Memperkokoh Stabilitas, Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Strengthening Stability Towards Quality Economic Growth



2014 | Laporan Tahunan
Annual Report

BANK INDONESIA

Memperkokoh Stabilitas, Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Strengthening Stability Towards Quality Economic Growth

Tahun 2014 merupakan tahun yang memiliki arti penting bagi Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam mendukung pengelolaan stabilitas ekonomi makro diuji dengan kondisi perekonomian yang penuh tantangan, baik yang bersumber dari faktor global maupun domestik. Di tahun 2014, Bank Indonesia juga mulai menjalankan peran barunya sebagai otoritas makroprudensial, pasca beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemulihan ekonomi global pada 2014 tidak secepat perkiraan awal. Masih lemahnya kondisi ekonomi global berdampak pada berlanjutnya tren penurunan harga komoditas non-migas dan harga minyak. Ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) juga berdampak pada pergeseran arus modal dunia dari negara *emerging market* ke negara maju.

Dari sisi domestik, perekonomian dihadapkan pada tantangan ekonomi global yang tidak secerah prakiraan. Selain itu, terdapat berbagai masalah struktural domestik sehingga meningkatkan risiko neraca pembayaran, fiskal, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan guna menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan stabilitas ekonomi makro. Selama 2014, Bank Indonesia secara konsisten menempuh kebijakan moneter yang bias ketat untuk membawa perekonomian kembali menuju keseimbangannya. Bank Indonesia juga melakukan sinergi berbagai kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial dalam satu kerangka bauran kebijakan.

Untuk menopang stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah difokuskan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal. Di samping itu, Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan.

Upaya untuk mengelola stabilitas perekonomian dilakukan bersamaan dengan penataan organisasi dan kapabilitas Bank Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ke depan, Bank Indonesia mencanangkan program transformasi menuju visi Bank Indonesia 2024 dengan mempersiapkan arsitektur dan strategi jangka menengah panjang.

Kondisi perekonomian Indonesia yang kokoh dan stabil selama 2014 patut disyukuri. Tantangan ke depan adalah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Meskipun kondisi perekonomian masih akan dihadapkan dengan berbagai tantangan, optimisme membaiknya kondisi perekonomian penting untuk selalu dijaga. Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya agar optimisme tersebut dapat terwujud.

2014 was a meaningful year for Bank Indonesia. Bank Indonesia's role in supporting the management of macro-economic stability was tested by challenging economic conditions, both from global and domestic factors. At the same time, Bank Indonesia started a new role as a macroprudential authority, a role that was granted to Bank Indonesia after handing over the function of banking regulation and supervision to the Financial Services Authority (OJK).

The progress of global economic recovery in 2014 was slower than projected. The protracted weak economic condition had an impact on the declining trend of non-oil and gas and oil commodity prices. Uncertainty regarding the Federal Reserve's plan to normalise its monetary policy stance also triggered a shift in global funds that flowed out of emerging market countries and into advanced countries.

From the domestic side, the economy confronted unforeseen global economic challenges and a number of domestic structural challenges that escalated balance of payments risk, fiscal risk, currency risk and inflation expectation risk.

Bank Indonesia continuously strengthened its policy mix in order to overcome the challenges associated with macroeconomic stability management. Throughout 2014, Bank Indonesia instituted consistent tight-bias monetary policy to restore economic balance, while seeking to synergise monetary and macroprudential policy within a policy mix framework.

In order to sustain the monetary stability and the financial stability, the policies of Payment System and Currency Management were focused toward ensuring implementation of a secure, efficient and reliable payment system.

Efforts to manage the stability of the economy performed in conjunction with the restructuring of the organization and capabilities of Bank Indonesia. To face the challenges ahead , Bank Indonesia launched a transformation program towards the vision of Bank Indonesia in 2024 by preparing architectural and medium to long-term strategy.

The strong and stable economic performance in 2014 should be grateful. The challenge ahead is to maintain economic stability and realize the quality economic growth. Although economic conditions will still encounter various challenges, optimism of better economic conditions is important to always be maintained. Bank Indonesia is committed to make efforts so that such optimism can be achieved

Daftar Isi
Contents

01 **HIGHLIGHT 2014**
HIGHLIGHTS OF 2014

02 **PENGANTAR GUBERNUR**
FOREWORD BY THE GOVERNOR

08 **SAMBUTAN KETUA BSBI**
REMARKS OF BSBI CHAIRMAN

13 **TENTANG BANK INDONESIA**
ABOUT BANK INDONESIA

14 Status, Tujuan, dan Tugas
Status, Objective, and Task

16 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis
Vision, Mission, and Strategic Values

20 Profil Dewan Gubernur Bank Indonesia
Profile of the Board of Governors of Bank Indonesia

28 Badan Supervisi Bank Indonesia
Supervisory Board of Bank Indonesia

30 Rangkaian Peristiwa 2014
Series of Events in 2014

37 **PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA 2014**
2014 BANK INDONESIA TASK IMPLEMENTATION

38 Perekonomian Global
Global Economy

42 Perekonomian Domestic
Domestic Economy

48 Menjaga Kestabilan Moneter
Maintaining Monetary Stability

62 Boks: Meredam Gejolak Nilai Tukar Rupiah
Box: Alleviating Exchange Rate Shocks

64 Memantapkan Stabilitas Sistem Keuangan
Strengthening Financial System Stability

74 Boks: Tugas Bank Indonesia sebagai Otoritas Makroprudensial
Box: Bank Indonesia Task as the Macroprudential Authority

76 Menjaga Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Maintaining Payment System and Rupiah Management

85 Boks: Membentuk Masyarakat Non Tunai
Box: Creating a Less Cash Society

88 Boks: Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di wilayah NKRI
Box: The Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia

91 Koordinasi dengan Pemerintah
Coordination with the Government

94 Mendorong Perluasan Akses Keuangan, serta Perkembangan Sektor Riil dan UMKM
Promoting Broader Financial Access as well as Real Sector and MSME Development

100 Boks: Membuka Akses Keuangan melalui LKD
Box: Expanding Financial Access through Digital Financial Services

102 Memperkokoh Kerja Sama Internasional
Strengthening International Cooperation

105 Boks: Memperkuat Benteng Pertahanan terhadap Krisis
Box: Strengthening the Second Line of Defence against a Crisis

106 *Outlook* Perekonomian Indonesia dan Strategi Ke Depan
Indonesia's Economic Outlook and Future Strategy

113 **TATA KELOLA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA**
BANK INDONESIA GOVERNANCE AND TRANSFORMATION

114 Dewan Gubernur
Board of Governors

115 Pengawasan terhadap Bank Indonesia
Supervision of Bank Indonesia

119 Hubungan dengan Pemerintah
Relationship with the Government

121 Rapat Dewan Gubernur
Board of Governors' Meeting

123 Komite
Committees

123 Manajemen Strategis
Strategic Management

125 Manajemen Risiko
Risk Management

130 Audit Internal
Internal Audit

131 Kode Etik, Pedoman Perilaku, dan Disiplin Bank Indonesia
Bank Indonesia Code of Ethics, Code of Conduct and Discipline

132 Menata Organisasi dan Mengelola Kinerja
Restructuring the Organisation and Human Resources to Improve Performance

136 Komunikasi dan Edukasi Publik
Public Communication and Education

138 Layanan Informasi Publik
Public Information Services

141 Bank Indonesia di Media Sosial
Bank Indonesia in Social Media

143 Transformasi Menuju Bank Indonesia 2024
Transformation towards Bank Indonesia 2024

149 **PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA**
BANK INDONESIA SOCIAL PROGRAM

150 Dedikasi untuk Negeri
Dedication for the Nation

150 Jenis dan Ruang Lingkup PSBI
PSBI Type and Scope

151 Kebijakan dan Metode PSBI
PSBI Policy and Method

152 Program PSBI
Bank Indonesia Social Program (PSBI)

153 Program Beasiswa Bank Indonesia
Bank Indonesia Scholarship Program

154 Jenis dan Program Studi Penerima Beasiswa
Types and Study Program Scholarship Recipients

155 Generasi Baru Indonesia (GENBI)
New Indonesian Generation (GENBI)

157 **ORGANISASI BANK INDONESIA**
ORGANISATION OF BANK INDONESIA

158 Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia
Brief History of Bank Indonesia

162 Struktur Organisasi
Organisational Structure

164 Nama Pemimpin Satuan Kerja
Name of Department Heads

168 Peta Wilayah Kerja Bank Indonesia
Working Area Map of Bank Indonesia

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BANK INDONESIA (LKTBI)
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF BANK INDONESIA

Highlight 2014

Highlights of 2014

8,36% (YOY)

INFLASI IHK 2014
CPI INFLATION 2014

lebih rendah dibanding 2013 (8,38%, yoy).
lower than the 8.38% (yoy) posted in 2013.

2014 16,25%

LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Industri mencapai 4.660,9 juta transaksi dengan nilai Rp152.025,5 triliun.

THE PAYMENT SYSTEMS operated by Bank Indonesia and the industry served 4,660.9 million transactions to the tune of Rp152,025.5 trillion

EKONOMI INDONESIA
THE INDONESIAN ECONOMY
tetap mampu tumbuh sebesar
achieved
5%
melanjutkan tren pertumbuhan satu dasawarsa terakhir yang di atas 5%.
maintaining the growth trend of the past decade in excess of 5%.

Peningkatan transaksi sistem pembayaran ritel sebesar
An increase in the retail payment system equivalent to
1,67 KALI PDB
TIMES OF GDP
MENUNJANG KELANCARAN TRANSAKSI
bolstered economic transactions

Di tengah depresiasi nilai Rupiah secara terbatas sesuai nilai fundamentalnya, VOLATILITAS RUPIAH TERKENDALI sebesar
Against a backdrop of limited Rupiah depreciation in line with its fundamental value, RUPIAH VOLATILITY WAS CONTROLLED at around
10,17%
selama **2014.**
throughout 2014.

2014 0,65

STABILITAS SISTEM KEUANGAN INDONESIA
FINANCIAL SYSTEM STABILITY

dari 1,1 pada 2013, jauh di bawah level krisis (2,00).
from 1.1 in 2013, which is well below the crisis level of 2.00.

2014 5,7%

UANG YANG BEREDAR
CURRENCY IN CIRCULATION

mencapai Rp528,5 triliun, meningkat dari akhir 2013 (Rp500T).
totalled Rp528.5 trillion, increasing at year end 2013 (Rp500 trillion).

Sasaran operasional kebijakan moneter tercapai.
The operational target of monetary policy was achieved.

Bauran kebijakan yang diterapkan secara konsisten didukung koordinasi dengan otoritas dan *stakeholders* terkait dinilai kredibel sehingga efektif mempengaruhi perilaku pasar.
Consistent implementation of policy mix supported by coordination with related authorities and stakeholders was deemed credible to influence market behavior effectively.

Kebijakan makroprudensial, peningkatan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat.
Macroprudential policy, broadening financial access to micro, small and medium enterprises (MSMEs) and the public.

Sistem Pembayaran andal didukung ketersediaan sistem pembayaran dan keberhasilan penyelesaian transaksi.
Reliable payment system was supported by adequacy payment system and the successful of transaction settlement.

Program perluasan penggunaan instrumen non-tunai di masyarakat didukung perlindungan konsumen.
Programs committed to expand the use of non-cash instruments amongst the public was supported by consumer protection.

Pengelolaan Uang Layak Edar ke seluruh wilayah NKRI.
Rupiah management to all regions of the Republic of Indonesia.

Pengantar Gubernur

Foreword by the Governor



Agus D.W. Martowardojo

Gubernur
Governor

Perjalanan selama tahun 2014 dapat kami ungkapkan sebagai suatu fase yang memberikan pelajaran sekaligus warna baru bagi pelaksanaan fungsi dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Di tengah perlambatan ekonomi domestik dan pemulihan ekonomi global yang lemah dan belum berimbang, pada awal tahun 2014, amanah pengaturan dan pengawasan bank secara resmi beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bersamaan dengan itu pula Bank Indonesia kemudian menempatkan fokusnya untuk memelihara stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, melengkapi bauran kebijakan moneter serta kebijakan penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

The past year of 2014 we convey as a journey of learning, while simultaneously implementing new elements of Bank Indonesia's function and tasks as the central bank of the Republic of Indonesia. Against a backdrop of domestic economic moderation as well as the protracted and uneven global recovery, the mandate for banking supervision and regulation was officially handed over from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) at the beginning of 2014. Bank Indonesia subsequently refocused on maintaining financial system stability through macroprudential policy, complemented with a monetary policy mix as well as payment system and Rupiah currency management policy.

Transisi peralihan pengawasan mikroprudensial kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berjalan baik, tidak kemudian melenakan dan mengganggu fokus Bank Indonesia dalam menjalankan amanah menjaga stabilitas nilai Rupiah. Episode baru segera menyambut. Episode yang semakin menantang dan menuntut kesiapan ekstra, baik dari segi kapabilitas individu, perangkat organisasi, maupun visi dan misi lembaga. Oleh karena itu, Bank Indonesia mencanangkan program transformasi organisasi di tahun 2014 lewat Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) guna mewujudkan visi baru menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.

The smooth handover of microprudential supervision to the Financial Services Authority (OJK) ensured Bank Indonesia's focus on maintaining Rupiah stability was unaffected. A new era was embraced; a more challenging era that demands additional preparations in terms of individual capability, the organisation as well as the mission and vision. Consequently, Bank Indonesia launched a transformation program in 2014 through the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) in order to realise the new vision of becoming a credible central bank and the best in the region.

AFSBI dirancang sebagai arah derap organisasi sampai dengan tahun 2024 yang bertumpu pada penguatan mandat utama yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Perumusan bauran kebijakan moneter yang kredibel dan konsisten; kebijakan makroprudensial yang kuat dan teruji; dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah yang kredibel dan proaktif adalah wujud penguatan mandat utama yang kemudian ditopang oleh kolaborasi eksternal serta penguatan kapabilitas internal organisasi. Dengan telah dimulainya implementasi ke-25 program strategis sebagai bagian dari AFSBI, segenap insan Bank Indonesia meneguhkan komitmennya dan menyatukan tekad untuk menjadikan lembaga ini semakin kredibel dan lebih baik.

AFSBI represents the organisational direction through to 2024 based on the primary mandate pursuant to prevailing laws through a credible and consistent monetary policy mix; robust and tested macroprudential policy; as well as credible and proactive payment system and Rupiah management policy supported by external collaboration and reinforcement of the organisation's internal capabilities. Commencing implementation of 25 strategic programs in 2014 demonstrated the avowed commitment of Bank Indonesia and unified determination to improve the credibility of the organisation.

Fokus kami untuk bertransformasi dengan memperkuat keunggulan inti organisasi adalah sebuah resultan, dari visi kami untuk menjadi yang terbaik dan sebagai respon terhadap tantangan perekonomian ke depan yang kami yakini akan semakin kompleks. Dengan pemulihan ekonomi global pasca krisis yang lemah dan tidak berimbang, pertumbuhan negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada tahun 2014 tidak dapat setinggi beberapa periode lalu. Perekonomian pun menghadapi konstelasi tantangan yang baru dan belum pernah dihadapi sebelumnya.

Our focus on transformation by strengthening the core of the organisation is the result of the vision to become the best and in response to future economic challenges that will undoubtedly become increasingly complex. The prolonged and uneven post-crisis global economic recovery led to weaker growth in developing countries, including Indonesia, in 2014. Further, the economy confronted a new constellation of challenges not previously faced.

Perlambatan harga komoditas secara berturut-turut akan memasuki tahun kelimanya. Hal ini selain memukul ekspor, juga menggambarkan masih lemahnya permintaan negara-negara

The commodity prices decline will enter the fifth consecutive year. Besides hurting exports, it also portrays the prevailing weak global demand including from China.

di global termasuk dari Tiongkok. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia yang merupakan konsumen utama berbagai jenis komoditas primer mulai dari energi, logam industri, sampai dengan bahan pangan, perlambatan struktural perekonomian Tiongkok di tahun 2014 sangat mempengaruhi kinerja ekspor negara-negara eksportir komoditas, termasuk Indonesia.

As the second largest economy in the world that is a major consumer of various types of primary commodities ranging from energy, industrial metals, to foodstuffs, the structural slowing down of the Chinese economy in 2014 greatly affected the export performance of commodity exporting countries, including Indonesia.

Bersamaan dengan masih lemahnya ekspor, kebutuhan impor untuk menggerakkan roda perekonomian domestik juga cukup tinggi. Gencarnya rencana proyek investasi seperti infrastruktur dan industri tentunya masih membutuhkan barang modal dan bahan baku yang sebagian berasal dari impor. Pada gilirannya, defisit neraca transaksi berjalan masih terjadi, dan telah berlangsung selama 14 triwulan. Namun, langkah stabilisasi yang ditempuh selama tahun 2014 telah dapat memperbaiki kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dan menurunkan defisit neraca transaksi berjalan menuju tingkat yang lebih sehat. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara konsisten terus menyampaikan pentingnya komitmen reformasi struktural bagi perbaikan struktur dan kapasitas perekonomian di masa yang akan datang.

Concurrently with weak exports, the needs for import to mobilize the domestic economy are also quite high. Incessant investment projects plan such as infrastructure and industry would still require capital goods and raw materials derived partly from imports. In turn, the current account deficit is still occurring, and has been going on for 14 quarters. However, stabilization measures that were taken during 2014 had been able to improve Indonesia's Balance of Payments (BOP) the performance and lower current account deficit towards a healthier level. Therefore, Bank Indonesia consistently conveys the importance of commitment to structural reforms for the improvement of the economy structure and capacity in the future.

Pemulihan ekonomi yang belum berimbang dan diliputi ketidakpastian, khususnya di negara-negara maju mendorong timbulnya divergensi arah kebijakan moneter global. Solidnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan adanya rencana normalisasi kebijakan moneter AS kemudian diikuti dengan paket-paket kebijakan moneter ultra akomodatif di Jepang dan Eropa. Hal tersebut semakin meningkatkan ketidakpastian yang kemudian menciptakan gejolak dan volatilitas di pasar keuangan negara berkembang. Risiko pengetatan likuiditas yang dapat diikuti dengan tekanan modal keluar dan depresiasi nilai tukar menjadi salah satu fokus perhatian pengelolaan stabilitas makro negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Selain itu, penguatan Dolar AS dalam skala global akibat solidnya pemulihan ekonomi AS juga menambah tekanan kepada seluruh mata uang dunia termasuk Rupiah.

The uneven global recovery was further overshadowed by widespread uncertainty, particularly in advanced countries, triggering global monetary policy divergence. Furthermore, the Federal Reserve's plan to normalise its monetary policy stance was accompanied by ultra-accommodative monetary policy in Japan and Europe, which intensified the uncertainty and sparked shocks and volatility on financial markets in developing countries. The risks of tighter liquidity, capital outflow pressures and exchange rate depreciation were the main focus of macro stability management amongst developing countries, including Indonesia. In addition, broad US Dollar appreciation due to solid US indicators exacerbated pressures on all currencies, including the Rupiah.

Oleh karena itu, di sepanjang tahun 2014 Bank Indonesia secara konsisten menempuh kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*) guna mengendalikan laju inflasi dan mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Kebijakan tersebut didukung dengan memperkuat kegiatan *surveillance* dan menerapkan ketentuan pengawasan makroprudensial untuk menjamin kualitas pengelolaan risiko dan terpeliharanya stabilitas pada sistem keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga secara intensif melakukan upaya stabilisasi nilai tukar melalui kebijakan *dual intervention*. Kebijakan tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan secara konsisten menjaga volatilitas nilai tukar agar tetap terkendali melalui intervensi di pasar valas. Di sisi lain, kecukupan likuiditas sistem perbankan selalu dijaga melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Bank Indonesia consistently instituted tight-bias monetary policy throughout 2014 in order to control inflation and manage the current account deficit to a healthier level. The policy was bolstered through strong surveillance activity and macroprudential regulations to guarantee the quality of risk management and maintain financial system stability. Bank Indonesia also intensively undertook measures to stabilise the exchange rate through consistent dual intervention policy to mitigate exchange rate volatility. On the other hand, adequate banking system liquidity was maintained through intervention on the tradeable government securities (SBN) market.

Dalam menjalankan mandatnya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional. Salah satu upaya penting yang kami canangkan secara intensif di tahun 2014 adalah melalui program pendalaman pasar keuangan. Selain ditujukan untuk memperkuat resiliensi sistem keuangan terhadap berbagai *shock eksternal*, upaya pendalaman pasar keuangan juga akan dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan secara keseluruhan berkontribusi meningkatkan kapasitas perekonomian. Vitalnya peran struktur pasar keuangan yang dalam merupakan bekal penting bagi Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan terciptanya pasar keuangan yang dalam maka diharapkan dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam mengelola dana.

Pursuant to its mandate as the monetary authority, Bank Indonesia consistently strives to enhance national financial system resilience, of which a crucial element in 2014 was financial market deepening. In addition to boosting financial system resilience to external shocks, financial market deepening also enhanced the efficacy of monetary policy transmission and expanded economic capacity. Deep financial markets are vital for the Indonesian economy to achieve sustainable economic growth. Furthermore, deep financial markets would also provide convenience and flexibility for market players to manage their funds.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk dapat memperkokoh stabilitas makroekonomi tentunya tidak akan efektif tanpa disertai dengan sinergi kebijakan moneter-fiskal yang selaras. Pada tahun 2014 Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan pengelolaan fiskal yang *prudent* untuk dapat memelihara momentum pertumbuhan dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Yang menjadikan tahun 2014 sebagai tahun yang dapat kami katakan transformatif bagi ekonomi nasional adalah berjalannya proses demokrasi mengawal transisi Pemerintahan baru dengan baik. Lebih lanjut, Pemerintah juga menerapkan kebijakan penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil diikuti dengan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

Various efforts undertaken by Bank Indonesia to strengthen macroeconomics stability would not be effective without synergy of monetary and fiscal policy. In 2014, the government instituted prudent fiscal policy management to maintain growth momentum by managing the budget deficit. What made 2014 a transformative year for the national economy was a smooth democratic process of transition to escort the new government well. Furthermore, the new government also implemented successful energy reforms, while maintaining macroeconomic stability.

Selain dari penyesuaian subsidi BBM, beberapa penyesuaian harga barang *administered* lainnya juga terjadi sepanjang 2014, seperti tarif tenaga listrik (TTL) dan *liquid petroleum gas* (LPG) 12 kg. Lebih lanjut, gejolak harga pangan domestik juga memberikan tekanan pada inflasi khususnya pada akhir 2014. Berkat konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan sinergi dengan Pemerintah dalam merespons berbagai risiko yang dapat mendorong naiknya inflasi, inflasi 2014 dapat tetap terjaga pada *single digit*. Koordinasi yang erat dalam mengendalikan inflasi juga terus diperkuat dalam wadah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang memberikan rekomendasi antara lain terkait kebijakan stabilisasi harga, penguatan kerjasama antar daerah, dan pengkinian data dan informasi pangan strategis.

Aside from the fuel subsidy adjustment, several adjustments of other administered good prices also occurred throughout 2014, such as electricity tariff (TTL) and liquid petroleum gas (LPG) 12 kg. Furthermore, the volatility of domestic food prices also put pressure on inflation, especially at the end of 2014. Due to the consistency of Bank Indonesia monetary policy and the synergy with the Government in responding to a variety of risks that could push inflation to rise, the inflation in 2014 were able to be maintained at a single digit. Close coordination in controlling inflation was also strengthened within the Inflation Monitoring and Control Team (TPI) and the Regional Inflation Monitoring and Control Team (TPID), which provided the recommendations that among others were related to price stabilization policy, the strengthening of inter-regional cooperation, and updating data and information of strategic food.

Terjaganya inflasi sepanjang 2014 yang diikuti dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di pusat maupun daerah selain menggambarkan kualitas pengelolaan makroekonomi, juga menumbuhkan ekspektasi positif terhadap stabilitas perekonomian serta

Subdued inflation during 2014 followed by a close synergistic effort between Bank Indonesia and the government both at central and regional levels, besides depicting the quality of macroeconomic management, also foster positive expectations on the economic stability

prospek ekonomi Indonesia ke depan. Positifnya prospek perekonomian nasional sebagai salah satu dari negara berkembang utama dunia tercermin dari kepercayaan investor yang terus tumbuh. Aliran dana portofolio asing yang masuk dan turut serta membiayai ekonomi nasional sepanjang tahun 2014 mencatatkan rekor tertingginya.

and the Indonesian economic outlook. The positive national economic prospect as one of the world's major emerging countries was reflected in the growing investor confidence. The inflow of foreign portfolio funds that participated in financing the national economy during 2014 was at its highest record.

Kepercayaan dunia internasional terhadap pengelolaan makroekonomi Indonesia menjadi bekal semangat kami untuk terus memperkokoh kerjasama di tataran internasional. Berbagai kerjasama dalam forum multilateral, regional, dan bilateral menjadi wadah Bank Indonesia untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya dalam memelihara stabilitas perekonomian domestik, namun juga untuk memperkuat daya tahan kawasan dan mengupayakan integrasi keuangan.

International confidence in Indonesia's macroeconomic management provided solid impetus for Bank Indonesia to continue strengthening cooperation at the international level. Various multilateral, regional and bilateral forums provided Bank Indonesia a means to actively participate not only in terms of maintaining domestic economic stability but also strengthening regional resilience and promoting financial integration.

Di akhir tahun 2014, Bank Indonesia berhasil menyelesaikan kesepakatan Kerangka Kerja Integrasi Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ ABIF). Dengan sistem keuangan yang semakin terintegrasi ke depan, diharapkan industri perbankan nasional akan mendapatkan akses pasar dan fleksibilitas operasional yang lebih luas di ASEAN. Selain itu, penguatan kerjasama antar bank sentral dalam bentuk *regional financial arrangement*, *bilateral swap arrangement*, dan *bilateral currency swap agreement* juga terus diupayakan. Kesemua upaya tersebut adalah sumbangsih Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dunia, untuk merespon secara kolektif berbagai permasalahan perekonomian global yang semakin kompleks dan menantang.

At year end of 2014, Bank Indonesia successfully achieved a reciprocity agreement within the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). The increasingly integrated nature of the financial system is expected to broaden market access for our national banking industry within ASEAN while providing greater operational flexibility in the region. In addition, cooperation between central banks through regional financial arrangements, bilateral swap arrangements and bilateral currency swap agreements is continuously sought and strengthened. That is what Indonesia brings to the table in terms of its contribution to the global financial system in order to collectively respond to increasingly complex and onerous global economic challenges.

Kami sepenuhnya menyadari walaupun stabilitas makro dapat tetap terjaga di sepanjang tahun 2014, namun geliat perekonomian yang semakin dinamis mengandung berbagai risiko yang menuntut kewaspadaan dari semua pihak. Ditengah kondisi likuiditas global yang cenderung longgar pasca krisis, peningkatan utang luar negeri (ULN) swasta tanpa disertai perlindungan yang memadai dari risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko beban utang berlebih menjadi salah satu fokus perhatian kami. Bank Indonesia berupaya memitigasi risiko tersebut dengan menerbitkan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan ULN korporasi non-bank. Dengan menjaga rasio lindung nilai tertentu pada pinjaman luar negerinya, diharapkan pelaku usaha dapat tetap mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian di tengah berbagai ketidakpastian ke depan.

We are fully cognisant that although macro stability was maintained throughout 2014, the increasingly dynamic economy contained various risks that demanded vigilance from all parties. Amidst loose post-crisis liquidity conditions, spiralling private external debt without adequate protection from currency risk, liquidity risk and overleverage risk became a focus of our attention. Bank Indonesia strived to mitigate the risks through the promulgation of regulations concerning prudential principles to manage nonbank corporate external debt. By maintaining a predetermined hedging ratio on external debt, entrepreneurs can now continue to prioritise vigilance and prudence amidst future uncertainties.

Globalisasi yang sarat dengan perubahan pada gilirannya juga menuntut negara dengan sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia untuk dapat semakin adaptif. Menyikapi pesatnya perkembangan teknologi sistem pembayaran dan guna mewujudkan efisiensi perekonomian nasional, Bank Indonesia pada pertengahan tahun 2014 mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Globalisation replete with change ultimately demanded countries with an open economy, such as Indonesia, to adapt. Addressing rapid advances in payment system technology and to boost national economic efficiency, Bank Indonesia launched the National Noncash Movement (GNNT) in the middle of 2014. With enthusiasm to realise a less cash society (LCS), we are aware that all societal strata

Dengan semangat untuk membentuk masyarakat non-tunai, kami meyakini bahwa manfaat kemudahan, keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam transaksi akan dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat yang semakin luas.

would enjoy the benefits of transaction simplicity, security, efficiency and accountability.

Selain itu kami juga meyakini bahwa untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menyejahterakan, akses terhadap layanan keuangan yang inklusif menjadi prasyarat yang tidak terpisahkan. Bersinergi dengan Pemerintah dan industri perbankan, Bank Indonesia selama tahun 2014 telah melaksanakan program Layanan Keuangan Digital (LKD) guna terus memperluas akses keuangan kepada masyarakat *unbanked*. Tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, LKD juga berhasil memfasilitasi penyaluran bantuan sosial Pemerintah kepada masyarakat lewat jalur non-tunai. Hal ini tentunya menjamin efektivitas bantuan yang diberikan, serta akan menumbuhkembangkan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik di masyarakat.

We are also mindful that access to inclusive financial services is a prerequisite to quality economic growth that ameliorates welfare. Consequently, in synergy with the Government and banking industry, Bank Indonesia implemented the Digital Financial Services (DFS) program during 2014 in order to broaden access to financial services amongst the unbanked. Not only does the program extend public access to financial services, DFS also facilitates the disbursement of government social assistance through noncash channels, thereby boosting the effectiveness of the assistance disbursed and advancing financial management amongst the public.

Secuplik hasil kerja, tantangan, dan capaian selama tahun 2014 ini kami harap dapat menjadi pengantar yang mewakili komitmen Bank Indonesia untuk terus berkontribusi dalam memperkokoh stabilitas, menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sejumlah langkah penting telah diambil, dan kami mencatat bahwa tahun 2014 telah melanjutkan episode perjalanan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas moneter, otoritas makroprudensial dan otoritas sistem pembayaran di Indonesia. Dedikasi yang diberikan oleh segenap insan Bank Indonesia adalah nilai luhur yang menjadikan Bank Indonesia dapat terus menjalankan amanah Undang-Undang tersebut dengan sebaik-baiknya.

This brief introduction to the work, challenges and achievements of 2014 demonstrates our commitment to quality economic growth and stability. A number of key measures were instituted and we can remark that 2014 was merely the next episode of Bank Indonesia's journey as the monetary, macroprudential and payment system authority in Indonesia. The dedication shown by all those involved with Bank Indonesia manifested in honourable values that enable Bank Indonesia to fulfil its mandate.

Atas nama Dewan Gubernur, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pegawai yang telah menjalankan tugas dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai strategis lembaga. Akhirnya, kami menyampaikan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2014 ini dengan semangat untuk terus bekerja mencapai visi menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.

On behalf of the Board of Governors, I would like to express our upmost appreciation to all employees who uphold Bank Indonesia's strategic values. In closing, allow me to present the 2014 Bank Indonesia Annual Report and assure that we will continue to strive towards our vision of becoming a credible central bank and the best in the region.



Agus D.W. Martowardojo
Gubernur
Governor

Sambutan Ketua BSBI

Remarks of BSBI Chairman



Umar Juoro

Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Chairman of the Supervisory Board of Bank Indonesia

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia yang masih berjalan tidak seimbang menyebabkan penurunan kinerja ekspor Indonesia, sehingga berdampak negatif terhadap neraca berjalan. Selain itu, ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter oleh Federal Reserve menyebabkan pasar keuangan Indonesia terkena imbasnya dan nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan. Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 tercatat sebesar 5,0% (yoy) lebih lambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,6% (yoy). Kondisi ini juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural antara lain di bidang ketahanan pangan, energi, dan penyediaan infrastruktur.

2014 was a year full of challenges for the Indonesian economy. The unbalanced world economic recovery caused a decline in Indonesia's export performance, thus adversely impacted the current account. In addition, the uncertainty of monetary policy normalization by the Federal Reserve affected the Indonesian financial markets and weakened the Rupiah exchange rate. From the domestic perspective, Indonesia's economic growth in 2014 was recorded at 5.0% (yoy) slower than the previous year at 5.6 % (yoy). This condition is also confronted with structural problems, among others are in the field of food sustainability, energy, and infrastructure provision.

Berbagai tantangan tersebut menyebabkan pengelolaan stabilitas ekonomi di 2014 menjadi tidak mudah. Diperlukan kebijakan yang efektif dan kerjasama yang baik antar otoritas, untuk menjaga agar kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap stabil. Meski demikian, patut disyukuri bahwa perekonomian Indonesia masih berada pada jalurnya. Meski melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh secara moderat, bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan negara ASEAN 5 sebesar 4,7%. Kinerja pasar keuangan dan institusi keuangan secara umum juga masih mencatatkan kinerja positif, dengan kepercayaan investor yang terjaga.

These challenges caused difficulty in maintaining economic stability in 2014. In order to keep the macroeconomic conditions and Indonesia's financial system remain stable, effective policies and good cooperation among authorities is required. It is fortunate that the Indonesian economy is still on track. Although slowing down, the Indonesian economy was still growing moderately, even higher than the average growth of five ASEAN countries by 4.7%. The performance of financial markets and financial institutions in general still recorded a positive performance, with maintained investor confidence.

Kondisi makro ekonomi dan sistem keuangan yang positif selama 2014 merupakan hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia. Melalui kewenangan yang dimiliki, Bank Indonesia berkontribusi dalam menjaga ketahanan ekonomi. Selama 2014, Bank Indonesia juga melakukan berbagai terobosan antara lain dengan mendorong transaksi lindung nilai (*hedging*) bagi BUMN dan korporasi, penggunaan transaksi non-tunai yang lebih luas, dan mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bank Indonesia juga memantapkan perannya sebagai otoritas makroprudensial pasca-pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan di akhir 2013.

Positive macroeconomic conditions and financial system during 2014 were the result of policies implemented by various parties, including Bank Indonesia. Through its authority, Bank Indonesia contributed in maintaining the economic resilience. During 2014, Bank Indonesia also initiated several breakthroughs, among others are encouraging hedging transactions by state-owned enterprises and corporations, urging extensive use of non-cash transactions, and enforcing the use of Rupiah currency in every transaction in the territory of the Republic of Indonesia. Bank Indonesia also strengthened its role as macro-prudential authority after the transfer of regulation and banking supervision to the Financial Services Authority at the end of 2013.

Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Termasuk upaya untuk bersinergi dengan otoritas fiskal serta pemangku kepentingan lainnya. Kami meyakini koordinasi dan sinergi antar lembaga akan membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara lebih efektif.

We appreciate the efforts undertaken by Bank Indonesia in carrying out its duties and authorities. Including the efforts to form a synergy with fiscal authorities as well as other stakeholders. We believe that inter-agency coordination and synergy will help solve various problems in a more effective manner.

Selama 2014, BSBI terus bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di Bank Indonesia. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, setiap triwulan BSBI melakukan telaahan di bidang-bidang tertentu dan memberikan rekomendasi penyempurnaan bagi Bank Indonesia. Atas inisiatif kedua pihak, Bank Indonesia bersama BSBI juga membahas berbagai aspek tata kelola Bank Indonesia. Kami menghargai Bank Indonesia dan khususnya Dewan Gubernur yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang disampaikan oleh BSBI.

During 2014, BSBI continued to cooperate with Bank Indonesia to promote the establishment of good governance in Bank Indonesia. As mandated by the Law on Bank Indonesia, BSBI undertakes quarterly review on specific areas and recommend improvements for Bank Indonesia. At the initiative of the two parties, BSBI and Bank Indonesia also discussed various aspects of Bank Indonesia governance. We appreciate Bank Indonesia and in particular the Board of Governors who have given their attentions to various issues presented by BSBI.

Selaras dengan hal tersebut, kami menyambut baik inisiatif pencanangan program transformasi Bank Indonesia (Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia) dalam upaya meningkatan kapabilitas Bank Indonesia. Program ini menjadi salah satu fokus perhatian BSBI, agar terlaksana dalam koridor tata kelola yang baik. Kami meyakini bahwa program transformasi Bank Indonesia akan memperkuat kelembagaan dan kebijakan Bank Indonesia, serta mampu menjawab tantangan ke depan.

BSBI welcomes the launching of Bank Indonesia transformation program initiative (Bank Indonesia Architecture Strategic Function) in an effort to improve Bank Indonesia capabilities . This program became one of the focused attention of BSBI, so that it would be implemented within the corridors of good governance. We believe that Bank Indonesia transformation program will strengthen the institutions and policies of Bank Indonesia, as well as the ability to cope with the challenges ahead.

Kondisi perekonomian ke depan masih dihadapkan sejumlah tantangan. Isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan berlanjutnya penurunan komoditas dunia masih menjadi tantangan eksternal di 2015. Dari dalam negeri, defisit transaksi berjalan, alokasi anggaran Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, dan konsistensi reformasi struktural perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN juga telah di depan mata. Diperlukan kerja yang lebih keras dan komitmen yang lebih kuat dari regulator termasuk Bank Indonesia untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik dan sekaligus menjaga optimisme masyarakat.

The future economic condition is still faced by a number of challenges. The issues on the rise of US interest rates and the continuing decline in world commodity remains to pose as external challenges in 2015. From the domestic side, the current account deficit, the disbursement of government budget to encourage growth, and the consistency of structural reforms needs to be addressed. In addition, the implementation of the ASEAN Economic Community has also been in sight. Regulators, including Bank Indonesia, are urged to work harder with stronger commitment, in order to achieve better economic conditions and at the same time maintain public optimism.

Akhirnya, atas nama BSBI kami menyampaikan apresiasi kepada Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia atas pencapaian kinerjanya sepanjang tahun 2014. Semoga kerjasama yang baik dapat dilanjutkan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.

Finally, on behalf of BSBI we expressed our appreciation to the Board of Governors and all employees of Bank Indonesia on the performance achievement throughout 2014. We hope that the well-established cooperation can be continued and even more enhanced for the years to come.



Umar Juoro
Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Chairman of the Supervisory Board of Bank Indonesia



Kokohnya gedung ditentukan oleh pondasi yang kuat dan solid. Demikian pula dengan Bank Indonesia, yang dari generasi ke generasi senantiasa ditopang komitmen dan dedikasi untuk mendukung kemajuan ekonomi bangsa.

A sturdy building determined by its solid and strong foundation. Similarly with Bank Indonesia which from generation to generation always have a commitment and dedication to support the advancement of the nation's economy.



TENTANG BANK INDONESIA

ABOUT BANK INDONESIA

Keberadaan bank sentral merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

The presence of a Central Bank was mandated by the 1945 Constitution. Thereafter, the structure, status, authority, responsibility and independence of the central bank was further regulated pursuant to the Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia, which was subsequently amended several times, most recently by Act No. 6 of 2009.

Status, Tujuan, dan Tugas

Status, Objectives and Tasks



Status
Status

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia, representing a legal entity with the authority to promulgate legislation. As a public legal entity, Bank Indonesia is authorised to issue legally binding subordinate regulations in accordance with its duties and jurisdiction. As a civil legal entity, Bank Indonesia is entitled to act for and on behalf of itself in and outside a court of law.

Tujuan
Objectives

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Bank Indonesia has the single objective of achieving and maintaining Rupiah currency stability. Rupiah currency stability is measured in terms of two aspects, namely stability against goods and services as reflected in inflation as well as stability against other currencies. To that end, Bank Indonesia institutes sustainable, consistent and transparent monetary policy that pays due consideration to the economic policies of the Government.



Tugas *Tasks*

Pascaberalihnya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK, Bank Indonesia mendapatkan mandat tambahan berupa tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat di bidang makroprudensial ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia, selain tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran, sebagai tambahan tugas yang diamanatkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia masih dapat memeriksa individual bank secara langsung untuk bank yang masuk kategori *systemically important bank* atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia, berkoordinasi dengan OJK.

After transferring the function of banking supervision and regulation to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia received an additional mandate in the form of macroprudential policy, regulation and supervision pursuant to the OJK Act enforced on 1st January 2014. The mandate supports the realisation of financial system stability in Indonesia, in addition to the existing monetary and payment system tasks contained in the Bank Indonesia Act.

In accordance with the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is authorised to implement the following tasks: (i) formulate and execute monetary policy; (ii) regulate and maintain a smooth payment system; (iii) regulate and supervise banks. Bank Indonesia is still authorised to inspect individual systemically important banks directly as well as other banks pursuant to the mandate of Bank Indonesia in conjunction with the Financial Services Authority (OJK).

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis

Vision, Mission, and Strategic Values

Upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia dipandu dengan arah strategis yang ditetapkan Bank Indonesia berupa visi, misi, dan nilai strategis. Arah strategis ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai dan pimpinan Bank Indonesia untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Efforts to achieve the objectives of Bank Indonesia in accordance with the Bank Indonesia Act are guided by the strategic direction in the form of a vision, mission and strategic values. The strategic direction forms the basis and guidelines for all Bank Indonesia employees and officials to work professionally, transparently, accountably and with integrity.

Visi *Vision*

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

To be a credible institution and the best central bank in the region by strengthening the strategic values held as well as through the achievement of low inflation together with a stable exchange rate.

Misi *Mission*

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

1. *To achieve Rupiah stability and maintain the efficiency of monetary policy transmission in order to drive quality economic growth.*
2. *To nurture an effective and efficient national financial system that can withstand internal and external shocks in order to support the allocation of funding/financing that contributes to national economic growth and stability.*
3. *To create a secure, efficient and smooth payment system that contributes to the economy, monetary stability, and financial system stability with regard to broad financial access and the national interest.*
4. *To build and maintain the organisation and human resources of Bank Indonesia, who are performance based and uphold the strategic values, as well as to enforce good corporate governance in order to implement tasks as mandated by prevailing laws.*

Nilai-Nilai Strategis *Strategic Values*

1. Trust and Integrity
   Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, keandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika.

   Trust and Integrity
   Creating mutual respect and trust internally and externally through openness, reliability and consistency in terms of thoughts, words and actions based on moral and ethical values.

2. Professionalism
   Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional, dan obyektif.

   Professionalism
   Working diligently and responsibly to the best of one's ability in an independent, anticipative, rational and objective way.

3. Excellence
   Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan.

   Excellence
   Always doing one's best by prioritising the creation of value added to achieve sustainable excellence in the pursuit of perfection.

4. Public Interest
   Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab.

   Public Interest
   Prioritising and protecting the national interest over personal gain when executing the mandate with dedication, fairness and accountability.

5. Coordination dan Teamwork
   Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi.

   Coordination dan Teamwork
   Creating sustainable internal and external synergy through collaboration and communication that generates commitment to provide value added based on mutual trust and appreciation as well as a spirit of independence.

Dewan Gubernur Bank Indonesia

The Board of Governors of Bank Indonesia



Hendar

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Ronald Waas

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Mirza Adityaswara

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor



Agus D.W. Martowardojo

Gubernur
Governor

Halim Alamsyah

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Perry Warjiyo

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Profil Dewan Gubernur Bank Indonesia

Profile of the Board of Governors of Bank Indonesia

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 2014 terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur. Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara terpilih untuk kedua kalinya pada posisi yang sama untuk periode 2014-2019.

In 2014, the Board of Governors consisted of the Governor, Senior Deputy Governor and four Deputy Governors. Senior Deputy Governor Mirza Adityaswara was installed for a second term in the same position for the period of 2014-2019.



Agus D.W. Martowardojo

Gubernur
Governor

Agus D.W. Martowardojo lahir di Belanda pada 1956. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia. Agus D.W. Martowardojo juga memperluas wawasan dengan mengikuti berbagai program di State University of New York, Harvard Business School, Standford University, dan Wharton Executive Education.

Perjalanan karir Agus D.W. Martowardojo diawali di dunia perbankan, yakni di Bank of America, kemudian di Bank Niaga pada 1986. Sejak 1995, Agus D.W. Martowardojo diminta untuk menjadi Direktur Utama PT Bank Bumiputera dan pada 1998 sebagai Direktur Utama PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Selama kurun waktu 1999-2002, bertugas sebagai Managing Director Bank Mandiri. Pada Oktober 2002, setelah menjabat sebagai Penasehat untuk Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbakan Nasional), ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Permata Tbk dan sejak Mei 2005 hingga Mei 2010, memimpin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Direktur Utama.

Sebelum diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 20 Mei 2010. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.45/P Tahun 2013, tanggal 13 April 2013, diambil sumpahnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2013. Masa jabatan Agus D.W. Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2013–2018.

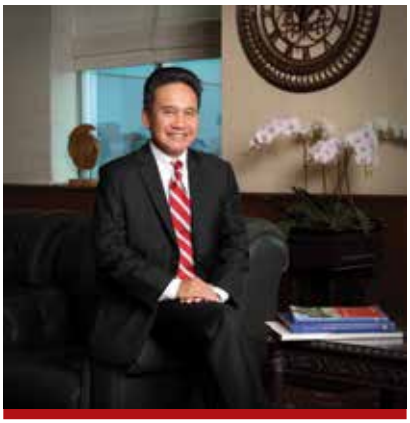
Penghargaan yang telah diraih Agus D.W. Martowardojo antara lain Indonesia's Best Executive in 2009 dari Asiamoney, The Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010 dari The Asian Banker, dan terpilih sebagai Finance Minister of the Year 2012 untuk level dunia dan Asia-Pasifik versi The Banker pada Februari 2012. Pada Agustus 2014, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Agus D.W. Martowardojo Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana atas pengabdian dan kontribusinya bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Agus D.W. Martowardojo was born in the Netherlands in 1956. He is a graduate of economics at the University of Indonesia and deepened his knowledge further through various programs at the State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, and Wharton Executive Education.

Agus D.W. Martowardojo's career began in the banking industry at the Bank of America and then Bank Niaga in 1986. In 1995, he was appointed President Director of Bank Bumiputera and in 1998 as the President Director of Bank Ekspor Impor Indonesia. From 1999-2002, he served as the Managing Director of Bank Mandiri. In October 2002, after working as an advisor to the Chairman of IBRA (The Indonesian Bank Restructuring Agency), he was installed as the President Director of Bank Permata. From May 2005 until May 2010 Agus D.W. Martowardojo led Bank Mandiri as its President Director.

Prior to his selection as the Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo was the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as of 20th May 2010. Subsequently, pursuant to Presidential Decree No. 45/P, 2013, Agus D.W. Martowardojo was sworn in as the Governor of Bank Indonesia on 24th May 2013. Agus D.W. Martowardojo's tenure as Governor of Bank Indonesia will run for the period from 2013–2018.

Agus D.W. Martowardojo won, among others, Indonesia's Best Executive in 2009 from Asiamoney, The Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010 from The Asian Banker, and was chosen as Finance Minister of the Year 2012 on a global and Asia-Pacific level for The Banker in February 2012. In August 2014, Agus D.W. Martowardojo received an honour of the Star of Mahaputera Adipradana by the President of the Republic of Indonesia for his devotion and contribution to the progress, welfare, and prosperity of the nation.



Mirza Adityaswara

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak tahun 2002 hingga Oktober 2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas, kemudian pada November di tahun yang sama diminta menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008 – 2010, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, Mirza Adityaswara diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk masa jabatan 2013 - 2014.

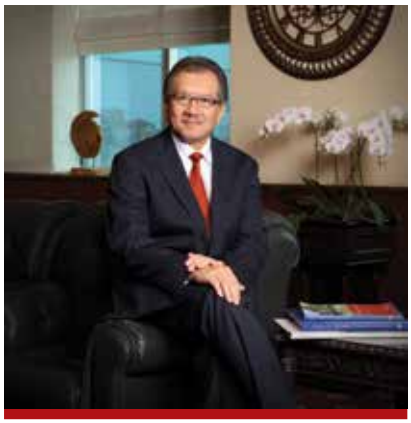
Jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019.

Mirza Adityaswara, born in Surabaya in 1965, graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received his Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002 until October 2005, however, he was installed as Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities and then in November 2005 he was appointed as Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. From 2008–2010, Mirza served as Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Securities and simultaneously as the Chief Economist for Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza served on the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and since April 2012 he has also functioned as the Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation and the Board of Commissioners. In accordance with Presidential Decree No. 113/P of 2013, dated 30th September 2013, Mirza was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013, incumbent for the period from 2013–2014.

Under Presidential Decree Number 62/P of 2014, Mirza Adityaswara is appointed the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2014-2019.



Halim Alamsyah

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Halim Alamsyah lahir di Bangka pada 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Halim Alamsyah meraih gelar Master of Arts dalam bidang Development Economics, Boston University, Massachussets, USA dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi, dari Universitas Indonesia, Jakarta.

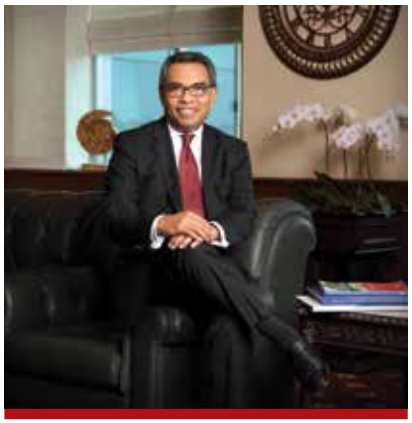
Halim Alamsyah memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1982 sebagai staf analis kredit, di Urusan Kredit Koperasi. Tahun 1985, mulai berkiprah sebagai staf peneliti di Urusan Ekonomi dan Statistik. Tahun 1999 diangkat sebagai Deputi Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Selang satu setengah tahun kemudian, tepatnya Juli 2000, Halim Alamsyah diangkat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia. Pada Juli 2002 dipromosikan sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Sejak Januari 2003, Halim Alamsyah berturut-turut menempati pos sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat pada April 2005, dan Direktur Direktorat Statistik dan Moneter pada Februari 2006, sebelum akhirnya ditempatkan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada Maret 2007.

Halim Alamsyah diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Juni 2010 untuk masa jabatan 2010-2015.

Halim Alamsyah was born in Bangka in 1957. Halim Alamsyah graduated with a Bachelor of Economics at the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, and a degree in Law at the University of Gadjah Mada University, Yogyakarta, a Master of Arts in Development Economics, Boston University, Massachusetts, USA and obtained his doctorate in Economics from the University of Indonesia, Jakarta.

Halim Alamsyah started his career at Bank Indonesia in 1982 as a staff of credit analysts, the Cooperative Credit Affairs. In 1985, Halim Alamsyah began acting as a staff researcher at the Economic Affairs and Statistics. Year 1999 was appointed as Deputy Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy. Lapse of one and a half years later, in July 2000, Halim Alamsyah was appointed as a Director in Office of the Governor of Bank Indonesia. In July 2002 he was promoted as Director of the Centre of Education and Central Bank Studies. Since January 2003, Halim Alamsyah was successively occupied the post as Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy, Director of the Directorate of Strategic Planning and Public Relations in April 2005, and Director of the Monetary and Statistics Directorate in February 2006, before finally issued as a Director of Banking Research and Regulation in March 2007.

Halim Alamsyah was appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia by Presidential Decree No.63/P Year 2010 dated 1st June 2010 and sworn on 17th June 2010 for the period from 2010-2015.



Ronald Waas

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Ronald Waas, lahir di Tanjung Pinang pada 1955. Ronald Waas meraih gelar sarjananya di Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung di tahun 1980, dan meraih gelar Master of International Affairs (MIA) di Columbia University pada tahun 1996.

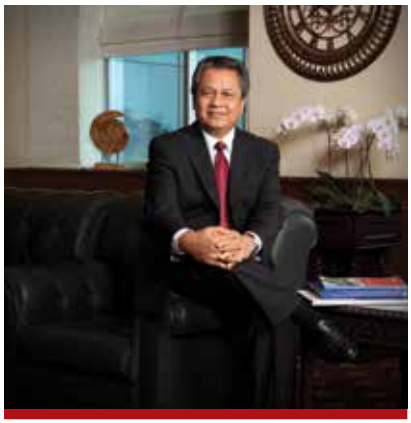
Ronald Waas mulai bekerja di Bank Indonesia pada tahun 1981 dan selama berkarir di Bank Indonesia pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Teknologi Informasi selama tiga tahun (2004 s.d. 2007), kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai Direktur Unit Khusus Manajemen Informasi pada tahun 2007 s.d. 2009 dan terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Ronald Waas diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan diambil sumpahnya pada tanggal 29 Desember 2011 untuk masa jabatan 2011-2016.

Ronald Waas was born in Tanjung Pinang in 1955. Ronald earned his degree in Civil Engineering of from Bandung Institute of Technology in 1980, and holds a Master of International Affairs (MIA) at Columbia University in 1996.

Ronald Waas began working at Bank Indonesia in 1981 and during his career, he had served as Director of the Directorate of Information Technology for three years (2004-2007), then serves as Director of Information Management Special Unit in 2007-2009 and lastly he served as Director of the Directorate of Accounting and Payment System.

Ronald Waas was formally appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia under Presidential Decree No.75/P Year 2011 dated 21th December 2011 and was sworn on 29th December 2011 for the period from 2011-2016.



Perry Warjiyo

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada 1959. Gelar S1 diraih dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada 1982, sementara gelar Master dan PhD di bidang moneter dan keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.

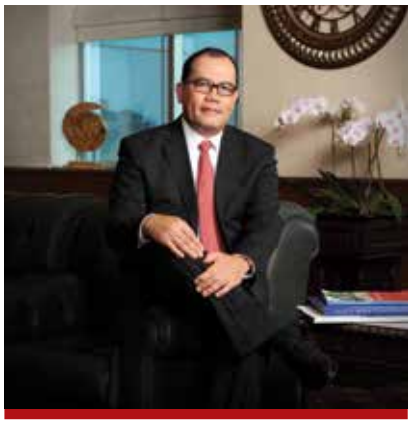
Perry Warjiyo memulai karirnya di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, pengelolaan devisa, isu-isu internasional, serta transformasi organisasi. Pada 2007-2009, Perry Warjiyo mendapat mandat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group (SEAVG). Selanjutnya Perry Warjiyo meneruskan kariernya sebagai Kepala Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia mulai 2009 hingga 2012. Sejak awal 2013, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi area kebijakan moneter dan internasional.

Perry Warjiyo diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.28/P Tahun 2013 tanggal 5 April 2013, dan diambil sumpahnya pada 15 April 2013 untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo was born in Sukoharjo on 1959. Perry Warjiyo graduated from Gadjah Mada University in 1982. He continued his study in Iowa State University, and on 1991, he received his Ph.D. degree in monetary and international financial economics.

Perry Warjiyo started his career at Bank Indonesia in 1984. He nurtured his career particularly in the areas of economic research and monetary policy, foreign exchange management, international issues and also organizational transformation. From 2007 to 2009, he held a mandatory strategic role as Executive Director in International Monetary Fund (IMF), representing the 13 members of the South-East Asia Voting Group (SEAVG). Perry Warjiyo continued his career as Head of Economic Research and Monetary Policy Directorate in Bank Indonesia from 2009-2012. Early 2013, Perry Warjiyo was appointed as Assistant Governor of Bank Indonesia in the area of international and monetary policy.

Perry Warjiyo appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia by Presidential Decree 28/P of 2013 dated 5th April 2013, and was sworn on 15th April 2013 for the period from 2013-2018.



Hendar

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Hendar dilahirkan pada 1957 di Bandung. Pada 1982 Hendar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di bidang ilmu manajemen dari Universitas Padjajaran. Pada 1995, Hendar memperoleh gelar MA di bidang Ekonomi Pembangunan dari Center for Development Economics, Williams College, AS. Selanjutnya, pada 2010 Hendar mendapatkan gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Sebagai kader Pimpinan Bank Indonesia, pada tahun 2008 Hendar menjadi wakil Bank Indonesia untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan 41 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikan calon pegawai Bank Indonesia, Hendar memulai perjalanan karirnya di Bank Indonesia pada 1983 sebagai staf pada Urusan Kredit Umum. Berbagai penugasan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan dalam negeri telah dilalui. Sejak tahun 1995, Hendar memperoleh berbagai penugasan pada sektor moneter mulai dari bidang kajian ekonomi makro, neraca pembayaran serta analisa dan perencanaan kebijakan moneter hingga pelaksanaan operasi moneter. Jabatan terakhir yang disandang Hendar sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur adalah sebagai Asisten Gubernur Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang dan Pengelolaan Sistem Informasi. Dalam kapasitasnya mewakili Bank Indonesia, Hendar juga aktif dalam berbagai forum pertemuan internasional seperti antara lain Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) dan BIS Meeting on Government Bonds Market Development.

Hendar diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2013 tanggal 27 Juli 2013 dan diambil sumpahnya pada tanggal 2 Agustus 2013 untuk masa jabatan 2013-2016.

Hendar was born in 1957 in Bandung – West Java. After completing his studies at the Faculty of Economics, Padjajaran University – Bandung, in 1982 Hendar received a bachelor of economics in management science. In 1995, Hendar received an MA in development economics from the Center for Development Economics, Williams College, US. In 2010 Hendar received a doctorate in economics from Padjadjaran University in Bandung. As a Bank Indonesia leader cadre, in 2008 Hendar represented Bank Indonesia at the PPRA Education Program organised by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia.

After completing the Bank Indonesia trainee program, Hendar began his career at Bank Indonesia in 1983 as a member of staff in Credit Affairs. Hendar was assigned at various assignment both at head office and regional office. Since 1995, Hendar has been assigned to macroeconomic review, the balance of payments as well as monetary policy analysis, planning and operation. Before appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia, his previous position was Assistant Governor for Payment Systems, Money Circulation and Management of Information Systems. In his capacity as a representative of Bank Indonesia, Hendar remains active at an array of international forum, among others the Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) and the BIS Meeting on Government Bonds Market Development.

Hendar is installed as Deputy Governor of Bank Indonesia pursuant to Presidential Decree Number 89/P of 2013, dated 27th July 2013, and sworn in on 2nd August 2013 from the period 2013-2016.

SUMPAH JABATAN

Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi Gubernur Senior/ Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/ Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara".

OATH OF OFFICE

Prior to assume his/her duty, members of the Board of Governor of Bank Indonesia shall take an oath by the Chief Justice of the Supreme Court Republic Indonesia

"I swear/promise that I, to become a Governor/a Senior Deputy Governor/a Deputy Governor of Bank Indonesia shall, directly or indirectly under any name and for any reason, not give or promise to give anything to anybody. I swear/promise that I shall, in conducting or refraining from conducting something during this term of office, not receive, directly or indirectly from anybody, any promise or gift in any form. I swear/promise that I will implement the tasks and obligation of a Governor/a Senior Deputy Governor/a Deputy Governor of Bank Indonesia with my best effort and with full responsibility. I swear/promise that I shall be loyal to the state, constitution, and the state guideline."

Badan Supervisi Bank Indonesia

Supervisory Board of Bank Indonesia

Untuk membantu DPR-RI melakukan pengawasan di bidang tertentu serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas, Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Keanggotaan BSBI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden.

To assist the House of Representatives supervise certain aspects and in order to enhance accountability, independence, transparency and credibility, the Bank Indonesia Act mandates the establishment of the Bank Indonesia Supervisory Body (BSBI). BSBI membership consists of a chairman as member along with four other members selected by the House of Representatives which appointed by the President.

Keanggotaan BSBI dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme, dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum. Anggota BSBI diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BSBI members are selected from candidates with integrity, morality, ability, capacity, expertise, professionalism and experience in economics, finance, banking or law. BSBI members serve tenure of three years with the possibility of reappointment for one more term in the subsequent period.

Pada 2014, BSBI terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang telah dipilih DPR-RI pada proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) pada 2013 untuk periode 2013-2016. Susunan keanggotaan BSBI tersebut adalah Umar Juoro sebagai ketua, serta Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan, dan Sri Adiningsih masing-masing sebagai anggota.

In 2014, BSBI comprised of five members selected by the House of Representatives through fit and proper tests conducted in 2013 for the period of 2013-2016. BSBI members include Umar Juoro as Chairman along with Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan and Sri Adiningsih as members.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, dan investasi. Cakupan lainnya adalah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan dilaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI.

The supervision function of BSBI covers the findings of Bank Indonesia Annual Financial Statements, the operational budget and investments. Supervision also extends to operational decision-making procedures outside of monetary policy and asset management of Bank Indonesia. The results are reported to the House of Representatives on a quarterly basis or as requested.

Terhadap hasil telaahan BSBI yang disampaikan tahun 2014, Bank Indonesia memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau melalui pertemuan antara Dewan Gubernur dan pemimpin satuan kerja dengan anggota BSBI. Selain membahas hasil telaahan BSBI, dalam pertemuan juga membahas hal-hal lain yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Concerning the BSBI report in 2014, Bank Indonesia responded in writing as well as attended meetings between the Board of Governors, Department Heads and BSBI. In addition to discussing the report of BSBI, discussions also centred on supporting the effectiveness of task implementation at Bank Indonesia.



4 2 1 3 5

1 Umar Juoro

Ketua
Chairman

Pendidikan :
Education

Master of Art in Political Economy dari Boston University, USA
Master of Art in Political Economy from the Boston University, USA
Master of Art in Economics dari University of Philipines
Master of Art in Economics from the University of Philipines

2 Moh. Fadhil Hasan

Anggota
Member

Pendidikan :
Education

Ph.D dalam Agricultural Economics dari University of Kentucky, USA
Ph.D in Agricultural Economics from the University of Kentucky, USA

3 Sri Adiningsih

Anggota
Member

Pendidikan :
Education

Ph.D di bidang ekonomi dari University of Illinois, USA
Ph.D in economics from the University of Illinois, USA

4 Chaerul Djusman Djakman

Anggota
Member

Pendidikan :
Education

Doktor bidang akuntansi dari Universitas Indonesia
Ph.D in accounting from the University of Indonesia

5 Ahmad Erani Yustika

Anggota
Member

Pendidikan :
Education

Ph.D dari Institute fuer Rurale Entwicklung, Universitaet Gottingen, Jerman
Ph.D from the Institute fuer Rurale Entwicklung, Universitaet Göttingen, Germany

Rangkaian Peristiwa 2014

Series of Event in 2014



4


6

Januari
January

1. Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea menyepakati peningkatan peran Bank dan Pedagang Valuta Asing (PVA) dalam penggunaan uang di wilayah perbatasan, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

   Bank Indonesia and the Bank of Papua New Guinea agreed to expand the role of banks and money exchange business activities in border areas in order to stimulate economic activity.

2. Bank Indonesia menyelenggarakan pertemuan bank sentral di regional untuk membahas pengelolaan cadangan devisa di tengah tantangan perekonomian global. Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Forum Investasi Tahunan untuk merumuskan strategi pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia.

   Bank Indonesia hosted a regional meeting of central banks to discuss foreign exchange management amidst global economic challenges. This meeting was held back to back with of the Annual Investment Forum which formulate a strategy for foreign exchange reserves management at Bank Indonesia.

Februari
February

3. Bank Indonesia mendukung pendalaman pasar uang Rupiah melalui implementasi Mini Master Repurchase Agreement MRA (Mini MRA) tahap II. Sebanyak 38 bank sepakat untuk menggunakan Mini MRA dalam melakukan transaksi Repurchase Agreement (REPO). Dengan bergabungnya 38 bank tersebut, jumlah keseluruhan pelaku pasar yang menggunakan perjanjian Mini MRA dalam transaksi REPO menjadi 46 bank.

   Bank Indonesia facilitated the inclusion of 38 additional banks in the Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA) Phase II, bringing the total to 46 banks.

Maret
March

4. Penandatanganan perjanjian kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Bank of Korea dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara kedua negara pada 2013. Fasilitas tersebut senilai KRW10,7 triliun/ Rp115 triliun (ekivalen USD10 miliar) dan berlaku efektif selama tiga tahun.

   Bank Indonesia signed a Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) with the Bank of Korea in order to follow up the agreement between both countries in 2013. The facility amounted to KRW10.7 trillion/ Rp115 trillion (equivalent to US$10 billion) and shall be effective for three years.

April
April

5. Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi pemantauan dan pengelolaan inflasi daerah dengan menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU).

   Bank Indonesia, the Coordinating Ministry of Economic Affairs, and Ministry of Home Affairs reinforced the coordination to monitor and manage the regional inflation by signing the extention of Memorandum of Understanding (MoU).



7


13

6. Pencanangan program transformasi Bank Indonesia melalui pengembangan Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) untuk mewujudkan visi baru Bank Indonesia menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional pada 2024.

   Bank Indonesia conducted the launching of transformation program by developing the Architecture of Bank Indonesia Strategic Function (AFSBI) in order to create a new vision for Bank Indonesia as a credible central bank and the best in the region by 2024.

Mei *May*

7. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diselenggarakan dengan tema "Mendorong Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Antardaerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Meningkatkan Ekonomi Daerah". Rakornas dibuka oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Gubernur dan Walikota/Bupati yang mewakili 233 TPID (33 provinsi dan 200 kabupaten/kota).

   The President of the Republic of Indonesia opened the Fifth National Coordinating Meeting (Rakornas) of Regional Inflation Control Teams in Jakarta with the theme "Strengthening Inter-Regional Coordination and Cooperation to maintain Price Stability and Stimulate Regional Economies". The National Coordinating Meeting attended by the Governors and Mayors/ Regents representing 233 Regional Inflation Control Teams (TPID) (33 provinces and 200 regencies/cities).

8. Bank Indonesia bersama dengan *Alliance for Financial Inclusion (AFI)* menyelenggarakan Pertemuan AFI Small and *Medium Enterprises Finance Working Group (SMEFWG)* 2014. Pertemuan bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM dan *peer learning* program, khususnya terkait isu kebijakan dan pembiayaan UMKM.

   Bank Indonesia, in conjunction with the Alliance for Financial Inclusion (AFI) organised a meeting of Small and Medium Enterprises Finance Working Group (SMEFWG) 2014. This meeting aimed to support MSME development and a peer learning program specifically on MSME financing and policy.

9. Pertemuan *Board of Director (BoD) International Islamic Financial Market (IIFM)* ke-30 di Jakarta, membahas perkembangan kegiatan IIFM sebagai *standard setting body* pasar keuangan syariah.

   The 30th Board of Directors' Meeting of the International Islamic Financial Market (IIFM) was also held in Jakarta to discuss IIFM activity. IIFM is a standard setting body for sharia financial markets.



14



18

Juni
June

10. Dalam upaya menciptakan transparansi harga pangan terpercaya sehingga terbentuk ekspektasi harga yang wajar, Bank Indonesia berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan peluncuran Informasi Pangan Jakarta (IPJ). IPJ merupakan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dikembangkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta.

    Bank Indonesia collaborated with the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta officially launched the Jakarta Food Information (IPJ) at Jakarta City Hall. IPJ is a Strategic Food Price Information Centre (PIHPS) developed by the Regional Inflation Control Team (TPID) in Jakarta to transparently present trusted food prices and therefore create fair price expectations.

11. Bank Indonesia menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "Mendorong Percepatan Reformasi Struktural untuk Penguatan Ekonomi di Kawasan Indonesia Timur" di Makassar. Tiga pilar kebijakan reformasi struktural yang diprioritaskan adalah (i) peningkatan daya saing industri nasional, (ii) peningkatan kemandirian ekonomi nasional, dan (iii) penguatan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

    Bank Indonesia hosted a national seminar with the theme "Expediting Structural Reforms to Strengthen Economies in Eastern Indonesia Area" in Makassar. The three priority pillars of structural reform policies include: (i) enhancing national industrial competitiveness; (ii) ensuring national economic independence; and (iii) strengthening sustainable sources of development financing.

12. Bank Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Rupiah sebagai Lambang Kedaulatan Bangsa dan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia" oleh Bank Indonesia, pelaku usaha, dan penegak hukum.

    Bank Indonesia hosted a national seminar with the theme "The Rupiah as a Symbol of National Sovereignty and Mandatory Use of Rupiah Currency within the territory of Republic of Indonesia" in conjunction with the entrepreneurs and law enforcement.

Juli
July

13. Mirza Adityaswara dilantik kembali sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2014 s.d 2019.

    Mirza Adityaswara was reappointed as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia for the period of 2014 – 2019.

Agustus
August

14. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo secara resmi mencanangkan "Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)". Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.



19



21

The Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, officially launched the National Non-cash Movement (GNNT). This movement was marked by the signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Bank Indonesia and the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance, Local Government and the Association of Indonesian Provincial Governments as commitment to support GNNT.

15. *Bank Indonesia menyelenggarakan Seminar Internasional "Inclusive Islamic Financial Sector" bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI–IDB).*

    Bank Indonesia hosted an international seminar entitled "Inclusive Islamic Financial Sector" in conjunction with the National Amil Zakat Board (Baznas) and the Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTA – IDB).

16. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta.

    The Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, received an honour of the Star of Mahaputera Adipradana by President Susilo Bambang Yudhoyono at the State Palace in Jakarta.

September *September*

17. Bank Indonesia dan Kementerian Agama menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan penggunaan non-tunai di lingkungan Kementerian Agama.

    Bank Indonesia and the Ministry of Religious Affairs signed a Memorandum of Understanding (MoU) to develop the economic self-reliance of Islamic boarding schools (Pesantren) as well as to expand the utilisation of electronic money at the Ministry of Religious Affairs.

Oktober *October*

18. Peresmian uji coba penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan Uang Elektronik melalui Agen Layanan Keuangan Digital (LKD).

    Bank Indonesia officialy trialed the Indonesian Household Conditional Cash Transfer Programme utilising Electronic Money through Digital Financial Service Providers.

19. Pelaksanaan Forum Strategis Bank Indonesia Tahun 2014 sebagai momentum Dewan Gubernur mengkomunikasikan strategi tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dalam bentuk Program Transformasi Bank Indonesia menuju Visi Bank Indonesia 2024.

    The Bank Indonesia Strategic Forum 2014 was held for the Board of Governors to communicate the annual strategy in the near, medium and long term in the form of the Bank Indonesia Transformation Program towards 2024.



22



25

20. Bank Indonesia memulai implementasi Program Transformasi Menuju Bank Indonesia 2024. Program Transformasi ini didasarkan pada Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia 2014-2024.

    Bank Indonesia started implementation of the Transformation Program towards 2024 based on the Bank Indonesia Strategic Function Architecture 2014-2024.

November
November

21. Pertemuan Bank Sentral dan Otoritas Moneter negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Surabaya. Kegiatan diisi dengan Expert Group Workshop dengan tema "*Dealing with Financial Stability Risk: Macroprudential Policy and Financial Deepening in Islamic Finance*".

    The Meeting of Central Banks and Monetary Authorities of the members of the Organisation of Islamic Cooperation was held in Surabaya. Activities conducted inter alia an Expert Group Workshop entitled "Dealing with Financial Stability risk: Macroprudential Policy and Financial Deepening in Islamic Finance".

22. Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014 di Jakarta dengan tema "Mengawal Stabilitas, Bersinergi Mempercepat Reformasi Struktural". Pertemuan Tahunan tersebut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.

    Bank Indonesia hosted the 2014 Bank Indonesia Annual Meeting in Jakarta entitled "Safeguarding Stability, Synergize to Accelerate Structural Reforms". The meeting was attended by the President of the Republic of Indonesia.

23. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, meresmikan pembukaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.

    The Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, officially opened a BI Regional Office of the Province of Bangka Belitung in Pangkal Pinang.

24. Bank Indonesia menyelenggarakan *Entrepreneurship Strategic Policy Forum* dengan tema "*Policy Recommendation on Entrepreneurship Ecosystem Development in Indonesia*" di Jakarta. Forum merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan di tingkat nasional dalam rangka membangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia dan program penciptaan wirausaha baru yang efektif.

    Bank Indonesia hosted the Entrepreneurship Strategic Policy Forum with the theme of "Policy Recommendations on Entrepreneurship Ecosystem Development in Indonesia" in Jakarta. The forum formulated policy recommendations at the national level to develop an entrepreneurship ecosystem in Indonesia as well as a program to create new and effective entrepreneurs.



26



27

25. Peresmian Forum Pengembangan Ekonomi Daerah atau West Java Incorporated (WJI) oleh Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Jawa Barat. Pembentukan WJI selanjutnya diformalkan dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 76 Tahun 2014.

The Governor of Bank Indonesia and the Governor of West Java launched the Regional Economic Development Forum or West Java Incorporated (WJI). WJI establishment was subsequently legalised pursuant to West Java Governor Regulation No. 76 of 2014.

Desember *December*

26. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, meresmikan pembukaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat di Manokwari, yang merupakan komitmen nyata Bank Indonesia mendukung perekonomian di daerah.

The Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, officially opened a BI Representative Office of the Province of West Papua in Manokwari. It was a real commitment of Bank Indonesia to support regional economic development.

27. Bank Indonesia bersama OJK dengan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati *head of agreement (HoA)* dalam rangka implementasi *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*, dan penandatanganan *ABIF Guidelines* oleh Gubernur Bank Sentral ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mendukung integrasi perbankan ASEAN yang menjadi langkah penting guna memfasilitasi kemajuan integrasi ekonomi dan keuangan ASEAN.

Bank Indonesia, in conjunction with the Financial Services Authority (OJK) and Bank Negara Malaysia (BNM), approved a Heads of Agreement (HoA) to implement the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) and also ABIF Guidelines signed by all governors of central banks in ASEAN. These agreements support ASEAN banking integration as a crucial step to facilitate the development of economic and financial integration in ASEAN.

28. *International Monetary Fund (IMF)* memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pengelolaan makroekonomi Indonesia yang baik, sehingga meningkatkan kredibilitas kebijakan dan ketahanan eksternal di Indonesia.

The International Monetary Fund (IMF) presented Bank Indonesia with an award for sound macroeconomic management, thus enhancing the credibility of policy and external resilience in Indonesia.



Kejutan demi kejutan datang silih berganti menghadang perekonomian Indonesia di 2014, tidak menyurutkan langkah Bank Indonesia untuk menjaga perekonomian bangsa. Kerja keras dan kerja sama menjadi daya penopang untuk mengubah tantangan menjadi peluang, sekaligus mengharmonisasikan gerak yang masih terserak.

One incident after another that hampered Indonesian economy in 2014 did not deter Bank Indonesia to maintain nation's economy. Hard work and cooperation becomes a key driver to transform challenges into opportunities as well as to harmonize the scattered motion.



PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA 2014

2014 BANK INDONESIA TASK IMPLEMENTATION

Stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah pengaruh situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi fundamental domestik yang masih perlu diperkuat. Kondisi ini menjadi hasil nyata dari upaya yang ditempuh Bank Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya sepanjang 2014.

Penguatan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk menempuh bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi, menjaga defisit agar tetap terkendali, penguatan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan sistem pembayaran, serta mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi, dengan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap mencapai 5%.

Indonesian economic stability was maintained amid an uneven global economic recovery and weak domestic economic fundamentals. This economic stability was an outcome of efforts conducted by Bank Indonesia in conjunction with other stakeholders throughout 2014.

Synergy between Bank Indonesia and the Government was improved in terms of instituting the policy mix in order to control inflation, manage the deficit, maintain financial system stability, maintain payment system and macroeconomic stability as well as preserve economic growth at 5%.

PEREKONOMIAN GLOBAL

Dinamika perkembangan ekonomi negara maju dan emerging markets (EM) pada tahun 2014 diwarnai proses *rebalancing*. Respons kebijakan yang ditempuh oleh negara maju dan EM yang divergen berdampak pada pemulihan ekonomi global yang tidak merata dan berlangsung lebih lambat dari perkiraan semula. Kebijakan yang ditempuh negara maju lebih akomodatif guna mendorong pemulihan ekonominya, sedangkan kebijakan negara EM cenderung lebih beragam dalam rangka memperkuat fundamental ekonominya. Dampak respons kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2014 relatif stabil dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 3,3%, namun lebih rendah dibandingkan perkiraan awal tahun sekitar 3,7% (IMF).

Perkembangan ekonomi dunia tersebut juga menjadi perhatian berbagai forum internasional, diantaranya forum G-20. Forum G-20 menekankan pentingnya kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sebagai respons terhadap pemulihan ekonomi global yang masih berjalan lambat dan tidak merata. Untuk mencapai hal tersebut, forum G-20 menyatakan perlunya reformasi struktural serta kerja sama untuk menggerakkan investasi. Didukung oleh kebijakan yang lebih longgar, pemulihan ekonomi negara maju semakin kuat, meskipun dampaknya tidak seragam bagi semua negara. Secara keseluruhan, perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara maju yang lebih tinggi menjadi 1,8% dari 1,4% pada tahun 2013.

Kebijakan akomodatif, baik moneter maupun fiskal, yang ditempuh oleh Amerika Serikat (AS) mampu mendorong perbaikan ekonomi AS, bahkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global. Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi AS untuk menempuh kebijakan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) secara bertahap sejak bulan Januari 2014 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Pemulihan ekonomi AS juga didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif berupa pelonggaran pemotongan anggaran.

Sementara itu, dampak kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif terhadap perbaikan kinerja ekonomi kawasan Eropa dan Jepang masih belum signifikan. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang longgar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa, meskipun masih terbatas, menjadi 0,9% dibandingkan

GLOBAL ECONOMY

The dynamic movements of developed and emerging markets (EM) economies in 2014 were marked with rebalancing process. The divergent policy responses adopted by developed and EM countries resulted in uneven global economic recovery, which progressed slower than initially predicted. Developed countries pursued more accommodative policies aimed at promoting economic recovery, while EM countries policies tended to be more diverse in their approaches to strengthen economic fundamentals. These policy responses contributed to the global economic growth in 2014 that is relatively stable compared to 2013, which reached 3.3%, but fell short of the initial estimate at approximately 3.7% (IMF).

The world economic development also became a concern in various international forums, including the G-20 forum. The G-20 forum stressed the importance of pro-growth policies in response to the slowing down and uneven global economic recovery. To achieve that, the G-20 forum expressed the need for structural reforms as well as cooperation to promote investment activity. Supported by more relaxed policy stances, the economic recovery of developed countries gathered momentum, although the impact did not benefit all countries equally. Overall, these developments boosted the economic growth of developed countries to 1.8%, higher than 1.4% in 2013.

The accommodative monetary and fiscal policies pursued by the United States (US) helped promote the US economic recovery, and even turning it to become the engine for global economic recovery. The continuing economic recovery was one of the underlying considerations for the US to gradually pursue a tapering off of monetary stimulus policy that began in January 2014 and ended in October 2014. The US economic recovery was also supported by accommodative fiscal policy by easing previous budget cuts.

Meanwhile, the accommodative monetary and fiscal policies did not significantly improve economic performance in Eurozone and Japan. The loose monetary and fiscal policy implementation were able to increase Eurozone economic growth, although still limited, to 0.9% compared to the 0.4% contraction in 2013. On the

dengan kontraksi 0,4% pada tahun 2013. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang masih terus melambat meskipun Pemerintah Jepang telah menempuh kebijakan moneter dan fiskal yang longgar. Reformasi struktural yang dicanangkan pada pertengahan tahun 2013 juga masih belum menunjukkan dampak yang signifikan.

other hand, Japan's economic growth slowed further despite the loose monetary and fiscal policies undertaken by the Japanese government. Even the structural reforms launched in mid-2013 had not demonstrated any significant impact to the economy.

Di tengah perbaikan ekonomi negara maju, ekonomi EM masih tumbuh dalam tren melambat. Dengan *stance* kebijakan yang lebih beragam, pada tahun 2014, ekonomi negara EM tumbuh melambat menjadi 4,4% dari 4,7%. Beberapa negara EM seperti Kolombia, Brazil dan Argentina menempuh kebijakan moneter ketat sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang masih lebar. Sedangkan Thailand, Korea Selatan, dan Meksiko menempuh kebijakan moneter yang longgar untuk mendorong perekonomiannya di tengah permintaan eksternal yang melambat. Upaya *rebalancing* untuk menggeser motor ekonomi Tiongkok dari investasi ke konsumsi berdampak pada perlambatan ekonomi Tiongkok menjadi 7,4% dari 7,7% pada tahun 2013. Upaya tersebut dilengkapi dengan kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang dan kebijakan moneter yang akomodatif dalam bentuk pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan penurunan suku bunga untuk menahan perlambatan yang lebih dalam. Sementara itu, reformasi struktural yang ditempuh oleh India di tengah penerapan kebijakan moneter ketat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi India menjadi 5,5% dari 4,7% pada tahun 2013. Kebijakan moneter ketat tersebut ditujukan untuk mengarahkan inflasi mencapai sasaran sekaligus untuk memperbaiki fundamental ekonomi menghadapi normalisasi suku bunga kebijakan *Fed Fund Rate* (FFR). Untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, India menempuh kebijakan reformasi struktural antara lain melalui program "*Make in India*".

In the midst of developed countries economic improvements, EM economic growth trend remained slow. With a more diversified policy stances, in 2014, EM countries economic growth slowed down to 4.4% from previously 4,7%. Several EM countries such as Colombia, Brazil and Argentina pursued tight monetary policy in response to increasing inflationary pressures and widening current account deficit. Meanwhile, Thailand, South Korea, and Mexico adopted loose monetary policy to boost the economy amid slumping external demand. Rebalancing attempt to shift Chinese engine of growth from investment to consumption led to a slowdown of Chinese economic growth to 7.4% from 7.7% in 2013. The efforts were accompanied with structural reform policies in various areas and accommodative monetary policy by easing the statutory reserve requirements (GWM) and lowering interest rates to prevent further slowdown. Meanwhile, the structural reforms pursued by India amidst tight monetary policy implementation boosted India's economic growth to 5.5% from 4.7% in 2013. This monetary policy tightening was aimed at steering inflation toward reaching the target and at the same time improve the economic fundamentals in anticipation of the Fed Funds Rate (FFR) interest rate policy normalization. To promote economic growth, India pursued structural reform policies, among others, through the "Make in India" program.

Masih terbatasnya pemulihan ekonomi global tersebut berdampak pada perkembangan harga komoditas global yang masih terus menurun, meskipun dengan laju yang semakin melambat. Selain dipengaruhi oleh permintaan yang rendah, penurunan harga komoditas non-energi juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan di Tiongkok, yang menyebabkan permintaan atas komoditas batu bara dan karet menurun. Selain itu, faktor cuaca (*el nino delay*) juga berpengaruh terhadap melimpahnya pasokan komoditas khususnya minyak kelapa sawit. Komoditas minyak juga menunjukkan penurunan harga yang signifikan, terutama pada paruh kedua 2014. Setelah sempat meningkat sampai dengan pertengahan tahun,

The limited global economic recovery impacted global commodity prices, which continued to decline, albeit at a slower rate. Besides influenced by low demand, the decline in non-energy commodity prices were also affected by a number of policy in China that led to shrinking demand for coal and rubber commodities. In addition, weather factors (the El Nino delay) also brought about an abundant supply of commodities, particularly palm oil. The crude oil commodity prices also significantly declined, especially in the second half of 2014. Following the rise of oil prices until the middle of the year, the oil prices suffered a substantial drop during the second semester in response to increased oil supply, particularly from US

pada semester II minyak mencatat penurunan harga yang cukup besar dipengaruhi oleh pasokan minyak yang meningkat, terutama dalam bentuk *shale oil* dari AS. Faktor geopolitik dan permintaan yang menurun sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang belum kuat juga memengaruhi penurunan harga minyak. Secara keseluruhan, perkembangan harga tersebut mendorong inflasi global yang lebih rendah. Tingkat inflasi beberapa negara maju seperti AS, Eropa dan Jepang masih berada di bawah target inflasinya, bahkan Eropa berada dalam zona deflasi.

shale oil. Geopolitical factors and the shrinking demand in line with the weakening of global economic recovery also affected oil prices to fall. Overall, these prices movements pushed global inflation to a lower level. The inflation rate several developed countries such as the US, Europe and Japan remained below the inflation target, and even Europe was in deflation zone.

Di sisi pasar keuangan global, ketidakpastian atas kebijakan normalisasi the Fed dan divergensi kebijakan moneter negara maju menjadi faktor yang memengaruhi kerentanan pasar keuangan global. Kinerja ekonomi AS yang terus membaik mendorong *the Fed* untuk mulai mengurangi program *Quantitative Easing* sejak bulan Januari 2014. Namun demikian, pengumuman the Fed pada bulan Juli untuk menyelesaikan program Quantitative Easing pada bulan Oktober menyebabkan ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat. Kondisi ini berdampak pada aliran modal, terutama ke negara berkembang. Arus masuk modal asing ke Indonesia yang tinggi sampai dengan triwulan III 2014, cenderung menurun pada triwulan akhir 2014. Di samping itu, sebagai respons terhadap dampak kebijakan moneter longgar yang ditempuh negara maju, beberapa negara EM turut menempuh kebijakan moneter longgar untuk menjaga daya saing ekspor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonominya.

On the global financial market, uncertainty over the Fed's policy normalization and monetary policy divergence of developed countries became the factors that exacerbated vulnerability in the global financial markets. The steady improvement of US economic performance prompted the Fed to begin reducing the Quantitative Easing program since January 2014. However, the Fed's announcement in July to end the Quantitative Easing program in October triggered to heightened uncertainty in the global financial markets. These conditions influenced capital flows, especially to developing countries. The high volume of foreign capital inflows to Indonesia until the third quarter of 2014 subsided in the final quarter of 2014. In addition, in response to loose monetary policy pursued by developed countries, several EM countries opted for a loose monetary policy to maintain export competitiveness, in lieu of encouraging economic growth.

Ke depan, perekonomian dunia diperkirakan tumbuh lebih tinggi, terutama didukung oleh perbaikan ekonomi negara maju, khususnya AS sebagai motor penggerak. Dengan perkiraan ini, diharapkan permintaan ekspor akan kembali meningkat sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, kebijakan QE oleh ECB dan Bank of Japan diperkirakan dapat mengimbangi sebagian pengaruh kebijakan the Fed terhadap pergerakan arus modal ke *emerging markets*, termasuk Indonesia. Dengan demikian aliran modal masuk ke Indonesia berpotensi relatif terbatas. Selain itu, divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju tersebut dapat menimbulkan gejolak di pasar keuangan global yang selanjutnya dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.

Looking ahead, the world economy is expected to grow even higher, mainly supported by the economic improvement of developed countries, especially the US as a driving force. This forecast underpinned the expectation that export demand will rebound and thus support domestic economic growth. Meanwhile, the Quantitative Easing policies of the ECB and the Bank of Japan is predicted to partly offset the effects of the Fed's policy on the capital flows movement into emerging markets, including Indonesia. Thus the capital flow going into Indonesia has relatively limited potential. In addition, the divergent monetary policies in developed countries could cause turbulence in the global financial markets which in turn could put pressure on the domestic financial system stability.

Perkembangan ekonomi global secara umum masih diwarnai divergensi kebijakan. Negara maju masih menempuh kebijakan moneter akomodatif dan

The global economic development in general was tinged with divergent policies. Developed countries still pursued accommodative monetary and fiscal policies in the long

konsolidasi fiskal dalam jangka panjang. Kebijakan moneter akomodatif tersebut tercermin pada implementasi kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dan kebijakan suku bunga rendah. Selama 2014, otoritas moneter Amerika Serikat (*Federal Reserve* atau *the Fed*) tetap melanjutkan kebijakan QE meski besarannya dikurangi secara bertahap (Tapering-off QE III) sejak Januari 2014 dan diselesaikan pada Oktober 2014. Selain itu, the Fed juga mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level rendah yaitu 0-0,25%. Sementara itu, kebijakan fiskal berupa pemotongan anggaran negara (*sequester*) Amerika Serikat (AS) masih berlanjut meski pada tahun 2014 Pemerintah AS melakukan pelonggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

term. The accommodative monetary policy was reflected in the implementation of Quantitative Easing (QE) and low interest rates policies. During 2014, the monetary authorities of the United States (Federal Reserve or the Fed) continued QE policy even though the amount was reduced gradually (Tapering-off QE III) since January 2014 and ended in October 2014. Despite that, the Fed also maintained a low interest rate policy of 0-0.25%. Meanwhile, United States (US) fiscal policy through state budget cuts (sequester) continued even though in 2014 the US government took easing measures to boost economic growth.

Di kawasan Eropa, kebijakan moneter yang longgar ditunjukkan oleh penerapan kebijakan *negative deposit rate* yang disertai dengan langkah QE dan paket kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit. Sementara itu, kebijakan konsolidasi fiskal di kawasan Eropa terus berlanjut meski *fiscal drag* tahun 2014 mengalami penurunan dalam rangka pemulihan ekonomi Eropa. Di Jepang, Pemerintah masih menerapkan paket kebijakan *Abenomics* dengan 3 panah (stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural) untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan tingkat inflasi. Meski telah menempuh berbagai kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonominya, hanya Amerika Serikat yang tampil sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi dunia, sementara pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah bahkan Jepang masih dalam fase resesi.

In Europe, loose monetary policy as demonstrated by negative deposit rate policy, along with QE measure and macroprudential policy package to encourage credit. Meanwhile, the fiscal consolidation policy in the European area persisted despite the fiscal drag in 2014 was decreased in lieu of Europe economic recovery. In Japan, the government continued to implement the Abenomics policy package with 3 arrows (monetary stimulus, fiscal stimulus and structural reforms) to achieve growth and inflation level objectives. Although many has pursued a variety of policies to strengthen the economic recovery, only the United States emerged as a driving force of world economic recovery, while Europe's economic growth remained weak and even Japan was trapped in recession phase.

Pada sisi lain, kebijakan yang ditempuh negara EM selama tahun 2014 diantaranya merupakan respon terhadap dampak rambatan (*spillover*) kebijakan negara maju khususnya *Tapering QE* oleh *the Fed*. Dengan komposisi likuiditas global yang mulai bergeser, negara EM diharuskan untuk memperbaiki kondisi fundamental ekonomi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Negara EM menerapkan respons kebijakan yang beragam bergantung pada kondisi domestik masing-masing negara. Otoritas Tiongkok melanjutkan kebijakan *rebalancing* ekonomi dan reformasi struktural disertai dengan berbagai kebijakan pelonggaran moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan tetap pada kisaran 7,5%. Sementara itu, beberapa negara EM lainnya menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat sebagai respons terhadap arus modal keluar yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang masih lebar. Beberapa negara seperti India, Meksiko dan Indonesia juga menempuh kebijakan reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

On the other hand, the policies pursued by EM countries during 2014 were a response to the spillover effects of the policies taken by developed countries, particularly tapering of QE by the Fed. With the global liquidity composition that has begun to shift, EM countries are required to improve the economic fundamentals in order to achieve sustainable economic growth. EM countries applied divergent policy responses depending on the domestic conditions of each country. The Chinese authorities continued economic rebalancing and structural reforms policies accompanied by monetary easing policies to achieve sustainable economic growth and remained at around 7.5%. Meanwhile, several other EM countries pursued tighter monetary policy in response to increased capital outflows and widening current account deficit. Some countries such as India, Mexico and Indonesia also undertaken structural reforms policies to strengthen economic resilience.

PEREKONOMIAN DOMESTIK

Perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif ditengah permasalahan struktural dalam perekonomian domestik yang masih mengemuka, dihadapi Bank Indonesia dan Pemerintah dengan menempuh bauran kebijakan. Langkah ini mampu menjaga stabilitas perekonomian domestik selama tahun 2014. Kombinasi kebijakan moneter bias ketat yang dibarengi dengan kebijakan fiskal untuk menjaga sustainabilitas mampu membuat laju inflasi terkendali di tengah kenaikan BBM, defisit transaksi berjalan yang menyusut, surplus transaksi modal dan finansial meningkat, volatilitas nilai tukar yang menurun dan defisit fiskal yang terkendali. Namun, di tengah belum optimalnya reformasi struktural, perkembangan ekonomi global yang tidak sebaik perkiraan semula dan kebijakan stabilisasi makroekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 5% pada tahun 2014. Meski demikian pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara ASEAN 5 sebesar 4,7%.

Sinergi kebijakan stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah berhasil mengarahkan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat. Perbaikan ekonomi global yang berjalan lambat dan penurunan harga komoditas di tengah struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas SDA telah memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor. Namun, kebijakan stabilisasi yang ditujukan untuk mengendalikan impor di tengah kondisi ekspor yang tertekan mampu menurunkan defisit transaksi berjalan. Di jalur keuangan, kuatnya keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia di tengah likuiditas global yang berlimpah berdampak pada surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Perkembangan tersebut telah memperkuat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), sehingga mampu menjaga ketahanan eksternal antara lain tercermin dari kemampuan cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban ULN jangka pendek yang meningkat.

DOMESTIC ECONOMY

Unfavorable global economic development amid structural problems in the domestic economy was managed by Bank Indonesia and the Government by employing policy mix. As a result, the domestic economy for 2014 was preserved in a stable condition. Further, the tight bias monetary policy coupled with fiscal policy was successfully curbing inflation under control, decreasing the current account deficit, increasing the surplus of capital and financial account, reducing exchange rate volatility, as well as controlling fiscal deficits. However, the ongoing structural reforms, the unfavorable global economy, and the macroeconomic stabilization policies had affected the domestic growth decelerating to 5% in 2014. Compared to the average economic growth of ASEAN countries, the Indonesian economic growth was still higher.

The collaboration of stabilization policies implemented by Bank Indonesia and the Government managed to steer the current account deficit to a better level. The slow pace of global economy growth and the drop in commodity prices in the middle of Indonesia's export structure which was dominated by natural resources commodities, had put some pressures on Indonesia's export performance. However, stabilization policies aimed to control imports was capable of lowering the current account deficit. Meanwhile in financial sector, the perception of foreign investors remained positive towards the resilience of the Indonesian economy and its future prospect. This positively affected the surplus of capital and financial account, even reaching the highest level of surplus in history. At the end, these developments had strengthened the performance of Indonesia's Balance of Payment (BOP), thus sustaining the external resiliency as reflected by the ability of foreign reserves to fulfill soaring short term debt obligations.

Stabilitas nilai tukar Rupiah pada tahun 2014 tetap terjaga, sejalan dengan perbaikan defisit transaksi berjalan serta konsistensi kebijakan untuk mengarahkan nilai tukar sesuai dengan fundamental perekonomian., Secara *point to point*, nilai tukar melemah 1,7% disertai dengan volatilitas yang terus menurun di sepanjang tahun 2014. Perkembangan nilai tukar Rupiah terutama dipicu oleh defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut, ketidakpastian rencana normalisasi the Fed, serta dinamika politik nasional. Pada penghujung tahun 2014, upaya Bank Indonesia melalui *dual intervention* yang disertai dengan perkembangan positif dari struktur mikro pasar valas domestik dan pasar keuangan mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan depresiasi yang meningkat.

The Rupiah exchange rate in 2014 was maintained stable, in line with the improvement of the current account deficit, as well as the consistency of policies to steer the exchange rate in accordance with economic fundamentals. In point to point, the Rupiah exchange rate dropped by 1.7%, with reduced volatility throughout the year 2014. The negative sentiments on the current account deficit, the Fed rate hike uncertainty, as well as the dynamics of national politics were among major factors affecting Rupiah exchange rate. At the end of 2014, Bank Indonesia's efforts through a dual intervention coupled with the positive development of the domestic foreign exchange market microstructure and the financial markets were able to uphold the stability of the Rupiah.

Kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro dan koordinasi dengan Pemerintah yang semakin solid, dapat menjaga inflasi tahun 2014 tetap terkendali *single digit* di tengah tekanan inflasi *administered prices* dan *volatile food* yang meningkat. Tekanan inflasi pada 10 bulan pertama 2014 dapat dikendalikan, sehingga inflasi kembali bergerak menuju lintasan sasaran inflasi. Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 berdampak pada realisasi inflasi tahun 2014 yang melampaui sasaran yang telah ditetapkan sebesar 4,5±1%, yaitu mencapai 8,36%. Meski demikian, realisasi inflasi 2014 masih lebih rendah dari tahun lalu. Inflasi 2014 yang terkendali *single digit* juga didukung oleh perkembangan inflasi inti yang tetap terjaga.

Bank Indonesia policies in preserving macroeconomic stability and keeping solid coordination with the government, kept the inflation rate in 2014 remained stable in a single digit rate. In the middle of high pressures derived from administered prices inflation and volatile foods inflation, inflationary pressures in the first 10 months of 2014 could be controlled. However, the increase on subsidized fuel prices in November 2014 had affected inflation in 2014 exceeding the target set at 4.5 ± 1%, reaching 8.36%, but lower than the inflation rate in 2013.

Pertumbuhan ekonomi domestik melambat menjadi 5,0% dibandingkan dengan 5,6% pada tahun 2013 dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pada awal tahun sebesar 5,5-5,9%. Hal ini sebagai imbas dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Selain bersumber dari perlambatan ekspor, moderasi ekonomi juga disebabkan oleh stimulus fiskal dalam perekonomian yang menurun sejalan dengan program penghematan belanja yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, moderasi ekonomi juga terlihat di seluruh kawasan, khususnya Kawasan Timur Indonesia (KTI) sejalan dengan ekspor komoditas SDA yang menurun, terutama karena melemahnya permintaan ekspor dari Tiongkok. Sejalan dengan perlambatan ekonomi, angka pengangguran sedikit meningkat. Namun, perkembangan harga yang terkendali sampai dengan bulan Oktober 2014 mampu membawa perbaikan bagi kondisi kemiskinan di tahun 2014.

Domestic economic growth slowed to 5.0% in 2014 compared to 5.6% in 2013, and was lower than expected at the beginning of the year by 5.5 to 5.9%. The decreasing growth of economy was affected by global economic condition and stabilization policies adopted by Bank Indonesia and the Government. This was exacerbated by the declining fiscal stimulus in line with spending austerity program pursued by the Government. The economic moderation was occurred in all region, particularly Eastern Indonesia (KTI) due to the drop of natural resources commodity exports, mainly because of weakening export demand from China. In line with the economic slowdown, the unemployment rate increased slightly. However, the stable commodity price had restrained the poverty rate from worsening condition.

Pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat serta harga komoditas yang menurun memberikan tekanan terhadap penerimaan negara. Sementara, kenaikan harga minyak dunia selama paruh pertama 2014 memberikan tekanan terhadap belanja melalui beban subsidi BBM yang meningkat. Perkembangan ini mendorong Pemerintah untuk menempuh kebijakan penghematan anggaran untuk memastikan agar defisit fiskal tidak melampaui target, sehingga dapat menjaga sustainabilitas fiskal. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 untuk mengendalikan konsumsi dan beban subsidi BBM bersubsidi. Dengan respon tersebut, defisit fiskal 2014 tercatat mencapai 2,2% dari PDB, relatif sama dibandingkan dengan tahun 2013, namun lebih rendah dari target APBNP sebesar 2,4% dari PDB. Pencapaian tersebut juga dibarengi dengan defisit keseimbangan primer yang membaik menjadi 0,9% dari PDB dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,0% dari PDB.

The weakening domestic economic growth and declining commodity prices put pressure on the Government revenues. Meanwhile, the increase in world oil prices during the first half of 2014 put pressure on the Government expenditure through the increasing burden of fuel subsidies. This situation had encouraged the Government to pursue budgetary austerity policies to ensure that the fiscal deficit does not exceed the target, so as to maintain fiscal sustainability. To alleviate the burden, the Government increased the subsidized fuel price in November 2014. With such a response, the 2014 fiscal deficit reached 2.2% of GDP, relatively the same compared with 2013, but lower than the revised budget target of 2.4% of GDP. The achievement is also coupled with an improving primary balance deficit to 0.9% of GDP compared to the year 2013 amounted to 1.0% of GDP.

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2014 tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Ketahanan industri perbankan tercermin pada risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Perkembangan tersebut tercermin dari indeks stabilitas sistem keuangan membaik menjadi 0,6 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 1,1. Rasio NPL sedikit meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2013, namun masih pada level yang rendah di kisaran 2,0%. Risiko likuiditas yang sempat meningkat pada paruh pertama 2014, kembali menurun sejalan dengan ekspansi operasi keuangan Pemerintah yang disertai dengan kebijakan GWM-LDR. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal yang tinggi mencapai 19,6% mencerminkan daya tahan perbankan yang kuat. Kinerja pasar keuangan yaitu di pasar saham dan obligasi juga meningkat tercermin pada kenaikan IHSG dan penurunan *yield* SBN di seluruh tenor.

The stability of the financial system in 2014 endured under control, sustained by banking resilient and improved financial market performance. The resilience of the banking industry was reflected by the credit risk, liquidity risk and market risk that were maintained in acceptable level, as well as backed up by strong capital. The index of financial system stability improved to 0.6 compared to the year 2013 by 1.1. Meanwhile, the Non- Performing Loans (NPL) ratio increased slightly compared with the end of 2013, but still at a low level in the range of 2.0%. Liquidity risk was increased in the first half of 2014, but declined in line with the expansion of the Government's financial operations and the impact of a new regulation on statutory reserve requirement – loan to deposit ratio. In terms of capital, banking capital adequacy ratio reached 19.6% reflecting strong banking durability. The performance of financial markets, namely in the stock and bond markets also rose reflected in the increase of stock exchange index and the decrease in yield on government securities in all tenors.

Kebijakan moneter melalui penetapan BI *rate* telah direspons melalui jalur ekspektasi inflasi, suku bunga, dan kredit. Kebijakan moneter bias ketat mampu mengarahkan ekspektasi inflasi yang terus menurun. Dari jalur suku bunga, transmisi ke suku bunga deposito terlihat lebih kuat dibandingkan dengan transmisi ke suku bunga kredit. Sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit dan moderasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit pada tahun 2014 melambat menjadi 11,6% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 21,6%.

The monetary policy as reflected by policy rate (BI Rate) had been responded through various transmission channels namely inflation expectations, interest rates and credit. Tight bias monetary policy was able to steer inflation expectations continued to decline. In the interest rate channel, the transmission to the deposit rate appeared stronger than the transmission into lending rates. In line with the increase in lending rates and the moderation of economic growth, credit growth in 2014 slowed to 11.6% compared with 21.6% in 2013.

Pada tahun 2014, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah berjalan secara aman, efisien, dan andal untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan

In 2014, payment systems and money management run safely, efficiently, and reliably to support macroeconomic stability and financial system, while increasing the efficiency

sistem keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi perekonomian. Terjaganya keamanan sistem pembayaran antara lain tercermin dari *fraud* APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan rasio NPL kartu kredit yang menurun. Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tercermin pada nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel yang meningkat. Sementara, kinerja pengelolaan uang Rupiah yang andal terlihat dari ketersediaan uang kartal dengan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Rasio posisi kas meningkat menjadi 3,5 bulan *outflow* rata-rata dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 2,5 bulan didukung oleh peningkatan transaksi uang kartal antar bank (TUKAB) dan terjaganya kualitas uang Rupiah yang diedarkan.

of the economy. The preservation of security of payment systems, among others reflected in the declining fraud and the decreasing of NPL ratio for credit cards. Meanwhile, the performance of reliable money management Rupiah was revealed through the availability of currency in sufficient amounts, types of appropriate fractions, on time, and in a condition fit for circulation. Simultaneously, the ratio of cash position outflow increased to 3.5 months on average compared with the year 2013 amounted to 2.5 months supported by an increase in inter-bank currency transactions and maintain the quality of Rupiah currency in circulation.

Risiko ketidakstabilan makroekonomi pada tahun 2014 mengalami peningkatan, didorong perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif di tengah berbagai permasalahan domestik yang masih mengemuka. Untuk itu, bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada upaya memperkokoh stabilitas moneter dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut dilaksanakan melalui sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaaan uang Rupiah serta pendalaman pasar keuangan. Berbagai kebijakan tersebut juga diperkuat oleh koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan instansi yang lain serta strategi komunikasi yang baik untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia.

The increased risk of macroeconomic instability in 2014 was driven by unfavorable global economic developments and an array of domestic problems. To address that, Bank Indonesia policy mix was aimed towards strengthening monetary stability and supporting financial system stability. The Bank Indonesia policy mix was implemented through synergy among monetary policy, macroprudential policy, payment system policy and Rupiah currency management as well as financial market deepening. The various policies were also strengthened by close coordination with the Government and other agencies as well as good communication strategy to improve the effectiveness of Bank Indonesia policy mix.

Upaya memperkokoh stabilitas moneter dan sistem keuangan, ditempuh dengan menerapkan bauran kebijakan dengan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial bias ketat sampai dengan November 2014. Strategi tersebut diejawantahkan dalam bentuk penetapan BI Rate sebesar 7,5% untuk menjangkar ekspektasi inflasi, sementara Lending Facility dan Deposits Facility masing-masing dipertahankan sebesar 7,5% dan 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dipandang masih konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2014, penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta tetap kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Kebijakan suku bunga tersebut didukung kebijakan nilai tukar yang mengarahkan nilai tukar Rupiah agar konsisten dengan nilai fundamentalnya dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa. Selain itu ditempuh pula berbagai upaya pendalaman pasar keuangan baik Rupiah maupun valas untuk meningkatkan ketahanan pasar keuangan domestik terhadap berbagai gejolak yang berasal dari kondisi global sekaligus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Strengthening monetary and financial system stability was pursued by implementing a policy mix consisted of tight bias monetary policy and macroprudential policy until November 2014. The strategy was embodied in setting the BI Rate at 7.5% to anchor inflation expectations, while maintaining Lending Facility and Deposit Facility consecutively at 7.5% and 5.75%. The interest rate was considered consistent with achieving the inflation target of 2014, decreasing current account deficit to a healthier level that was still conducive to maintain financial system stability. The interest rate policy was supported by exchange rate policies to keep the Rupiah exchange rate in consistent with the fundamental value while also keeping in regards the adequacy of foreign exchange reserves. Furthermore, numerous efforts in financial market deepening both in Rupiah and foreign currency were also taken to increase the domestic financial market resiliency to shocks emanating from global conditions while also enhance the effectiveness of monetary policy transmission.

Penguatan kebijakan dilakukan pula pada kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia bersifat proaktif untuk mencegah timbulnya risiko yang lebih luas dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Selama tahun 2014, sebagai bagian dari penguatan kebijakan makroprudensial yang proaktif, landasan hukum kebijakan makropudensial telah diperkuat. Di samping itu, kegiatan asesmen dan *surveillance* makroprudensial terus dilakukan upaya memitigasi risiko-risiko utama yang berpotensi sistemik (risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar). Kegiatan evaluasi ketentuan LTV terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan melalui peningkatan transparansi perluasan jangkauan perbankan pada semua lapisan masyarakat (keuangan inklusif) dan peningkatan persaingan yang sehat. Selanjutnya diperkuat pula koordinasi baik dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun instansi lain yang terkait di berbagai forum seperti Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM).

Strengthening of macroprudential policy was also conducted as part of Bank Indonesia policy mix aimed to prevent and reduce systemic risks, encourage balanced and high quality intermediation function, as well as improving the efficiency of the financial system and financial access. Macroprudential policies adopted by Bank Indonesia was taken as proactive measures to prevent the a wider range of risks that could disturb the financial system stability. During 2014, as part of a proactive effort in strengthening macroprudential policies, the legal basis of macroprudential policy has been reinforced. In addition, macroprudential assessment and surveillance activities continued to mitigate key risks that were potentially systemic (credit risk, liquidity risk and market risk). The evaluation of LTV regulation was continued to increase the policy effectiveness. Macroprudential regulation and supervision were also intended to improve the financial system efficiency and financial access through banking outreach at all levels of society (inclusive finance) and increase healthy competition. Furthermore, good coordination with the Government, the Financial Services Authority (OJK) and other related agencies was also strengthened through various forums such as the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK) and Macro-Microprudential Coordination Forum (FKMM).

Di bidang sistem pembayaran, selama tahun 2014 kebijakan ditujukan untuk menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal guna mendukung tercapainya stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran dan perluasan akses masyarakat terhadap penggunaan jasa sistem pembayaran, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Keseluruhan kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbiasa menggunakan sistem dan instrumen pembayaran nontunai (*less cash society*/LCS) serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara dalam pengelolaan uang Rupiah ditempuh lima kebijakan. Pertama, menjaga kecukupan posisi kas Bank Indonesia untuk memenuhi penarikan uang kartal masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, mengeluarkan dan menerbitkan uang kertas pecahan Rp100.000 dengan ciri-ciri sesuai UU Mata Uang. Ketiga, mengembangkan dan memperluas layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Keempat, memperkuat infrastruktur sistem informasi pengelolaan uang Rupiah. Kelima, meningkatkan kegiatan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah dan cara memperlakukan uang Rupiah dengan baik.

In the payment systems area, the policies during 2014 were aimed to ensure safe, efficient, and reliable payment systems to support the achievement of monetary and financial system stability. The policies were pursued through strengthening the payment system infrastructure and expanding the public access to payment system services, with keeping regards to payment system services consumer protection. The overall policy aims to create a society that is accustomed to using non-cash payment instruments (less cash society/LCS) and support national economic growth. Meanwhile in Rupiah currency management, five policies were adopted. First, maintain sufficient cash position of Bank Indonesia to fulfil the need of currency withdrawal throughout Indonesia. Second, issue and publish Rp100,000 bills with attributes in accordance to the Currency Law. Third, develop and expand cash services to banks and the public. Fourth, strengthen the management of information systems infrastructure of Rupiah currency management. Fifth, increase public education activities on the characteristics of authentic Rupiah currency and good treatment of the Rupiah currency.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan, koordinasi kebijakan, baik dengan Pemerintah dan otoritas domestik terkait, maupun dengan bank sentral dan otoritas keuangan negara mitra terus diperkokoh. Dengan penguatan koordinasi kebijakan ini efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia diharapkan akan meningkat, sehingga mendukung stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di tengah peningkatan tantangan perekonomian global dan cukup tingginya kerentanan perekonomian domestik. Penguatan koordinasi kebijakan tersebut terutama mencakup area pengendalian inflasi, bauran kebijakan, sektor keuangan serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Furthermore, to enhance the effectiveness of the policy mix, policy coordination with the Government and related domestic authorities as well as with central banks and financial authorities in partnering countries continued to be intensified. By increasing these policy coordinations the effectiveness of Bank Indonesia policy mix was expected to improve, thus supporting macroeconomic stability and sustainable economic growth in the midst of rising global economic challenges and considerably high domestic economic vulnerability. The strengthening of policy coordination are mainly in the area of inflation control, policy mix, financial sector as well as payment systems and Rupiah currency management.

Koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi ditujukan untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi penawaran, khususnya menyangkut *volatile food* dan untuk mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan *administered prices*, agar ekspektasi inflasi terjaga pada kisaran sasaran inflasi. Sementara itu, penguatan koordinasi juga dilakukan untuk mendorong percepatan program reformasi struktural, termasuk dalam memperbaiki postur fiskal. Demikian pula koordinasi kebijakan pada sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, melalui kebijakan makro dan mikroprudensial dan koordinasi kebijakan untuk pencegahan/penanganan krisis, serta kebijakan terkait upaya mendorong *financial inclusion*. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk mewujudkan sistem pembayaran nontunai yang aman dan efisien guna meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, serta mendukung kelancaran pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, penguatan koordinasi juag dilakukan untuk mendukung komitmen Indonesia di berbagai forum Internasional.

Policy coordination to control inflation was aimed to manage inflationary pressures from the supply side, especially related to volatile food and in anticipation of the impact of further increases in administered prices, so that inflation expectations are maintained within the range of targeted inflation. Meanwhile, the strengthening of coordination were also made to promote the acceleration of structural reform programs, including in improving fiscal posture. Similarly, policy coordination in the financial sector was aimed to maintain financial system stability as a whole, through macro and microprudential policy as well as policy coordination for the crisis prevention/mitigation, as well as policies related to promoting financial inclusion. Increased coordination with related agencies were also undertaken to realize a safe and efficient non-cash payment system in order to increase the use of non-cash payment instruments, as well as support Rupiah currency management. In addition, strengthening coordination was also conducted to support Indonesia commitment in various international forums.

Ke depan, dengan fundamental ekonomi yang lebih kuat, implementasi bauran kebijakan moneter yang masih bias ketat serta kebijakan makroprudensial dan fiskal yang lebih akomodatif paska kenaikan harga BBM bersubsidi diharapkan dapat memiliki efek yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Reformasi subsidi yang telah diterapkan oleh Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi belanja yang lebih produktif sehingga dapat memperkuat fundamental ekonomi. Selain itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah untuk melaksanakan komitmen reformasi struktural diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang berkesinambungan dan berkualitas.

Looking ahead, stronger economic fundamentals, the implemention of tight bias monetary policy mix as well as accommodative macroprudential and fiscal policies after the subsidized fuel price hike were expected to have stronger effect in promoting higher quality economic growth. Subsidy reforms that had been adopted by the Government would give ample room for more productive expenditure so that the economic fundamentals would be strengthened. Moreover, the synergy between Bank Indonesia and the Government to follow-up on the commitment to implement structural reforms were expected to strengthen macroeconomic stability and encourage a sustainable and high quality economic development.

MENJAGA KESTABILAN MONETER

Selama 2014, perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, baik berasal dari global maupun domestik. Dari sisi global, pemulihan ekonomi global tidak secepat perkiraan sebelumnya. Selain itu, melemahnya permintaan komoditas dari negara berkembang dan Jepang belum mampu diimbangi oleh peningkatan permintaan produk manufaktur dari negara maju. Pada periode yang sama, normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat *(The Federal Reserve)* memberikan risiko terhadap kinerja sektor eksternal melalui jalur keuangan. Semua itu ikut memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap perekonomian Indonesia diperberat oleh kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih lemah. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai permasalahan struktural. Misalnya, struktur ekspor masih didominasi produk berbasis sumber daya alam (SDA). Ketahanan pangan dan energi Indonesia juga masih rendah. Di sisi lain, pasar keuangan masih dangkal, sedangkan ketergantungan pada pembiayaan eksternal justru meningkat. Merespons berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat sinergi untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan fondasi ekonomi ke arah yang lebih kuat. Hal ini ditempuh melalui bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah.

Selama 2014, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter yang cenderung ketat *(tight bias)* guna mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Sementara itu, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan reformasi struktural untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Kombinasi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah itu terbukti mampu menjaga stabilitas makroekonomi.

Langkah reformasi struktural di bidang energi melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi dan upaya pendalaman pasar keuangan menjadi penguat fondasi perekonomian Indonesia di masa-masa yang akan datang. Meski begitu, belum optimalnya reformasi struktural, berlanjutnya perlambatan ekonomi global, dan adanya kebijakan stabilisasi ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi domestik juga mengalami perlambatan.

Pada 2014, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,50% selama hampir 11 bulan dengan *Deposits Facility* (DF) dan *Lending Facility* (LF) masing-masing sebesar 5,75% dan 7,50%. Pada 18 November 2014, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 25bps menjadi 7,75% dengan DF dan LF masing-masing menjadi 5,75% dan 8,00%. Kenaikan suku bunga itu sebagai respons atas kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang meningkat seiring dengan berakhirnya program *Quantitative Easing (QE) the Fed.*

MAINTAINING MONETARY STABILITY

During 2014, the economy of Indonesia confronted a number of onerous domestic and external challenges. From a global perspective, the global economic recovery was weaker than expected, while sluggish commodity demand from developing countries and Japan was not offset by stronger manufacturing product demand from advanced countries. Further, the normalisation of the Federal Reserve's accommodative monetary policy stance triggered external sector risks through the financial channel. Such conditions exacerbated pressures on the domestic economy.

From the domestic perspective, pressures were compounded by weak economic fundamentals that manifested in structural problems. For instance, primary commodities based on natural resources continued to dominate the export structure, while food and energy security remained weak. On the other hand, financial markets remained shallow, whereas dependence on external financing increased. In response to the challenges, Bank Indonesia and the Government continuously synergise to strengthen macroeconomic stability and economic foundations through the policy mix of Bank Indonesia and the Government.

Throughout 2014, Bank Indonesia maintained a tight-bias monetary policy stance to control inflation and manage the current account deficit. Meanwhile, the Government implemented fiscal policy and structural reforms to manage the budget deficit. The combination of policies instituted by Bank Indonesia and the Government proved to be effective in terms of maintaining macroeconomic stability.

Structural reforms in energy through subsidised fuel price adjustment and financial market deepening are the foundation of stronger economic fundamentals for the future. Nonetheless, suboptimal structural reforms, the prolonged global economic recovery and economic rebalancing policy have led to domestic economic moderation.

In 2014, Bank Indonesia held the BI Rate at 7.50% for the first nearly 11 months, with the Deposit Facility (DF) and Lending Facility (LF) rates maintained at 5.75% and 7.50% respectively. On 18th November 2014, however, Bank Indonesia decided to raise the BI Rate 25bps to 7.75%, with the LF rate increased to 8.00% and the DF rate held at 5.75%. The increase of the BI rate was determined as a response to a Government subsidised fuel price hike amid exchange rate pressures along with the completion of the Federal Reserve's quantitative easing program.



Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya.

The Rupiah depreciated against the US Dollar in 2014 but appreciated against the currencies of other major trade partners.



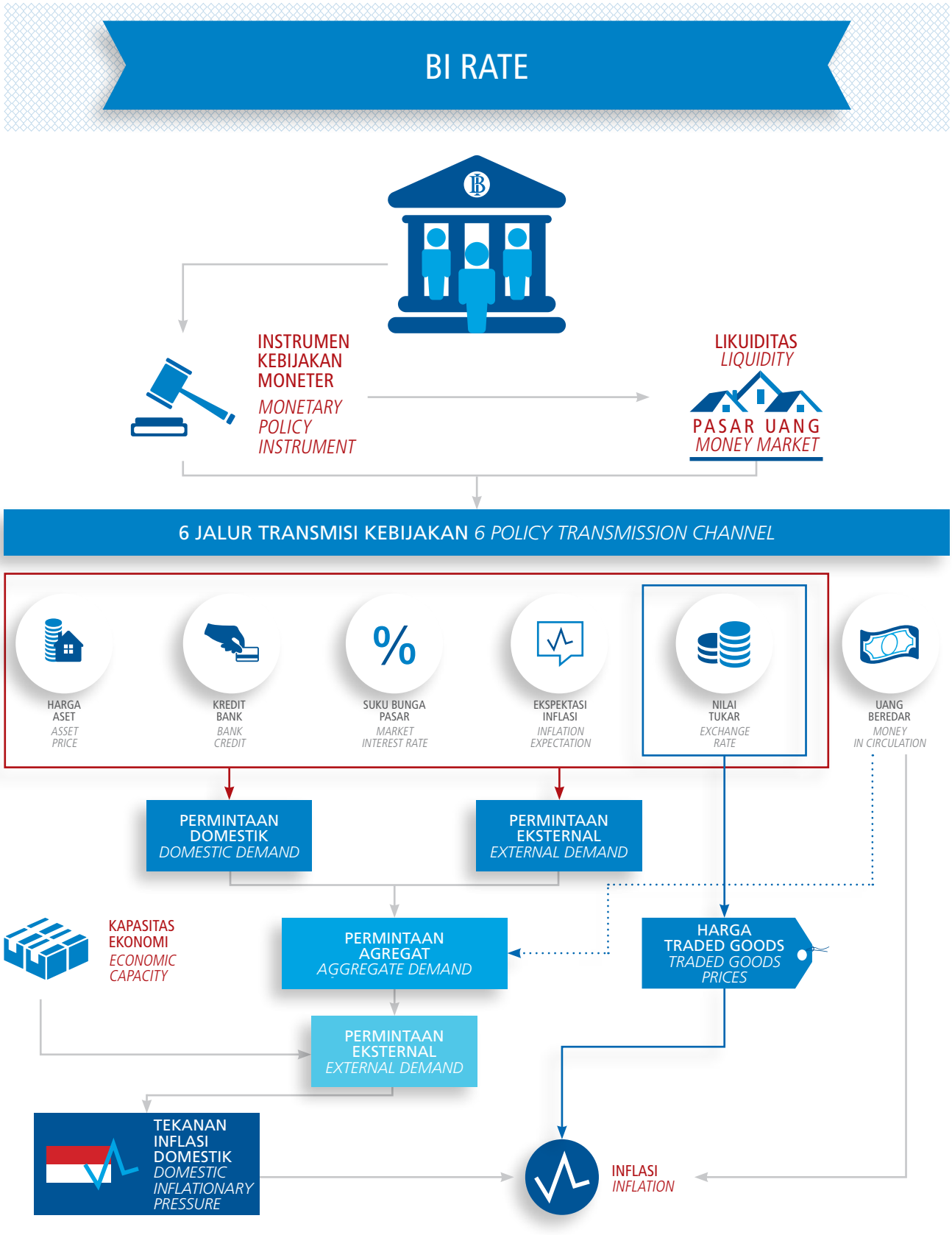


Merespon berbagai tantangan perekonomian, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat sinergi untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan fondasi ekonomi ke arah yang lebih kuat.

In response to the challenges, Bank Indonesia and the Government continuously synergize to strengthen macroeconomic stability and economic foundations through the policy mix of Bank Indonesia and the Government.

Transmisi Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia Policy Transmission



Kenaikan BI *Rate* ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan tekanan inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4±1% pada 2015. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan upaya untuk mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

BI *Rate* adalah suku bunga acuan Bank Indonesia yang mencerminkan sikap kebijakan moneter terhadap kondisi perekonomian secara umum. BI *Rate* diputuskan oleh Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan dan diumumkan kepada publik. BI *Rate* ditransmisikan melalui berbagai jalur, yang pada gilirannya akan mempengaruhi inflasi.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasarannya.

Kenaikan BI *Rate* ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan tekanan inflasi pascakenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4±1% pada 2015. Kebijakan tersebut juga konsisten dengan upaya untuk mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

Bank Indonesia raised its policy rate to anchor inflation expectations and control the inflation pressures; thereby the inflation could be controlled, temporary, and return to the target corridor of 4±1% as quickly as possible in 2015. Such policy was also consistent with efforts to manage the current account deficit towards a sounder level.

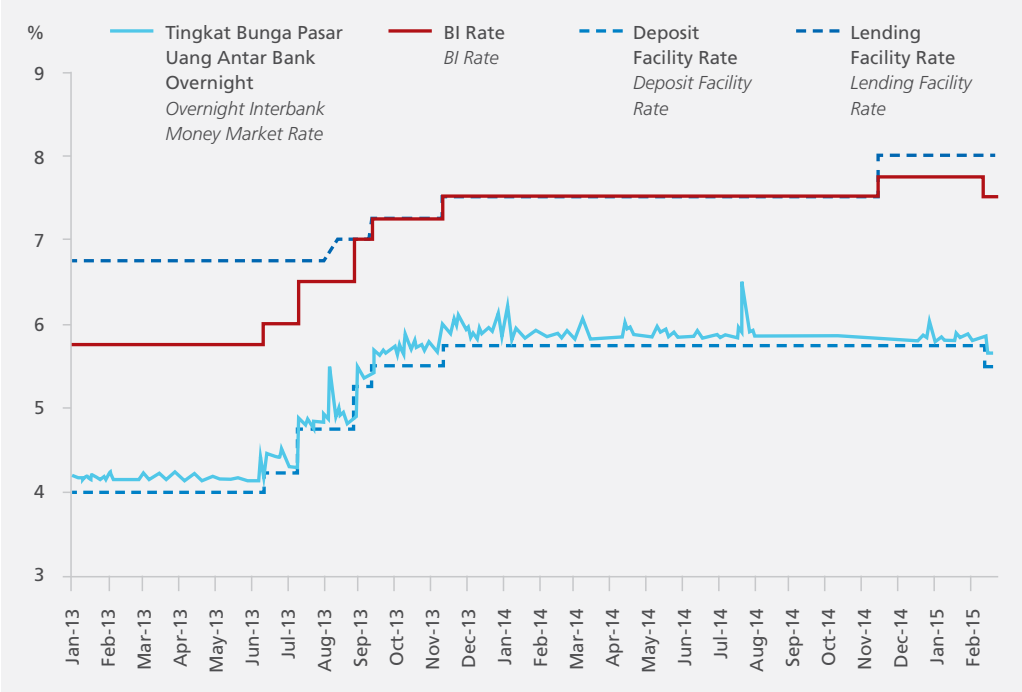
BI Rate is Bank Indonesia reference rate that reflects monetary policy stance on economic condition. BI Rate is determined by the Board of Governor in monthly meeting and published to public afterward. Further, BI Rate is transmitted into various channel which in turn will affect the inflation.

Considering other economic factors, Bank Indonesia will increase the BI Rate if the inflation is predicted to exceed the target corridor. On the contrary, Bank Indonesia will decrease the BI Rate if the inflation is predicted to be below the target corridor.

Bank Indonesia raised its policy rate to anchor inflation expectations and control the temporary inflationary pressures of the fuel price hike, thereby ensuring inflation would return to the target corridor of 4±1% as quickly as possible in 2015. Such policy was also consistent with efforts to manage the current account deficit towards a sounder level.

Grafik Respons Kebijakan Suku Bunga BI

Graph. BI Interest Rate Policy Responses



Respons kebijakan Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah mampu mengurangi tekanan terhadap inflasi. Di tengah tingginya tekanan dari *administered price* dan *volatile food*, inflasi 2014 tetap terkendali pada *single digit*. Inflasi akhir 2014 tercatat sebesar 8,36% atau sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 8,38%.

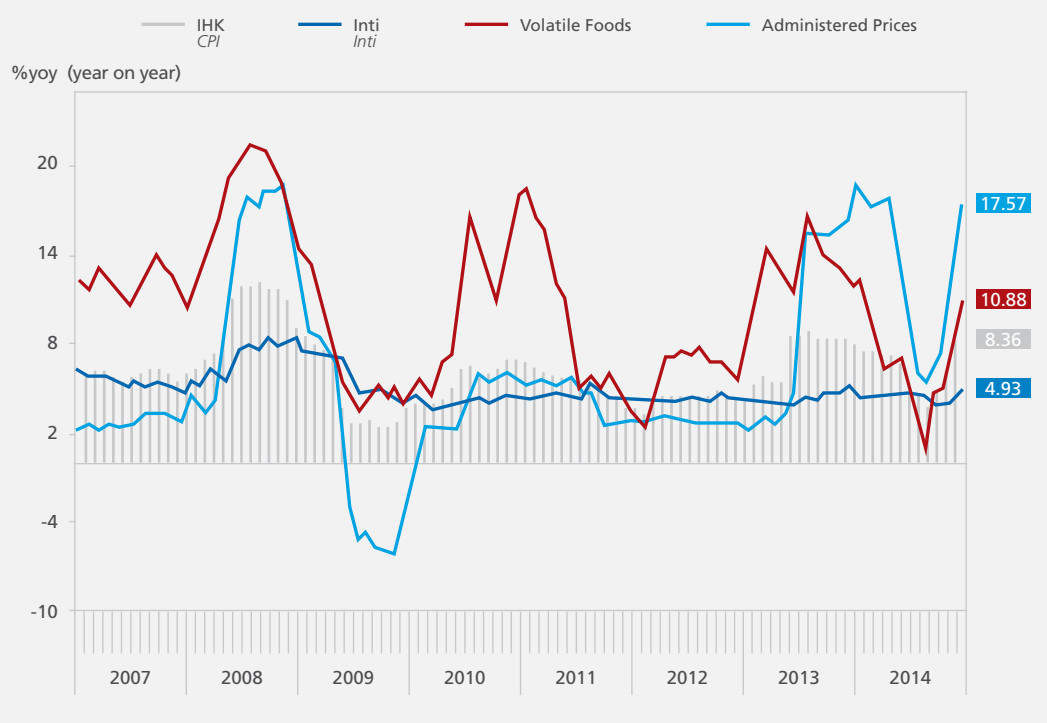
Tekanan inflasi 2014 terutama bersumber dari inflasi *administered prices* terkait dengan upaya reformasi subsidi energi seperti *liquefied petroleum gas* (LPG), tarif tenaga listrik (TTL), dan bahan bakar minyak (BBM). Perkembangan inflasi kelompok *volatile food* juga memberikan tekanan terhadap inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* merupakan dampak dari keterbatasan pasokan karena faktor musim dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Meski begitu, perkembangan inflasi inti relatif terjaga, bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The coordinated policy response of Bank Indonesia and the Government successfully alleviated inflationary pressures. Amidst intense pressures on administered prices and volatile foods, single-digit inflation remained under control in 2014, closing the year at 8.36% slightly down on the 8.38% in the previous year.

Administered pries contributed most to inflationary pressures in 2014 through energy subsidy reforms, including liquefied petroleum gas (LPG), electricity rates and fuel prices. Volatile foods also intensified inflationary pressures due to limited supply (seasonal factors) as well as the second-round impact of the subsidised fuel price hike. Nevertheless, core inflation was well controlled, even declining compared to the previous year.

Grafik Perkembangan Inflasi Tahunan

Graph. Development of Annual Inflation Rate

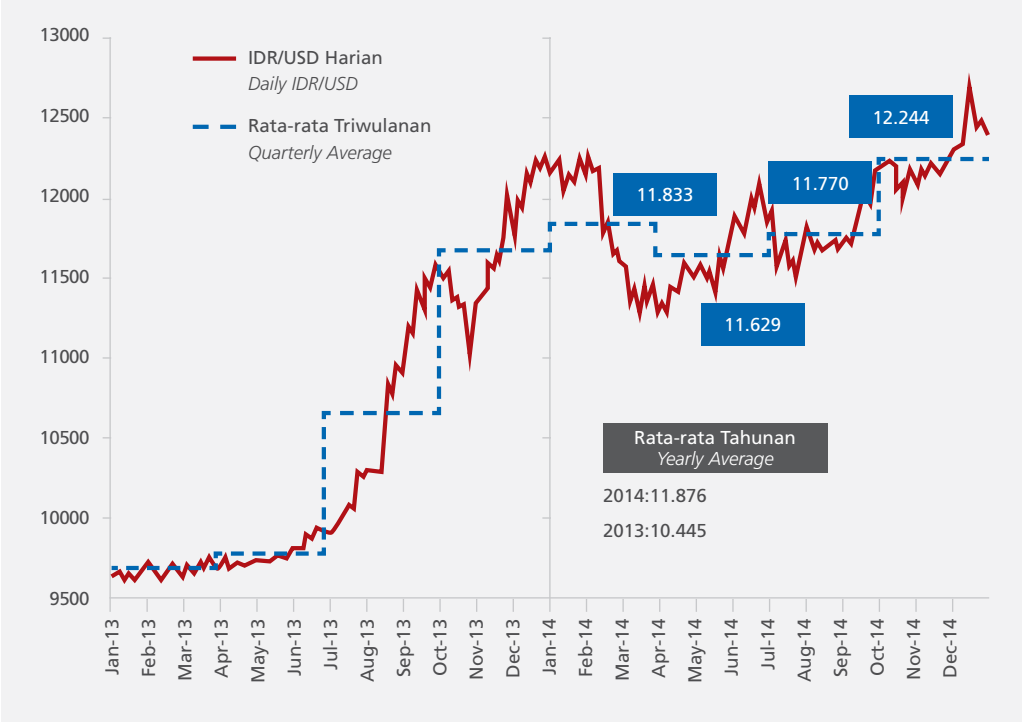


Di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang cukup kuat, Rupiah mengalami depresiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya disertai volatilitas yang menurun. Nilai tukar Rupiah pada 2014 mengalami depresiasi terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya.

Amidst pressures on the strong exchange rate, the Rupiah experienced more moderate depreciation than in the previous year and with less volatility. Further, the Rupiah depreciated against the US Dollar in 2014 but appreciated against the currencies of other major trade partners.

Grafik Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Graph. Development of Rupiah Exchange Rate



Dalam kerangka kebijakan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia mengarahkan nilai tukar Rupiah agar konsisten dengan nilai fundamentalnya dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa. Kebijakan ini ditempuh melalui kebijakan *dual intervention*.
Arah kebijakan nilai tukar ini tetap ditopang dengan pertimbangan menjaga kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense*. Hal ini untuk memberikan keyakinan terhadap ketahanan sektor eksternal dalam merespons ketidakpastian global yang meningkat.

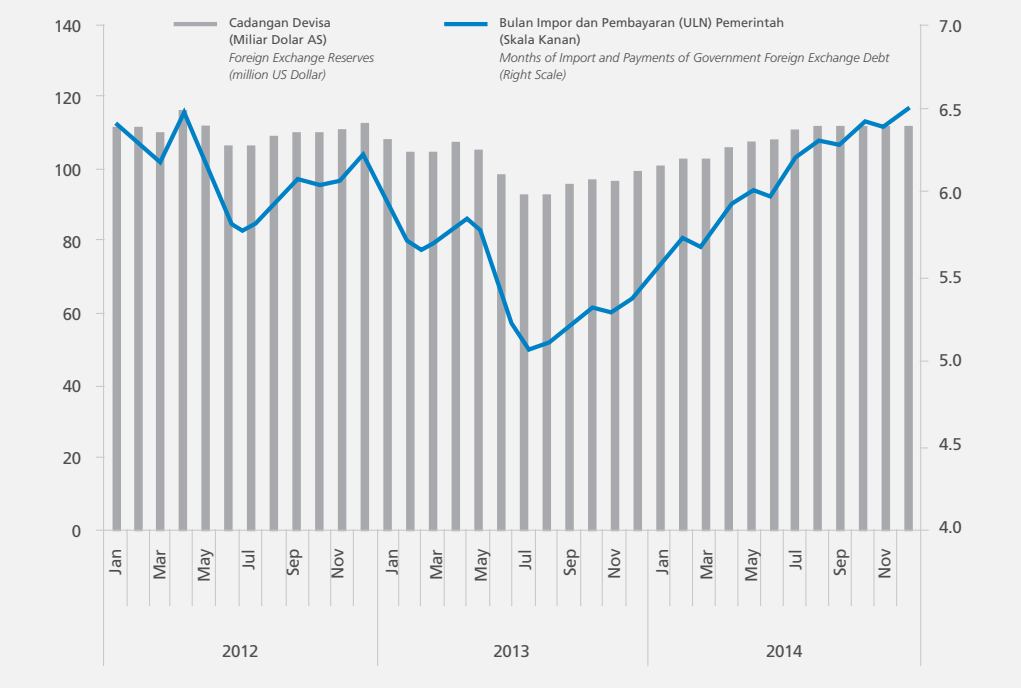
Within the framework of exchange rate policy, Bank Indonesia managed the Rupiah consistently in line with its fundamental value, while still maintaining adequate foreign exchange reserves. This policy was executed through dual intervention policy. The exchange rate policy was conducted with consideration of maintaining adequate foreign exchange reserves as the first line of defence. It boosted confidence in external sector resilience in responding to global uncertainty.

Cadangan devisa pada akhir 2014 meningkat menjadi USD111,9 miliar atau setara 6,5 bulan impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah, di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Jumlah ini meningkat sebesar USD12,5 miliar dari posisi cadangan devisa akhir 2013 sebesar USD99,4 miliar.

Foreign exchange reserves amounted to US$111.9 billion at yearend 2014, equivalent to 6.5 months of imports and servicing public external debt, which is well above international adequacy standards of three months. The position of foreign exchange reserves increased US$12.5 billion from US$99.4 billion reported at the end of 2013.

Grafik Perkembangan Cadangan Devisa

Graph. Development of Foreign Exchange Reserves



Sebagai bentuk implementasi kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas melalui operasi moneter. Kondisi likuiditas harian di sistem perbankan selama 2014 menunjukkan surplus. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia secara net cenderung melakukan operasi moneter yang bersifat absorpsi atau penyerapan.

Bank Indonesia manages liquidity through monetary operations. Daily liquidity condition in the banking system showed a surplus during 2014. This condition has compelled Bank Indonesia to conduct monetary operations to absorb liquidity.

Operasi moneter dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan kecukupan likuiditas Rupiah dan menjaga Pergerakan Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Pada 2014, rata-rata harian suku bunga PUAB O/N naik 103 bps menjadi 5,85% dibandingkan 2013. Posisi instrumen operasi moneter pada akhir 2014 juga meningkat 14,6% menjadi sebesar Rp313,44 triliun.

The monetary operation was conducted by optimising Rupiah liquidity adequacy management and maintaining the overnight interbank rate as the operational target of monetary policy. In 2014, the average daily overnight interbank rate increased 103bps to 5.85%. Furthermore, the position of monetary operation instruments increased 14.6% at the end of 2014 to Rp313.44 trillion.

Penguatan operasi moneter 2014 dilakukan dengan melanjutkan penyerapan ekses likuiditas melalui instrumen operasi moneter bertenor lebih panjang *(lengthening)*. Bank Indonesia juga memaksimalkan penggunaan Surat Berharga Negara (SBN) milik Bank Indonesia melalui Reverse Repo SBN dan memperkuat peran Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dalam operasi moneter.

Monetary policy was strengthened in 2014 through the absorption of excess liquidity by using long-term monetary instruments. Bank Indonesia also maximised the utilisation of tradeable government securities (SBN) owned by Bank Indonesia through reverse repurchase agreements (repo) and expanded the role of Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI).

Selain itu. Bank Indonesia juga melakukan perluasan surat berharga *(eligible securities)* yang dapat ditransaksikan dalam operasi moneter, khususnya dalam masa krisis. Surat berharga tersebut berbentuk surat berharga denominasi valas yang diterbitkan oleh negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk *Cross Border Collateral Arrangement* (CBCA).

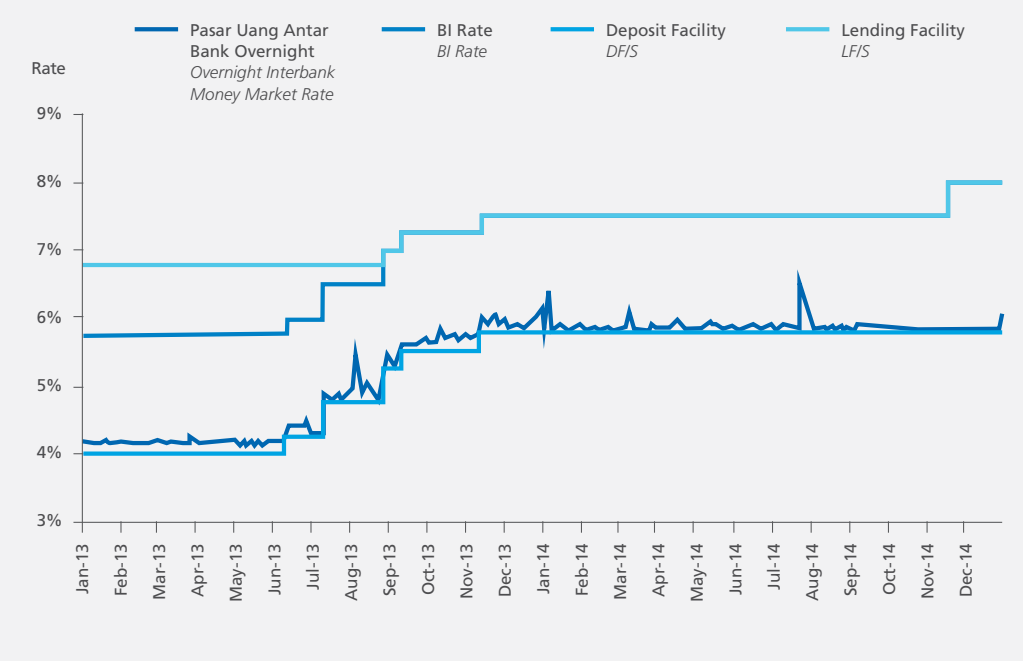
In addition, Bank Indonesia also expanded eligible securities for monetary operations which can be traded in monetary operation, especially during a crisis episode. The eligible securities were in the form of foreign securities issued by other central banks that have an arrangement with Bank Indonesia, inter alia in the form of Cross-Border Collateral Agreement (CBCA).

Untuk penguatan pengelolaan likuiditas valas perbankan, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen moneter. Instrumen yang digunakan antara lain lelang FX swap dan *Term Deposit Vala*s (TD Valas), serta mengeluarkan instrumen baru berupa Penempatan Berjangka *(Term Deposit)* Syariah dalam Valuta Asing (TD Valas Syariah).

Furthermore, Bank Indonesia used an array of monetary instruments to strengthen foreign currency liquidity management at banks, including FX swaps and Foreign Currency Term Deposits, and also issued new instruments in the form of Sharia Foreign Currency Term Deposits.

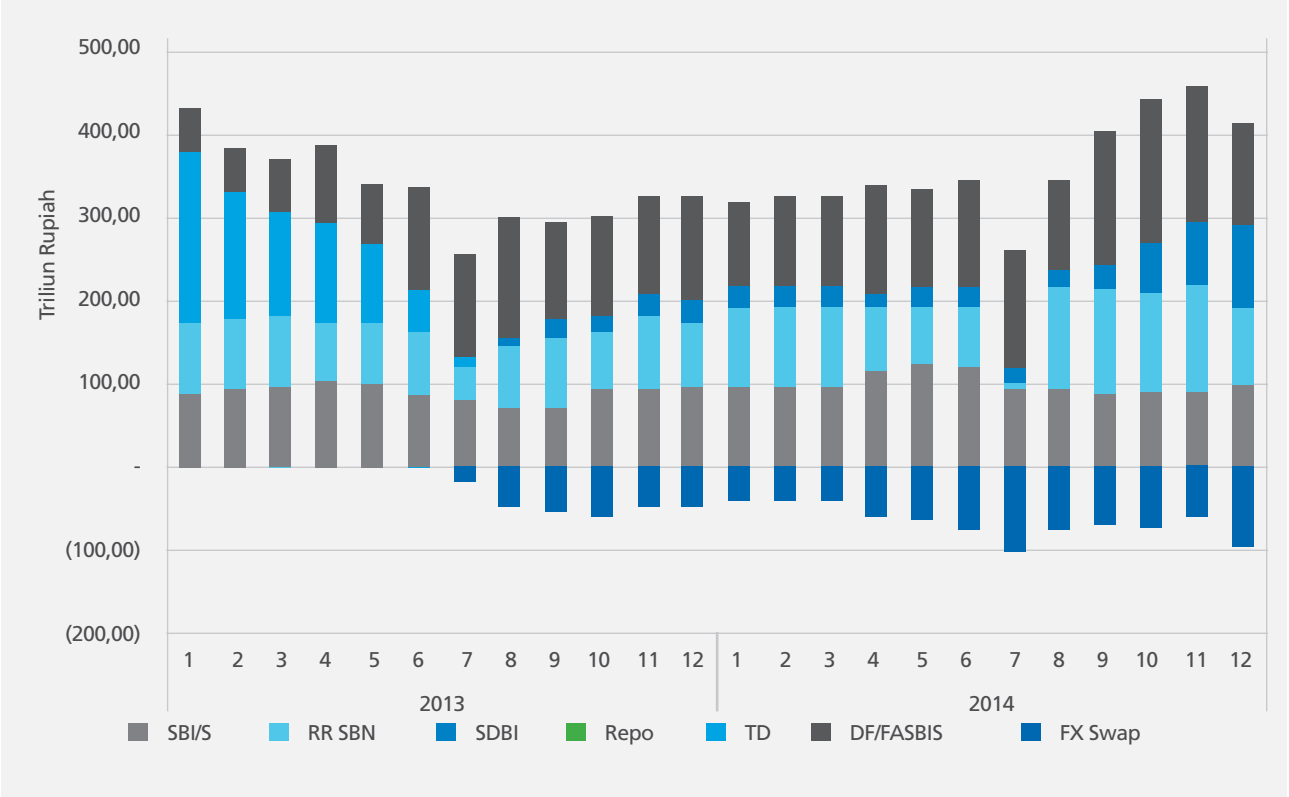
Grafik Perkembangan Suku Bunga PUAB O/N

Graph. Development of Overnight Interbank Money Market Rate



Grafik Posisi Instrumen Operasi Moneter

Graph. Position of Monetary Operation Instrument



Bank Indonesia menilai upaya pendalaman pasar keuangan menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal ke depan. Selain meningkatkan ketahanan (resiliensi) terhadap kejutan *(shock)*, pasar uang yang dalam memberikan insentif kepada berbagai sisi perekonomian. Insentif itu antara lain memperlancar transmisi kebijakan moneter, mendukung kebutuhan pembiayaan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas ekonomi.

Bank Indonesia considers market deepening increasingly vital to encounter future external challenges. In addition to enhancing resilience to shocks, a deeper money market also provides incentives for various economic aspects. Such incentives include expediting monetary policy transmission, supporting the economic financing and boosting economic capacity.

Pendalaman pasar keuangan diarahkan sesuai dengan dinamika perekonomian domestik maupun global. Pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui lima pilar. Pertama, pengembangan instrumen dan basis investor. Kedua, pengembangan infrastruktur pasar. Ketiga, penyesuaian regulasi dan standardisasi transaksi. Keempat, penguatan dukungan kelembagaan dan kelima, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.

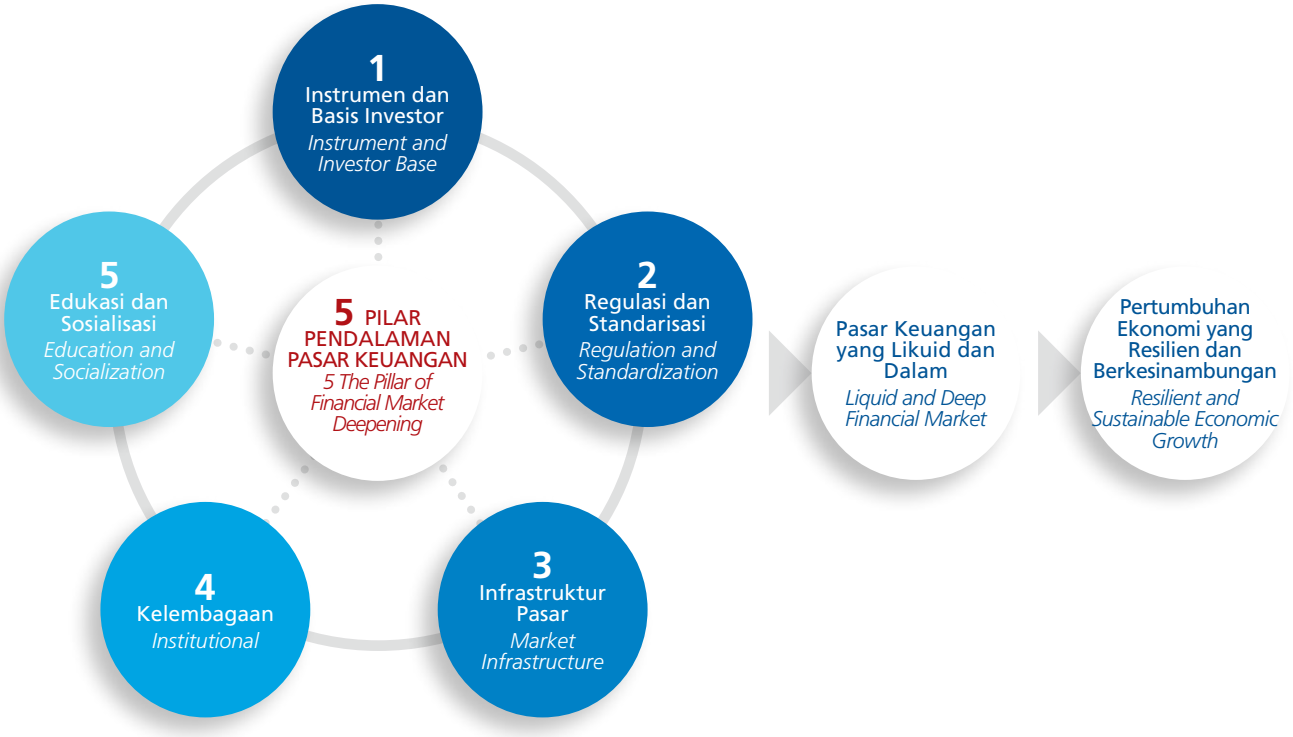
Financial market deepening is aligned with the dynamics of the domestic and global economies. Financial market deepening and development is achieved through five pillars. Firstly, the development of instruments and the investor base. Secondly, market infrastructure development. Thirdly, regulatory harmonisation and standardised transactions. Fourthly, strengthening institutional support and lastly, the implementation of education and socialisation.

Pada 13 Februari 2014, sebanyak 38 bank sepakat menggunakan perjanjian *Mini Master Repo Agreement* (Mini MRA). Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan pasar untuk menyusun Mini MRA dalam transaksi PUAB pada akhir tahun sebelumnya.

On 13th February 2014, 38 banks agreed to sign the Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA) as a follow-up action of market consensus to establish a mini MRA reached at the end of the previous year.

Pilar Pendalaman Pasar Keuangan

The Pillar of Financial Market Deepening



Hingga akhir 2014, tercatat sebanyak 67 bank telah menggunakan perjanjian Mini MRA. Pascapenyusunan standardisasi perjanjian Repo antarbank tersebut, rata-rata bulanan transaksi Repo meningkat secara signifikan, yaitu dari Rp2,81 triliun pada Januari-November 2013 menjadi Rp12,8 triliun pada 2014.

At the end of 2014, 67 banks had joined the Mini MRA. After the implementation of such interbank repo agreement standardisation, average monthly repo transactions soared from Rp2.81 trillion in January-November 2013 to Rp12.8 trillion in 2014.

Kebijakan Bank Indonesia untuk mempublikasikan kurs referensi spot Rupiah/USD, yaitu *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada Mei 2013 telah mendapat respons positif dari pelaku pasar di luar negeri, khususnya di Singapura.

Bank Indonesia policy to begin publishing the Rupiah/USD spot reference rate, namely the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) in May 2013 received a favourable response from international market players, especially in Singapore.

Pada 18 Februari 2014, *ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd.* (ABS Co) dan *The Singapore Foreign Exchange Markets Committee* (SFEMC) merekomendasikan kepada pelaku pasar keuangan di Singapura untuk menggunakan JISDOR sebagai referensi harga sejak 28 Maret 2014. Penggunaan JISDOR sebagai referensi harga USD/IDR di pasar keuangan Singapura dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar keuangan internasional.

On 18th February 2014, ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co) and the Singapore Foreign Exchange Markets Committee (SFEMC) recommended JISDOR as the USD/IDR reference rate for financial market players in Singapore from 28th March 2014. The utilization of JISDOR as the USD/IDR reference rate in Singapore financial market will boost international financial market player confidence.

Dalam rangka mendukung akselerasi pendalaman pasar keuangan, pada 1 April 2014, Bank Indonesia menginisiasi pembentukan komite pasar keuangan (*Indonesia Foreign Exchange Market Committee* /IFEMC). IFEMC merupakan forum bagi pelaku pasar sekaligus merupakan mitra strategis bagi otoritas dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Untuk meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia, komite telah menyusun dan menetapkan *Financial Market Code of Conduct* (CoC) sebagai acuan bertransaksi di pasar keuangan.

To accelerate financial market deepening, Bank Indonesia initiated the Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) on 1st April 2014 as a forum for market players and a strategic partner for the relevant authorities. IFEMC is a forum prepared and published the Financial Market Code of Conduct (CoC) as a reference for transacting on financial markets in Indonesia.

Selanjutnya pada 26 Mei 2014, IFEMC menyerahkan secara simbolis CoC kepada Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, bertempat di Bank Indonesia, Jakarta. Bank Indonesia melanjutkan upaya stabilisasi nilai tukar yang didukung dengan upaya pendalaman pasar valas domestik.

Thereafter, on 26th May 2014, the IFEMC symbolically presented the Code of Conduct to the Governor of Bank Indonesia and Chairman of the Financial Services Authority (OJK) at Bank Indonesia head office in Jakarta. Bank Indonesia continued to stabilize the exchange rate which supported by domestic foreign exchange market deepening.

Upaya dilakukan dengan mendorong pelaku pasar untuk lebih banyak melakukan transaksi valas dengan tenor yang lebih panjang dari transaksi spot, yaitu transaksi derivatif, baik dalam bentuk transaksi *forward* atau transaksi *swap*. Upaya ini dilakukan melalui relaksasi dan harmonisasi peraturan, dengan tetap meminimalkan spekulasi pada transaksi valas. Yang termasuk dalam penyempurnaan ketentuan itu, antara lain perluasan dan penyederhanaan cakupan *underlying* transaksi valas terhadap Rupiah dan penegasan penyelesaian secara *netting* pada transaksi valas terhadap Rupiah. Penyempurnaan juga terkait pengaturan batas nilai nominal (*threshold*) transaksi valas terhadap Rupiah dan pengaturan transaksi lindung nilai (*hedging*), baik *hedging* kepada bank atau *hedging* kepada Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan tersebut sekaligus menyederhanakan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam enam PBI menjadi hanya tiga PBI.

The effort was conducted to encourage market players to favour longer-term transactions than spot transactions, for example through derivatives such as forwards and swaps transaction. Incentives involved relaxing and harmonising regulation, including expanding and simplifying the scope of underlying transactions against the Rupiah and confirming netting settlement. Refinements were also made to the threshold of foreign exchange transactions against the Rupiah and regulations on hedging activity at banks and at Bank Indonesia. The refinements also consolidated the provisions previously contained in six Bank Indonesia regulations into just three regulations.

Untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar, bauran kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dengan kebijakan di bidang pengelolaan lalu lintas devisa. Kebijakan tersebut fokus pada upaya memperkuat ketahanan (resiliensi) perekonomian domestik terhadap risiko tingginya utang luar negeri di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Supporting exchange rate stabilisation measures, the BI policy mix was also reinforced by cross-border capital flow management, focusing on efforts to strengthen domestic economic resilience to the high risks associated with spiralling external debt amidst growing global uncertainty. The policy was issued considering the relatively balanced structure of the domestic foreign exchange market as well as supply and demand.

Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan struktur pasar valas domestik dan *supply-demand* di pasar valas domestik yang relatif berimbang selama 2014. Selama 2014, pasokan valas meningkat, terutama dari sektor swasta dalam bentuk utang luar negeri

The policy was issued considering the relatively balanced structure of the domestic foreign exchange market as well as supply and demand. Supply picked up throughout 2014, primarily in the form of private external debt, which soared as a result of strong domestic demand to support

dilatarbelakangi oleh permintaan domestik yang tinggi untuk menopang aktivitas ekonomi dalam negeri di tengah melimpahnya dana asing. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, jumlah ULN sektor swasta meningkat tiga kali lipat, yaitu dari USD50,6 miliar pada akhir 2005 menjadi USD161,3 miliar pada Oktober 2014. Posisi ULN swasta ini mencapai 54,8% dari total ULN Indonesia yang sebesar USD294,5 miliar. Dari ULN swasta itu, sekitar 30% merupakan ULN jangka pendek.

economic activity and abundant foreign funds. Over the past decade, private external debt has rocketed three-fold from US$50.6 billion at the end of 2005 to US$161.3 billion in October 2014, accounting for 54.8% of total external debt standing at US$294.5 billion. Of the total, around 30% is short-term external debt.

Peningkatan ULN swasta berjangka pendek memunculkan beberapa risiko, seperti risiko nilai tukar (*currency risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko beban utang yang berlebihan (*overleverage risk*). Risiko itu semakin tinggi sejalan dengan prospek perekonomian global yang masih diliputi berbagai ketidakpastian. Untuk memitigasi berbagai risiko itu, Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN . Bank Indonesia juga menerbitkan aturan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi non-bank.

The rapid growth of short-term private external debt triggered a number of risks, such as currency risk, liquidity risk and overleverage risk. Furthermore, risks became more intense in line with the global economic outlook that was shrouded in uncertainty. To mitigate the various risks, Bank Indonesia issued regulations concerning prudential principles to manage external debt. Further, Bank Indonesia also issued legislation on the application of prudential principles to manage nonbank external debt.

Penerbitan ketentuan-ketentuan itu untuk menyelaraskan dengan praktik umum kegiatan usaha, mendorong pembangunan infrastruktur, dan menyelaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang akan dikeluarkan. Sementara itu, untuk lebih mendukung struktur pasokan valas yang lebih kuat, Bank Indonesia melanjutkan relaksasi ketentuan pembelian valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan bukti (*underlying*) dokumen penjualan valas yang pernah dilakukan sebelumnya.

Promulgation of the regulations in line with general business practices, supported infrastructure development and laid the foundation for future Bank Indonesia regulations as required. Meanwhile, Bank Indonesia also relaxed regulations on purchasing foreign exchange by exporters using export earnings to strengthen the supply structure. The policy aimed to facilitate exporters purchasing foreign exchange using existing underlying documents.

Pemerintah menetapkan sasaran inflasi untuk Tahun 2016, 2017, dan 2018 setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sasaran inflasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahun adalah sebesar 4,0%; 4,0%; dan 3,5% dengan deviasi ± 1%. Guna mencapai sasaran inflasi tersebut, Bank Indonesia menempuh berbagai langkah penguatan koordinasi pengendalian inflasi untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi penawaran agar ekspektasi inflasi terjaga pada kisaran sasaran yang telah ditetapkan.

The government determined inflation target for 2016, 2017, and 2018 after coordination with Bank Indonesia. The inflation target that has been set for each concecutive year are 4.05%; 4.0%; and 3.5% with ± 1% deviation tolerance. In order to achieve the targeted inflation, Bank Indonesia took steps to strengthen the coordination of inflation control to manage supply side inflationary pressures so that inflation expectations remain within the targeted range.

Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi ditempuh melalui penguatan peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Daerah (TPI dan TPID). Koordinasi diarahkan untuk dapat menghasilkan rumusan program dan rekomendasi kebijakan, guna memitigasi potensi risiko inflasi dari kenaikan harga pangan dan energi, serta berbagai kebijakan *administered prices* yang ditempuh Pemerintah.

Coordination of inflation control policy is pursued by strengthening the role of the Inflation Monitoring and Control Teams both at the national and the regional level (TPI dan TPID). Coordination is geared to produce a formulation of programs and policy recommendations, to mitigate potential inflation risks from rising food and energy prices, as well as administered prices set by the government.

Koordinasi pengendalian inflasi melalui peran TPID semakin intensif dengan bertambahnya daerah yang membentuk TPID. Sampai akhir 2014, jumlah keseluruhan TPID mencapai 359 (33 TPID provinsi dan 326 TPID kabupaten/kota). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 136 TPID (33 TPID Provinsi dan 103 TPID kabupaten/kota).

The coordination of inflation control through TPID role became increasingly more intensive with a wider range of areas forming new TPID. Until the end of 2014, the overall number of TPID had reached 359 (33 provincial TPID and 326 district/city TPID). The number was increased from the previous year which was recorded at 136 TPID (33 TPID provincial TPID and 103 districts/cities TPID).

Sebagai bentuk koordinasi yang lebih solid antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID mendorong penguatan peran daerah untuk mampu memprakirakan dinamika makroekonomi ke depan. Guna mendukung hal itu, Bank Indonesia mengembangkan model makro ekonomi regional (Regional Macroeconomic Model Bank Indonesia – REMBI). Model tersebut dibentuk untuk mendukung peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah dalam melakukan peran penasihat (*advisory*) kepada Pemerintah daerah. Hingga saat ini, model tersebut telah dibentuk di 18 provinsi dari sebelumnya 9 model berbasis wilayah yang dikembangkan pada 2013.

As a more solid form of coordination between the central and local governments, the National Working Group on TPID emphasized expanding the role of local regions to project future macroeconomic dynamics. To that end, Bank Indonesia developed the Regional Macroeconomic Model of Bank Indonesia (REMBI). This model aimed to support the advisory role played by Bank Indonesia Representative Offices to local government. The model is currently used in 18 provinces compared to just 9 regions under the old model developed in 2013.

Untuk mengatasi adanya kesenjangan produksi pangan antardaerah, Pokjanas TPID mendorong kerja sama antardaerah (KAD), seperti dilaksanakan oleh Jakarta dan Lampung. Secara berkelanjutan, TPID mengkinikan peta surplus defisit komoditas pangan di daerah masing-masing. Hal ini sebagai basis mewujudkan perdagangan antaradaerah yang mengalami surplus dan daerah yang mengalami defisit.

To address the disparity in food production between the regions, the TPID National Working Group (Pokjanas) encouraged inter-regional cooperation (KAD), as it was implemented by Jakarta and Lampung. Accordingly, TPIDs continuously update the food commodity surplus/deficit map in each respective region. It became the basis to realize inter-regional trade between deficit and surplus regions.

Untuk mengatasi berbagai risiko inflasi ke depan, TPID juga diimbau untuk menyusun *roadmap* TPID guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengendalian inflasi. Penguatan peran TPID digambarkan dalam *roadmap* yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu (i) *Building Awareness* yang telah dilakukan sejak 2005-2015, (ii) *Fostering Commitment* yang dilakukan pada 2014-2019, dan (iii) *Mature* yang direncanakan terwujud pada 2020.

To mitigate future inflation risks, TPID were also advised to prepare a roadmap in order to optimize their role in controlling inflation. Enhancing the role of TPID is described in a roadmap consisting of three stages, namely (i) Building Awareness since 2005 to 2015, (ii) Fostering Commitment in 2014-2019, and (iii) Mature that is planned to materialize in 2020.

Mempertimbangkan karakteristik inflasi di daerah didominasi sisi penawaran, *awareness* Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pengendalian inflasi daerah perlu ditingkatkan untuk mendorong terbentuknya komitmen dan dukungan terhadap TPID. Selain pengendalian inflasi, TPID juga menganalisis sumber utama permasalahan struktural daerah dan mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan selama ini oleh otoritas terkait.

Considering that the inflation characteristics in the region is dominated by the supply side, the Local Government awareness of the importance of inflation control in the regions need to be improved to encourage the commitment and support for TPID. In addition to controlling inflation, TPID also analyzes the major source of structural problems in the region and evaluate the effectiveness of the efforts made so far by the relevant authorities.

Upaya pengendalian inflasi daerah tahun 2015 dimulai dengan mendorong komitmen agar: (i) program TPID menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Daerah, (ii) melakukan identifikasi skala prioritas program reformasi struktural di setiap daerah, serta (iii) merumuskan rencana kebijakan dalam bentuk program kerja yang lebih rinci. Pada 2016, akan dilakukan: (i) identifikasi program kerja Pemerintah Pusat, (ii) implementasi program strategis daerah, serta (iii) penentuan target yang akan dicapai. Pada 2017 akan dilakukan evaluasi awal terhadap implementasi kegiatan pada 2016 dan tindak lanjut penyempurnaan program guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Efforts to control regional inflation in 2015 began with encouraging commitment for: (i) TPID program to be part of Local Government work plan, (ii) identifying priority scale of structural reform programs in each region, and (iii) formulate a policy plan in the form of a more detailed work programs. Programs that will be implemented in 2016 are: (i) identification of the Central Government work program, (ii) implementation of the regional strategic programs, and (iii) determination of targets to be achieved. In 2017, there will be an initial evaluation of the activities implemented in 2016 and follow-up improvement programs in order to achieve the agreed-upon targets.

Pada akhir periode pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah, akan dilakukan evaluasi akhir guna menilai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui implementasi *roadmap* TPID tersebut, diharapkan sasaran inflasi 3,5±1% pada 2018 akan tercapai.

At the end of the period of regional inflation control program implementation, there will be a final evaluation in order to assess the effectiveness and accountability of program implementation. With the strengthening of inflation control coordination through TPID roadmap implementation, the targeted inflation of 3.5 ± 1% in 2018 will be achieved.

Untuk mengendalikan inflasi dan mendukung ketahanan pangan, Bank Indonesia juga menyinergikan program pengembangan UMKM melalui program klaster Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk komoditas tertentu penyumbang inflasi dan komoditas berorientasi ekspor, yang lazim disebut sebagai klaster ketahanan pangan.

Furthermore, Bank Indonesia also synergized MSME development through cluster programs to control inflations and support food resilience for certain items in the inflation basket and export-oriented commodities, commonly referred to as food resilience clusters.

Selain menjaga kesinambungan pasokan, pembentukan harga yang selama ini belum efisien karena adanya *asymmetric information* diatasi dengan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di berbagai daerah. Pengembangan PIHPS tersebut membuka akses informasi harga yang lebih luas kepada publik dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkontribusi terhadap stabilisasi harga.

In addition to maintaining supply continuity, the problem of inefficient price setting due to asymmetric information was overcome through the establishment of a Strategic Food Price Information Centre (PIHPS) in various regions. The development of PIHPS has broadened public access to price information and provided the opportunity for local regions to contribute to price stability.

Meredam Gejolak Nilai Tukar Rupiah

Alleviating Exchange Rate Shocks

Di tengah tekanan yang cukup kuat terhadap nilai tukar, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu menjaga stabilitas dan arah nilai tukar yang sejalan dengan fundamental perekonomian. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik.

Amidst intense pressures on the exchange rate, the policies of Bank Indonesia and the Government successfully maintained the stability and value of Rupiah in line with economic fundamentals. Notwithstanding, a number of external and domestic challenges were encountered.

Di sisi eksternal, tekanan nilai tukar tidak terlepas dari pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan penurunan harga komoditas global. Hal ini berdampak pada defisit transaksi berjalan yang masih berlanjut. Dari sisi domestik, nilai Rupiah yang terdepresiasi dipicu oleh hasil Pemilu legislatif yang kurang konklusif akibat tidak adanya partai politik yang menguasai suara secara dominan. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014, tekanan depresiasi Rupiah berlanjut seiring dengan ekspektasi inflasi yang meningkat.

From an external perspective, exchange rate pressures emanated from the protracted global economic recovery and sliding international commodity prices, which perpetuated the current account deficit. From a domestic perspective, an inconclusive legislative election triggered Rupiah depreciation. Furthermore, depreciatory pressures persisted in line with higher inflation expectations after the subsidised fuel price hike in November 2014.

Tekanan Rupiah yang cukup kuat mampu dimitigasi oleh bauran kebijakan dan upaya stabilisasi oleh Bank Indonesia. Terkait nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh dua kebijakan intervensi *(dual intervention)* di pasar valas dan pasar Rupiah melalui Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan intervensi di pasar valas dilakukan secara terukur untuk meminimalkan volatilitas Rupiah. Sementara itu, intervensi di pasar SBN dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di sistem perbankan dan mendukung stabilitas di pasar SBN.

The policy mix and stabilisation policy of Bank Indonesia successfully mitigated intense pressures on the Rupiah. Bank Indonesia implemented dual intervention policy on the Rupiah and foreign exchange markets through tradeable government securities (SBN). Intervention policy was measured on the foreign exchange market to minimise Rupiah volatility. Meanwhile, intervention on the SBN market aimed to maintain adequate liquidity in the banking system and bolster SBN market stability.

Kebijakan intervensi itu mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan demikian, keyakinan pasar untuk berinvestasi di Indonesia meningkat. Kebijakan itu juga untuk memitigasi terjadinya pembalikan aliran modal asing pada saat terjadi kejutan dalam perekonomian.

Dual intervention policy effectively maintained exchange rate stability. Consequently, market confidence to invest in Indonesia increased. The policy also successfully mitigated the possibility of a sudden capital reversal in the event of shocks in the economy.

Untuk meningkatkan pendalaman pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia. Guna memperkuat ketahanan (resiliensi) perekonomian domestik, Bank Indonesia juga memperkuat jaring pengaman keuangan internasional berupa penambahan bantalan cadangan devisa sebagai *second line of defense* dalam menghadapi guncangan eksternal.

To deepen the domestic foreign exchange market, Bank Indonesia issued regulation on restrictions of Rupiah transactions and foreign currency lending by banks. The regulation provided greater flexibility for market players to hedge against economic activity in Indonesia, particularly hedging against investment income. Strengthening domestic economic resilience, Bank Indonesia also reinforced the global financial safety net through an additional foreign exchange reserve buffer as a second line of defence to external shocks.



Pada 2014, Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan bank sentral dan otoritas lain, baik dalam tataran regional maupun bilateral. Peningkatan kerjasama regional diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas Chiang-Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Penguatan itu dilakukan melalui peningkatan nilai komitmen kerjasama dari USD120 miliar menjadi USD240 miliar, penyediaan fasilitas *Precautionary Line* untuk pencegahan krisis, dan peningkatan IMF *delinked portion*. Penguatan kapasitas CMIM ini ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman keuangan regional bagi negara anggota ASEAN+3 yang akan atau sedang menghadapi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek.

In 2014, Bank Indonesia further enhanced regional and multilateral cooperation with other central banks and authorities. Regional cooperation was embodied in the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), for which the commitment was doubled from US$120 billion to US$240 billion, a Precautionary Line was made available to prevent a crisis and the IMF delinked portion was increased. CMIM capacity was expanded to enhance the regional financial safety net for ASEAN+3 members facing problems associated with the balance of payments and inadequate short-term liquidity.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengelola nilai tukar yang sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah sehingga tidak menimbulkan tekanan pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Langkah stabilisasi itu diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendorong proses penyesuaian eksternal dan memperhatikan kecukupan cadangan devisa.

Moving forward, Bank Indonesia will continued to manage the exchange rate in line with its fundamental value by mitigating Rupiah volatility and therefore avoiding general pressures on economic stability. Stabilisation policy is expected to stimulate growth while promoting economic rebalancing and maintaining foreign exchange reserves.

MEMANTAPKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada 2014 tetap terjaga di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian global dan perlambatan ekonomi nasional. Kondisi ini tercermin dari membaiknya risiko sektor keuangan seperti penurunan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) dari 1,10 pada tahun sebelumnya menjadi 0,78.

Kondisi perbankan yang memiliki pangsa aset terbesar dalam sistem keuangan turut mendukung terjaganya SSK. Hal itu ditopang oleh permodalan yang masih cukup kuat dan likuiditas perbankan yang cenderung membaik. Permodalan industri perbankan (Capital Adequacy Ratio/ CAR) mencapai 19,4% jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Hal ini diperkirakan masih mampu menyerap risiko-risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Kinerja positif ini juga didukung oleh fungsi intermediasi perbankan yang masih baik meskipun melambat.

Sejalan dengan perlambatan ekonomi, pertumbuhan kredit industri perbankan turut melambat menjadi 11,58% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 21,60%. Non-performing loan (NPL) juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 1,77% menjadi 2,16%. Dilihat dari sisi sektor ekonomi, tingginya rasio NPL tersebut terutama berasal dari sektor pengangkutan, listrik, pertambangan, dan perdagangan dengan pertumbuhan masing-masing 1,25%; 1,17%; 1,01%; dan 0,67% (yoy). Namun demikian, perbankan masih mampu menjaga risiko kredit berada cukup jauh di bawah batas aman yaitu 5%, sehingga belum membahayakan kondisi stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi risiko likuiditas, kondisi likuiditas membaik, terutama didorong oleh ekspansi rekening Pemerintah pada akhir tahun dan adanya aliran masuk uang kartal. Dari sisi sumber pendanaan utama perbankan di Indonesia, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh melambat menjadi 12,3% dari 13,6%. Pada akhir 2014, total DPK perbankan nasional tercatat sebesar Rp4.111,4 triliun dibandingkan posisi akhir 2013 sebesar Rp3.663,9 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang melambat. Hal ini berindikasi pada pergeseran dana masyarakat kepada simpanan jangka panjang sejalan dengan kenaikan suku bunga simpanan, terutama suku bunga simpanan deposito 1 bulan sebesar 8,58% dari tahun sebelumnya sebesar 7,92%.

Di sektor keuangan, tekanan terhadap SSK sempat terjadi di pasar obligasi. Hal ini dipicu karena meningkatnya *yield* SBN dan CDS pada kuartal III-2014, namun dapat kembali pulih pada akhir 2014. Kinerja pasar saham domestik tercatat menurun terimbas faktor risiko eksternal dan domestik yang kembali meningkat. Meskipun menurun, kinerja pasar saham Indonesia masih lebih baik dibandingkan bursa

STRENGTHENING FINANCIAL SYSTEM STABILITY

Financial system stability was maintained throughout 2014 despite widespread global uncertainty and domestic economic moderation. Consequently, risk eased in the financial sector, as reflected by a decline in the Financial System Stability Index from 1.10 to 0.78.

Conditions in the banking sector, which dominates asset share of the financial system, also underpinned financial system stability, bolstered by a solid capital base and increasing liquidity. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the banking industry reached 19.4%, which is well above the threshold. This condition indicated the ability of the banking sector to absorb risks, such as credit, liquidity and market risks. Further, a sound bank intermediation function, despite decelerating, also stimulated such positive performance.

In line with national economic moderation, bank credit growth slowed from 21.60% in 2013 to 11.58% (yoy) in 2014. Non-performing loans (NPL) also experienced a significant bump from 1.77% to 2.16%. From the economic sector, most non-performing loans (NPL) originated from the transportation sector, utilities, mining and trade with growth of 1.25%, 1.17%, 1.01% and 0.67% (yoy) respectively. Nevertheless, the banking industry still able to mitigate credit risk at a level well below the 5% threshold, thereby avoiding any threat to financial system stability.

In terms of liquidity risk, expansive government financial operations towards the end of the year along with a net inflow of currency improved liquidity conditions. As the primary source of bank funding in Indonesia, third-party funds decelerated to 12.3% from 13.6%. At yearend 2014, total third-party funds were recorded at Rp4,111.4 trillion compared to Rp3,663.9 trillion in 2013. Slower growth of demand deposits and savings accounts drove the growth of third-party funds in 2014. This condition indicated a shift in the public's funds to long-term deposits in line with higher deposit rates, especially 1 month term deposits, which increased to 8.58% from 7.92% in the previous year.

In the financial sector, pressures on financial system stability befell the bond market due to higher yields of tradeable government securities (SBN) and credit default swaps (CDS) in Q3/2014, however the condition subsequently recovered towards the end of the year. Domestic stock market performance moderated due to increasing domestic and global risk factors. Despite declining, the stock market in

Pergeseran dana masyarakat kepada simpanan jangka panjang sejalan dengan kenaikan suku bunga simpanan, terutama suku bunga simpanan deposito 1 bulan.

Shifting of public fund from long-term savingwas aligned to the increase of deposit interest rates, specifically one month depository rates.





Bank Indonesia terus berupaya untuk mencegah timbulnya risiko yang lebih luas dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan asesmen dan surveillance makroprudensial.

Bank Indonesia continuously strives to prevent systemic risks that could undermine financial system stability through assessments and macroprudential surveillance.



saham di negara kawasan, seperti China dan Thailand. Pada akhir 2014, IHSG yang terkoreksi mampu berbalik arah (*rebound*) dan menahan kejatuhan yang lebih dalam.

Indonesia still out-performed regional stock markets, such as China and Thailand. At yearend 2014, the corrected JCI rebounded and prevented a further decline.

Dalam rangka mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia terus berupaya untuk mencegah timbulnya risiko yang lebih luas dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan asesmen dan *surveillance* makroprudensial. Kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

Bank Indonesia continuously strives to prevent systemic risks that could undermine financial system stability through assessments and macroprudential surveillance. Macroprudential policy aims to prevent and reduce systemic risks, nurture a balanced and quality intermediation function as well as enhance financial system efficiency and broaden financial access.

Kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan yang ditempuh Bank Indonesia pada 2014 juga mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, stabilitas sistem keuangan Indonesia masih mendapat tantangan dari proses pemulihan ekonomi global dan penyesuaian keseimbangan ekonomi domestik.

Bank Indonesia policy to maintain financial system stability in 2014 also considered the global and domestic economic developments of previous years. In general, financial system stability in Indonesia continued to confront challenges due to the prolonged global economic recovery and domestic economic rebalancing.

Beberapa isu global 2014 seperti ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global, rencana kebijakan pengurangan stimulus *(tappering off)* oleh Federal Reserve AS, dan perkembangan harga komoditas dunia, telah mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi pada 2014 dipandang masih rentan terhadap koreksi dengan pertumbuhan kredit yang dianggap masih terlalu tinggi yaitu selalu berada pada level di atas 20% selama beberapa tahun terakhir.

A number of global issues impacted national economic performance, including the uncertain pace of the global recovery, the tapering off by the Federal Reserve's and tumbling international commodity prices. Robust growth in Indonesia during 2014, however, was considered vulnerable to a correction due to excessive credit growth at a level persistently of 20% for the past several years.

Bank Indonesia senantiasa menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan guna menciptakan struktur ekonomi menjadi lebih seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Terkait hal itu, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial dengan mengarahkan pertumbuhan kredit pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama 2014, Bank Indonesia melakukan beberapa kebijakan meliputi penetapan dasar hukum pengaturan dan *framework* pengawasan makroprudensial, dan *review* terhadap ketentuan yang pernah dikeluarkan antara lain *review* kebijakan *loan-to-value* (LTV) *ratio*.

Bank Indonesia continuously maintains economic and financial system stability in order to create a more balanced, sound and sustainable economic structure. To that end, Bank Indonesia directed macroprudential policy towards credit growth lower than previous year. Throughout 2014, Bank Indonesia instituted a number of policies, including a legal regulatory framework as well as a macroprudential supervision framework, and reviewed existing regulations, such as the loan-to-value policy.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pengawasan makroprudensial . Pengaturan ini bertujuan agar fungsi dan kegiatan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri maupun sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan kelompok masyarakat.

Bank Indonesia also issued a regulation concerning macroprudential surveillance to support task implementation that preserves financial system stability. The regulation was designed to ensure the function and operating activities of banks and other financial institutions sustainably support macroeconomic activity, industry and system stability, as well as balance amongst economic sectors and the public.

Bank Indonesia mengatur instrumen makroprudensial yang dipergunakan untuk beberapa tujuan.

a. Mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, seperti *loan to value ratio* (LTV) dan giro wajib minimum berdasarkan *loan to deposit ratio* (LDR);
b. Membatasi konsentrasi eksposur *(exposure concentration)*, seperti pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu;
c. Memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan;
d. Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan, antara lain melalui pengaturan terhadap persyaratan transparansi suku bunga kredit, rasio kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD);
e. Memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah pengaruh *(leverage)* yang berlebihan, seperti biaya tambahan modal *(capital surcharge)* bagi bank-bank besar dan kontersiklis penyangga modal *(Countercyclical Capital Buffer/CCB)*.

Bank Indonesia regulates the macroprudential instruments used to a number of ends as follows:

a. Manage the intermediation function and control credit risk, for instance the loan-to-value (LTV) policy and the LDR-based reserve requirement (RR);
b. Restrict exposure concentration, for example the restrictions on lending to certain sectors;
c. Strengthen financial infrastructure resilience;
d. Enhance financial system efficiency and financial access, amongst others through the transparent publication of prime lending rates, the application of a MSME credit allocation ratio and the development of Digital Financial Services.
e. Strengthen capital resilience and prevent excessive leverage, for instance through a capital surcharge imposed on large banks and a Countercyclical Capital Buffer (CCB).

Selain memiliki kewenangan pengaturan makroprudensial, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi bank atau lembaga keuangan lainnya secara makroprudensial. Hal ini dilakukan melalui pengawasan *(surveillance)* dengan memantau perkembangan kondisi sistem keuangan, mengidentifikasi dan menganalisis risiko sistem keuangan, serta melakukan penilaian risiko sistem keuangan.

In addition to macroprudential regulation, Bank Indonesia is also authorised to oversee banks and other financial institutions at the macroprudential level. This supervision was conducted through macroprudential surveillance, involving monitoring financial system performance, identifying and analysing financial system risks as well as assessing financial system risks.

Pengawasan makroprudensial lebih memfokuskan kepada sumber risiko sistemik dan pemicunya melalui pemantauan terhadap komponen-komponen di dalam sistem keuangan. Komponen itu antara lain terdiri atas lembaga keuangan (diutamakan pada bank-bank besar dan konglomerasinya), pasar keuangan, sektor riil (korporasi dan rumah tangga), infrastruktur sistem keuangan, dan kondisi makroekonomi.

Macroprudential surveillance places greater emphasis on sources of systemic risk and their triggers by monitoring components of the financial system, including financial institutions (primarily big banks and conglomerates), financial markets, the real sector (corporations and households), financial system infrastructure and macroeconomic conditions.

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kebijakan penguatan aspek hukum dan aspek teknis dalam penerapan ketentuan, Bank Indonesia melakukan *review* terhadap pelaksanaan kebijakan LTV. Sejalan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan pada 2012, Bank Indonesia mengevaluasi ketentuan itu untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kebijakan LTV. Sasaran kebijakan LTV yaitu mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko, meningkatkan upaya perlindungan hak-hak konsumen, dan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

Bank Indonesia reviewed the implementation of LTV policy in order to enhance the effective attainment of policy targets, namely the legal and technical aspects of regulation implementation. Bank Indonesia evaluated the LTV regulation promulgated in 2012 in order to enhance target efficacy of LTV. The target of LTV policy is to improve the quality of risk management, enhance consumer protection and help low-income earners meet their housing needs.

Ketentuan LTV ditujukan untuk memastikan kesesuaian antara proses bisnis dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Bank Indonesia menerima masukan dari pemangku kepentingan di antaranya larangan kredit inden yang telah berdampak pada turunnya kredit perumahan secara signifikan.

Furthermore, LTV policy aims to ensure conformity between business process and prevailing regulations. To that end, Bank Indonesia welcomed stakeholder input, including banning partially prepaid housing loans, which significantly reduced property loan growth.

Bank Indonesia menerapkan beberapa persyaratan untuk pengecualian yang secara garis besar sebagai berikut. Pertama, fasilitas kredit merupakan fasilitas pertama bagi debitur. Kedua, adanya perjanjian mengenai kesanggupan penyelesaian properti sesuai yang diperjanjikan. Ketiga, adanya jaminan *corporate guarantee* dari pengembang kepada bank. Keempat, pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan.

Bank Indonesia included a number of exemptions in the regulation as follows: (i) first-time mortgage borrowers; (ii) agreement between bank and developers to complete the property; (iii) a corporate guarantee from the developer to the bank; and (iv) disbursement of funds conducted in stages pursuant to construction progress.

Selain itu, rencana penyempurnaan ketentuan LTV meliputi aspek kewenangan pemeriksaan oleh Bank Indonesia. Kewenangan tersebut terkait pengenaan sanksi dan hal-hal teknis lainnya seperti persyaratan jaminan untuk kredit inden, penyediaan fasilitas pinjaman uang muka perumahan, dan perlakuan terhadap kredit/pembiayaan yang dialihkan ke bank lain *(take over)*.

The plan to refine LTV policy also involved Bank Indonesia's authority to conduct inspections, impose sanctions and other technical aspects such as guarantee requirements for indent credit, downpayment loans for mortgage and loan takeovers to other bank.

Bank Indonesia juga menyesuaikan ketentuan GWM-LDR. Langkah ini untuk mendukung likuiditas perbankan, mendorong kredit perbankan, dan memperdalam pasar keuangan. Penyesuaian ketentuan GWM-LDR meliputi perluasan definisi LDR yang difokuskan pada komponen deposit atau dana pihak ketiga (DPK) dengan memasukkan surat berharga yang diterbitkan oleh bank atau dibeli bank. Pemberian insentif untuk mendorong pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, juga menjadi bagian dari penyesuaian ketentuan GWM-LDR.

Bank Indonesia also adjusted its LDR-based reserve requirement (RR) to support bank liquidity, stimulate bank credit growth and deepen the financial markets. Bank Indonesia broadened the LDR definition that focuses on deposits to include bank-issued securities. The incentive was provided to nurture productive sector financing, particularly of MSMEs, as part of the refinements.

Sesuai amanat undang-undang, Bank Indonesia ikut berperan di dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam implementasinya, Bank Indonesia turut mendukung stabilitas sistem keuangan melalui peranannya sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, dan otoritas makroprudensial. Untuk melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pursuant to its mandate, Bank Indonesia remained active in the Financial System Stability Coordination Forum (FSSCF) in order to maintain financial system stability. In its implementation, Bank Indonesia preserves financial system stability through its role as the monetary authority, payment system authority and macroprudential authority. Bank Indonesia applies a macroprudential regulation and supervision policy framework to implement macroprudential regulation and surveillance.

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan dengan beberapa tujuan. Pertama, mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

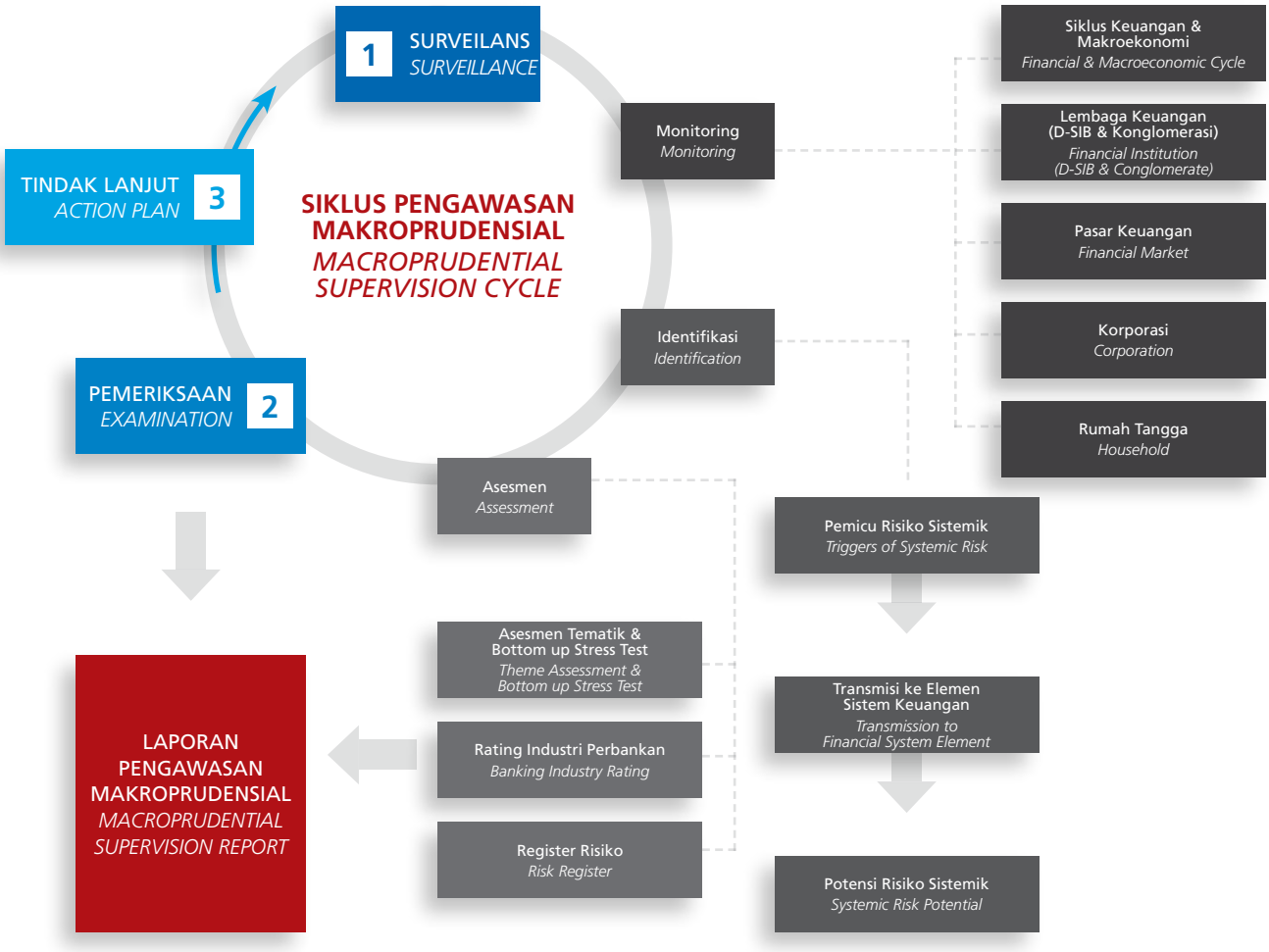
BI macroprudential surveillance of the financial system has a number of objectives. First is to prevent and reduce systemic risk. Second is to nurture a balanced and quality intermediation function. Third is to enhance financial system efficiency and broaden financial access.

Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemeriksaan makroprudensial. Surveilans dilakukan dalam rangka monitoring, identifikasi, dan asesmen potensi risiko sistemik. Sebagai bagian dari pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia juga dapat memeriksa bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank.

Macroprudential supervision includes macroprudential surveillance and inspections. Surveillance is achieved by monitoring, identifying and assessing potential systemic risks. As one element of macroprudential surveillance, Bank Indonesia also inspects banks and other financial institutions linked to banks.

Siklus Pengawasan Makroprudensial

Macroprudential Supervision Cycle



Siklus pengawasan makroprudensial mencakup tahapan kegiatan pengawasan secara langsung *(onsite)* maupun tidak langsung *(offsite)*. Kerangka pengawasan makroprudensial itu lebih merupakan kerangka berpikir dan tidak mencerminkan rangkaian kegiatan yang bersifat urutan (sekuensial). Kelengkapan rangkaian kegiatan dalam pengawasan makroprudensial akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat pelaksanaan.

Kegiatan surveilans terdiri atas beberapa kegiatan pokok, yaitu monitoring sistem keuangan, identifikasi, dan asesmen terhadap potensi risiko sistemik. Monitoring risiko sistemik dilakukan melalui proses pemantauan terhadap ketidakseimbangan sumber dana dan penggunaan dana *(financial imbalance)* di sektor keuangan, rumah tangga, korporasi, dan interaksi antarsektor tersebut.

The macroprudential surveillance cycle includes onsite examinations and offsite inspections. Furthermore, macroprudential surveillance represents more of a thought framework rather than a sequential series of activities. Consequently, macroprudential surveillance activities are complemented according to the conditions and requirements at implementation.

Surveillance consists of a number of core activities, namely monitoring the financial system, as well as identifying and assessing potential systemic risks. Systemic risks are monitored for financial imbalances in the financial sector, household sector, corporate sector as well as interactions between the sectors.

Fokus awal monitoring terhadap sektor keuangan adalah industri perbankan sebagai industri yang mendominasi sektor keuangan. Khususnya, perbankan dengan kategori *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), baik secara individual maupun agregasi. Cakupan monitoring D-SIB yaitu faktor internal *(endogenous)* dan faktor eksternal *(exogenous)*. Faktor internal D-SIB berupa risiko utama seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, termasuk pengaruhnya terhadap ketahanan/resiliensi dan efisiensi. Sedangkan faktor eksternal berupa kondisi makro ekonomi dan pasar keuangan.

The primary focus of financial sector monitoring is the banking industry, which dominates the financial sector. More specifically, domestic systemically important banks (D-SIB) are the main targets of financial sector monitoring, individually and as an aggregate. The scope of monitoring D-SIBs includes internal (endogenous) and eternal factors (exogenous). Internal factors comprise of credit, market and liquidity risks, including their influence on resilience and efficiency. External factors, however, include macroeconomic and financial market conditions.

Pemantauan awal terhadap sektor rumah tangga dan korporasi difokuskan pada penyusunan neraca keuangan. Hal ini untuk melihat kesenjangan finansial *(financial gap)* antara sumber dana dan penggunaan dananya. Sedangkan identifikasi terhadap potensi risiko sistemik sistem keuangan mencakup identifikasi pemicu risiko sistemik. Hasil identifikasi itu kemudian ditransmisikan ke dalam elemen sistem keuangan seperti sektor keuangan, sektor rumah tangga, dan sektor korporasi. Identifikasi potensi risiko sistemik juga dilakukan terhadap ketidakseimbangan keuangan *(financial imbalances)*, perilaku yang berlebihan *(risk taking behavior)*, dan efek rambatan *(contagion)* dari risiko individual bank *(idiosyncratic risk)*.

Preliminary monitoring of the household and corporate sectors focused on preparing balance sheets in order to reveal financial gaps between funding sources and utilisation. Meanwhile, the identification of potential systemic risks included identifying the triggers, which are subsequently transmitted to elements of the financial system, such as the financial sector, household sector and corporate sector. The identification of systemic risks also extends to financial imbalances, risk-taking behaviour and contagion from idiosyncratic risk.

Asesmen terhadap potensi risiko sistemik dilakukan dengan menganalisis kondisi masing-masing D-SIB yang bersumber dari isu-isu makroprudensial, termasuk melalui *stress test*. *Stress test* yang dilakukan bersifat *bottom up* dengan menggunakan data individual institusi keuangan. Selanjutnya, hasil *stress test* individual dianalisis untuk menilai pengaruh perubahan faktor goncangan *(shock)* terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. *Stress test* juga mempertimbangkan dampak dari siklus keuangan *(financial cycle)* terhadap tingkat ketahanan bank.

Potential systemic risks are assessed through analysis of macroprudential issues at respective D-SIBs, including using stress tests. Bottom-up stress tests utilise data from individual financial institutions. The results of the stress tests are analysed to assess the impact of shocks on the overall financial system. Stress tests also take into consideration the influence of the financial cycle on bank resilience.

Proses asesmen juga dilakukan terhadap pilar-pilar yang mendukung terciptanya sistem keuangan yang efisien, efektif, dan mampu bertahan terhadap gejolak internal maupun eksternal. Pilar-pilar itu mencakup indikator utama D-SIB yang dikelompokkan berdasarkan aspek ketahanan *(resilience)*, keseimbangan *(balance)*, dan efisiensi *(efficiency)*. Penilaian terhadap ketiga aspek itu dituangkan dalam suatu peringkat industri perbankan *(Banking Industry Rating)*, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana mitigasi risiko *(risk register)*.

The pillars that support the creation of an efficient and effective financial system resilient to internal and external shocks were also assessed, including the leading indicators of D-SIBs based on resilience, balance and efficiency. Assessments of the three aforementioned aspects are amalgamated into a Banking Industry Rating, which is used as the basis of the risk register.

Untuk mendalami hasil asesmen risiko sistemik, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan makroprudensial berupa pemeriksaan tematik maupun kepatuhan terhadap ketentuan makroprudensial. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap D-SIB dan/atau bank lainnya yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Bila dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank.

To enrich the results of systemic risk assessment, Bank Indonesia is also authorised to conduct macroprudential inspections in the form of thematic examinations and compliance audits to macroprudential regulations. D-SIBs and other banks with potential systemic impact are subject to examinations. If risk exposure is considered significant or systemic, then the parent company, affiliated companies and subsidiaries of the bank are also subject to examinations.

Sebagai tindak lanjut pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi dan/atau sanksi kepada bank. Hasil pengawasan makroprudensial juga dapat menjadi bahan rekomendasi dalam perumusan kebijakan Bank Indonesia. Bila hasilnya ada keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, Bank Indonesia akan menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap stabilitas sistem keuangan.

As a follow-up action of macroprudential surveillance, Bank Indonesia is authorised to propose recommendations and/or impose sanctions on banks. The results of macroprudential surveillance can also be used as inputs for policymaking at Bank Indonesia or other financial system stability authorities as required.

Bank Indonesia juga mempersiapkan penyesuaian kebijakan makroprudensial guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan. Penyesuaian kebijakan ini sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas. Kebijakan ini antara lain meliputi perluasan cakupan definisi simpanan dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR dalam kebijakan GWM-LDR. Bank Indonesia juga menyiapkan pemberian insentif untuk mendorong penyaluran kredit UMKM.

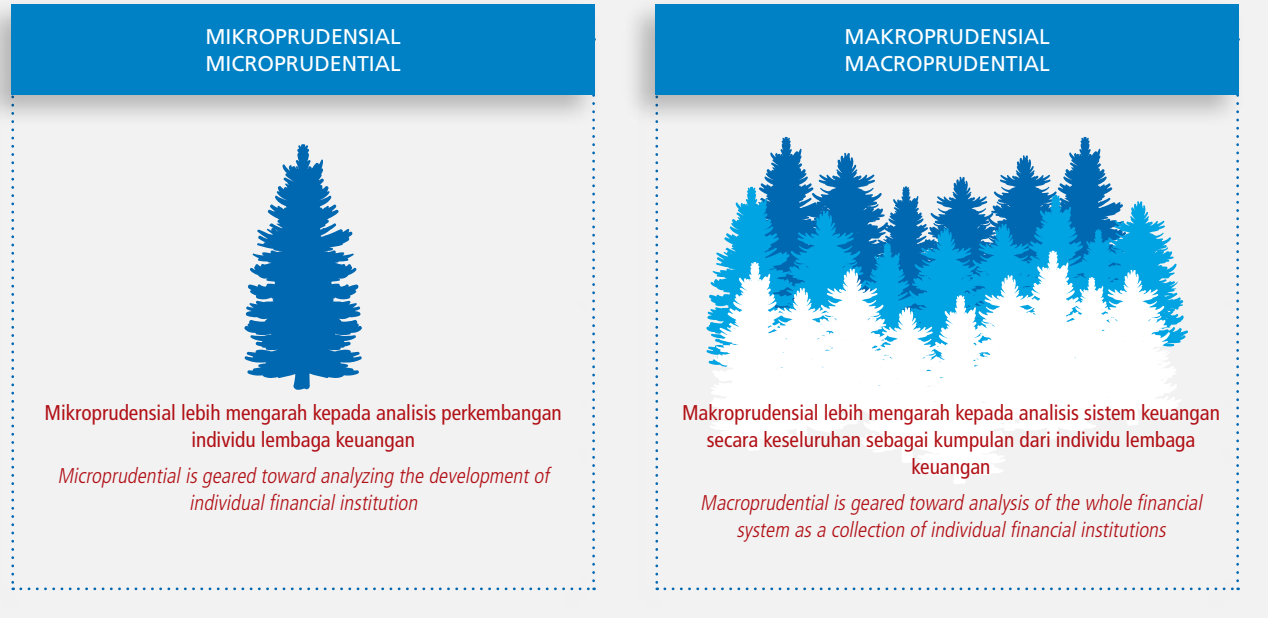
Bank Indonesia is also prepared to adjust macroprudential policy to expand funding sources for banks and simultaneously deepen financial markets and encourage lending to priority productive sectors. Macroprudential policy was adjusted in 2014 by broadening the definition of deposits to include bank-issued securities when calculating LDR for the reserve requirement. Bank Indonesia also provided incentives to stimulate MSME credit growth.

Pada 2014, Bank Indonesia telah menyusun pedoman pelaksanaan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia juga mengevaluasi beberapa ketentuan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk *review* atas kelengkapan aturan pelaksanaannya. Langkah itu mengacu pada perkembangan terkini di industri keuangan dan memperhatikan sinergi dalam pelaksanaan kewenangan terkait makroprudensial-mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

In 2014, Bank Indonesia prepared implementation guidelines for macroprudential regulation and supervision. Bank Indonesia also evaluated a number of existing regulations, including reviewing the comprehensiveness of implementation guidelines.

Gambar Perbedaan antara Makroprudensial vs. Mikroprudensial

Picture. The Differences Between Macroprudential vs. Microprudential



Selama satu dekade terakhir, Bank Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Hal ini tercermin dengan diakuinya operasi perbankan yang dapat dilakukan secara bagi hasil dalam Undang-Undang Perbankan hingga pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Over the past decade, Bank Indonesia has played an increasingly important role in terms of sharia financial development, as reflected by the recognition of profit sharing banking operations in banking legislation promulgated through the Islamic Banking Act.

Bank Indonesia senantiasa konsisten mendampingi proses pengembangan perbankan syariah hingga pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK pada Desember 2013. Pada saat pengalihan, pangsa (*share*) perbankan syariah telah mencapai 4,7%.

Bank Indonesia was a persistent presence throughout the sharia banking development process until handover of the banking regulation and supervision function to the Financial Services Authority (OJK) in December 2013. At the time of the handover, the share of the Islamic banking industry in Indonesia was 4.7% of the total.

Dengan adanya pengalihan tersebut, Bank Indonesia tetap berperan aktif dalam pengembangan keuangan syariah. Sampai dengan triwulan-IV 2014, Bank Indonesia tercatat sebagai anggota pada beberapa forum internasional di bidang keuangan syariah sebagai berikut:

a. *Islamic Financial Services Board* (IFSB), merupakan *international standard setting body* yang mengeluarkan standar prudensial dan *guiding principles* untuk industri keuangan syariah secara global. Bank Indonesia adalah salah satu negara anggota IFSB yang terlibat dalam penyusunan *Core Principles for Islamic Finance Regulation* (CPIFR) dan anggota satuan tugas *(task force)* untuk *Prudential Structural Indicator for Islamic Financial Institutions* (PSIFIs). Gubernur Bank Indonesia adalah *chairman* IFSB untuk 2015.

Despite the handover, Bank Indonesia remained actively involved with sharia financial development. In Q4/2014, Bank Indonesia was still a member of several international forums concerned with sharia finance as follows:

a. Islamic Financial Services Board (IFSB) is an international standard setting body that issues prudential standards and guiding principles for the global Islamic financial industry. Bank Indonesia is an IFSB member involved with preparing the Core Principles for Islamic Finance Regulation (CPIFR) and is a member of the Task Force for Prudential Structural Indicators for Islamic Financial Institutions (PSIFIs). The Governor of Bank Indonesia was appointed IFSB Chairman for 2015.

b. *International Islamic Liquidity Management Corporation* (IILM); merupakan institusi yang didirikan oleh bank sentral, otoritas moneter, dan lembaga multilateral. Institusi ini didirikan untuk mengeluarkan *cross border short term* sukuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen likuiditas perbankan syariah. Bank Indonesia adalah salah satu negara anggota yang terlibat dalam *technical committee* untuk *Risk Management Standard Operating Procedures*.
c. *International Islamic Financial Market* (IIFM); merupakan *international standard setting body* yang mengeluarkan standar terkait pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Bank Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang terlibat dalam memberikan penilaian dan masukan (input) terkait dokumentasi dan standardisasi produk pasar modal syariah dan pasar uang syariah.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan pengembangan ekonomi syariah dengan menginisiasi penyusunan standardisasi zakat internasional pada 27-28 Agustus 2014. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank* (IRTI-IDB), telah dilakukan pertemuan antarotoritas zakat di beberapa negara *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) seperti Malaysia, Singapura, Pakistan, Indonesia, Sudan, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia.

Pertemuan itu telah ditindaklanjuti pada pertemuan ke-2 pada November 2014 dalam serangkaian kegiatan pertemuan tahunan OIC 2014 di Surabaya. Pertemuan dilakukan bersamaan dengan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) yang berlangsung pada 3-9 November 2014 di Surabaya.

Tujuan dari penyusunan standardisasi zakat adalah untuk meningkatkan tata kelola pengawasan zakat yang efektif. *Zakat core principles* diharapkan menjadi pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan, atau perangkat infrastruktur lainnya. Inisiatif Bank Indonesia ini terutama mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Turut memelihara kestabilan sistem keuangan. Selama ini, zakat dianggap sebagai sektor sosial yang berada di luar sektor keuangan. Padahal, zakat dapat digunakan untuk jaring pengaman keuangan saat negara terkena krisis ekonomi dan keuangan. Zakat juga dapat berfungsi untuk memecah konsentrasi penyaluran dana pada golongan tertentu.
2. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Pemanfaatan zakat untuk sektor produktif memberikan dampak bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan basis produksi. Peningkatan basis produksi akan meningkatkan pasokan produk sehingga harga komoditas dapat ditekan dan inflasi terjaga.

b. International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) is an institution established by central banks, monetary authorities and multilateral institutions to create and issue cross-border short-term sukuk to meet the liquidity management needs of the Islamic banking industry. Bank Indonesia is a member of the technical committee for Risk Management Standard Operating Procedures.

c. International Islamic Financial Market (IIFM) is an international standard setting body for the sharia capital market and sharia money market. Bank Indonesia is involved with assessments and input regarding sharia capital market and sharia money market product standardisation and documentation.

Additionally, Bank Indonesia further advanced sharia economic development by initiating international zakat standardisation on 27-28th August 2014. In conjunction with the National Amil Zakat Board (Baznas) and the Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank (IRTI-IDB), Bank Indonesia organises zakat inter-authority meetings in a number of countries under the auspices of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), such as Malaysia, Singapore, Pakistan, Indonesia, Sudan, South Africa and Saudi Arabia.

The second such meeting was held in November 2014 as part of the 2014 OIC Annual Meeting in Surabaya. The meeting was organised in conjunction with the Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) held on 3-9th November 2014, also in Surabaya.

The goal of zakat standardisation is to enhance the effective governance of zakat supervision. Accordingly, the zakat core principles are general guidelines for zakat regulators and managers in the formulation of rules and other infrastructure. This Bank Indonesia initiative aims to:

1. Maintain financial system stability. Hitherto, zakat has been considered a social sector operating outside of the financial sector. Zakat could be utilised, however, as a financial safety net when a country is beset by a financial and economic crisis. Zakat could also prevent a concentration of disbursed funds to certain groups.

2. Achieve and maintain Rupiah stability. The utilisation of zakat for productive sectors underpins financial system stability and simultaneously expands the production base, which increases product supply and therefore suppresses commodity prices and mitigates inflation.

Tugas Bank Indonesia sebagai Otoritas Makroprudensial

Bank Indonesia Task as the Macroprudential Authority

Pascaberalihnya tugas mengatur dan mengawasi perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan pada awal 2014, Bank Indonesia secara mandat memiliki tugas dan wewenang baru di bidang makroprudensial. Untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan suatu kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan.

After the handover of the banking regulation and supervision function to the Financial Services Authority (OJK) at the beginning of 2014, Bank Indonesia was given a new macroprudential mandate. Nurturing financial system stability, Bank Indonesia applies a macroprudential policy framework to prevent and mitigate systemic risk in the financial system.

Mandat sebagai otoritas makroprudensial diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

Bank Indonesia's mandate as the macroprudential authority was consolidated through a Bank Indonesia regulation concerning macroprudential regulation and supervision, designed to prevent and reduce systemic risk, promote a balanced and quality intermediation function as well as enhance financial system efficiency and broaden financial access.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen makroprudensial yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan kemungkinan terjadinya risiko sistemik pada sistem keuangan secara keseluruhan. Ketentuan makroprudensial yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain ketentuan Giro Wajib Minimum *Loan to Deposit* (GWM-LDR) dan ketentuan *Loan to Value* (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan *down payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB).

Supporting its mandate, Bank Indonesia utilises a number of macroprudential policy instruments to analyse problems and the possibility of systemic risk in the financial system as a whole. Existing macroprudential regulations issued by Bank Indonesia include the LDR-based reserve requirement (RR) as well as LTV policy for housing loans and downpayments on automotive loans.

Selain melakukan tugas pengaturan di bidang makroprudensial, Bank Indonesia secara rutin melakukan surveilans *(surveillance)* sistem keuangan dan pemeriksaan (*on-site* apabila diperlukan). Surveilans ditujukan untuk memantau perkembangan kondisi sistem keuangan komponen-komponen di dalam sistem keuangan. Komponen-komponen itu antara lain lembaga keuangan, pasar keuangan, sektor riil (korporasi dan rumah tangga), infrastruktur sistem keuangan, dan kondisi makroekonomi dengan fokus pada faktor-faktor yang merupakan sumber risiko sistemik dan pemicunya.

In addition to macroprudential regulations, Bank Indonesia also routinely conducts financial system surveillance and onsite examinations as required. Surveillance aims to monitor the performance of financial system components, including financial institutions, the capital market, real sector (corporations and households) and financial system infrastructure as well as macroeconomic conditions with a focus on systemic risk and its triggers.

Hasil pemantauan selanjutnya digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan *(imbalance)* dan kerawanan *(vulnerabilities)* yang memiliki dampak sistemik. Untuk meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan *(on-site)* terhadap bank besar dan/atau bank lainnya yang memiliki eksposur umum *(common exposure)* yang berpotensi memberikan dampak sistemik.

Monitoring is used to detect systemic imbalances and vulnerabilities. To ensure systemic risk originates from bank business activity, Bank Indonesia conducts onsite examinations of big banks and/or other banks with common exposure and potential systemic impact.

Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan bukan hanya domain Bank Indonesia. Koordinasi dan kerjasama Bank Indonesia dengan otoritas lain merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan informasi/materi hasil Surveilans/asesmen dan untuk memperkuat tindakan dalam pelaksanaan pencegahan maupun penanganan krisis.

The function of maintaining financial system stability is not merely the domain of Bank Indonesia. Bank Indonesia also coordinates and cooperates with other authorities to meet the requirement for information/material from surveillance/assessments and to strengthen the implementation of crisis prevention and resolution.

Terkait dengan pencegahan dan penanganan krisis, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK diperkuat dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) FKSSK pada 3 Desember 2014 antara anggota FKSSK (Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kemenkeu). Pengoptimalan pelaksanaan tugas Bank Indonesia itu memerlukan landasan hukum (legal basis) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing institusi dan koordinasi lintas sektor/otoritas dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Concerning crisis prevention and resolution, coordination between Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) was strengthened through a Memorandum of Understanding (MoU) signed on 3rd December 2014 by members of the Financial System Stability Coordination Forum (BI, OJK, LPS and MoF). Optimising Bank Indonesia task implementation required a solid legal basis in the form of laws and regulations that clarify the respective jurisdictions of each authority and outline cross-sector/authority coordination to prevent and resolve crises.

MENJAGA SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai sebagai infrastruktur keuangan merupakan faktor penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan moneter. Selain itu, sistem ini sangat penting untuk memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

Selama 2014, sistem pembayaran menunjukkan kinerja positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya berbagai transaksi pembayaran dalam kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Nilai dan volume transaksi sistem pembayaran non-tunai meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2014, nilai transaksi pembayaran non-tunai meningkat sebesar 32,76%, sedangkan volume transaksinya tumbuh sebesar 18,88%. Peningkatan nilai transaksi ini terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi moneter, sedangkan peningkatan volume transaksi seiring dengan meningkatnya transaksi masyarakat melalui instrumen non-tunai.

MAINTAINING PAYMENT SYSTEM AND RUPIAH MANAGEMENT

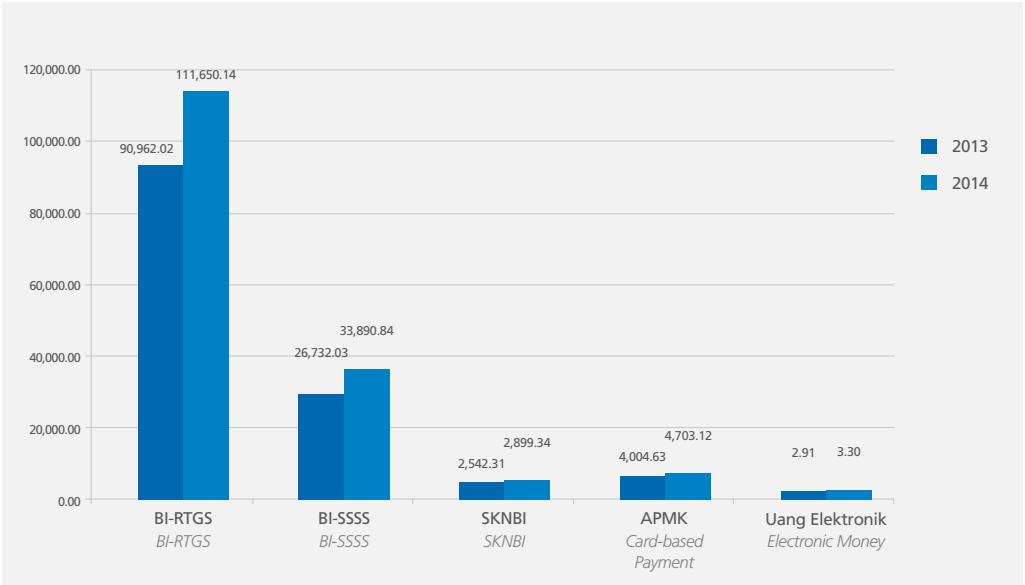
The noncash payment system as financial infrastructure is a crucial element of maintaining financial system and monetary stability and is necessary to facilitate economic activities.

The payment system performed soundly throughout 2014, as reflected by an increase in various payment transactions initiated by the public and corporate sector. Accordingly, noncash payment system transaction value and volume increased in 2014 on the previous year.

Noncash payment system transaction value increased 32.76% in 2014, with transaction volume achieving 18.88% growth. The increase in transaction value stemmed from monetary transactions, while volume increased due to greater public use of noncash payment instruments.

Grafik Nilai Transaksi Pembayaran

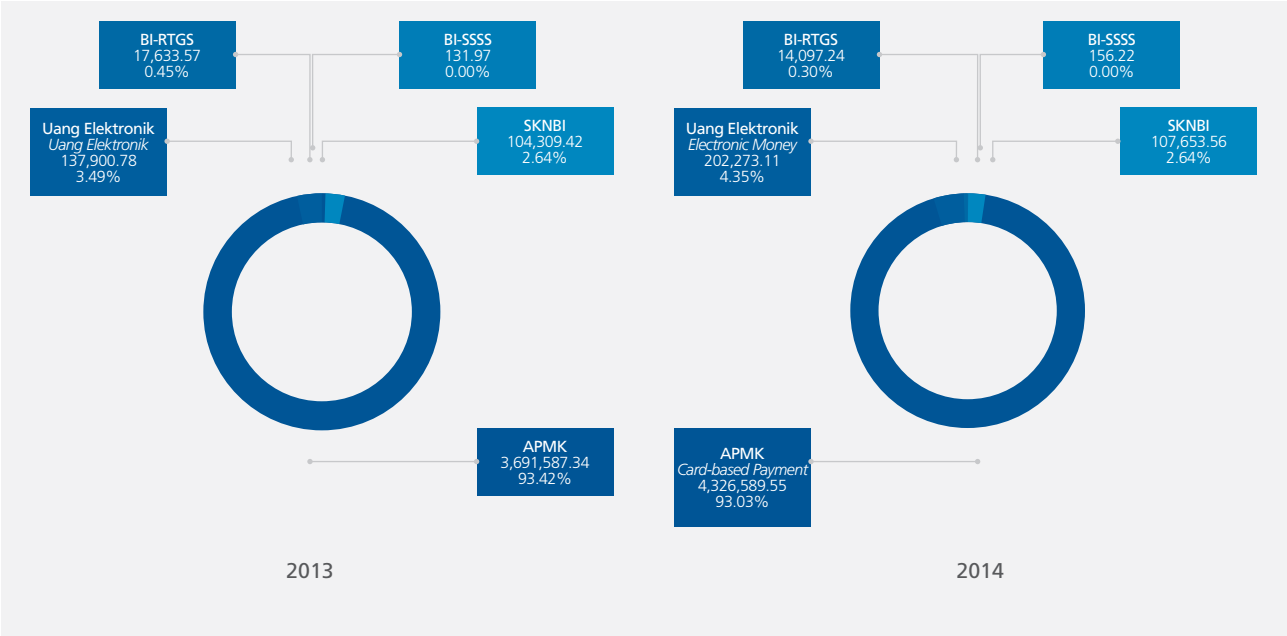
Graph. Payment Transaction Amount



Sumber data: EDW SP dan EDW LKPBU

Grafik Volume Transaksi Pembayaran

Graph. Payment Transaction Volume



Sumber data: EDW SP dan EDW LKPBU

Keandalan sistem pembayaran pada 2014 tetap terpelihara dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan *(availability)* sistem pembayaran sesuai tingkat layanan *(service level)* yang telah ditetapkan.

Payment system reliability was maintained throughout 2014, as reflected by payment system availability that remained in line with the predetermined service level.

Selama 2014, pengembangan terus dilakukan terhadap infrastruktur sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Langkah ini guna menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran.

Payment system infrastructure operated by Bank Indonesia was developed throughout 2014 in order to maintain and enhance payment system availability, security and efficiency.

Pengembangan infrastruktur dilakukan terhadap Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II telah memasuki tahap kegiatan uji coba aplikasi dan pelaksanaan tes integrasi sistem. Bank Indonesia juga menyiapkan peserta dari sisi bisnis melalui kegiatan *change management*, dan penyusunan ketentuan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem. Terkait SKNBI Generasi II, Bank Indonesia telah menyusun kajian pendukung, menyiapkan infrastruktur, dan mengembangkan aplikasi.

Infrastructure was developed for the Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system, Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) and Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI). Generation II BI-RTGS and BI-SSSS development entered the application trials phase along with system integration testing. Bank Indonesia also prepared participants on the business side through change management and by formulating regulations as a legal basis for system operation. Concerning the Generation II SKNBI, Bank Indonesia has compiled supporting studies, prepared the infrastructure and developed applications.

Bank Indonesia terus mendorong keseimbangan pemanfaatan infrastruktur layanan sistem pembayaran nasional non-tunai. Untuk itu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur bahwa transfer kredit atas nama nasabah melalui sistem BI-RTGS hanya untuk transaksi yang lebih besar dari Rp100 juta per transaksi.

Bank Indonesia strives towards the balanced utilisation of national noncash payment system services infrastructure. To that end, Bank Indonesia issued policy to limit credit transfers at the behest of a customer through the Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system to transactions of more than Rp100 million.

Di samping itu, Bank Indonesia bersama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempersiapkan pelaksanaan setelmen transaksi pasar modal di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS. Mekanisme ini dilakukan dalam rangka mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas pada sistem pembayaran.

Bank Indonesia, in conjunction with the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and Financial Services Authority (OJK), is currently preparing capital market transaction settlement at Bank Indonesia through the Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system to mitigate credit and liquidity risks in the payment system.

Salah satu kebijakan Bank Indonesia di industri sistem pembayaran ritel adalah mengatasi inefisiensi dan mengurangi risiko penyelesaian transaksi melalui inisiatif pengembangan National Payment Gateway (NPG). Pada tahap awal, penguatan infrastruktur dilakukan melalui pengembangan *domestic switching* dengan mengintegrasikan berbagai sistem *switching* yang ada di Indonesia.

One BI policy for the retail payment system industry to overcome inefficiencies and reduce settlement risk is the National Payment Gateway (NPG). At the preliminary stage, infrastructure was strengthened through domestic switching by integrating the various switching systems present in Indonesia.

Dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga mengembangkan industri uang elektronik dan memperluas penggunaan instrumen pembayaran non-tunai. Penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan uang elektronik dilakukan antara lain melalui pengaturan biaya yang dapat dikenakan kepada pengguna uang elektronik, termasuk keharusan melaksanakan transparansi dalam pengenaan biaya. Aspek lain yang disempurnakan adalah kerjasama yang dapat dilakukan oleh penerbit uang elektronik dengan agen Layanan Keuangan Digital (LKD).

Paying due regard to consumer protection, Bank Indonesia is also developing an electronic money industry and expanding the utilisation of noncash payment instruments. Electronic money policy was refined by regulating the costs that can be charged to users of electronic money, including mandatory transparency. Cooperation was also enhanced between issuers of electronic money and agents of Digital Financial Services (DFS).

Selain itu, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai penyesuaian jangka waktu implementasi PIN Online 6 digit untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Hal tersebut untuk memetakan kesiapan industri dan masyarakat agar penerbit dan *acquirer* mempunyai waktu untuk mempersiapkan implementasi PIN Online 6 digit secara komprehensif. Implementasinya akan melihat kesiapan infrastruktur maupun kesiapan pengguna kartu kredit dan *merchant* yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.

Bank Indonesia adjusted the implementation schedule for credit cards using online 6-digit PIN in order to ensure the industry and public are prepared and that issuers and acquirers have sufficient time to comprehensively implement the regulation. Implementation will take into consideration infrastructure preparedness as well as the readiness of credit card users and merchants where card payments will be accepted.

Sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Langkah ini untuk memperkuat penyelenggara KUPVA bukan bank, antara lain dalam aspek tata kelola. Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing. Penyempurnaan ketentuan ini juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan sistem pembayaran.

As the regulator of money changing activities, Bank Indonesia amended its existing regulation to strengthen nonbank moneychangers in terms of governance, amongst others. The regulation was issued to create a sound business climate that supports moneychanger industry growth and to improve the efficacy of payment system supervision.



Dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga mengembangkan industri uang elektronik dan memperluas penggunaan *instrument* pembayaran non-tunai.

Paying due regard to consumer protection, Bank Indonesia is also developing an electronic money industry and expanding the utilisation of noncash payment instruments.



Salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen jasa pembayaran. Ketentuan ini memuat beberapa prinsip perlakuan yang adil pada konsumen.

Bank Indonesia also promulgated a regulation on consumer protection in payment system services, containing principles on the fair treatment of consumers



Salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Ketentuan itu memuat beberapa prinsip perlakuan yang adil pada konsumen. Ketentuan ini juga mengamanatkan kepada penyelenggara untuk memberikan jasa yang akurat dan aman. Selain itu, penyelenggara harus memberikan informasi secara transparan, melindungi data konsumen, dan menyelesaikan pengaduan secara efektif.

Bank Indonesia also promulgated a regulation on consumer protection in payment system services, containing principles on the fair treatment of consumers and requiring operators to provide accurate and safe services. Furthermore, operators are required to provide information transparently, protect consumer data and effectively resolve complaints.

Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran sebagai panduan bagi penyelenggara sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia melakukan berbagai sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerbitan ketentuan tersebut.

Bank Indonesia also issued a regulation concerning implementation procedures for consumer protection in the payment system as guidelines for payment system operators. Additionally, Bank Indonesia also undertook various socialisation and education activities associated with the new regulation.

Secara aktif, Bank Indonesia senantiasa mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Selama 2014, Bank Indonesia mengawasi secara langsung kepatuhan penerbit kartu kredit terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan kartu kredit yang harus sudah diterapkan selambat-lambatnya 31 Desember 2014.

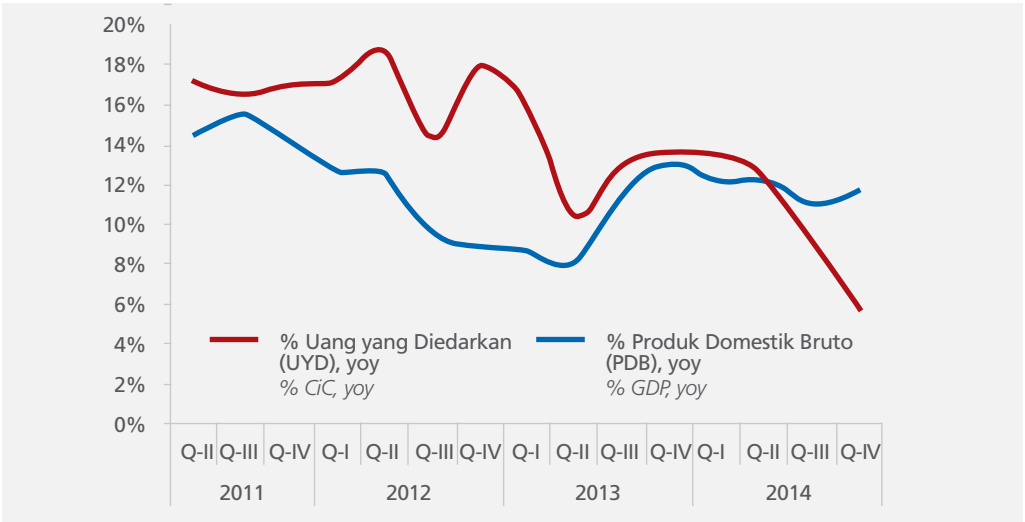
Bank Indonesia actively oversees payment system operators. In 2014, Bank Indonesia directly examined credit card issuer compliance to restrictions on cardholders that were to be enforced no later than 31st December 2014.

Secara tahunan, posisi uang yang diedarkan (UYD) pada akhir Desember 2014 tercatat sebesar Rp528,5 triliun atau tumbuh sebesar 5,7% dibandingkan posisi 2013 sebesar Rp500,0 triliun. Pertumbuhan UYD pada 2014 lebih rendah dibandingkan 2013 yang tumbuh sebesar 13,7%. Perlambatan pertumbuhan UYD ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2014.

On an annualised basis, the position of currency in circulation in December 2014 was recorded at Rp528.5 trillion, growing 5.7% on the position in 2013 at Rp500.0 trillion when 13.7% growth was reported. Slower currency in circulation growth was attributed to domestic economic moderation in 2014.

Grafik Pertumbuhan PDB dan UYD

Graph. Growth of Gross Domestic Product and Currency in Circulation



Di bidang pengelolaan uang, Bank Indonesia mengemban misi untuk menjaga ketersediaan uang yang berkualitas dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan tepat waktu. Sepanjang 2014, Bank Indonesia berhasil menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat melalui perbankan. Pemenuhan itu termasuk saat permintaan uang meningkat secara signifikan pada periode Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, periode Natal, dan Tahun Baru.

In terms of currency management, Bank Indonesia is committed to its mission of maintaining timely currency supply that is fit for circulation of a sufficient amount in appropriate denominations. Bank Indonesia successfully met the public requirement for currency through the banking industry in 2014, including the significant spikes in demand during Ramadan, Eid-ul-Fitr, Christmas and New Year.

Bank Indonesia senantiasa menyediakan UYD untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan menjaga kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Pemenuhan kecukupan uang juga telah memberi kontribusi penting bagi kinerja sektor perbankan dalam menyediakan uang kartal bagi nasabahnya.

Bank Indonesia continuously maintains currency in circulation to support government policy and economic activity. Satisfying the requirement for currency also provided an important contribution to banking sector performance in terms of providing currency to the banks' customers.

Kebijakan umum pengelolaan uang Rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar. Pertama, ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Kedua, distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal. Ketiga, layanan kas yang prima.

Rupiah currency management aims to achieve three pillars as follows: (i) quality and trusted Rupiah currency availability; (ii) secure and optimal currency management and distribution; and (iii) premium cash services.

Untuk mencapai pilar pertama, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Penanggulangan pemalsuan uang Rupiah dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) dan Kepolisian Republik Indonesia. Bank Indonesia juga mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar dapat mengenali ciri keaslian uang Rupiah (Cikur) dan memperlakukan uang Rupiah dengan baik.

Towards attainment of the first pillar, Bank Indonesia coordinates closely with the Government in terms of planning and printing Rupiah currency as well as the destruction of old coins and banknotes pursuant to the Currency Act. Furthermore, Bank Indonesia also collaborates with the Coordination Board for the Eradication of Counterfeit Rupiah (Botasupal) and the national police in order to combat counterfeit Rupiah banknotes. Bank Indonesia also took to the streets through public socialisation and education activities to familiarise local communities with genuine Rupiah banknotes and correct handling techniques.

Sesuai amanat Pasal 42 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000, dengan ciri umum sebagaimana diatur undang-undang tersebut. Pengeluaran uang tersebut dilakukan bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2014.

In accordance with Article 42 of the Currency Act (No. 7 of 2011), Bank Indonesia issued a new series of Rp100,000 denomination Rupiah banknotes on Indonesian Independence Day, 17th August 2014.

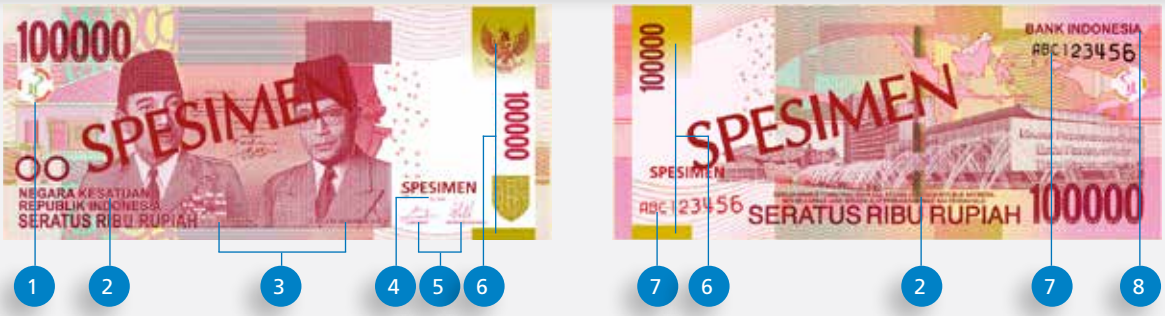
Gambar Uang Kertas Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2014

Picture. Paper Currency in Denomination of Rp100.000 Year Emissions of 2014

Desain Uang / *Currency Design* Rp100.000 TE 2004



Desain Uang / *Currency Design* Rp100.000 TE 2014



1. Perubahan desain *see through* register/rectoverso
2. Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Perubahan penulisan nama dan gelar pahlawan (sesuai Keputusan Presiden)
4. Perubahan lokasi Tahun Emisi dan Tahun Cetak
5. Perubahan penandatangan (GBI dan Menteri Keuangan)
6. Penambahan blok warna
7. Perubahan warna pada nomor seri
8. Perubahan ukuran huruf pada frasa Bank Indonesia

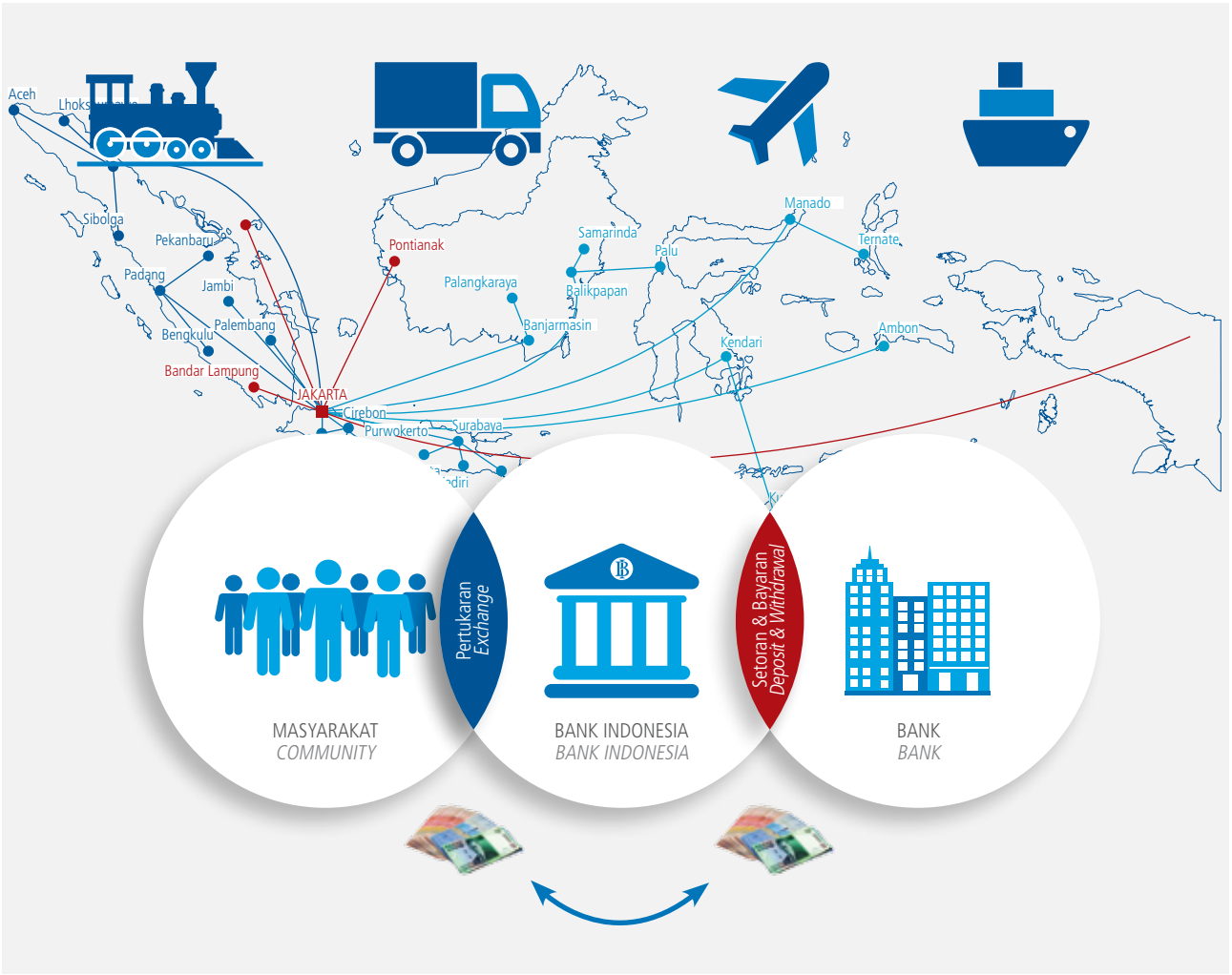
1. *Design changes see through register/rectoverso*
2. *The United Republic of Indonesia phrase*
3. *Changes in writing the names and heroic title (according to President Decree)*
4. *Changes in the location of Year Emissions and Year Printing*
5. *Signatures changes (BI Governor and Ministry of Finance)*
6. *Additional color blocks*
7. *Serial numbers color changes*
8. *Changes in the font size of Bank Indonesia phrase*

Secara umum, tidak terdapat perubahan signifikan pada desain uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 dengan pecahan yang sama Tahun Emisi 2004. Perbedaan utama dikenali dari frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada bagian muka dan belakang uang. Perbedaan lainnya adalah pihak yang menandatangani uang dari sebelumnya Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

In general, the design of the new Rp100,000 Rupiah banknote differed little from the old series issued in 2004. The most striking difference was the inclusion of the phrase Negara Kesatuan Republik Indonesia (The Unitary State of the Republic of Indonesia) on the back and front of the banknote. Another notable change was to the signatories on the note, changed from the Governor and Deputy Governor of Bank Indonesia to the Governor of Bank Indonesia and Minister of Finance.

Gambar Layanan Kas Bank Indonesia

Picture. Bank Indonesia Cash Services



Dalam mencapai pilar kedua, Bank Indonesia bekerja sama dengan PT KAI, Pelni, dan PT Silkargo untuk mendistribusikan Rupiah ke seluruh wilayah NKRI melalui Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang menjalankan fungsi perkasan. Dalam proses distribusi, Bank Indonesia memperhatikan efektivitas penyimpanan uang di seluruh satuan kerja kas. Pencapaian pilar kedua ini didukung pula dengan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan pengolahan uang, baik di Bank Indonesia, perbankan, maupun di perusahaan *cash in transit*.

Untuk mencapai pilar ketiga, Bank Indonesia memberikan layanan kepada perbankan di seluruh kantor Bank Indonesia yang menjalankan fungsi perkasan. Selain itu, Bank Indonesia memberikan layanan kas keliling yang berlokasi di tempat-tempat keramaian seperti pasar, stasiun kereta api, dan pada kegiatan pameran.

In terms of the second pillar, Bank Indonesia cooperated with PT KAI (Indonesian Railways Co.), Pelni (the national shipping company of Indonesia) and PT Silkargo (a logistics company) to distribute Rupiah currency throughout the Indonesian archipelago using BI head office and representative offices to perform the cash function. Through the distribution process, Bank Indonesia monitors the efficacy of cash deposits at all cash work units. Attainment of the second pillar also relies on the effective application of currency management at Bank Indonesia, in the banking industry and cash-in-transit companies.

The third pillar is achieved through BI services provided to banks at all BI offices that operate a cash function. Furthermore, Bank Indonesia also provides extensive mobile cash services at crowded local places, such as markets, railway stations and exhibitions.

Layanan kas keliling juga diberikan di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau terdepan Indonesia. Untuk melayani daerah yang sulit atau belum terjangkau oleh layanan Bank Indonesia secara optimal, namun memiliki aktivitas ekonomi yang cukup, Bank Indonesia memperluas jangkauan layanan kas bekerja sama dengan perbankan setempat dengan membuka kas titipan.

Mobile cash services are also extended to border areas, remote regions and the outer islands. Serving hard-to-reach areas as well as regions lacking BI services but with nascent economic activity, Bank Indonesia expanded the reach of cash services through cooperation with local banks as cash custodians.

Dalam rangka layanan kas keliling di wilayah terpencil, perbatasan, dan pulau terdepan NKRI, pada Juni 2014, Bank Indonesia mengikuti ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (Bhakesra) IV. Wilayah yang dikunjungi adalah Pulau Buton, Pulau Obi, Sorong dan Pulau Waisei, Kepulauan Raja Ampat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan TNI-AL, dengan salah satu kegiatan pokok berupa penukaran uang Rupiah yang sudah tidak layak edar.

Supporting mobile cash services in remote and border areas as well as the outer islands, Bank Indonesia accompanied the Fourth Bhakesra Expedition in June 2014, visiting Buton Island, Obi Island, Sorong and Waisei Island as well as the Raja Ampat Islands. The expedition was organised by the Coordinating Ministry for People's Welfare in conjunction with the Indonesian Navy and one of the key activities was exchanging Rupiah currency unfit for circulation.

Kerja sama dengan perbankan dalam rangka pembukaan Kas Titipan telah dimulai sejak 1997, yaitu di Gunung Sitoli, Sibolga. Sampai dengan akhir 2014, Bank Indonesia telah membuka 30 unit kas titipan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI kecuali Pulau Jawa, bekerja sama dengan 12 bank umum dengan plafon Kas Titipan berkisar antara Rp40 miliar s.d. Rp300 miliar sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.

Cooperation with banks as cash custodians began in 1997 in Gunung Sitoli, Sibolga. At yearend 2014, Bank Indonesia had already opened 30 cash custodians spread throughout the Republic of Indonesia, excluding the island of Java, in collaboration with 12 commercial banks and a cash custodian ceiling of between Rp40 billion and Rp300 billion depending on local requirements.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pengelolaan uang Rupiah, terutama terkait distribusi, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada 1 September 2014, kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan nota kerja sama guna mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama ini mencakup tukar-menukar data dan atau informasi, pengamanan dan pengawalan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan SDM, dan sosialisasi.

Bank Indonesia also supports currency management, specifically distribution, through cooperation with the Indonesian Police. On 1st September 2014, a Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Bank Indonesia and the Indonesian Police to support task implementation and strengthen cooperation, covering the exchange of data and information, security and cash-in-transit escorts, supervision, law enforcement, enhancing human resources and socialisation activities.

Dalam rangka mendorong implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, sebagaimana diatur pada pasal 21 UU Mata Uang, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu kegiatan *focus group discussion*, seminar, penelitian, penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak terkait (Astindo, PHRI), dan koordinasi dengan Pemerintah. Upaya lainnya adalah penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) "Rupiah sebagai Lambang Kedaulatan Bangsa" pada media televisi lokal dan nasional.

Promoting Rupiah sovereignty within the Republic of Indonesia, Bank Indonesia undertook a number of initiatives pursuant to Article 21 of the Currency Act, namely focus group discussions, seminars, training, signing of MoUs with relevant parties (Astindo, PHRI) and government coordination. Bank Indonesia also ran public service advertisements themed "The Rupiah as a Symbol of National Sovereignty" on local and national television.

Membentuk Masyarakat Non-Tunai

Creating a Less Cash Society

Sebagian masyarakat perkotaan di Indonesia mulai terbiasa menggunakan uang elektronik untuk membayar parkir, tiket kereta api *commuter*, tiket bus Transjakarta, dan belanja di sejumlah toko. Dengan uang elektronik, masyarakat bisa langsung masuk stasiun tanpa harus antre membeli tiket dan menunggu uang kembalian. Kehadiran kartu elektronik jelas memudahkan kita bertransaksi.

It has become commonplace for those dwelling in cities to use electronic money when paying for parking, commuter railway tickets, Transjakarta bus tickets and shopping at various stores. Electronic money allows commuters to walk straight into the station without queuing for a ticket and change. Undoubtedly, the emergence of electronic money has made transactions more convenient.

Kehadiran uang elektronik itu merupakan langkah awal menuju masyarakat non-tunai (Less Cash Society/ LCS). Dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN, Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal pembayaran dengan uang elektronik. Di Indonesia, 99,4% pembayaran ritel masih mengandalkan uang tunai. Di Thailand, transaksi ritel dengan uang tunai sekitar 97,2%. Di Singapura, transaksi uang tunai hanya 55,5% dari total transaksi ritel.

The advent of electronic money is merely the first step towards a less cash society (LCS). In comparison to several other countries in the ASEAN region, however, Indonesia has been left well behind in terms of using electronic payments. In Indonesia, 99.4% of retail payments rely on cash. In Thailand, cash retail transactions account for around 97.2% but in Singapore, cash transactions account for just 55.5% of all retail transactions.

Melihat kenyataan itu, pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Selain menggandeng pelaku bisnis dan perbankan, Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Melalui kerjasama itu, Bank Indonesia yakin akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan instrumen tunai ke instrumen non-tunai dalam aktivitas ekonominya.

Addressing that fact, Bank Indonesia launched the National Noncash Movement (GNNT) on 14th August 2014. In addition to the involvement of the business community and banking sector, Bank Indonesia also signed Memorandums of Understanding (MoU) with the Coordinating Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance, Local Government and Provincial Government Associations throughout Indonesia. Consequently, Bank Indonesia perceives a large-scale shift in the public towards a propensity for noncash instruments.

Bank Indonesia juga mendorong penyelenggara sistem pembayaran lainnya untuk mengikuti langkah strategis ini. GNNT bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga Pemerintah agar menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam transaksi keuangan. Ke depan, transaksi non-tunai akan lebih mudah, aman, dan efisien. Bila komposisi pembayaran non-tunai meningkat, layanan perbankan Indonesia bisa bersaing dengan bank-bank di kawasan ini.

Bank Indonesia also encouraged other payment system operators to participate in the GNNT, intending to build awareness amongst the public, business community and government institutions concerning the use of noncash payments. Moving forward, noncash transactions will become increasingly convenient, secure and efficient. Furthermore, if the composition of noncash payments increases, banking services in Indonesia will be able to compete with other banks in the region.

Dengan transaksi elektronik, Indonesia juga bisa mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi dalam transaksi. Bank Indonesia berharap transaksi non-tunai menyebar hingga ke pelosok negeri, bukan hanya di toko-toko

Through electronic transactions, Indonesia could create greater transaction efficiency and accountability. Consequently, Bank Indonesia is eager for noncash transactions to proliferate to all corners of the country,

modern namun juga di warung-warung kecil. Pada prinsipnya, penggunaan uang elektronik bisa dilakukan di mana pun sepanjang tersedia infrastruktur telekomunikasi.

Bagi pelaku bisnis, penggunaan uang elektronik menjadikan pengelolaan keuangan lebih akuntabel. Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal, Bank Indonesia akan meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan infrastruktur sistem pembayaran.

Ke depan, Bank Indonesia akan menyusun sentralisasi pembayaran *utility bills* dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran Pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan terkoordinasi. Bank Indonesia juga akan mengembangkan integrasi Electronic Bill Presentment System dan integrasi layanan pembayaran antarjaringan pembayaran.

Untuk mendorong transaksi nontunai, Bank Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain pembentukan kawasan non-tunai di lingkungan kampus. Bank Indonesia juga mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai untuk layanan keuangan Pemerintah, pelayanan bantuan sosial Pemerintah, dan layanan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Hingga akhir 2014, kawasan non-tunai sudah terbentuk di sejumlah kampus di 10 kota. Kampus-kampus tersebut, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Negeri Makassar, IAIN Antasari, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, dan Institut Pertanian Bogor.

Untuk layanan keuangan Pemerintah, perluasan penggunaan instrumen nontunai diimplementasikan melalui *e-payment*. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk meningkatkan penggunaan transaksi nontunai dalam kegiatan pemrosesan dan penempatan TKI.

Penyaluran bantuan sosial Pemerintah kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan uang elektronik melalui agen Lembaga Keuangan Desa (LKD). Bank Indonesia juga mendukung program uji coba penyaluran bantuan Pemerintah di lima lokasi di Jakarta melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial, Bank Indonesia, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan instansi terkait lainnya.

not only in modern stores but also at little stalls. In principle, electronic money could be used anywhere that telecommunications infrastructure is available.

For merchants, electronic money represents a more accountable form of financial management. Additionally, Bank Indonesia will extend the electronification of payment transactions and infrastructure in order to create a more efficient, secure and reliable payment system.

Looking ahead, Bank Indonesia will introduce centralised payments for utility bills and promote the more active and coordinated use of electronic government payments. Bank Indonesia will also develop an integrated Electronic Bill Presentment System as well as integrated payment services across different payment networks.

Bank Indonesia organised a number of activities to nurture noncash payment uptake, including creating noncash zones on university campuses. Moreover, Bank Indonesia also advocated the use of noncash payment instruments for government financial services, social assistance services and migrant worker services.

Noncash zones were established at university campuses in 10 cities, including the University of Indonesia, State University of Makassar, IAIN Antasari, Udayana University, Airlangga University, Gadjah Mada University, Padjajaran University, Institute of Public Administration (IPDN), Indonesia Institute of Cooperative Management, Sriwijaya University, Andalas University, North Sumatra University and the Bogor Agricultural University.

In terms of government financial services, noncash payment instruments will be further expanded through e-payments. Bank Indonesia also cooperates with the Ministry of Manpower and Transmigration as well as the National Board for the Placement and Protection of Overseas Workers (BNP2TKI) to extend the use of noncash payments when processing and placing Indonesian migrant workers.

Government social assistance disbursements to participants of the Family of Hope Program now utilise electronic money through agents of Digital Financial Services (DFS). Bank Indonesia also trialled government assistance disbursements at five locations in Jakarta through Indonesian Health Cards (KIS) and Indonesian Smart Cards (KIP). The program represents a form of collaboration between the Ministry of Social Affairs, Bank Indonesia, Bank Mandiri, PT Pos Indonesia (the national postal service) and other relevant institutions.

Uang Elektronik
E-Money

Karakteristik
Characteristics

- Disetor di awal — *Paid in advance*
- Fungsi utama sebagai alat pembayaran dengan nilai kecil (*micropayment*) — *The main function is as micropayment instrument*

UANG ELEKTRONIK *ELECTRONIC MONEY*

- Bukan dikategorikan simpanan: tidak dijamin, tidak memperoleh bunga — *Not treated as deposit: not guaranteed, non-interest bearing*
- Disimpan dalam media tertentu — *Stored in particular media*

Kategori
Category

Jenis Uang Elektronik berdasarkan media penyimpanan
Type of e-money based on storage media

Berbasis Server / *Server Based*	Berbasis *Chip* / *ChipBased*
Data saldo uang disimpan di server Penerbit — *Credit value stored in server at the Issuer*	Data saldo uang disimpan di *chip* kartu — *Credit value stored in chip*

Uang Elektronik diterbitkan oleh Penerbit setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia
E-money issued by Issuer after obtaining license from Bank Indonesia

Penerbit
Issuer

Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik, dapat berupa Bank atau Lembaga selain Bank
Issuer is Corporation that issue e-money, it can be inform of Banks or other than Banks

Konsumen
Consumer

Konsumen menggunakan Uang Elektronik
Consumer use e-money

Tempat Transaksi
Transaction Site

- Mini Market — *Mini Market* (Shop)
- Beli Pulsa — *Buy Mobile Phone Deposit*
- Transportasi — *Transportation*
- Tagihan Utilitas — *Utility Bill*
- Belanja Online — *Online Shopping*

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

The Obligation to Use Rupiah in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia

Sesuai amanat Pasal 23 UUD 1945, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Amanat itu telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Undang-Undang Mata Uang mewajibkan setiap pihak untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang itu juga mengatur sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban penggunaan Rupiah.

Pursuant to Article 23 of the 1945 Constitution, the kind and price of currency shall be determined by virtue of law. That mandate is also contained in the Currency Act (No. 7 of 2011), which requires all parties to utilise the Rupiah for all transactions in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Currency Act also regulates the sanctions applicable for violations of the Act.

Secara garis besar, terdapat tiga alasan yang menjadikan Rupiah wajib digunakan pada setiap transaksi di wilayah NKRI. Pertama, dimensi hukum. UU Mata Uang telah mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI. Kedua, dimensi kebangsaan. Rupiah merupakan simbol kedaulatan NKRI. Dengan demikian, penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI merupakan hal mutlak bagi setiap penduduk. Ketiga, dimensi ekonomi/bisnis. Kebutuhan mata uang asing yang tinggi untuk transaksi kegiatan ekonomi berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi nasional karena mudah terimbas oleh gejolak ekonomi global.

There are three main reasons for mandatory Rupiah use for transactions in Indonesia. First is the legal dimension. The Currency Act already stipulates mandatory Rupiah use for all transactions in Indonesia. Second is the national dimension. The Rupiah is a symbol of Indonesia's sovereignty. Therefore, using the Rupiah for all transactions in Indonesia is a necessity for all citizens. Third is the business/economic dimension. High demand for foreign currencies could potentially expose the national economy to global economic shocks.

Bank Indonesia secara aktif telah melakukan berbagai langkah untuk memberikan pemahaman dan mendorong penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Langkah yang ditempuh antara lain berkoordinasi dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Bank Indonesia actively builds understanding and promotes Rupiah use throughout the territory of Indonesia, including coordination with relevant ministries, such as the Ministry of Finance, Ministry of Transport, Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Ministry of State-Owned Enterprises, Ministry of Industry and the Ministry of Trade as well as the Indonesian Police.

Pada tahap awal, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian RI menandatangani nota kesepahaman tentang "Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia". Ruang lingkup kerja sama antara Bank Indonesia dan Polri di area penegakan hukum mencakup tiga hal. Pertama, penegakan hukum bagi pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Kedua, dugaan tindak pidana uang Rupiah. Ketiga, dugaan adanya tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

At the preliminary phase, the Governor of Bank Indonesia and the Chief of the Indonesian Police signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning Cooperation to Support Task Implementation and the respective Authority of Bank Indonesia and the Police. The scope of cooperation includes law enforcement covering three main aspects as follows: (i) violations of mandatory Rupiah use in the Unitary State of the Republic of Indonesia; (ii) allegations of Rupiah currency crime; and (iii) allegations of payment system and moneychanger crime.

Bank Indonesia dan Polri juga telah menandatangani pedoman kerja dan pokok-pokok Kesepahaman. Pedoman kerja akan menjadi landasan pelaksanaan kerja sama di tingkat nasional, sedangkan pokok-pokok kesepahaman menjadi acuan pelaksanaan kerja sama di daerah.

Bank Indonesia and the Police also signed working guidelines as a foundation for cooperation at the national level as well as points of agreement as a reference for cooperation at the local level.

Bank Indonesia terus mendorong kewajiban penggunaan Rupiah bagi pelaku bisnis. Untuk itu, Bank Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah asosiasi, antara lain Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Selain itu, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan edukasi publik melalui iklan layanan masyarakat di media massa dengan tema "Rupiah Lambang Kedaulatan Negara". Bank Indonesia juga menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "Rupiah sebagai Lambang Kedaulatan Bangsa dan Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI". Seminar itu melibatkan pemangku kebijakan seperti otoritas, regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku ekonomi. Seminar menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, DPR-RI, Kementerian Keuangan, Bareskrim Polri, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Bank Indonesia juga memberikan perhatian khusus penggunaan uang Rupiah di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil. Pada 29 Januari 2014, Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea menandatangani nota kesepahaman mengenai penggunaan uang di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea sepakat untuk meningkatkan peran lembaga keuangan bank dan pedagang valuta asing (PVA) di masing-masing Negara. Kesepakatan itu juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan dengan mendorong terciptanya kelancaran dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI AL dan Polair melakukan layanan kas keliling dan edukasi di wilayah terpencil dan perbatasan.

Selain kegiatan seminar, Bank Indonesia telah mensosialisasikan penggunaan uang Rupiah kepada kepolisian daerah tertentu seperti di Batam, Kepulauan Riau. Selama ini, banyak transaksi di Batam yang menggunakan valuta asing dengan alasan kepraktisan, kandungan impor yang tinggi, atau keuntungan dari selisih kurs. Penggunaan mata uang asing itu dilakukan di berbagai tempat seperti pelabuhan, perusahaan manufaktur, hotel, dan restoran.

Pada 2014, Bank Indonesia dan Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Batam. Penerapan undang-undang itu didukung dengan surat edaran Walikota Batam dan instruksi Menteri Perhubungan.

Bank Indonesia continued to enforce Rupiah policy on the business community. To that end, Bank Indonesia signed Memorandums of Understanding (MoU) with a number of associations, including but not limited to the Association of Air Ticketing Companies in Indonesia (Astindo) and the Indonesian Hotels and Restaurants Association (PHRI).

Bank Indonesia also conducted an assortment of public educational activities through public service advertisements in the mass media themed "The Rupiah as a Symbol of National Sovereignty". Furthermore, Bank Indonesia organised a national seminar entitled "The Rupiah as a Symbol of National Sovereignty and Mandatory Rupiah use in the Republic of Indonesia" , involving policymakers such as the authorities, regulators and law enforcement as well as economic players. The seminar brought together speakers from Bank Indonesia, the House of Representatives, Ministry of Finance, Criminal Investigation Division and the Employers' Association of Indonesia (Apindo).

Bank Indonesia also focused specifically on mandatory Rupiah use in border and remote areas. On 29th January 2014, Bank Indonesia and the Bank of Papua New Guinea signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning mandatory Rupiah use in border areas between the Republic of Indonesia and Papua New Guinea. Bank Indonesia and the Bank of Papua New Guinea agreed to expand the roles of banks and moneychangers in each respective country, while catalysing economic activities in border areas to create a smooth and reliable payment system. Bank Indonesia also cooperated with the Indonesian Navy and Maritime Police to provide mobile cash services and education in remote and border areas.

In addition to seminar activities, Bank Indonesia also socialised mandatory Rupiah use to the Indonesian Police in specific regions, such as Batam, Riau Islands. Hitherto, numerous transactions in Batam have used foreign currencies due to their practicality and high import content along with gains from exchange rate disparities. Foreign currencies are used at particular locations, for instance ports, manufacturing companies, hotels and restaurants.

In 2014, Bank Indonesia and the Government enforced the Currency Act (No. 7 of 2011) in Batam through a Circular Letter from the Mayor of Batam and an Instruction from the Minister for Transport .

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
The Obligation to Use Rupiah Inside the Region of Republic of Indonesia



Rupiah Salah Satu Simbol Kedaulatan Negara
Rupiah as one of Sovereignty Symbols of a Country

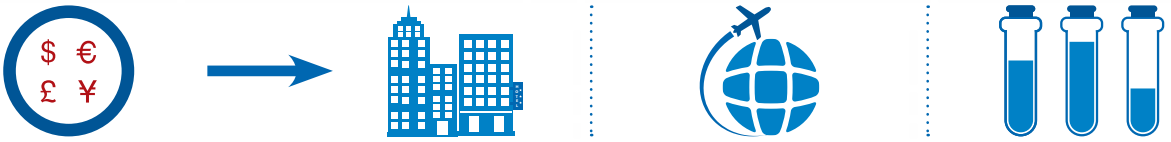


Wajib Rupiah di Wilayah NKRI; Melanggar > Dikenakan Sanksi
Rupiah Must be Used in the Republic of Indonesia Region; Violation > Penalized

UU No. 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang

Law No. 7 of 2011
on Currency





Masih banyak transaksi di wilayah NKRI menggunakan valas, seperti di bidang perhotelan, travel, bahan kimia, termasuk pencantuman tarif dan harga dalam mata uang asing

There are still many transactions in the Republic of Indonesia Region that use foreign exchange currency, such as in the hospitality, travel, and chemical sectors, including display of fare and price in foreign currency.

Dalam rangka mendorong implementasi kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI Bank Indonesia dengan berbagai pihak, baik Pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, korporasi dan seluruh elemen masyarakat, serta dengan memastikan dan mendorong penyediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI.

In promoting the implementation of using Rupiah in the Republic of Indonesia region, Bank Indonesia collaborate with various parties such as the central dan provincial governments, law enforcement officers, state-owned companies, corporations and all elements of the community, also ensure the provision of Rupiah currency in the entire Indonesia Region.

KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH

Bank Indonesia melakukan koordinasi baik dengan Pemerintah maupun otoritas terkait lainnya, Koordinasi bertujuan guna mendukung stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Koordinasi yang dilakukan terkait penguatan kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bauran kebijakan, terutama dalam merespons tantangan perekonomian global dan memperkuat ketahanan perekonomian domestik terhadap gejolak perekonomian.

Selain pengendalian inflasi, area koordinasi kebijakan terutama dilakukan dalam upaya: (i) penguatan kebijakan moneter dan fiskal, (ii) penguatan stabilitas sektor keuangan, (iii) peningkatan efisiensi sistem pembayaran dan penguatan pengelolaan uang Rupiah. Berbagai koordinasi kebijakan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk merespons tantangan dan potensi risiko perekonomian dan sistem keuangan yang diperkirakan masih tinggi.

Selain mencapai target inflasi yang ditetapkan, koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan moneter dan fiskal dalam upaya mendorong percepatan reformasi struktural guna memperbaiki fundamental perekonomian yang yang lebih sehat.

Dalam Pokjanas TPID, peran TPID ke depan juga diarahkan untuk mendorong penyelesaian permasalahan struktural bersinergi dengan program lain yang sejalan. Untuk mengoptimalkan sinergi dengan Pemerintah, penetapan program TPID diselaraskan dengan agenda pembangunan yang dilaksanakan serentak secara nasional, dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi masing-masing daerah. Implementasi program TPID dilakukan dengan target yang terukur, sehingga akuntabilitas pelaksanaan program dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan.

Koordinasi dilakukan baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah melalui Rapat koordinasi (Rakor) yang dilakukan secara rutin. Pada 2014 telah dilakukan Rakor di beberapa daerah yaitu di Manado pada 11 Agustus 2014 dan di Bandung, 11 November 2014.

COORDINATION WITH THE GOVERMENT

Bank Indonesia conducted coordination with the government as well as other related authorities. The coordination is meant to support macroeconomic stability and economic growth sustainability. The coordination performed in relation to strengthening Bank Indonesia policy is meant to increase the effectiveness of policy mix, especially in response to the global economic challenges and strengthen domestic economy resilience against economic upheavals.

Besides inflation control, policy coordinations are mainly conducted in the areas of: (i) strengthening of monetary policy and increasing real sector role, (ii) strengthening financial sector stability, and (iii) payment system efficiency enhancement and strengthening of Rupiah currency management. Various Bank Indonesia policy coordination will be furher strengthen to respond to challenges and potential economic and financial system risks that are still projected high.

In addition to achieving the determined targeted inflation, coordination is also conducted to strengthen monetary and fiscal policy as an effort to accelerate structural reforms in order to improve the betterment of economic fundamentals.

In TPID Pokjanas, the role of TPID going forward is geared to support the achievement of the targeted inflation set by the government and encourage the resolution of structural problems in synergy with other programs that are in line. To optimize synergy with the Government, the TPID program is aligned with the development agenda that is carried out simultaneously nationwide, while taking into account the economic characteristics of each region. The implemention of TPID programs are carried out with measurable targets, so that the accountability for implementing the programs can be evaluated and accounted for.

Coordination is conducted either with the central government as well as the local government through routine coordination meetings. Coordination meetings in 2014 took place in a few regions, which is in Manado on 11th August 2014 and in Bandung, 11th November 2014.

Rakor yang diselenggarakan di Manado menghasilkan tiga usulan langkah koordinasi kebijakan untuk mendorong reformasi struktural yaitu (i) percepatan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, (ii) percepatan reformasi fiskal pusat dan daerah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur, memperbesar dukungan fiskal daerah dalam pengembangan infrastruktur, dan pengendalian inflasi di daerah, dan (iii) mendukung pelaksanaan program TPID di daerah.

The coordination meeting held in Manado produced three proposed policy coordination measures to encourage structural reforms, namely (i) accelerating the implementation of the National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019, (ii) acceleration of the central and regional fiscal reforms to increase the government capacity in financing infrastructure projects, expand regional fiscal support in infrastructure development, and inflation control in the regions, and (iii) support the implementation of the TPID program in the regions.

Rakor di Bandung merumuskan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat di Manado dalam tiga bagian koordinasi kebijakan, yaitu (i) pembangunan infrastruktur dan perbaikan sistem logistik, (ii) percepatan reformasi fiskal, dan (iii) kemudahan investasi. Implementasi dari komitmen tersebut akan menjadi kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi regional ke depan.

The coordination meeting in Bandung formulated follow-up action plans to the agreements made in Manado, which were divided into three parts of policy coordination, namely (i) infrastructure development and logistics systems improvement, (ii) fiscal reforms acceleration, and (iii) ease of investment. The implementation of these commitments will become the key to accelerating regional economic development in the future.

Koordinasi dalam penguatan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, serta koordinasi dalam pencegahan/penanganan krisis. Pasca beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas jasa keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2013, koordinasi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan OJK semakin diperkuat. Efektivitas kebijakan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik pada sistem keuangan perlu didukung oleh kondisi perbankan yang sehat.

Coordination in strengthening financial system stability as a whole is conducted through strengthening mikroprudensial and macroprudential policy coordination, as well as coordination in crisis prevention/management. After the transfer of the functions, duties and authorities in banking regulation and supervision from Bank Indonesia to Financial Services Authority (OJK) since 31th December 2013, the coordination of mikroprudential and macroprudential policy between Bank Indonesia and OJK was strengthened. The effectiveness of macroprudential policies in mitigating systemic risk in the financial system needs to be supported by sound banking condition.

Sebagai landasan bagi Bank Indonesia dan OJK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi, telah ditandatangani Surat Keputusan Bersama antara kedua lembaga pada 18 Oktober 2013. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dibentuk Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM) beserta perangkat koordinasi berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan bersama (mekanisme kerja) makroprudensial-mikroprudensial. Selain itu, pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan lembaga keuangan diimplementasikan melalui Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Guna memfasilitasi pertukaran informasi tersebut dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas data, sehingga pengawasan makroprudensial-mikroprudensial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

As a basis for Bank Indonesia and OJK in conducting cooperation and coordination, a Joint Decree between the two institutions was signed on 18th October 2013. Based on the consensus, Macro-Microprudential Coordination Forum (FKMM) including the supporting tools such as implementation guidelines and joint implementation guidelines (work mechanism) of macroprudential-microprudential were established. In addition, information exchange and financial institution reporting system was implemented through an Information Exchange and Reporting System Coordination Forum (FKPISP). In order to facilitate the exchange of information, an integrated information system was developed to improve the quality of data, so that macroprudential-mikroprudential supervision can be conducted more effectively and efficiently.

Dalam memperkuat Protokol Manajemen Krisis (PMK), Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah. Penguatan dilakukan melalui pertemuan koordinasi secara rutin antar anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Dalam pertemuan koordinasi dibahas asesmen stabilitas sistem keuangan dan berbagai kegiatan yang telah dilakukan di lingkup PMK Nasional.

In strengthening the Crisis Management Protocol (PMK), Bank Indonesia strengthened coordination with the government. Strengthening coordination is done through regular coordination meetings among members of the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK). In the coordination meetings, assessment of the financial system stability and the all kind of activities that have been performed in the scope of National PMK were discussed.

Pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam FKSSK didukung dengan seperangkat prosedur operasional untuk melengkapi perangkat kerja FKSSK. Sesuai prosedur pertukaran data dan informasi, Bank Indonesia secara berkala menyampaikan asesmen sub-protokol nilai tukar kepada FKSSK. Berdasarkan hasil pemantauan (surveillance) dari masing-masing anggota FKSSK, secara umum kondisi SSK menunjukkan indikasi normal, meskipun indikator ketahanan fiskal dinilai perlu diwaspadai. Selain itu, Bank Indonesia bersama anggota FKSSK lainnya mengembangkan instrumen pengambilan keputusan FKSSK dalam mengantisipasi potensi risiko yang dapat menganggu stabilitas sistem keuangan.

The implementation of inter-agency coordination in FKSSK was supported by a set of operational procedures to supplement FKSSK work mechanism. According to the data and information exchange procedure, Bank Indonesia regularly deliver assessment of exchange rate sub-protocol to FKSSK. Based on the surveillance results by each member of the FKSSK, SSK condition in general was indicated to be normal, although the assessment of fiscal resiliency indicators showed that it needs to be watched out. In addition, Bank Indonesia together with other FKSSK members developed FKSSK decision-making instruments in anticipation of potential risks that could undermine the financial system stability.

Sejak awal tahun, telah dibentuk Working Group FKSSK untuk memperkuat kerangka analisis, penetapan dan harmonisasi indikator *surveillance* kondisi SSK, penyiapan mekanisme koordinasi Jaring Pengaman Sistem Keuangan Internasional (International Financial Safety Net), serta aspek legal. Untuk menguji kesiapan anggota FKSSK dalam menggunakan instrumen dimaksud, pada 18 Desember 2014 telah dilakukan simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang dihadiri perwakilan pimpinan dari masing-masing institusi anggota FKSSK.

Since the beginning of the year, FKSSK Working Group was formed to strengthen the analytical framework, the establishment and harmonization of the surveillance indicators of the financial system stability conditions, the preparation of coordination mechanisms of International Financial System Safety Net, as well as the legal aspects. To test the readiness of FKSSK members in implementing the instruments, a simulation of crisis prevention and resolution was performed in December 18, 2014, which was attended by representatives of the leaders of each FKSSK members institution.

Bank Indonesia juga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan peningkatan efisiensi sistem pembayaran nontunai yang aman serta mendukung kelancaran pengelolaan uang Rupiah.

Bank Indonesia also continue to improve coordination with related agencies to achieve increased efficiency of non-cash payment system that is safe as well as support the smoothness of Rupiah currency management.

Untuk mendorong peningkatan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, pelaksanaan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dilakukan dengan dukungan komitmen Pemerintah. Dukungan diberikan dengan menggunakan nontunai untuk layanan keuangan Pemerintah, implementasi *e-payment* dan *e-budgetting* Pemerintah Provinsi, serta memperluas akses layanan keuangan dan edukasi kepada masyarakat. Sementara koordinasi dan kerja sama Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah bertujuan untuk mendukung ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya, serta distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal serta layanan kas yang prima.

To promote increased use of non-cash payment instrument, the implementation of the National Movement of Non-Cash (GNNT) program was performed with the support of government's commitment. The Support was provided by the use of non-cash instrument for government financial services, the implementation of provincial government e-payment and e-budgetting, as well as the expansion of access to financial services and education to the public. Meanwhile the coordination and cooperation of Bank Indonesia in Rupiah currency management was intended to support the availability of Rupiah currency that is high in quality and trustworthy, as well as the currency distribution and processing that is safe and optimal, as well as excellent cash services.

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan terkait perencanaan uang Rupiah. Koordinasi dilakukan dalam pembahasan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) 2015 dengan Kementerian Keuangan. Hasil EKU tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengadaan bahan uang dan penyusunan Rencana Cetak Uang (RCU) 2015 yang disepakati dengan Pemerintah. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam penyusunan desain uang, pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar melalui penyampaian informasi uang Rupiah yang dimusnahkan kepada Pemerintah secara berkala.

Other than that, coordination with the government was also carried out in relation to Rupiah currency planning. Coordination was done through the discussion of Currency Needs Estimates (EKU) of 2015 with the Ministry of Finance. The EKU result were the basis for the procurement of currency materials and the development of Currency Printing Plan (RCU) of 2015 that was agreed with the government. Bank Indonesia also coordinated with the government in preparing currency design, destruction of Rupiah currency that is not fit for circulation through the submission of information on the Rupiah currency that was destroyed to the government on a regular basis.

MENDORONG PERLUASAN AKSES KEUANGAN, SERTA PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN UMKM

PROMOTING BROADER FINANCIAL ACCESS AS WELL AS REAL SECTOR AND MSME DEVELOPMENT

Bank Indonesia terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui keuangan inklusif, serta perkembangan sektor riil dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional. Kegiatan itu guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas inflasi dan nilai tukar dan mendorong sistem keuangan yang efektif dan efisien.

Bank Indonesia continuously broadens public financial access through financial inclusion along with real sector and Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) development to increase the contribution to the national economy. Such activities support core task implementation at Bank Indonesia, namely to create and maintain inflation and exchange rate stability, while nurturing an effective and efficient financial system.

Hasil survei Bank Dunia (2011) yang menyatakan bahwa hanya 19,6% penduduk dewasa Indonesia memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang belum tersentuh akses bank *(unbanked)* di Indonesia cukup tinggi.

A World Bank Survey conducted in 2011 found that only 19.6% of the adult population has access to formal financial institutions, which demonstrates the large portion of unbanked in Indonesia.

Menyikapi kondisi itu, keuangan inklusif telah menjadi agenda prioritas Pemerintah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kebijakan keuangan inklusif dilakukan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian terkait, perbankan, lembaga domestik, dan internasional.

Addressing the deficit, financial inclusion is a priority government agenda item to broaden public financial access, which aims to create economic prosperity through poverty alleviation, income equality and financial system stability in Indonesia. Bank Indonesia implements financial inclusion policy in synergy with related ministries, the banking industry as well as national and international institutions.

Selama 2014, Bank Indonesia telah melakukan berbagai program keuangan inklusif antara lain TabunganKu dan Basic Saving Account (BSA) lainnya, edukasi keuangan kepada masyarakat, dan Kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM). Bank Indonesia juga mengimplementasikan program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan memfasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah (Government to Person, G2P) kepada masyarakat melalui LKD.

In 2014, Bank Indonesia implemented a range of financial inclusion programs including TabunganKu (MySavings) and other Basic Savings Accounts (BSA), public financial education and the Indonesian Saving Movement (GIM). Moreover, Bank Indonesia also initiated Digital Financial Services (DFS) and facilitated Government Assistance Disbursements (Government to Person, G2P) to the public through DFS.

Program TabunganKu dan BSA lainnya bertujuan untuk mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk tabungan yang cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Desember 2014, jumlah rekening TabunganKu dan BSA lainnya tercatat sebanyak 12,41 juta rekening, meningkat 16,9% (yoy) dibandingkan Desember 2013 yang tercatat sebanyak 10,62 juta rekening.

The TabunganKu and BSA program aimed to increase the availability and utilisation of savings products suitable for low-income earners. Based on December 2014 data, the total number of TabunganKu and BSA accounts was recorded at 12.41 million, growing 16.9% (yoy) on the 10.62 million accounts reported in December 2013.

Untuk mendorong program tersebut dilakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Edukasi diprioritaskan kepada segmen tertentu seperti tenaga kerja Indonesia (TKI), pelajar (SD, SMP, SMA setingkat, dan mahasiswa), petani, nelayan, pedagang, perempuan pekerja rumahan *(homeworkers)*, dan masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan. Selama 2014, telah dilaksanakan edukasi keuangan di 14 daerah dan Training for Trainiers (ToT) di 27 daerah.

Public education was also provided to support program implementation, prioritising specific segments such as Indonesian migrant workers (TKI), students (primary, junior high, high school and university students), farmers, fishermen, merchants, homeworkers and populations in border and island regions. Financial education was provided in 14 regions during 2014, with training for trainers provided in 27 locales.

Selain itu, Bank Indonesia melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM). Kegiatan ini untuk mendukung peningkatan jumlah TabunganKu dan BSA lainnya, serta mendukung pelaksanaan edukasi keuangan. Kegiatan disinergikan dengan program pengembangan UMKM melalui penyediaan bazar UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia dan perbankan.

Bank Indonesia also rolled out the Indonesian Saving Movement (GIM) to bolster TabunganKu and BSA growth, while supporting financial education. Such activities were synergised with MSME development through an MSME bazar as the target of Bank Indonesia and the banking industry.

Untuk membantu masyarakat *unbanked* memiliki akses kepada layanan jasa keuangan, Bank Indonesia mendorong program *Financial Identity Number* (FIN) atau nomor identitas keuangan yang bersifat unik, *simple*, dan melekat. Nomor ini diberikan kepada masyarakat umum yang memiliki keterbatasan akses keuangan dalam bentuk kartu.

To help the unbanked access formal financial services, Bank Indonesia implemented unique, simple and binding Financial identity Numbers (FIN), which are provided to the unbanked and underbanked in the form of a card.

Pelaksanaan berbagai program itu memerlukan peningkatan koordinasi dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Koordinasi dilakukan untuk memberikan arah pengembangan keuangan inklusif. Untuk itu, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, TNP2K, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

The implementation of so many programs requires solid coordination to develop and execute the National Financial Inclusion Strategy. Furthermore, coordination helps direct financial inclusion. To that end, Bank Indonesia in conjunction with the Ministry of Finance, the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) and the Financial Services Authority (OJK) prepared a National Financial Inclusion Strategy.

Bank Indonesia memfokuskan pengembangan UMKM untuk mencapai peningkatan akses dan jangkauan UMKM terhadap jasa keuangan. Upaya pengembangan dimulai dari hulu dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan itu antara lain melalui penelitian skema pembiayaan pertanian komoditas pangan dengan pendekatan *Value Chain Financing* (VCF), khususnya komoditas beras, cabai, dan bawang merah.

Bank Indonesia focused MSME development on extending the access and reach of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to financial services, starting with upstream activities in the form of research and development. R&D includes financing schemes for agricultural produce through Value Chain Financing (VCF), particularly for rice, chilli and shallots.

Bank Indonesia juga melakukan kajian peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif dan pengembangan alternatif lembaga keuangan yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia menyusun panduan replikasi dalam pengembangan klaster berbasis komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan.

Bank Indonesia also reviewed ways to extend access to financing for creative industries as well as the development of alternative financial institutions that empower the community. Furthermore, Bank Indonesia prepared replication guidelines for cluster development based on major commodities to improve food security.

Bank Indonesia melakukan kajian peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif dan pengembangan alternatif lembaga keuangan yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bank Indonesia also reviewed ways to extend access to financing for creative industries as well as the development of alternative financial institutions that empower the community.







Sampai dengan akhir 2014, Bank Indonesia telah mengembangkan 133 klaster. Sebanyak 61 klaster telah mencapai tahap *phasing out* menjadi klaster yang mandiri.

Bank Indonesia had developed 133 clusters by the end of 2014, with 61 clusters phased out to become independent clusters.

Sementara itu, implementasi pengembangan UMKM dilakukan antara lain dengan menerapkan hasil Kajian Pola Pembiayaan (*Lending Model*) komoditas Cabai Merah Organik dalam bentuk pengembangan Klaster Cabai Merah binaan KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan itu dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia berkerjasama dengan kementerian teknis dan Pemerintah daerah. Bank Indonesia juga mengembangkan klaster yang berkontribusi besar dalam pengendalian inflasi. Pengembangan klaster difokuskan pada komoditas ketahanan pangan.

MSME development was advanced through the application of a lending model for organic red chillies in the form of cluster development under the auspices of the Bank Indonesia Representative Office in South Sulawesi in conjunction with Bank Indonesia head office as well as technical ministries and local government. Bank Indonesia also developed clusters that help to control inflation, focusing on food security.

Sampai dengan akhir 2014, Bank Indonesia telah mengembangkan 133 klaster. Sebanyak 61 klaster telah dihapus secara bertahap *(phasing out)* menjadi klaster yang mandiri. Selain itu, Bank Indonesia melakukan kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan usahanya. Program tersebut dilaksanakan di KPBI dan 23 KPw. Hingga akhir 2014, Bank Indonesia telah membina 633 wirausaha berskala UMKM. Program ini sejalan dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN).

Bank Indonesia had developed 133 clusters by the end of 2014, with 61 clusters phased out to become independent clusters. In addition, Bank Indonesia also rolled out activities to create new entrepreneurs amongst the younger generation through the provision of skills and knowledge at BI head office and 23 representative offices. By yearend 2014, Bank Indonesia had developed 633 MSME-level entrepreneurs in line with the National Entrepreneurship Movement (GKN).

Untuk pengembangan UMKM, dilakukan pula melalui kerjasama internasional pada beberapa forum internasional. Kegiatan tersebut antara lain: (i) *The Alliance for Financial Inclusion's* (AFI) sebagai *co-chair* SME's *Working Group* (SMEWG), dan (ii) *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) SMEWG sebagai *proponent* proyek "*Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology*". Bank Indonesia telah melakukan kajian dan menyebarluaskan hasil kajian kepada *stakeholders* seluruh negara ASEAN dalam ASEAN SMEWG di Jakarta.

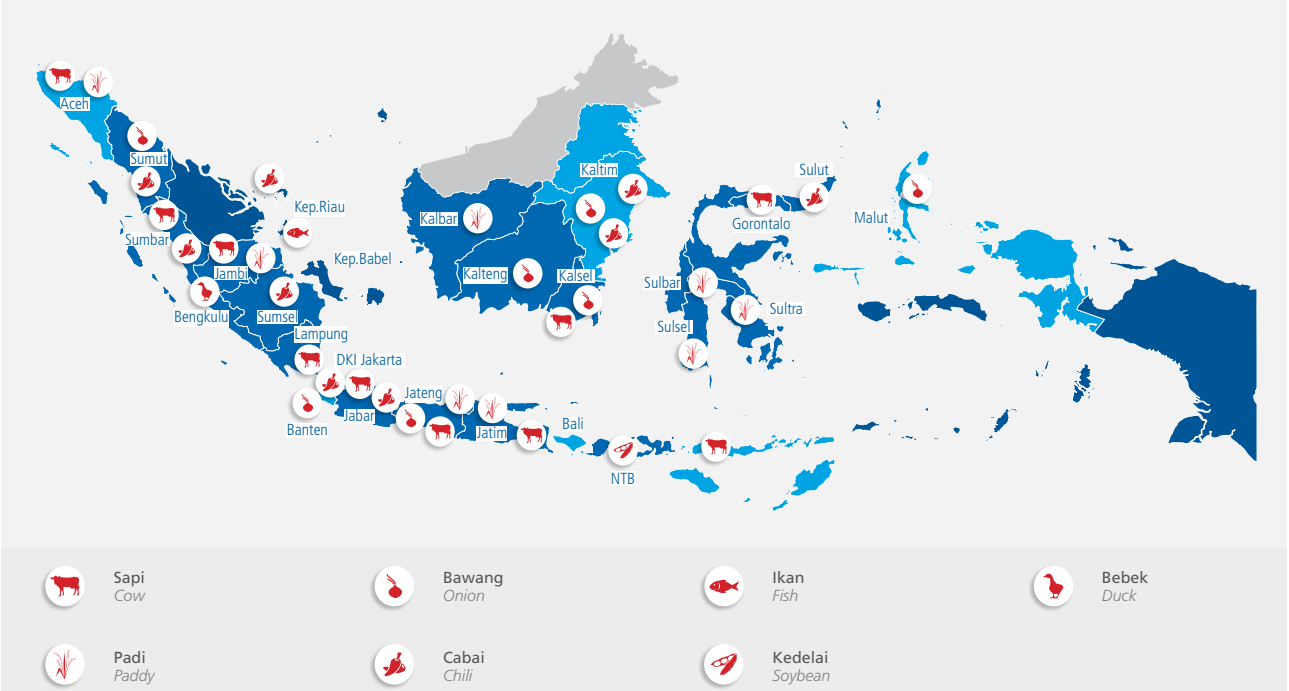
MSME development was also pursued through international cooperation at a number of forums as follows: (i) The Alliance for Financial Inclusion (AFI) as co-chair of the SME Finance Working Group (SMEFWG); and (ii) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) SMEWG as project proponent for "Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Methodology." Bank Indonesia reviewed and disseminated the results to stakeholders in all ASEAN countries at the ASEAN SMEWG held in Jakarta.

Bank Indonesia berupaya untuk menjembatani permasalahan informasi asimetris (*asymmetric information*) antara UMKM dan lembaga keuangan. Langkah itu dilakukan melalui penyampaian informasi pada *website* Bank Indonesia (*minisite* Info UMKM). Selama 2014, telah dilakukan pengkayaan informasi berupa penambahan informasi hasil penelitian pola pembiayaan (*Lending Model*) sebanyak 175 hasil penelitian. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* untuk melakukan usaha maupun dalam memberikan pembiayaan.

Bank Indonesia strived to bridge the asymmetric information gap between MSMEs and financial institutions by posting pertinent information on the MSME Info Minisite accessible through the official Bank Indonesia website. The information on the minisite was enriched in 2014 through additional lending models gleaned from 175 research papers, which stakeholders are free to use to provide financing or do business.

Gambar Sebaran Klaster Ketahanan Pangan Bank Indonesia Tahun 2014

Picture. Distribution Map of Bank Indonesia Food Resilience Cluster in 2014



Tahap 1	: Penyebaran klaster untuk mengatasi masalah ketersediaan dan distribusi
Stage 1	*: Spread clusters to solve problems of availability and distribution*
Tahap 2	: Pemenuhan kebutuhan bahan pangan antar kantor perwakilan dalam satu area
Stage 2	*: Fulfillment of food requirements among representative offices in one area*
Tahap 3	: Interkonektivitas antar area untuk menutupi gap kebutuhan bahan pangan
Stage 3	*: Interconnectivity among areas to cover the food requirements gap*

Guna mengurangi adanya informasi asimetris, Bank Indonesia juga menyediakan informasi harga komoditas di tingkat produsen melalui Sistem Informasi Harga Bagi Petani dan Nelayan (SIPN). Penyediaan informasi ini diharapkan dapat membantu petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan posisi daya tawar *(bargaining position)*. Selain itu, petani dan nelayan memperoleh informasi terkini mengenai harga jual produk pertanian, cara bercocok tanam yang tepat, cuaca, serta informasi mengenai pemasok dan pembeli.

Reducing the prevalence of asymmetric information, Bank Indonesia also provided commodity price information at the producer level through the Price Information System for Farmers and Fishermen (SIPN). Such price information helps farmers and fishermen enhance productivity and their bargaining position. In addition, farmers and fishermen are able to access the latest information on selling prices of agricultural produce, proper cultivation techniques, weather forecasts as well as information on suppliers and buyers.

Membuka Akses Keuangan Melalui LKD

Expanding Financial Access through Digital Financial Services (DFS)

Guna memperluas akses keuangan, Bank Indonesia berinisiatif mengembangkan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan. Layanan ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau yang disebut agen dan memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama telekomunikasi seperti telepon genggam.

Bank Indonesia developed Digital Financial Services (DFS) in order to expand financial access through payment system and financial services in cooperation with third parties as agents and by exploiting technological advancements, in particular telecommunication technology such as cellular telephones.

Penyediaan akses ini diharapkan menjadi pintu masuk *(entry point)* masyarakat untuk belajar menyimpan uang dalam bentuk non-tunai sehingga yang sebelumnya tidak terhubung dengan bank sudah mulai mengenal bank dengan menggunakan produk dan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhannya. Perluasan akses keuangan ini sekaligus mendukung peningkatan efisiensi transaksi keuangan secara nasional.

Digital Financial Services (DFS) are an entry point for the unbanked to learn how to deposit noncash using formal financial products and services as required. Expanding financial access also improves financial transaction efficiency nationally.

Sebagai dasar pelaksanaan LKD, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai uang elektronik dan penyelenggaraan LKD melalui agen LKD Individu yang menginduk pada ketentuan uang elektronik. Untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik, Bank Indonesia secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan LKD. Bank Indonesia bekerjasama pula dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait dengan menjadikan LKD sebagai alternatif penyaluran bantuan Pemerintah yang lebih mempunyai nilai tambah *(value added)*, baik bagi penerima bantuan maupun Pemerintah.

As a legal basis of Digital Financial Services (DFS), Bank Indonesia promulgated regulations on electronic money and operating DFS through individual DFS agents . Bank Indonesia actively provided public education on the benefits of DFS to expand the role of electronic money. Furthermore, Bank Indonesia also collaborated with several ministries and institutions to nurture the use of DFS as an alternative method to disburse government assistance programs with greater value added for the recipients and the Government alike.

Pada 2014, Bank Indonesia bersama Kementerian PPN/ Bappenas, TNP2K, dan Kementerian Sosial melakukan uji coba penyaluran bantuan Pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Uji coba penyaluran PKH diberikan kepada 1.860 rumah tangga penerima di 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan PSKS kepada 1 juta keluarga di 19 kabupaten/kota di Indonesia.

In 2014, Bank Indonesia together with the National Development Planning Agency, National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) and the Ministry of Social Affairs initiated government assistance disbursement trials for the Family Hope Program (PKH) and the Prosperous Family Saving Program (PSKS). PKH trials were extended to 1,860 families in four provinces, namely the Special Capital Region of Jakarta, West Java, East Java and East Nusa Tenggara, while PSKS trials involved 1 million families in 19 regencies/cities throughout Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring, masyarakat penerima bantuan PKH berpendapat bahwa proses penyaluran menjadi lebih aman dan lebih nyaman dengan penggunaan agen LKD. Penerima bantuan tidak perlu lagi mengantri panjang untuk mencairkan bantuan. Mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar atau menghabiskan waktu karena keberadaan agen LKD dekat dengan permukiman. Mengingat agen LKD dikenal dengan baik, penerima bantuan percaya untuk tidak mengambil seluruh dana bantuan. Dengan kata lain, mereka menyimpan sebagian dana bantuan tersebut.

Based on monitoring, recipients of the PKH social protection program opined that the disbursement process was more secure and convenient using Digital Financial Services (DFS) as long queues were a thing of the past. Furthermore, the presence of local DFS agents reduced the travel costs incurred and the amount of time spent. Furthermore, due to recipient confidence and trust in DFS agents, recipients often saved a portion of their assistance funds.

Untuk semakin meningkatkan kepedulian *(awareness)* dan adopsi penggunaan LKD oleh masyarakat, Bank Indonesia akan terus mengupayakan terciptanya ekosistem LKD dan uang elektronik yang difokuskan pada 4 (empat) aspek. Pertama, memperluas penyelenggara LKD dengan menggunakan agen individu. Kedua, mengkaji ulang *(review)* model bisnis umum, termasuk model bisnis penyaluran bantuan Pemerintah menggunakan LKD. Ketiga, me-*review* aspek regulasi yang berlaku. Keempat, mengembangkan ekosistem LKD.

To build public awareness and expand the adoption of Digital Financial Services (DFS), Bank Indonesia will continue to develop the DFS ecosystem and electronic money with a focus on four key aspects: (i) expanding DFS operators using individual agents; (ii) reviewing the general business model, including that for government assistance disbursements through DFS; (iii) reviewing existing regulations; and (iv) developing the DFS ecosystem.

Pengembangan ekosistem itu termasuk menyelenggarakan edukasi terkait LKD kepada masyarakat, baik oleh Bank Indonesia maupun bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI), Bank Indonesia mengidentifikasi dan memetakan daerah yang berpotensi untuk implementasi LKD.

Ecosystem development encompasses DFS education for the public, provided by Bank Indonesia and in conjunction with relevant ministries and institutions. Through Bank Indonesia Representative Offices, BI identified and mapped potential areas for DFS implementation.

MEMPERKOKOH KERJASAMA INTERNASIONAL

Menyikapi ketidakpastian ekonomi global dan tantangan ke depan, Bank Indonesia dan kementerian/lembaga terkait menempuh langkah-langkah penguatan kerja sama di tataran multilateral, regional, dan bilateral. Kerja sama multilateral seperti G20 dan IMF menekankan perlunya respons kebijakan secara kolektif dan ambisius guna mengatasi tantangan ekonomi global serta menjaga stabilitas keuangan.

Untuk kerja sama regional dan bilateral, pembahasan terfokus pada upaya menjaga stabilitas, penguatan daya tahan kawasan dan integrasi keuangan. Selain kerja sama internasional, Bank Indonesia berkontribusi dalam peningkatan persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia melalui pengelolaan hubungan dengan *stakeholder* global.

Dalam kerja sama multilateral, Bank Indonesia mendukung kesepakatan G20 pada pertemuan puncak di Brisbane pada November 2014. Dalam pertemuan itu disepakati untuk melanjutkan kerja sama pemulihan ekonomi global dengan prioritas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini ditempuh melalui perbaikan konkret pada empat pilar kebijakan, yakni (i) investasi, (ii) ketenagakerjaan, (iii) perdagangan, dan (iv) persaingan usaha. Terkait Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Indonesia mendukung penyempurnaan tata kelola IMF. Penyempurnaan dilakukan melalui review atas kegiatan pengawasan ekonomi, penguatan fasilitas bantuan pencegahan krisis, dan penguatan jaring pengaman keuangan global.

Di tingkat regional, Bank Indonesia terus mendukung upaya peningkatan stabilitas keuangan di kawasan, terutama untuk memperkuat regional *financial arrangement* (RFA). Penguatan RFA itu untuk mengantisipasi dampak berlebihan *(spillover)* dan volatilitas global *(global volatility)* yang masih terus berlanjut. Dalam kerangka kerja sama ASEAN+3, peningkatan stabilitas keuangan dilakukan melalui penguatan *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) yang dijalin sejak 2003. Kerja sama ini juga didukung oleh kerja sama *swap bilateral* untuk memperkuat lapis kedua pertahanan *(second line of defense)*.

STRENGTHENING INTERNATIONAL COOPERATION

In response to global economic uncertainty and future challenges, Bank Indonesia together with relevant ministries/institutions strengthened multilateral, bilateral and regional cooperation. Multilateral cooperation, such as the G20 and International Monetary Fund (IMF) emphasises the need for a collective and ambitious policy response to overcome the global economic challenges and to maintain financial stability.

Regarding regional and bilateral cooperation, discussions tend to focus on maintaining stability, strengthening regional resilience as well as financial integration. In addition to international cooperation, Bank Indonesia also actively contributes to raise the perception of Indonesia's economy through relationship management with global stakeholders.

Multilaterally, Bank Indonesia supported the G20 agreement at the Brisbane Summit in November 2014 to continue cooperating in terms of expediting the global recovery, prioritising stronger economic growth and creating job openings through concrete improvements under four policy pillars as follows: (i) investment; (ii) employment; (iii) trade; and (iv) competition. Furthermore, Bank Indonesia also supported refinements to IMF governance by reviewing economic supervision, strengthening crisis prevention assistance facilities and reinforcing the global financial safety net.

Regionally, Bank Indonesia continues to support efforts to bolster financial stability, primarily through regional financial arrangements (RFA), in order to anticipate ongoing spillover and global volatility. Within the ASEAN+3 framework, financial stability is achieved through the Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), which was initiated in 2003 and is supported by bilateral swaps as a second line of defence. Regional financial stability is also achieved through the Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP).

Peningkatan stabilitas keuangan regional juga dilakukan melalui kerja sama *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* (EMEAP). Sejak 2012, Bank Indonesia berperan aktif dalam pembahasan implementasi Volcker Rules (VR) dan *Single Counterparty Credit Limits* (SCCL) dengan regulator AS. Pembahasan difokuskan pada hal-hal yang berpotensi mempengaruhi pasar obligasi dan efektivitas kebijakan moneter negara-negara anggota EMEAP. Pada September 2014, EMEAP kembali menyampaikan surat kedua kepada regulator AS mengenai fokus perhatian kawasan dalam EMEAP *Regional Voice on Volcker Rules*. Surat pertama disampaikan pada 2012.

Since 2012, Bank Indonesia has played an active role in discussions to implement the Volcker Rule (VR) and Single Counterparty Credit Limits (SCCL) with US regulators. Discussions focus on issues that could potentially affect bond markets and monetary policy efficacy in member countries. In September 2014, EMEAP submitted a second letter to US regulators concerning the regional focus in the form of the EMEAP Regional Voice of the Volcker Rule. The first such letter was submitted in 2012.

Untuk mendorong perdagangan dan investasi dengan negara mitra, Bank Indonesia menjalin kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan Korea. Kerja sama ini mendorong penggunaan mata uang lokal dalam setelmen perdagangan antara Indonesia dan Korea sehingga mengurangi ketergantungan terhadap USD. Kerja sama BCSA ini memperkuat kerja sama bilateral yang telah dijalin Bank Indonesia dengan bank sentral Tiongkok (BCSA BI-PBOC) dan Jepang (BCSA BI-BOJ).

Promoting trade and investment, Bank Indonesia entered into a Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) with South Korea. The BCSA facilitates the use of local currency to settle trade between Indonesia and South Korea, thereby reducing dependence on the US Dollar. The arrangement strengthens existing bilateral cooperation with the central banks of China (BCSA BI-PBOC) and Japan (BCSA BI-BOJ).

Terkait upaya integrasi keuangan di kawasan, Gubernur Bank Indonesia dan gubernur bank sentral ASEAN lain pada akhir 2014 menyepakati *guidelines* dari *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF). *Guidelines* tersebut sebagai panduan proses integrasi perbankan di ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia berhasil memperjuangkan prinsip resiprokal dalam *guidelines*, dengan tujuan agar lebih menjamin manfaat saling menguntungkan antarnegara dalam integrasi perbankan ASEAN.

In terms of regional financial integration, the Governor of Bank Indonesia agreed the guidelines of the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) at the end of 2014 with other central bank governors from ASEAN. The guidelines cover the banking integration process in ASEAN. Indonesia successfully fought to include the principle of reciprocity in the guidelines, which aims to ensure the mutual advantages of banking integration in ASEAN.

Bagi Indonesia, ABIF memberikan peluang kepada perbankan nasional untuk mendapatkan akses pasar dan fleksibilitas operasional yang lebih luas di ASEAN. Perjuangan Indonesia dalam menyukseskan ABIF ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

For Indonesia, ABIF provides an opportunity for the national banking industry to access broader ASEAN markets and also facilitates operational flexibility. Indonesia's success in terms of ABIF was unequivocally linked to sound coordination between Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK).

Selain penguatan kerja sama internasional, Bank Indonesia turut menjaga persepsi positif ekonomi Indonesia di mata stakeholder global. Selaku sekretariat Investor Relations Unit (IRU) Indonesia, Bank Indonesia terus melibatkan investor dan lembaga rating untuk menyampaikan perkembangan terkini, kebijakan perekonomian, dan potensi ekonomi Indonesia.

In addition to strengthening international cooperation, Bank Indonesia also maintained the positive perception of Indonesia's economy in the eyes of global stakeholders. As the secretariat of the Indonesia Investor Relations Unit (IRU), Bank Indonesia continuously involves investors and rating agencies in order to present the latest developments, economic policies and economic potential of Indonesia.



Sepanjang 2014, Bank Indonesia menyelenggarakan serangkaian kegiatan *investor summit* di London (19 Maret 2014), di Singapore (22 Agustus 2014), di Hong Kong (15 September 2014), dan *Indonesia Investment and Trade Day di Toronto* (7-8 Mei 2014). Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat, Bursa Efek Indonesia, perbankan domestik, lembaga keuangan setempat, dan Indonesia *Investment and Promotion Center New York* (untuk acara di Toronto). Animo para pelaku pasar keuangan dan non-keuangan internasional terhadap kegiatan temu investor ini cukup besar. Hal itu tercermin pada tingginya tingkat partisipasi peserta dalam acara tersebut.

In 2014, Bank Indonesia hosted a number of investor summits in London (19th March), Singapore (22nd August) and Hong Kong (15th September) as well as the Indonesia Investment and Trade Day in Toronto (7-8th May). The events were arranged in together with the local Embassy/ Consulate General of Indonesia, the Indonesia Stock Exchange, domestic banks, local financial institutions and the Investment and Promotion Centre in New York (for the event in Toronto). The level of interest among international financial and non-financial market players was high, as reflected by the level of participation.

Kegiatan IRU pada 2014 mendapat apresiasi dari *Institute of International Finance* (IIF) yang memberi skor 42 (tertinggi di antara negara berkembang) untuk kategori *Investor Relations Practices Criteria*. Di tengah meningkatnya tekanan eksternal, pengukuhan terhadap posisi peringkat investasi Indonesia oleh lembaga *rating* internasional membuktikan persepsi positif *stakeholder* global terhadap ekonomi domestik dan kinerja IRU sangat baik.

IRU activity in 2014 was recognised by the Institute of International Finance (IIF), awarding a score of 42 (the highest of developing countries) for Investor Relations Practices Criteria. Amidst escalating external pressures, the affirmation of Indonesia's investment grade status by international rating agencies evidenced the positive perception global stakeholders hold regarding the domestic economy and IRU performance.

Memperkuat Benteng Pertahanan terhadap Krisis

Strengthening the Defence Against a Crisis

Dalam rangka memperkuat strategi bauran kebijakan Indonesia, sepanjang 2014, Bank Indonesia terus melakukan upaya penguatan jaring pengaman keuangan internasional. Upaya itu dilakukan melalui penguatan *Regional Financial Arrangement* dalam skema *Chiang-Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) dan kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan *Bank of Korea* (BoK). Semua langkah penguatan itu untuk melengkapi kerja sama yang dijalin Bank Indonesia sebelumnya dengan *People Bank of China* (dalam bentuk BCSA) dan *Bank of Japan* (dalam bentuk *Bilateral Swap Arrangement* atau BSA) sehingga semakin memperkuat benteng pertahanan kita terhadap krisis.

Strengthening Indonesia's policy mix strategy, Bank Indonesia continued efforts to solidify the international financial safety net in 2014 through Regional Financial Arrangements under the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) as well as a Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) with the Bank of Korea (BoK). The BCSA with the BoK reinforced existing cooperation with the People's Bank of China (in the form of a BCSA) and the Bank of Japan (in the form of a Bilateral Swap Arrangement or BSA), thus bolstering Indonesia's second line of defence against a crisis.

CMIM merupakan inisiatif kerja sama keuangan dalam bentuk komitmen *pooling funds* di antara negara-negara ASEAN+3 yang dimulai sejak 2003. Kerja sama ini bertujuan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk *swap* kepada negara anggota yang menghadapi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek. Pada 17 Juli 2014, kerja sama CMIM mencatat momentum penting dengan ditandatanganinya amendemen perjanjian CMIM. Penandatangan itu memberikan implikasi antara lain pada peningkatan kapasitas CMIM dari USD120 miliar menjadi USD240 miliar dan tersedianya fasilitas pencegahan krisis (CMIM Precautionary Line) di samping fasilitas penanganan krisis (CMIM Stability Facility). Konsekuensinya, total fasilitas CMIM yang dapat diambil oleh negara ASEAN+3 juga meningkat. Untuk Indonesia, total fasilitas menjadi USD22,76 miliar dari semula USD11,38 miliar.

CMIM is a form of financial cooperation and commitment to pool funds in ASEAN+3 countries that began in 2003, aiming to provide financial assistance through swap arrangements between member countries facing problems with their balance of payments or inadequate short-term liquidity. On 17th July 2014, CMIM gained momentum through the signing of an amendment to the agreement that doubled CMIM capacity from US$120 billion to US$240 billion as well as provided a crisis prevention facility (CMIM Precautionary Line) and a crisis resolution facility (CMIM Stability Facility). Consequently, CMIM facilities available to ASEAN+3 countries also increased. For Indonesia, total facilities increased two-fold from US$11.38 billion to US$22.76 billion.

Sementara itu, kerja sama BCSA Bank Indonesia – Bank of Korea (BoK) yang ditandatangani pada 6 Maret 2014 bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bilateral dan memperkuat kerja sama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kedua negara. Kerja sama ini juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan USD dalam setelmen transaksi perdagangan. Kerja sama BCSA bernilai KRW10,7 triliun/Rp115 triliun (ekuivalen USD10 miliar) ini berlaku efektif selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Meanwhile , Bank Indonesia signed a cooperation BCSA with the Bank of Korea (BOK) on 6th March 2014 , which aims to promote bilateral trade and strengthen the financial cooperation between the two countries. The partnership also aims to reduce dependency on the use of the USD in transaction settlement. BCSA cooperation worth KRW10,7 trillion/Rp115 trillion (equivalent to USD 10 billion) is effective for 3 years and can be extended according to the agreement.

Selain dengan BoK, Bank Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama BCSA dengan Tiongkok pada 1 Oktober 2013 sebesar CNY100 miliar/Rp150 triliun. Bank Indonesia juga menjalin kerja sama dalam bentuk *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) senilai USD22,76 miliar yang ditandatangani pada 12 Desember 2013. BSA merupakan fasilitas pemupukan cadangan devisa dengan menggunakan metode transaksi *swap* USD dengan Rupiah yang bertujuan mengatasi masalah neraca pembayaran dan kesulitan likuiditas jangka pendek.

In addition to the BoK, Bank Indonesia signed an earlier BCSA with China on 1st October 2013 valued at CNY100 billion/Rp150 trillion. Furthermore, Bank Indonesia also entered into a bilateral swap arrangement (BSA) worth US$22.76 billion, signed on 12th December 2013, to bolster foreign exchange reserves through USD swap transactions against the rupiah that aim to overcome problems in the balance of payments and inadequate short-term liquidity.

OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA DAN STRATEGI KE DEPAN

Perekonomian nasional masih akan menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersumber dari global, regional maupun domestik. Tantangan dari sisi global terutama masih adanya risiko pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata dan divergensi kebijakan moneter di negara maju, sehingga volume perdagangan dunia diprakirakan masih tumbuh moderat dan risiko volatilitas aliran modal masih besar. Sedangkan dari sisi regional, terdapat peluang bagi Indonesia untuk mengambil manfaat dari implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015. Namun kemampuan memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecepatan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor, tidak saja dalam rantai nilai ASEAN tapi juga rantai nilai global.

Sementara itu dari domestik sendiri, tantangan yang dihadapi adalah adanya sejumlah permasalahan struktural terkait fundamental ekonomi yang masih belum terselesaikan dan memengaruhi kemampuan perekonomian untuk dapat melaju ke lintasan yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Pertama adalah tantangan untuk mencukupi dua input penting bagi proses industrialisasi dan percepatan transformasi ekonomi Indonesia ke tingkat perekonomian yang lebih maju, yaitu pangan dan energi. Kedua adalah tantangan untuk memperkuat laju industrialisasi dan daya saing sektor industri dalam jaringan produksi global. Kemampuan untuk melanjutkan proses industrialisasi, termasuk untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dalam rantai nilai global (*moving up the value chain*), akan sangat memengaruhi kemampuan Indonesia untuk bermigrasi ke negara industri dengan dukungan struktur neraca transaksi berjalan yang lebih kuat. Ketiga adalah tantangan memperkuat basis pembiayaan jangka panjang untuk aktivitas investasi swasta yang berkesinambungan dan mendukung implementasi program pembangunan oleh Pemerintah. Keempat adalah tantangan untuk terus membuka akses yang lebih merata bagi semua warga negara agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Masih terbatasnya perbaikan perekonomian global akan berdampak pada berlanjutnya penurunan harga komoditas utama dunia, termasuk minyak. Di sisi domestik, kebijakan reformasi energi yang ditempuh Pemerintah pada November 2014, selain memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah untuk meningkatkan belanja modal, juga akan mendorong penurunan impor migas.

INDONESIA'S ECONOMIC OUTLOOK AND FUTURE STRATEGY

The domestic economy will continue to face numerous challenges that emanate from global, regional and domestic issues. The challenges at the global level mainly are the prevailing risks pertaining to the uneven pace of economic recovery and divergence of monetary policy in developed countries, which are forecasted to cause the world trade volume to grow at a moderate pace and the capital flow volatility risk to loom large. From the regional level, there are opportunities for Indonesia to take advantage of the 2015 ASEAN Economic Community (AEC) implementation. However, the ability to benefit from these opportunities will depend heavily on how fast Indonesia can increase the nation's attractiveness as a production base for export, not only in ASEAN value chain but also the global value chain.

Meanwhile domestically, the challenges are posed by numerous structural problems pertaining to the economic fundamentals that have yet to be resolved, which affected the economic ability to continuously advance to a higher level. First is the challenge of providing two important inputs for the industrialization process and accelerating Indonesia economic transformation into a more advanced economic level, namely food and energy. Second is the challenge to increase the pace of industrialization and industrial sector competitiveness in the global production networks. The ability to move forward with industrialisation, which includes moving up the global value chain, will greatly influence Indonesia's ability to join the ranks of industrialised nations with the support of stronger current account structure. Third is the challenge of strengthening the long-term financing base for sustainable private investment activity and support the implementation of the Government's development programs. Fourth is the challenge to keep opening a more equitable access for all citizens to take advantage of economic opportunities.

Limited global economic improvements will perpetuate sliding international commodity prices, including oil. On the home front, government-led energy reforms introduced in November 2014 will not only create fiscal space for the government but also reduce oil and gas imports.

Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia memprakirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 berkisar pada 5,0-5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2015 diprakirakan masih terbatas dan akan membaik pada triwulan-triwulan mendatang. Hal ini didukung oleh meningkatnya konsumsi dan investasi, sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh Pemerintah dan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. Dengan perkembangan tersebut, defisit transaksi berjalan diprakirakan berada di kisaran 2,5-3,0% dari produk domestik bruto (PDB) dengan struktur yang lebih sehat. Pada 2015, investasi diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari realisasi 2014. Potensi pertumbuhan investasi yang masih cukup kuat juga didukung oleh mulai meningkatnya permintaan eksternal terhadap produk ekspor Indonesia. Prakiraan tersebut didukung oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang produktif.

Consequently, Bank Indonesia projects Indonesia economic growth in the 5,0-5,4% range in 2015. Indonesia is projected to have limited economic growth in second quarter 2015 and will accelerate in the next quarter. This condition is due to greater consumption and investment in line with the increase of fiscal spending and distribution of bank loan. Therefore, the current account deficit is expected at 2,5-3,0% of GDP with a sounder structure. Investment in 2015 is projected to grow exceeding actual data for 2014. Strong potential investment stems from growing external demand for exported products from Indonesia. That prognosis is supported by government efforts to enhance spending efficacy by expanding allocation to productive sectors.

Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada peningkatan modal dasar pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Pada gilirannya, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan kapasitas perekonomian, dan memperluas kesempatan kerja. Kinerja ekspor tahun 2015 diperkirakan terus membaik meski terbatas. Perbaikan ekspor ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang kemudian mendorong pertumbuhan volume perdagangan dunia. Namun demikian, potensi perbaikan ekspor lebih lanjut akan tertahan oleh harga komoditas yang masih turun sejalan dengan masih lemahnya harga minyak dan lemahnya permintaan Tiongkok.

Productive spending will tend to focus on raising development capital, particularly infrastructure development to boost competitiveness and production capacity. Infrastructure development, in turn, will create value added, expand economic capacity and create job openings. Export growth is projected to accelerate in 2015 due to stronger global growth which will boost the volume of global trade. However, potential of export recovery will be moderated due to declining commodity price in line with weak oil price and China demand.

Pertumbuhan impor 2015 diprakirakan membaik didorong oleh membaiknya permintaan domestik dan meningkatnya kegiatan ekspor. Sejalan dengan perkiraan investasi yang tumbuh lebih tinggi, pertumbuhan impor barang modal, di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur, diprakirakan turut meningkat. Kegiatan produksi yang masih tetap kuat juga mendorong permintaan impor bahan baku untuk memenuhi permintaan ekspor yang tumbuh lebih cepat. Sementara itu, impor barang konsumsi diprakirakan masih tetap tumbuh sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat.

Import growth in 2015 is projected to increase as domestic demand rebounds and export activities pick up. In line with a predicted surge in investment growth, imports of capital goods related to infrastructure projects, amongst others, will also increase. Tenacious production activity will also drive demand for raw materials to meet stronger demand for exports. On the other hand, imports of consumer goods will continue to expand in line with resilient household consumption.

Sementara itu, inflasi diprakirakan kembali pada kisaran sasaran inflasi 2015 sebesar 4±1%. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah

Inflation is projected to return to its target corridor in 2015 of 4±1%. Inflation expectations will be anchored with support from the policy mix and policy coordination with the central and local government through the National and Regional Inflation Control Teams (TPI

melalui TPI dan TPID. Dari sisi eksternal, tekanan inflasi diprakirakan tidak terlalu besar. Hal tersebut sejalan dengan perkiraan harga komoditas yang masih turun di tengah laju pemulihan ekonomi global yang berlangsung secara gradual.

and TPID). Externally, only mild inflationary pressures are expected due to the ongoing trend of tumbling commodity prices amidst a gradual global recovery.

Dari sisi domestik, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pertengahan November 2014 menyebabkan tekanan inflasi dari sisi penawaran cukup tinggi. Namun demikian, respons kebijakan Bank Indonesia yang diperkuat koordinasi dengan Pemerintah, diperkirakan mampu membawa inflasi kembali ke dalam kisaran sasaran inflasi 2015. Optimisme ini juga diperkuat dengan prospek harga minyak dunia yang masih menurun dan diimplementasikannya kebijakan *fixed subsidy* sejak awal 2015.

From a domestic standpoint, the impact of a fuel price hike in the middle of November 2014 triggered intense supply-side inflationary pressures. Nevertheless, the policy response of Bank Indonesia, strengthened through government coordination, is expected to bring inflation back to within the target corridor in 2015. Optimism is further bolstered by the prospect of lower oil prices along with implementation of fixed subsidy policy at the beginning of 2015.

Selama 2015, stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terkendali. Kondisi ini ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui koordinasi dengan OJK. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan DPK dan kredit diperkirakan meningkat. Kisaran proyeksi pertumbuhan kredit itu masih konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas perekonomian domestik. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) diprakirakan masih tinggi, di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) diperkirakan tetap rendah dan stabil. Sementara itu, likuiditas perbankan diprakirakan semakin membaik seiring dengan operasi keuangan Pemerintah yang lebih ekspansif. Pasar saham maupun SBN diprakirakan juga mencatatkan kinerja yang positif sejalan dengan masih positifnya persepsi investor terhadap perbaikan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Financial system stability should be maintained in 2015 due to a resilient banking industry and strong financial markets. Bank Indonesia will continue to encourage the banking sector to play an active role in terms of supporting economic management through coordination with the Financial Services Authority (OJK).
In harmony with robust economic growth, deposit and credit growth are predicted to accelerate to 14-16% and 15-17% respectively, consistent with BI efforts to maintain domestic stability. All signs point to the bank Capital Adequacy Ratio (CAR) remaining well in excess of the 8% minimum threshold, while non-performing loans (NPL) should remain low and stable.
Adequate Bank liquidity is projected in line with expansive government financial operations. The stock market and tradeable government securities (SBN) market will both perform well due to the favourable perception investors have concerning domestic economic fundamentals and the outlook.

Dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah melalui beberapa dimensi bauran kebijakan. Bauran kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pertama, kebijakan Bank Indonesia akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kedua, koordinasi bauran kebijakan moneter dan fiskal akan diperkuat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan stimulus

Faced with the complexities of multiple challenges, Bank Indonesia will strengthen policy coordination with the Government in several dimensions of the policy mix. The policy mix is aimed to strengthen macroeconomic stability and promote higher and sustainable growth. First, Bank Indonesia policy will remain focused on maintaining macroeconomic stability and financial system stability by strengthening the policy mix in the areas of monetary, macroprudential, and payment systems. Second, coordination of monetary and fiscal policy mix will be strengthened. In this case, fiscal policy is geared to stimulate economic growth while maintaining fiscal sustainability through subsidy reform and tax reform.

pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal melalui reformasi subsidi dan reformasi pajak. Ketiga, kebijakan reformasi struktural untuk memperkokoh kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing industri dan perdagangan, memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dan mendorong inklusi ekonomi yang ditopang oleh stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta modal dasar pembangunan yang kuat.

Third, the structural reform policies are meant to reinforce food and energy sovereignty, improve the competitiveness of industry and trade, expand the sources of development financing, and promote economic inclusion supported by macroeconomic and financial system stability as well as strong key enablers for development.

Penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran akan tetap menjadi fokus Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Di bidang moneter, kebijakan akan tetap secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi agar terus berada dalam tren menurun menuju kisaran sasarannya dan ekspektasi inflasi tetap terjangkar, serta defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya. Pergerakan nilai tukar yang sejalan dengan nilai fundamentalnya akan tetap dijaga agar tidak mengakselerasi guliran ekspektasi depresiasi. Pada satu sisi, nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya akan kondusif bagi pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas sistem keuangan, namun di sisi lain nilai tukar juga dapat mendukung perbaikan daya saing. Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, bauran kebijakan yang tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi tersebut akan kondusif bagi upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia juga akan memastikan keseluruhan kerangka kebijakan makroekonomi memiliki koherensi dan merefleksikan kualitas pengelolaan ekonomi makro yang paripurna. Kualitas tersebut merupakan prasyarat paling mendasar bagi munculnya optimisme tentang perekonomian nasional ke depan. Selain itu, guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus melakukan penguatan operasi moneter, baik Rupiah maupun valas. Berbagai kebijakan di atas juga akan diperkuat oleh Bank Indonesia, antara lain, dengan terus melakukan berbagai upaya pendalaman pasar, pengelolaan lalu lintas devisa yang berhati-hati dan penguatan jaring pengaman keuangan internasional melalui kerjasama dengan pemangku kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Bank Indonesia will remain focused on strengthening the policy mix in monetary, macroprudential, and payment systems to maintain macroeconomic stability and financial system stability. In monetary policy, the policy will be consistently directed to curb inflation on a downward trend towards the targeted range and keep inflation expectations anchored, as well as bring down the current account deficit to a healthier level through interest rate policy and exchange rate stabilization in alignment with the fundamental value. The exchange rate movement will be maintained in line with its fundamental value to avoid triggering the acceleration of depreciation expectations. On one hand, an exchange rate in accordance with the fundamentals will be conducive to inflation target achievement and support financial system stability, but also support improved competitiveness. Amid the high uncertainty, the policy mix firmly focused on maintaining macroeconomic stability will be conducive to achieving sustainable economic growth. In this regard, Bank Indonesia will also ensure that the overall framework of macroeconomic policy is coherent and reflects the quality of well-rounded macroeconomic management. The quality is the most basic prerequisite for fostering optimism on the future of the domestic economy. In addition, to boost the effectiveness of monetary policy, Bank Indonesia will take further measures to strengthen monetary operations, both in Rupiah and foreign exchange. The above policies will also be reinforced by Bank Indonesia, among others, through market deepening, prudent management of foreign exchange flows and strengthening the international financial safety net through collaboration with international stakeholders in monetary policy stability and financial system stability.

Di bidang makroprudensial, relaksasi ketentuan makroprudensial akan dilakukan secara selektif guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif

In the macroprudential area, loosening macro-prudential regulations will be carried out selectively in order to broaden the sources of funding for banks and also support financial market deepening and promote lending to priority productive sectors. Bank Indonesia will provide

yang prioritas. Bank Indonesia akan mengarahkan agar kredit dan likuiditas dapat tumbuh selaras dengan kebutuhan perekonomian serta keseimbangan finansial tetap terjaga, dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam kaitan ini, koordinasi dengan OJK, Kementerian Keuangan dan LPS akan ditingkatkan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Kerangka kebijakan makroprudensial akan terus diperkuat dengan berpedoman pada standar internasional, inisiatif reformasi keuangan global, dan *best practices* yang diselaraskan dengan kondisi domestik. Untuk memastikan kredit dan likuiditas perekonomian selaras.

direction for credit and liquidity to be able to expand in line with the needs of the economy while maintaining financial equilibrium, in support of financial system stability. In this regard, coordination with the Indonesian Financial Services Authority (OJK), Ministry of Finance and the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) will continue to be enhanced through the Coordination Forum of Financial System Stability (FKSSK). The macroprudential policy framework will continue to be strengthened based on international standards, global financial reform initiative, and best practices in alignment with the domestic conditions. It is to ensure that credit and liquidity in the economy are aligned.

Sementara itu, dari sisi internal Bank Indonesia terus melakukan penguatan organisasi. Upaya penguatan dilakukan melalui Program Transformasi Bank Indonesia yang telah digulirkan pada 2014. Program yang menyasar pada pencapaian Visi Bank Indonesia 2024 ini mencakup lima area tema transformasi yang terdiri atas 25 Program Strategis dan disusun dalam suatu *road map*. Pada 2015, Bank Indonesia akan membangun 104 kapabilitas baru. Untuk dapat memberikan manfaat secara nyata dalam waktu dekat, pada semester I-2015, Bank Indonesia menyelesaikan 39 *quick wins. Quick wins* tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Strategis dan kegiatan utama Satuan Kerja di Bank Indonesia.

From the internal side, Bank Indonesia continuously strengthens the organisation through the Bank Indonesia Transformation Program that was rolled out in 2014. The program, which targets attaining the Bank Indonesia Vision for 2024, covers five transformation themes consisting of 25 Strategic Programs compiled into one roadmap. In 2015, Bank Indonesia will develop 104 new capabilities. In the first semester alone, Bank Indonesia will complete 39 quick wins in order to enjoy a number of real benefits in a brief period of time. The quick wins are an inextricable part of the strategic programs and a major activity of work units at Bank Indonesia.

Pencapaian *quick wins* ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh unsur institusi terhadap transformasi. Penyelesaian *quick wins* merupakan bagian dari sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada strategi tahunan Bank Indonesia 2015 yang digambarkan dalam suatu Peta Strategi 2015. Selain empat (4) sasaran strategis pada sisi *outcome* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Bank Indonesia, ditetapkan 12 sasaran strategis pada sisi proses internal dan sisi pengembangan kapasitas internal (sumber daya manusia dan sistem informasi).

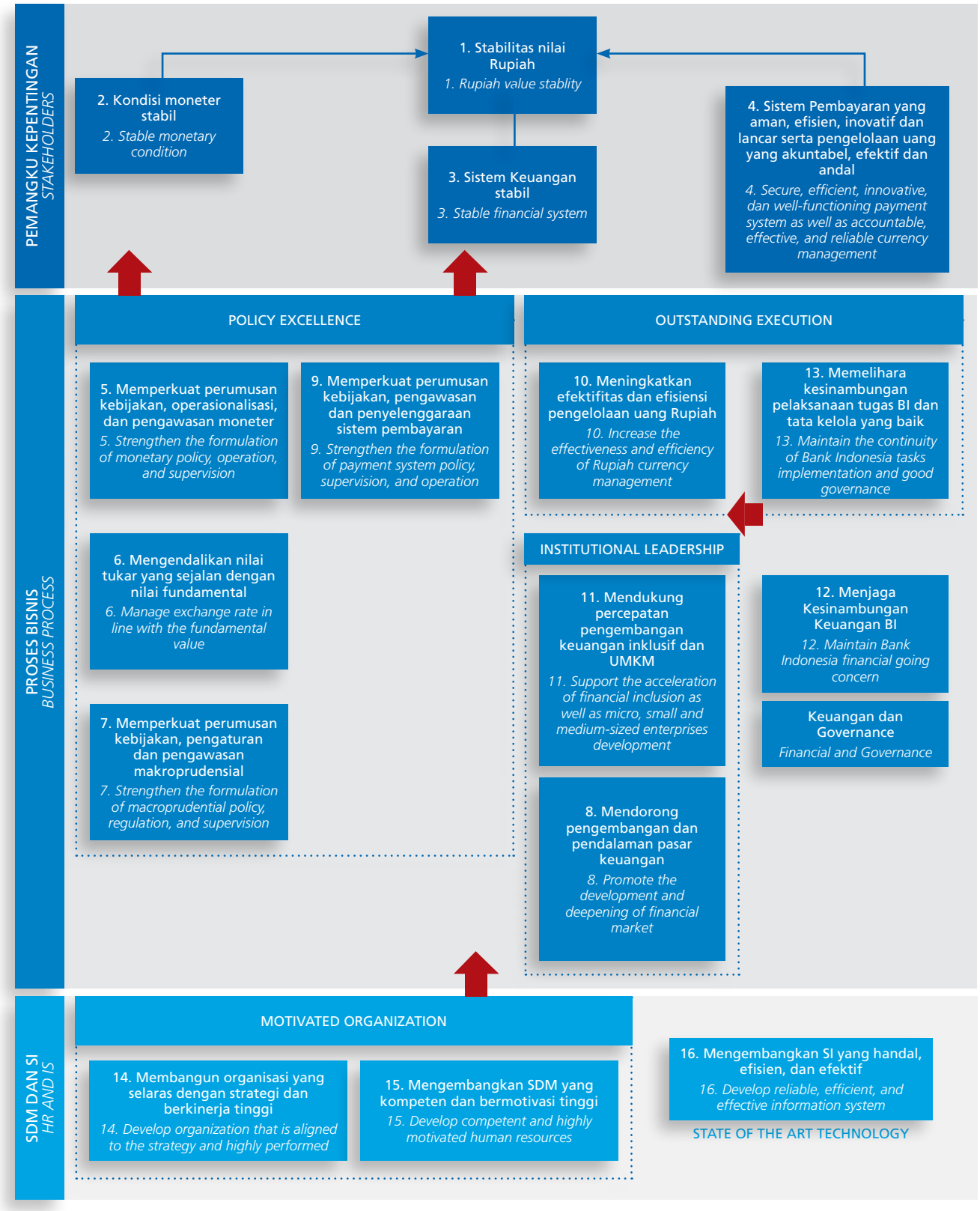
Completion of the 39 quick wins is part of the annual strategic targets that must be completed in 2015 as laid out in the 2015 Strategy Map. In addition to the four strategic targets on the outcome side pursuant to the Bank Indonesia Act, another 12 strategic targets were determined in terms of internal processes and internal capacity building (human resources and information systems).

39 QUICK WINS

"Untuk dapat memberikan manfaat yang dirasakan dari Program Transformasi Bank Indonesia, pada semester I 2015 akan diselesaikan 39 *quick wins*".

"To provide benefits from Bank Indonesia Transformation Program, in the first semester of 2015 39 quick wins will be accomplished."

Peta Strategi BI 2015
Bank Indonesia 2015 Strategic Map





Menjalankan amanah dengan ikhlas, kerja keras, dan integritas adalah benih meraih hasil terbaik. Tata kelola Bank Indonesia berperan penting untuk menjaga kesinambungan komitmen tersebut, sekaligus mengawal transformasi Bank Indonesia.

Carrying out the mandate with sincerity, hard work, and integrity are the seeds in attaining the best outcome. Bank Indonesia's governance plays a vital role in sustaining these commitments, as well as in escorting the transformation of Bank Indonesia.



TATA KELOLA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA

Bank Indonesia Governance and Transformation

Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mencapai tujuan merupakan amanat yang dipercayakan oleh bangsa yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Untuk itu, hasil dan proses dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan secara baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Menyadari pentingnya hal tersebut, Bank Indonesia membangun dan mengelola struktur dan tatanan kerja organisasi berdasarkan pada tiga pilar tata kelola (*governance*) bank sentral yang baik yakni Independensi, Akuntabilitas, dan Tranparansi.

Pilar Independensi dimaksudkan sebagai kewenangan untuk secara mandiri mengelola kebijakan dan sumber daya dengan tetap berkoordinasi bersama lembaga publik lainnya. Pilar akuntabilitas dimaknai sebagai kejelasan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik melalui perwakilan rakyat. Sementara itu, pilar transparansi menjamin keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah diambil Bank Indonesia.

Untuk menegakkan ketiga pilar tersebut, Anggota Dewan Gubernur dan seluruh pegawai dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma moral, melalui panduan perilaku dan penegakan disiplin Bank Indonesia.

The tasks and authorities of Bank Indonesia in achieving the objectives are contained within the trusted mandate stipulated in the Bank Indonesia Act. To that end, the outcomes and processes taken to achieve that mandate must be conducted appropriately and accountably. Acknowledging its importance, Bank Indonesia developes and manages an organisational structure based on three pillars of central bank governance, namely Independence, Accountability and Transparency.

The independency pillar is the authority to independently manage policy and resources in coordination with other public institutions.The accountability pilar clarifies the accountability mechanism for task and authority implementation at Bank Indonesia to the public through House of Representatives. Meanwhile, the transparency pillar guarantees information disclosure concerning task and policies implementation conducted by Bank Indonesia.

To uphold the three pillars of central bank governance, the member of Board of Governors and all employees are required to implement their tasks and authority pursuant to moral norms according to the code of conduct and enforcement of discipline at Bank Indonesia.

Dewan Gubernur

Board of Governors

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya.

As stipulated by the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, comprised of a Governor, a Senior Deputy Governor, and 4 (four) to 7 (seven) Deputy Governors. Each Member of the Board serves for 5 (five) years with the possibility of being reappointed for the same position in the subsequent period.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan mulai dari proses pemilihan hingga penilaian kinerja Dewan Gubernur. Proses pemilihan Anggota Dewan Gubernur dilakukan melalui mekanisme yang sejalan dengan konsep Pemerintahan yang demokratis.

Principles of good governance are applied throughout the processes starting from selection until performance appraisal of the Board of Governors. Members of the Board of Governors are selected through a mechanism that is in line with the concept of democratic government.

Anggota Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Gubernur, DPR-RI melakukan proses seleksi yang dikenal sebagai *fit and proper test* untuk mendalami visi, misi, keahlian, dan pengalaman kandidat.

Members of the Board of Governors are nominated and appointed by the President with the approval of the House of Representatives. In order to acquire appropriate and feasible candidates, the House of Representatives conducts a selection process known as fit and proper tests to gain an in-depth understanding of the candidates vision, mission, expertise and experience.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipiil dan strategis secara kolektif, yang penetapannya dilakukan melalui forum Rapat Dewan Gubernur. Dalam operasionalnya, Dewan Gubernur menetapkan pembagian bidang tugas dan wewenang untuk memperjelas tanggungjawab masing-masing Anggota Dewan Gubernur. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja pelaksanaan tugas Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama.

In the implementation of its duties, the Board of Governors determines principal and strategy policy collectively through Board of Governors' meetings. In its operation, the Board of Governors determines tasks and authority of the Board of Governors in order to clarify the responsibility of each respective member. As a form of accountability, the performance of the Board and each Board member is appraised according to Key Performance Indicators.

Pada 2014, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Agus D.W Martowardojo sebagai Gubernur, Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur yakni Halim Alamsyah, Ronald Waas, Perry Warjiyo, dan Hendar. Mirza Adityaswara pada 2014 terpilih untuk kedua kalinya oleh DPR-RI menjadi Deputi Gubernur Senior periode 2014 s.d 2019, setelah periode jabatan sebelumnya yaitu Oktober 2013 s.d 2014 selesai.

In 2014, members of the Bank Indonesia Board of Governors consisted of Agus D.W. Martowardojo as Governor, Mirza Adityaswara as Senior Deputy Governor and four Deputy Governors, namely Halim Alamsyah, Ronald Waas, Perry Warjiyo and Hendar. The House of Representatives reappointed Mirza Adityaswara in 2014 for a second term as Senior Deputy Governor for the period of 2014-2019 after completion of his previous tenure from October 2013-2014.

Pengawasan terhadap Bank Indonesia

Supervision of Bank Indonesia

Bank Indonesia bertanggung jawab kepada rakyat dalam pelaksanaan tugasnya melalui DPR-RI, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dilakukan oleh DPR-RI. Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dalam hal DPR-RI memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis. Penyampaian penjelasan dan keterangan antara lain dilakukan dalam forum Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI.

In the execution of its duties, Bank Indonesia is accountable to the public through the House of Representatives. Therefore, the House of Representatives supervises Bank Indonesia task and authority implementation. Pursuant to the Bank Indonesia Act, should the House of Representatives require a further explanation concerning any element of BI task and authority implementation, including appraising BI performance, Bank Indonesia is required to submit a verbal or written explanation at the House of Representatives Commission XI Work Meeting.

Beberapa topik yang umumnya dibahas dalam forum Rapat Kerja di antaranya terkait asumsi makroekonomi untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia.

The general topics discussed at the meeting include macroeconomic assumptions in relation to the proposed Draft of State Revenues and Expenditures Budget (RAPBN) and Draft of Bank Indonesia Annual Budget.

KEGIATAN BANK INDONESIA DENGAN DPD RI DAN DPR RI TAHUN 2014

BANK INDONESIA ACTIVITIES WITH DPR AND DPD 2014

No.	Nama Kegiatan *Activities*	Waktu *Time*	Tempat *Place*	Agenda Pembahasan *Agenda*
I. KEGIATAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) *ACTIVITIES WITH THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF REPUBLIC INDONESIA*				
1	Rapat Kerja dengan DPD RI *Work Meeting*	Maret *March*	Jakarta *Jakarta*	Penyaluran KUR dan Perkembangan UMKM di Indonesia *KUR and development of SMEs in Indonesia*
2	Rapat Kerja GBI dengan Komite IV DPD RI *Work Meeting with Committee IV*	Desember *December*	Jakarta *Jakarta*	Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2015 *Indonesian Economic Outlook 2015*
II. KEGIATAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) *ACTIVITIES WITH THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF REPUBLIC INDONESIA*				
1	Rapat Koordinasi dengan Panitia Kerja RUU Tentang Perbankan DPR RI *Coordination Meeting with Banking Act Working Committee*	Maret *March*	Jakarta *Jakarta*	Draft RUU tentang Perbankan *Banking Act Draft*
2	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Mei *May*	Banjarmasin *Banjarmasin*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah *Regional Inflation Monitoring*
3	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Mei *May*	Makassar *Makassar*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah *Regional Inflation Monitoring*
4	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Mei *May*	Mataram *Mataram*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah *Regional Inflation Monitoring*
5	Kunjungan Kerja Panitia Khusus Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) DPR RI *Special Committee of redenomination field work*	Juni *June*	Papua Barat *West Papua*	Draft RUU tentang Redenominasi *Redenomination Act Draft*

No.	Nama Kegiatan *Activities*	Waktu *Time*	Tempat *Place*	Agenda Pembahasan *Agenda*
6	Kunjungan Kerja Panitia Khusus Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) DPR RI *Special Committee of redenomination field work*	Juni *June*	Sumatera Barat *West Sumatera*	Draft RUU tentang Redenominasi *Redenomination Act Draft*
7	Kunjungan Kerja Panitia Khusus Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) DPR RI *Special Committee of redenomination field work*	Juni *June*	Jawa Timur *East Java*	Draft RUU tentang Redenominasi *Redenomination Act Draft*
8	Rapat Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia *Fit and Proper Test of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Candidate*	Juni *June*	Jakarta *Jakarta*	Fit and Proper Test DGS BI *Fit and Proper Test*
9	Rapat Pengambilan Keputusan terhadap hasil Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia *Decision Making Meeting for the Result of Field and Proper Test of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Candidate*	Juni *June*	Jakarta *Jakarta*	Pengambilan Keputusan terhadap hasil Fit and Proper Test DGS BI *Decision Making for the Fit and Proper Test Result*
10	Rapat Koordinasi dengan Panitia Kerja RUU Tentang Perbankan DPR RI *Coordination Meeting with Banking Act Working Committee*	Agustus *August*	Jakarta *Jakarta*	Draft RUU tentang Perbankan *Banking Act Draft*
11	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI *Commission XI Specific Field Work*	Agustus *August*	Yogyakarta *Yogyakarta*	Tingkat Inflasi Daerah dan Pengawasan terhadap penyaluran KUR *Regional Inflation and Distribution of KUR Monitoring*
12	Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI *Work Meeting with Commission XI*	Agustus *August*	Jakarta *Jakarta*	Penetapan Asumsi Makro Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 *Stipulation of Macroeconomic Assumption on State Revenues and Expenditures Budget 2015*

No.	Nama Kegiatan *Activities*	Waktu *Time*	Tempat *Place*	Agenda Pembahasan *Agenda*
13	Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI *Work Meeting with Commission XI*	September *September*	Jakarta *Jakarta*	Pengesahan ATBI Tahun Anggaran 2015 *Endorsement of Bank Indonesia Budget Year 2015*
14	Rapat Koordinasi dengan Anggota Komisi XI Periode 2009-2014 *Coordination Meeting with Commission XI Member for 2009-2014 period*	Oktober *October*	Jakarta *Jakarta*	Hubungan kerja antara Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI *Woking relation of BI and Commission XI*
15	Kunjungan Kerja Pimpinan DPR *House of Representatives Chairman Visit*	November *November*	Jakarta *Jakarta*	Mekanisme Pengelolaan Perpustakaan dan Museum Bank Indonesia *Management of Library and Museum of Bank Indonesia*
16	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI *Commission XI specific field work*	November *November*	Bandung *Bandung*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah *Regional Inflation Monitoring*
17	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI *Commission XI specific field work*	Desember *December*	Semarang *Semarang*	Pelaksanaan KUR Pemantauan Tingkat Inflasi *Regional Inflation and Distribution of KUR Monitoring*
18	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Desember *December*	Gorontalo *Gorontalo*	Daerah dan Pengawasan Pelaksanaan KUR *Regional Inflation and Distribution of KUR Monitoring*
19	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Desember *December*	Sumatera Utara *North Sumatera*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah dan Pengawasan Pelaksanaan KUR *Regional Inflation and Distribution of KUR Monitoring*
20	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI *Commission XI field work*	Desember *December*	Jawa Timur *East Java*	Pemantauan Tingkat Inflasi Daerah dan Pengawasan Pelaksanaan KUR *Regional Inflation and Distribution of KUR Monitoring*



Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan juga dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Pemeriksaan LKTBI 2014 didahului dengan audit interim pada Oktober 2014. Setelah periode laporan tahunan 2014 berakhir, dimulai pelaksanaan proses audit keuangan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKTBI 2014, Bank Indonesia kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan BPK RI.

Tindak lanjut terhadap temuan audit BPK pada 2014 oleh Bank Indonesia mencapai 95,68%. Langkah yang

The supervision of Bank Indonesia from financial aspects also conducted by the State Audit Board of the Republic of Indonesia through an audit of the Annual Financial Statements. The audit of the 2014 Bank Indonesia Annual Financial Statements was preceded by an interim audit in October 2014. Further, the full audit process began when the 2014 financial year was complete. Based on the audit of the 2014 Bank Indonesia Annual Financial Statements, Bank Indonesia received an Unqualified Opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia. That achievement was linked to Bank Indonesia efforts to follow-up on the audit findings submitted by the Audit Board.

Bank Indonesia addressed 95.68% of the follow-up actions on the findings of the 2014 Audit conducted by the Audit

dilakukan Bank Indonesia adalah dengan memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan. Pencapaian LKTBI dengan opini WTP selama dua belas tahun berturut-turut atau sejak 2003 mencerminkan kesungguhan dan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel. Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan BPK-RI disampaikan kepada DPR-RI. Sebagai wujud transparansi, Bank Indonesia juga mengumumkan laporan keuangan tahunannya kepada publik melalui media massa.

Board of the Republic of Indonesia. Measures conducted by Bank Indonesia included refining the preparation of annual financial statements. Twelve consecutive years of Unqualified Opinion from the Audit Board of the Republic of Indonesia since 2003 reflects the avowed commitment of Bank Indonesia to transparency and accountability. The auditor's report from Audit Board of the Republic of Indonesia was subsequently submitted to the House of Representatives. Furthermore, as a form of transparency, Bank Indonesia also publishes its Annual Financial Statements to the public through the mass media.

Selain audit terhadap laporan keuangan tahunan, pada 2014, BPK RI melakukan audit terhadap proses pencetakan, penerbitan, dan pemusnahan Rupiah guna menjamin akuntabilitas pelaksanaannya. Pelaksanaan audit tersebut mulai dilakukan sejak 2013 sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang tentang Mata Uang.

In addition to the audit of annual financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the printing, issuing and destruction of Rupiah banknotes and coins in 2014 to ensure accountable implementation. The audit was first conducted in 2013 pursuant to the Currency Act.

Hubungan dengan Pemerintah

Relationship with the Government

Tata kelola Bank Indonesia diperkuat dengan kejelasan hubungan antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan strategis, terutama Pemerintah. Hal tersebut diatur secara jelas dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia maupun undang-undang yang lain.

Bank Indonesia governance is strengthened through unambiguous relationships with strategic stakeholders, primarily the Government. The relationship with the Government is stipulated clearly in accordance with prevailing Bank Indonesia Act and other regulations.

Hubungan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah bertujuan agar masing-masing kebijakan dapat bersinergi dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Koordinasi tersebut antara lain berupa keikutsertaan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, keuangan, dan masalah lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Cooperation and coordination between Bank Indonesia and the Government aims to synergise the respective policies of each institution towards achievement of the macroeconomic targets. Coordination involves Bank Indonesia participation at cabinet meetings to discuss economic, banking and financial issues along with other issues related to the tasks and authority of Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), termasuk pada saat Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Bank Indonesia juga dapat mengundang wakil Pemerintah untuk hadir dalam RDG Bulanan guna memberikan pandangan dari sisi kebijakan fiskal.

Bank Indonesia also provides information to the Government concerning the proposed Draft of State Revenues and Expenditures Budget as well as when the government intends to issue government bonds. Bank Indonesia is also permitted to invite the Government Representatives to attend its monthly Board of Governors' meeting in order to provide a fiscal perspective.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan Pemerintah memiliki protokol koordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan

Maintaining financial system stability in Indonesia, Bank Indonesia and the Government have coordination protocols established through the Financial System

(FKSSK). Dalam forum tersebut, secara jelas diatur mengenai koordinasi dan peran masing-masing pihak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal, untuk pencegahan dan penanganan krisis.

Stability Coordination Forum (FSSCF). The Forum clearly regulates coordination and the respective roles of each party under normal and crisis conditions to prevent and resolve a crisis.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah dan memberikan remunerasi atas saldo kas Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan transaksi dan memperoleh informasi dari mutasi rekeningnya melalui *Bank Indonesia Government Electronic Banking* (BIG-eB).

In terms of the operational working relationship, Bank Indonesia holds the government cash account and provides remuneration on the government's cash account balance. Furthermore, the Government can transact and obtain account balance information through the Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB) application.

Sejak Januari 2014, aplikasi BIG-eB telah terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) milik Pemerintah. Aktivitas transaksi Pemerintah melalui Sistem BIG-eB selama 2014 menunjukkan peningkatan. Pada 2014, volume transaksi Sistem BIG-eB mencapai 19.123 transaksi dengan nominal sebesar Rp8.349,25 triliun.

Since January 2014, the BIG-eB application was connected to the State Budget and Treasury System (SPAN) owned by the Government. Consequently, government transactions through BIG-eB increased throughout 2014, with a transaction volume of 19,123 and a value of Rp8,349.25 trillion.

Berbagai permasalahan yang timbul, baik dari sisi kebijakan operasional maupun penggunaan BIG-eB, diselesaikan dalam Forum Harmonisasi (Forhar) yang diselenggarakan secara tahunan antara Bank Indonesia dan Pemerintah pada 6 November 2014. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan tindak lanjut atas penyelesaian 29 isu/topik oleh masing-masing lembaga.

The issues that subsequently emerged, in terms of operational policy and utilization of the BIG-eB system were resolved through the annual Harmonisation Forum hosted by Bank Indonesia and the Government on 6th November 2014. Consensus was reached at the Harmonisation Forum concerning follow-up actions for the 29 issues/topics raised by each institution.

Cakupan isu/topik yang dibahas antara lain mengenai usulan pengembangan fitur aplikasi sistem BIG-eB dan/atau BI-SSSS Generasi II, keikutsertaan Bank Indonesia dalam kegiatan diseminasi Kajian Fiskal Regional yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dan keikutsertaan Kementerian Keuangan dalam kegiatan diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

The topics discussed include, inter alia, the proposed additional features of the BIG-eB system and/or the Generation II BI-SSSS, Bank Indonesia participation in dissemination activity for the Regional Fiscal Review conducted by the Ministry of Finance as well as Ministry of Finance participation in dissemination activity for the Regional Economic and Financial Review conducted by Bank Indonesia.

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah juga menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Namun demikian, Bank Indonesia dilarang memberi kredit kepada Pemerintah. Di bidang pengelolaan mata uang Rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang.

For and on behalf of the Government, Bank Indonesia also receives external loans as well as settles and administrates government financial liabilities with international parties. However, Bank Indonesia is strictly forbidden from disbursing credit to the Government. In terms of Rupiah currency management, Bank Indonesia and the Government have a coordination mechanism for the planning, printing and destruction of currency.

Rapat Dewan Gubernur

Board of Governors' Meeting

Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, mekanisme dalam RDG diatur dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola bank sentral yang baik.

The Board of Governors' meeting (RDG) is the highest decision-making forum at Bank Indonesia. Accordingly, RDG mechanisms are regulated and based on the principles of good central bank governance. The Board of Governors' meeting is conducted monthly and weekly.

Penyelenggaraan RDG terdiri atas RDG Bulanan dan RDG Mingguan. RDG Bulanan bertujuan untuk menetapkan sikap *(stance)* kebijakan moneter yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. RDG Mingguan bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu. Pelaksanaan RDG Mingguan juga dilakukan untuk menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis yang berdampak luas, baik keluar maupun ke dalam Bank Indonesia.

The monthly RDG meeting aims to determine monetary policy stance and is convened at least once per month. The weekly RDG, however, aims to evaluate monetary policy implementation and is held at least once per week. Other principal and strategic policies are also formulated at the weekly meeting with far-reaching impacts within and outside Bank Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam RDG, materi yang diajukan untuk mendapatkan keputusan RDG terlebih dahulu harus dikaji dan dibahas secara matang dalam forum pembahasan/koordinasi di level departemen atau melalui pembahasan komite di Bank Indonesia. Materi yang akan dibahas juga harus dilengkapi dengan asesmen risiko dan mitigasi pengendaliannya terhadap usulan rekomendasi keputusan. Melalui upaya tersebut, Dewan Gubernur memiliki informasi yang lengkap dan komprehensif sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusan RDG.

To enhance RDG decision-making quality, the materials submitted must first be reviewed and discussed thoroughly at the department level or through committee discussions at Bank Indonesia. The materials must be supplemented with a risk assessment and suggested mitigation measures for the proposed recommendations. Consequently, the Board of Governors is furnished with complete and comprehensive information for consideration in the RDG decision-making process.

Sebagai bentuk transparansi, keputusan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan dipublikasikan kepada masyarakat pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RDG Bulanan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan jadwal RDG Bulanan untuk satu tahun, sebelum berakhirnya tahun berjalan. Melalui upaya tersebut, diharapkan pelaku ekonomi memiliki kepastian mengenai langkah kebijakan Bank Indonesia guna memperkuat perkembangan makroekonomi ke depan.

As a form of transparency, decisions made at the monthly RDG are published on the same day as the meeting. In addition, the schedule of the monthly RDG for the upcoming year is also announced prior to the end of the current year. Through such endeavours, economists receive assurances concerning Bank Indonesia policy to bolster macroeconomic development moving forward.

Selama 2014, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali RDG Bulanan sesuai jadwal yang telah dipublikasikan dan 1 kali RDG Bulanan tambahan yang dilakukan pada November 2014. Penyelenggaraan RDG Bulanan tambahan dinilai perlu guna memperkuat respons kebijakan Bank Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan terkini perekonomian.

Bank Indonesia convened 12 monthly RDG meetings in 2014 as per the published schedule as well as one additional monthly RDG meeting in November 2014 to strengthen the BI policy response in anticipation of the latest economic developments.

Penyelenggaraan RDG Mingguan tercatat sejumlah 59 kali dengan topik bahasan sebanyak 161 topik. Pembahasan dalam RDG Mingguan sebagian besar didominasi topik di bidang moneter guna mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan merumuskan bauran kebijakan. Selain membahas kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis terkait tugas pokok Bank Indonesia, RDG juga memutuskan kebijakan lainnya untuk memperkuat kapabilitas internal Bank Indonesia.

Furthermore, 59 weekly RDG meetings were held, discussing 161 topics dominated by monetary issues to evaluate monetary policy implementation and formulate the policy mix. In addition to discussing BI principal and strategic policies, the weekly RDG meeting also decided other policies to strengthen the internal capability of Bank Indonesia.

TABEL KOMPOSISI TOPIK YANG DIBAHAS DALAM RDG MINGGUAN

TABLE THE COMPOSITION OF THE TOPIC DISCUSSED IN WEEKLY BOARD MEETING

Uraian *Description*	Moneter *Monetary*	Stabilitas Sistem Keuangan *Financial System Stability*	Sistem Pembayaran *Payment System*	Pengelolaan Uang *Currency Management*	Kapabilitas Internal *Internal Capabilities*	Total *Total*
Jumlah Topik *Number of Topic*	79	7	7	11	57	161

Selama 2014, persentase kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam RDG Bulanan rata-rata sebesar 96,15%. Sedangkan persentase rata-rata tingkat kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam RDG Mingguan tercatat sebesar 80,85%.

In 2014, attendance of board members at monthly RDG meetings averaged 96.15%, while weekly RDG meetings at 80.85%.

TABEL KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DALAM RDG BULANAN

TABLE ATTENDANCE OF BOARD MEMBERS IN MONTHLY BOARD MEETING

Uraian *Description*	Agus D.W. Martowardojo	Mirza Adityaswara	Halim Alamsyah	Ronald Waas	Perry Warjiyo	Hendar
Hadir *Present*	12	12	13	12	13	13
Tidak Hadir *Absent*	1	1	0	1	0	0
% Kehadiran *% of Attendance*	92,3%	92,3%	100,0%	92,3%	100,0%	100,0%

TABEL KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DALAM PEMBAHASAN TOPIK PADA RDG MINGGUAN

TABLE ATTENDANCE OF BOARD MEMBERS IN WEEKLY BOARD MEETING

Uraian *Description*	Agus D.W. Martowardojo	Mirza Adityaswara	Halim Alamsyah	Ronald Waas	Perry Warjiyo	Hendar
Hadir *Present*	132	127	118	139	137	128
Tidak Hadir *Absent*	29	34	43	22	24	33
% Kehadiran *% of Attendance*	82,0%	78,9%	73,3%	86,3%	85,1%	79,5%

Komite
Committees

Kebijakan Bank Indonesia yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntabilitas, memerlukan dukungan proses perumusan kebijakan yang efektif dan terkoordinasi. Untuk itu, perumusan kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputus dalam Rapat Dewan Gubernur, dapat terlebih dahulu dibahas melalui rapat komite di Bank Indonesia selanjutnya, yang akan diputuskan oleh Komite akan membahas dan memberikan rekomendasi atas usulan kebijakan prinsipil dan strategis Dewan Gubernur.

Credible BI policy that meets accountability principles requires effective and coordinated policymaking. For that, principal and strategic policymaking at the Board of Governors' meeting is discussed in advance through committee meetings. Committees are responsible to discuss and provide recommendations for proposed principal and strategic policies in order to support the Board of Governors' decision-making process.

Komite di Bank Indonesia terdiri atas Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Kebijakan Sistem Pembayaran, Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan Komite Sumber Daya Manusia.

Committees at Bank Indonesia consist of Monetary Policy Committee, Financial System Stability Policy Committee, Payment System Policy Committee, Reserves Management Committee, and Human Resources Committee.

Keanggotaan masing-masing komite terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan salah satu Anggota Dewan Gubernur, serta anggota komite yang terdiri atas Anggota Dewan Gubernur dan pemimpin satuan kerja terkait. Dalam hal diperlukan, Dewan Gubernur dapat menunjuk pihak lain di luar Bank Indonesia sebagai anggota komite.

The members of committee consists of a Chairman and Vice Chairman who are members of the Board of Governor and Department heads. If necessary, the Board of Governors may appoint external parties aside of Bank Indonesia as committee members.

Manajemen Strategis
Strategic Management

Guna mencapai misi dan visinya, Bank Indonesia melakukan proses manajemen strategis yang terdiri atas tahap perumusan rencana strategis, implementasi dan monitoring strategi, serta evaluasi pencapaian kinerja.

To achieve its mission and vision, Bank Indonesia applies strategic management consisting of preparing strategic plans, implementation and monitoring as well as performance evaluation.

Proses perumusan rencana strategis pada 2014 dilakukan melalui Forum Strategis (Forstra) Bank Indonesia 2014. Forstra 2014 bukan saja menetapkan strategi jangka menengah dan tahunan, namun juga menetapkan strategi jangka panjang dalam bentuk Program Transformasi Bank Indonesia menuju Visi Bank Indonesia 2024.

The strategic plan for 2014 was discussed through the 2014 Bank Indonesia Strategic Forum (Forstra). The 2014 Forstra not only prepared the annual and medium-term strategy but also the long-term strategy in the form of the Bank Indonesia Transformation Program towards 2024.

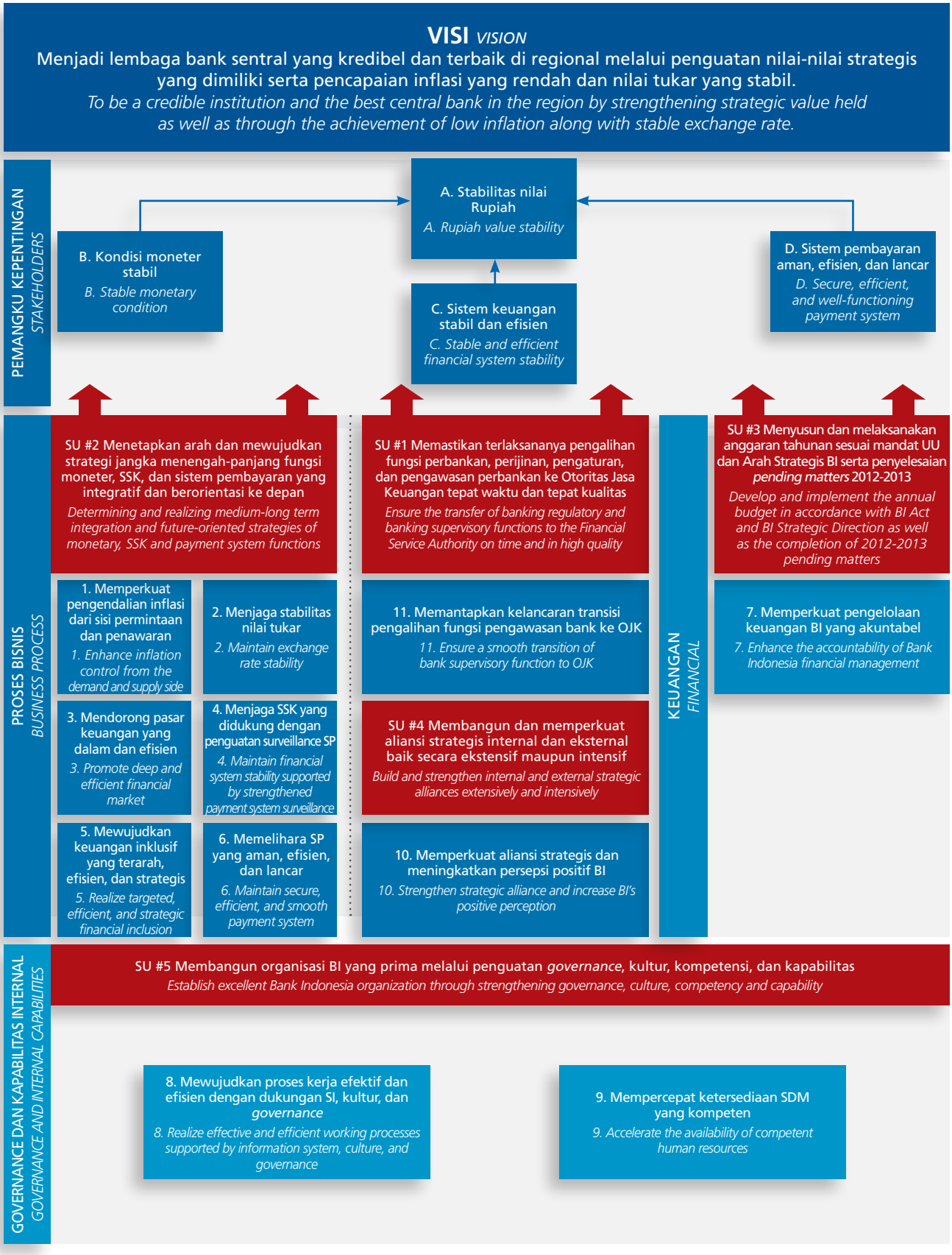
Program Transformasi dilakukan melalui tema transformasi dengan mencermati tantangan ke depan, baik domestik, regional, maupun regional. Tema transformasi ini selanjutnya dijabarkan dalam Program Strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja di Satuan Kerja hingga 2024. Untuk strategi tahunan 2014, telah ditetapkan Sasaran Strategis dan indikator pencapaian. Sasaran Strategis tersebut digambarkan dalam suatu Peta Strategi.

The Transformation Program is implemented through a transformation theme and reflects future domestic, regional and global challenges. The transformation theme was subsequently outlined in the Strategic Program as a reference for work program implementation for every work units until 2024. Concerning the 2014 Annual Strategy, the Strategic Targets and achievement indicators have already been determined.

Pelaksanaan strategi Bank Indonesia dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui pemantauan dan *review* terhadap realisasi program kerja, serta pencapaian indikator kinerja. Selanjutnya, pada akhir tahun dilakukan evaluasi akhir serta penilaian kinerja Bank Indonesia, satuan kerja, hingga ke level individu.

The implementation of Bank Indonesia strategy is monitored and assessed periodically through supervision and reviews of work program realisation and the achievement indicators. Further, a final assessment is conducted at year-end along with performance appraisals of Bank Indonesia, work units and individuals.

PETA STRATEGI BANK INDONESIA 2014
BANK INDONESIA 2014 STRATEGY MAP



Manajemen Risiko

Risk Management

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bank Indonesia menghadapi risiko kebijakan, risiko keuangan, dan risiko non keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia menyadari pentingnya proses manajemen risiko yang efektif dalam mengendalikan risiko, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Bank Indonesia.

In carrying out its duties and authority, Bank Indonesia encounters policy risk, financial risk, and non-financial risks. For that, Bank Indonesia realizes the importance of risk management processes to control risks deriving from internal and external sources of Bank Indonesia.

Pengelolaan risiko di Bank Indonesia masih dilakukan melalui fungsi yang terpisah di beberapa satuan kerja. Ke depan, Bank Indonesia menyempurnakan fungsi pengelolaan risiko dengan pendekatan yang tersentralisasi, termasuk dengan membentuk satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko Bank Indonesia secara menyeluruh. Penyempurnaan dilakukan dengan mengacu pada *international best practises*.

Currently, risk management at Bank Indonesia is managed via a separate function conducted by several working units. In the near future, Bank Indonesia will shift its approach towards a centralized risk management. This will include establishing a working unit which is responsible for managing the overall risk of Bank Indonesia. The adjustment will be carried out by referring to international best practices.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The risks encountered by Bank Indonesia are as follow:

1. Risiko Kebijakan
   Risiko kebijakan terkait erat dengan karakteristik nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing (USD) yang relatif sensitif dipengaruhi faktor eksternal Indonesia seperti keuangan global, kondisi geopolitik domestik, dan faktor sentimen pasar lainnya. Selain itu, risiko kebijakan juga dapat muncul akibat inkonsistensi antar kebijakan secara lintas otoritas. Upaya mengendalikan risiko dalam rangka menciptakan stabilitas nilai tukar Rupiah antara lain dilakukan dengan koordinasi antar otoritas, pengaturan transaksi devisa hasil ekspor, dan pengaturan transaksi valuta asing.

   1. Policy Risk
   Risk policy is closely linked to the characteristics of the Rupiah against foreign currency (USD) which are relatively sensitive influenced by external factors such as the global financial, domestic geopolitical conditions, and market sentiment. In addition, the policy risks may also arise due to inconsistencies between policies across the authorities. To control the risks Bank Indonesia took efforts by coordinating with other authorities, issuing regulation on transaction export proceeds, and regulating foreign exchange transaction.

2. Risiko Keuangan
   Risiko keuangan Bank Indonesia terutama bersumber dari pengelolaan cadangan devisa dan kepemilikan surat-surat berharga (SSB) dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Risiko keuangan terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
   a. Risiko Kredit
      Risiko kredit berasal dari penempatan SSB dan pasar uang dalam rangka peningkatan imbal hasil terhadap pengelolaan cadangan devisa dan Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilakukan dengan pihak ketiga (*counterparty*).

      Risiko kredit emiten (*issuer*) SSB dan *counterparty* cadangan devisa saat ini sangat aman dengan *weighted average rating* dipertahankan di atas *minimum investment grade* yang diperkenankan. Upaya mengurangi risiko kredit dilakukan melalui penerapan batasan minimum *credit rating* emiten SSB dan *counterparties* yang dinilai aman dalam pengelolaan cadangan devisa.

   2. Financial Risk
   Bank Indonesia's financial risks mainly derive from the reserves management and the ownership of securities (SSB) in the implemsentation of monetary policy. Financial risks consist of credit risk, market risk, and liquidity risk.
   a. Credit Risk
      Credit risk derived from the placement of securities and the money market in order to increase the yield on the reserves management and the Open Market Operation (OMO) carried out by third parties (counterparty).

      At present, issuer credit risk and reserve management counterparty risk are very safe with a weighted average rating is maintained above the tolerable minimum investment grade. To reduce the credit risk, Bank Indonesia applies the minimum credit rating of securities issuers and counterparties that are considered safe for reserves management.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit terhadap *counterparties* peserta OPT, mitigasi risiko dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan bank, kepatuhan terhadap Giro Wajib Minimum, serta kegiatan bank di pasar valas domestik.

In order to mitigate the credit risk arises from OMO participants, several measures are taken by observing the rating of bank participants, the compliance to statutory reserves, as well as the activities of banks in the domestic foreign exchange market.

b. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar Bank Indonesia muncul akibat ketidakpastian yang tinggi terkait rencana normalisasi suku bunga AS dan permasalahan utang Yunani. Untuk itu, pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan monitoring risiko pasar baik berupa pergerakan mata uang utama dunia (*hard currencies*) maupun suku bunga di pasar internasional. Pergerakan mata uang ditandai dengan penguatan Dolar AS yang terjadi secara menyeluruh terhadap seluruh mata uang utama dunia. Dengan demikian, portofolio non-Dolar AS mengalami penurunan nilai pada saat dihitung dalam satuan Dolar AS.

Pergerakan suku bunga ditandai dengan *yield US Treasury* yang bergerak melandai (*flattening*) dengan tenor di bawah 5 tahun mengalami kenaikan dan tenor di atas 5 tahun mengalami penurunan. Normalisasi suku bunga Fedres yang mengandung ketidakpastian tinggi dipengaruhi kondisi fundamental ekonomi AS. Penempatan portofolio aset dilakukan secara hati-hati berdasarkan tren perkembangan terkini kebijakan Fedres dan bank sentral negara maju lainnya. Untuk itu, pengelolaan risiko pasar secara periodik dilakukan melalui monitoring *Value at Risk* (VaR) untuk melihat toleransi risiko yang masih dapat diberikan terhadap portofolio. Disamping itu, pengelolaan risiko pasar juga dilakukan melalui monitoring *Tracking Error* untuk melihat deviasi imbal hasil portofolio terhadap *benchmark* yang ditetapkan sebagai acuan.

b. Market Risk

Bank Indonesia's market risk emerges from the high uncertainty due to the normalization of US interest rates and the debt problems of Greece. For that, the reserves management is done by monitoring the movement of major world currencies (hard currencies) and interest rates in the international market. Currency movements are characterized by the strengthening US Dollar that occurred as a whole against all major world currencies. Thus, the portfolio of non-US Dollar was impaired at the time a unit is calculated in US Dollars.

Interest rate movements marked with US Treasury yields moving ramp (flattening) with a tenor under 5 years has increased and tenor over 5 years decreased. Normalization of the Fed interest rates containing high uncertainty is influenced by US economic fundamentals. For that, the placement of asset portfolio performed carefully based on the current development trend Fedres's policy as well as policies taken by central banks in developed countries. To that end, the market risk management periodically carried out through monitoring of Value at Risk (VaR) to look at risk tolerance can still be given to the portfolio. In addition, market risk management is also done through monitoring tracking error to observe the deviation of the yield on the benchmark portfolio defined as a reference.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas Bank Indonesia bersumber dari pemenuhan kewajiban dalam rangka pembayaran utang luar negeri Bank Indonesia dan Pemerintah, serta dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah. Untuk memitigasi risiko likuiditas, Bank Indonesia memenuhi kecukupan likuiditas yang digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban.

c. Liquidity Risk

Bank Indonesia liquidity risk derives from the fulfillment of obligation to repay debt belongs to Bank Indonesia and the Government. Bank Indonesia is also exposed liquidity risk from the foreign exchange market operation. To mitigate liquidity risk, Bank Indonesia provides adequate liquidity used to make the payment obligation.

3. Risiko Non Keuangan
Risiko non keuangan terdiri dari risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi.

a. Risiko Operasional
Risiko operasional terutama terkait dengan keandalan sistem informasi dan telekomunikasi dalam kegiatan sistem pembayaran (kliring dan/atau Sistem BI-RTGS). Untuk memitigasi risiko tersebut, upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan sistem pembayaran terus dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem dan jaringan komunikasi guna meminimalisir gangguan pada sistem kliring dan/atau Sistem BI-RTGS.

Pada sistem pembayaran tunai, tantangan utama adalah memenuhi kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah NKRI. Upaya mitigasi risiko dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam kegiatan perencanaan, kajian penetapan *durable paper*, sosialisasi dan edukasi, peningkatan pengamanan uang Rupiah, serta kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

Pengendalian risiko operasional secara umum dilakukan dengan pemisahan fungsi antara pelaku transaksi (*front office*) dengan pelaku penyelesaian transaksi (*back office*), monitoring kepatuhan terhadap pedoman oleh satuan kerja manajemen risiko, dan penguatan fungsi internal audit. Selain itu, untuk memastikan kelancaran operasional dalam kondisi bencana, Bank Indonesia terus melakukan penguatan *Business Continuity Plan* (BCP).

b. Risiko Hukum
Risiko hukum dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian agar dalam menjalankan tugas dan amanatnya senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Mitigasi risiko hukum dilakukan antara lain melalui analisis dan rekomendasi hukum serta koordinasi dengan *stakeholders*, khususnya dalam rangka pengaturan kejelasan kewenangan Bank Indonesia pasca-pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kejelasan peranan Bank Indonesia dalam Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

3. Non-Financial Risk
Non-financial risk comprises of operational risk, legal risk, and reputation risk.

a. Operational risk
Operational risk is primarily associated with the reliability of information systems and telecommunications in the activities of payment systems (clearing and/or BI-RTGS). To mitigate the risks, Bank Indonesia manages to improve the quality and capacity of services payment systems. These are done by developing systems and communication networks in order to minimize intrusion on clearing system and/or BI-RTGS system.

In the cash payment system, the main challenge is to provide currency in sufficient amount, appropriate denomination, and fit for circulation throughout Indonesia. Risk mitigation efforts done by improving coordination in the planning, establishment of durable paper studies, socialization and education, increasing security Rupiah, as well as cooperation and coordination with law enforcement agencies and other relevant institutions.

Operational risk control is generally done with the separation of functions between front office and back office (settlement), monitoring compliance by the risk management unit, and the strengthening of the internal audit function. In addition, to ensure smooth operations in disaster conditions, Bank Indonesia continued to strengthen the implementation of Business Continuity Plan (BCP).

b. Legal Risk
Legal risk is managed based on the precautionary principle in order to carry out Bank Indonesia's duties and mandate always be guided by rules and regulations. Legal risk mitigation is conducted through analysis and legal advice as well as coordination with stakeholders, particularly in the context of setting the authority of Bank Indonesia clarity post-formation Financial Services Authority, and the clarity of the role of Bank Indonesia in the Financial System Safety Net.

c. Risiko Reputasi
Risiko reputasi Bank Indonesia tidak terlepas dari pemberitaan negatif terutama terkait dengan kebijakan moneter, bauran kebijakan makroprudensial, kelancaran sistem pembayaran, maupun pengelolaan uang tunai. Oleh karena itu, penguatan dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan tugas Bank Indonesia ditingkatkan melalui program transformasi secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi, perumusan, pemantauan, dan evaluasi, serta manajemen opini publik terus dilakukan untuk menjaga reputasi Bank Indonesia.

c. Reputation Risk
Reputation risk Bank Indonesia cannot be separated from the negative news primarily related to monetary policy, macro-prudential policy mix, smooth operation of payment systems, as well as cash management. Therefore, the strengthening and improvement in policy making, as well as the implementation of the tasks of Bank Indonesia increased through transformation program on an ongoing basis. In addition, Bank Indonesia keeps to undertake coordination, formulation, monitoring and evaluation, and management of public opinion in order to maintain the reputation of Bank Indonesia.

4. Analisis Risiko: Aset
Pengelolaan risiko terhadap pengelolaan aset keuangan dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan devisa. Pemenuhan kebutuhan likuiditas menjadi prioritas tanpa meninggalkan optimalisasi imbal hasil pengeloaan devisa. Pengelolaan aset berupa penempatan jangka pendek dilakukan berdasarkan perkiraan terhadap kebutuhan likuiditas serta informasi pendukung terkait rencana pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Penempatan pada aset jangka panjang dilakukan mengacu tren di pasar keuangan internasional serta mempertimbangkan durasi portofolio. Pengendalian risiko aset juga dilakukan melalui monitoring *Value at Risk* (VaR) guna meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar.

4. Risk Analysis: Asset
Financial assets risk management is aimed to support reserves management activities. In managing the reserves, the need of liquidity is placed as a priority, without leaving the goal to optimize yields. Management of assets particularly short-term investments are carried out based on an estimate of the liquidity needs as well as supporting information related to the payment of the foreign debt of the government. Placements in long-term assets are made based on the trend in the international financial markets as well as considering the duration of the portfolio. Asset risk control is also carried out through monitoring of Value at Risk (VaR) with the purpose of minimizing the potential for greater losses.

5. Analisis Risiko: Kewajiban (Liabilities)
Pengelolaan risiko terhadap kewajiban Bank Indonesia dilakukan terkait dengan kegiatan penyerapan likuiditas moneter. Kondisi perbankan domestik masih dalam mengalami ekses likuiditas yang membutuhkan penyerapan likuiditas oleh bank sentral. Dari sisi liabilities, mitigasi risiko dilakukan antara lain dengan mendorong penyerapan likuiditas pada instrumen moneter dengan tenor panjang yaitu sembilan bulan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

5. Risk Analysis: Liabilities
Liabilities risk management relates to the absorption of monetary liquidity. At present, the domestic banking sector is still experiencing excess liquidity that requires absorption of liquidity by the central bank. To manage the risk, Bank Indonesia absorbs the liquidity excess by using a long-term monetary instrument i.e. nine months in Bank Indonesia Certificates (SBI).

Mitigasi risiko terhadap instrumen dilakukan dengan menerapkan masa tenggang (*month holding period*) 1 bulan, dimana pembeli SBI, baik bank atau non bank, residen maupun non residen, harus memegang SBI minimal selama 1 bulan sebelum menjual kembali di pasar sekunder. Pada tenor menengah, yaitu 3 dan 6 bulan, likuiditas diserap melalui instrumen Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Instrumen SDBI hanya diperuntukkan kepada bank domestik sebagai salah satu instrumen likuiditas bank. Likuiditas jangka pendek diserap melalui instrumen *reverse* repo SBN, di mana bank menempatkan likuiditas Rupiah pada Bank Indonesia dengan jaminan berupa SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

Mitigation of risks to the instrument carried out by applying a minimum grace period for SBI's buyers, a bank or non-bank, resident or non-resident, to hold the SBI. At least for one month, buyers must hold the SBI prior to resell the SBI on the secondary market. For medium-term, namely 3 and 6 months, the liquidity is absorbed via the monetary instrument of Bank Indonesia Certificates of Deposit (SDBI). SDBI instrument is only intended for domestic banks as an instrument of bank liquidity. Whereas for short-term, liquidity is absorbed by Bank Indonesia by using reverse repo instruments of government securities. Using this instrument, banks place their liquidity at Bank Indonesia in exchange for collateralized government securities owned by Bank Indonesia.

6. Analisis Risiko: Modal
Pengelolaan risiko aset dan *liabilities* ditujukan untuk mendukung terjaganya kecukupan modal Bank Indonesia. Pengelolaan devisa berdasarkan *best practises* memberikan dukungan optimal terhadap modal yang cukup sehat dalam menopang kegiatan bank sentral. Di sisi lain, penyerapan likuiditas moneter dalam tenor panjang berkontribusi menekan biaya penyerapan moneter. Di samping itu, pergerakan nilai tukar Rupiah ikut memberi pengaruh signifikan pada kondisi neraca Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah tetap menjadi prioritas utama sesuai tugas Bank Indonesia dalam menjaga nilai Rupiah.

6. Risk Analysis: Capital
Asset and liabilities risk management is intended to support the adequacy of Bank Indonesia's capital. The reserve management which adopts best practices provides optimum support for Bank Indonesia's capital in carrying out its activities. On the other hand, the absorption of long-term monetary liquidity contributes in reducing the cost of monetary operation. In addition, the movement of the exchange rate took a significant influence on the balance sheet of Bank Indonesia. In its capacity as a central bank, an attempt to maintain the stability of the exchange rate remains a top priority according to the task of Bank Indonesia in maintaining the value of the Rupiah.

Audit Internal

Internal Audit

Sebagai salah satu elemen tata kelola bank sentral yang baik, Bank Indonesia melaksanakan fungsi audit internal. Ruang lingkup fungsi audit internal meliputi pelaksanaan audit dan konsultasi terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Keberadaan fungsi audit internal adalah untuk memberikan keyakinan bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian mampu mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Proses ini dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta taat pada ketentuan yang berlaku. Kegiatan audit Bank Indonesia menggunakan metodologi audit yang berbasis risiko. Semakin tinggi risiko sasaran audit, maka semakin tinggi keharusan untuk dilakukannya audit internal.

Dalam menunjang pelaksanaan audit, Bank Indonesia menerapkan konsultasi sistem pengendalian internal. Konsultasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas bisnis proses berlandaskan pada tata kelola yang baik. Kegiatan konsultasi mencakup pemberian rekomendasi dalam penyusunan dan implementasi ketentuan, serta tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal. Kegiatan konsultasi juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan. Kegiatan konsultasi diberikan untuk internal Bank Indonesia dalam rangka perbaikan implementasi dan desain ketentuan.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran dan kualitas kegiatan audit serta kegiatan konsultasi, dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi auditor internal, salah satunya melalui sertifikasi nasional dan internasional. Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil audit, sejak 2002 Bank Indonesia menerapkan ISO 9001:2000 yang diperbarui menjadi ISO 9001:2008.

Penyempurnaan fungsi audit internal dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan *roadmap* pengembangan 2014 – 2018. Pengembangan audit intern mencakup aspek sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, serta database dan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI). Tujuan pengembangan diarahkan untuk memperkuat keberadaan, peran, dan fungsi audit internal di Bank Indonesia.

Dalam kaitan itu, dalam rangka memperkuat implementasi tata kelola di Bank Indonesia dan mendukung fungsi audit internal, sedang dikembangkan sistem pelaporan dan penindakan pelanggaran (Whistler Blowing System/WBS). Adapun penyiapan ketentuan, organisasi dan sosialisasi serta penyediaan sistem informasi pendukung WBS akan dilakukan pada 2015.

As one of the element of central banks governance, Bank Indonesia implements the internal audit function. The scope of the internal audit function includes audits and assurance on the governance, risk management, and control processes. The existence of internal audit function is to provide assurance that the governance, risk management, and control processes are able to support the achievement of Bank Indonesia objective. This process is carried out effectively and efficiently, as well as in adherence to applicable regulations. Bank Indonesia audit activities uses risk-based audit methodology. The higher the risks of audit targets, the higher the necessity to undertake internal audit.

To support audits, Bank Indonesia implements consultation processes in implementing the internal control systems. Consultation is aimed to improve the quality of business processes based on good governance. Consulting activities include giving recommendations in the preparation and implementation of regulations, as well as follow-up results of the internal and external audits. Consulting activities are also carried out in the form of socialization, workshops, and training. Internal consultation activities are conducted in order to improve the design and implementation of regulations.

Meanwhile, to support the conduct of high quality audit as well as consulting activities, human resources development is carried out by improving internal auditors competencies, among others are through national and international certification. On the other hand, to improve the quality of the result of audits, Bank Indonesia has implemented ISO 9001:2000 since 2002 and ever since updated to ISO 9001:2008.

Improvements to the internal audit functions were conducted on an ongoing basis in accordance with the roadmap development of 2014-2018. Development of internal audits covers all aspects of human resources, policies and procedures, organizational structure, as well as databases and Internal Audit Information System (SIAI). The development objective is aimed at strengthening the presence, roles, and functions of internal audit in Bank Indonesia.

In that regard, in order to strengthen governance implementation in Bank Indonesia and support the internal audit function, a Whistler Blowing System/ WBS is being developed. As for the related regulation, organization, and socialization as well as information systems supporting the WBS will be developed in 2015.

Kode Etik, Pedoman Perilaku, dan Disiplin Bank Indonesia

Bank Indonesia Code of Ethics, Code of Conduct and Discipline

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas, Bank Indonesia memiliki panduan perilaku bagi pegawai dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Panduan tersebut dituangkan dalam bentuk aturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, serta Peraturan Disiplin Bank Indonesia.

To ensure that the duties of Bank Indonesia are executed professionally and with integrity, Bank Indonesia applies guidelines for all employees and the Board of Governors. The guidelines are stated in Bank Indonesia Code of Ethics, Code of Conduct and Disciplinary Rules.

Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk: (i) menjaga integritas dan independensi Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas sesuai nilai-nilai strategis Bank Indonesia; (ii) memberikan kejelasan pedoman perilaku bagi pihak Bank Indonesia, bagi pegawai yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan bagi Anggota Dewan Gubernur dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; dan (iii) mendukung kebijakan Bank Indonesia yang didasari oleh prinsip-prinsip Good Governance. Pengaturan Pedoman Perilaku Bank Indonesia mencakup: (i) menegakkan integritas dan profesionalisme, (ii) menghindari benturan kepentingan, (iii) menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan, (iv) bersikap adil, dan (v) menjaga norma kesusilaan dan kesopanan.

The objectives of the regulation are to: (i) maintain BI integrity and independence during task implementation in accordance with Bank Indonesia strategic values; (ii) clarify the code of conduct to Bank Indonesia employees, those employed by Bank Indonesia and the Board of Governors in executing its duties and responsibilities, and (iii) support Bank Indonesia policy based on good governance principles. The Bank Indonesia Code of Conduct includes: (i) enforcing integrity and professionalism; (ii) avoiding conflicts of interest; (iii) maintaining independence and impartiality; (iv) being fair; and (v) maintaining moral and courteous norms.

Dalam menegakkan integritas, pegawai dan Anggota Dewan Gubernur juga berkewajiban: (i) melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) menjunjung tinggi kaidah moral yang berlaku umum di masyarakat, (iii) mengambil keputusan berdasarkan itikad baik, kejujuran, dan kemampuan, serta (iv) senantiasa meningkatkan pengetahuan. Untuk menegakkan panduan perilaku serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, Peraturan Disiplin Bank Indonesia mencakup: (i) definisi dan subjek pelanggaran disiplin, (ii) sanksi dan pembinaan, (iii) kewenangan mengenakan sanksi, (iv) mekanisme penegakan, dan (v) kewajiban finansial pegawai.

To enforce integrity, employees and the Board of Governors are required to: (i) execute their duties accountably pursuant to prevailing regulations; (ii) honour the moral norms accepted in society; (iii) take decisions based on good intensions, honesty and ability; and (iv) continuously enhance knowledge. To enforce the code of conduct and ensure task implementation follows the systems and procedures in place, Bank Indonesia Disciplinary Rules include: (i) the definitions and subjects of disciplinary violations; (ii) sanctions and guidance; (iii) the authority to impose sanctions; (iv) enforcement mechanisms; (v) employees' financial obligations.

Menata Organisasi dan Mengelola Kinerja

Restructuring the Organisation and Human Resources to Improve Performance

Peningkatan kinerja Bank Indonesia dilakukan melalui upaya pengembangan kapabilitas internal melalui peran sumber daya manusia (SDM) dan organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Pengembangan SDM dan organisasi dilakukan di semua bidang, bukan hanya di sektor moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pengembangan SDM dan organisasi bidang manajemen intern juga dilakukan untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan terwujudnya tata kelola organisasi Bank Indonesia yang lebih baik.

Performance at Bank Indonesia is improved through sustainable internal capacity building of the organisation and human resources (HR). Human capital and organisation development affects all facets of the organisation, not merely the monetary sector, payment system and financial system stability. Internal management is also enhanced to attain the core purposes as well as create good central bank governance.

Pada 2014, kebijakan strategis di bidang manajemen intern adalah penyempurnaan organisasi, penguatan kompetensi SDM, dan penguatan kebijakan manajemen SDM. Di bidang organisasi, kebijakan strategis difokuskan pada upaya evaluasi struktur organisasi. Evaluasi dilakukan secara terintegrasi bersamaan dengan program inisiatif menata fungsi-fungsi strategis Bank Indonesia sesuai dengan visi dan misi Bank Indonesia 2024. Penataan fungsi itu disusun dalam bentuk Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI).

In 2014, the strategic policy of internal management was to refine the organisation, strengthen HR competence and enhance HR management policy. In terms of the organisation, strategic policy focused on efforts to evaluate organisational structure. Integrated evaluations were conducted together with initiatives to restructure BI strategic functions in line with the mission and vision towards 2024. Function restructuring was contained within the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI).

Sebagai tindak lanjutnya, penataan organisasi sesuai arsitektur fungsi tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, penataan organisasi dilakukan dengan penguatan fungsi manajemen risiko yang ada melalui pembentukan satuan kerja Departemen Manajemen Risiko. Untuk mengelola perubahan Bank Indonesia menuju Visi 2024 dibentuk Pusat Program Transformasi Bank Indonesia.

As a follow-up measure, the organisation is currently being restructured gradually in accordance with the function architecture. At the preliminary stage, existing risk management was strengthened through the establishment of a Risk Management Department work unit. Furthermore, the Bank Indonesia Transformation Program Centre was established to manage the transformation towards Bank Indonesia's vision for 2024.

Penataan organisasi juga dilakukan dengan menyesuaikan struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), antara lain terkait dengan model bisnis Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi. Sejalan dengan penyesuaian struktur organisasi KPwDN, Bank Indonesia membentuk Departemen Regional. Departemen Regional melaksanakan fungsi antara lain: (i) koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh KPwDN, (ii) koordinasi antarKPwDN, dan (iii) koordinasi antara KPw DN dan Kantor Pusat Bank Indonesia.

Domestic Bank Indonesia Representative Offices (KPwDN) are also being restructured in terms of the business model, amongst others, for which a Regional Department was set up. The Regional Department is tasked with the following: (i) coordinating activities undertaken by KPwDN; (ii) coordinating between KPwDN; and (iii) coordinating between KPwDN and head office.

Sesuai dengan arah strategis Bank Indonesia, penguatan fungsi dan peran Bank Indonesia dilakukan pula terhadap Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. KPwBI DN diarahkan untuk menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian harga dan pengembangan ekonomi regional. Terkait hal ini, KPwBI DN memberikan kontribusi melalui kajian riset kebijakan, penyediaan data ekonomi regional, dan hasil survei untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah. KPwBI DN akan melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber

In accordance with Bank Indonesia strategic direction, the strengthening of Bank Indonesia functions and roles has also been conducted at Bank Indonesia Representative Office in the regions. KPwBI DN was directed to become a strategic partner for the regional government in controlling prices and regional economic development. Related to this, KPwBI DN contributed through policy research studies, provision of regional economic data, and survey results to support regional economic policy formulation. KPwBI DN will monitor vulnerability

Di bidang SDM, fokus kebijakan selama 2014 adalah terkait (i) upaya pemenuhan SDM tepat waktu, (ii) pengembangan SDM yang lebih optimal, dan (iii) penyempurnaan kebijakan manajemen SDM yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dan mendukung terciptanya *High Performance Organization* (HPO).

In terms of human resources (HR), policy focus in 2014 included: (i) efforts to meet the HR requirement in a timely manner; (ii) optimal HR development; and (iii) refinements to human resource management (HRM) policy in order to motivate employees and help create a High Performance Organization (HPO).







Internalisasi nilai-nilai strategis Bank Indonesia dilaksanakan melalui Program Perubahan *(Change Program)* generik yang diterapkan oleh seluruh pegawai di seluruh satuan kerja.

Internationalisation of the strategic values involves a generic BI Change Program which is applicable to all employees in all work units.

kerentanan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada sistem keuangan di daerah. Selain itu, KPwBI DN juga berperan mendukung perluasan akses keuangan, peningkatan kapabilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan ketahanan pangan daerah. Penguatan fungsi yang lain adalah manajemen kas yang lebih baik guna mendukung kelancaran transaksi keuangan dan memastikan ketersediaan uang layak edar di masyarakat.

sources that could lead to imbalances in the regional financial system. In addition, the KPwBI DN also acted to support the expansion of access to finance, improving the capabilities of Micro, Small and Medium Enterprises, and regional food security. The strengthening of other functions included better cash management to support smooth financial transactions and ensure the availability of cash fit for circulation in the community.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan berbagai pembenahan pada KPwBI DN. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas jaringan kantor Bank Indonesia di daerah dengan meresmikan dua KPwBI DN yakni KPwBI DN Provinsi Papua Barat di Manokwari pada 4 Desember 2014 dan KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang pada 27 November 2014. Dengan dibukanya kedua KPwBI tersebut, pada akhir 2014 Bank Indonesia memiliki 42 KPwBI DN.

To achieve this goal, Bank Indonesia conducted various improvements in KPwBI DN. In addition, Bank Indonesia also expanded Bank Indonesia office network in the regions with the opening of two KPwBI DN, namely KPwBI DN of West Papua Province in Manokwari, on 4th December 2014 and KPwBI DN of Bangka Belitung Islands in Pangkal Pinang on 27th November 2014. With the opening of the two KPwBI DN, at the end of 2014 Bank Indonesia has 42 KPwBI DN.

Di bidang SDM, fokus kebijakan selama 2014 adalah terkait: (i) upaya pemenuhan SDM tepat waktu, (ii) pengembangan SDM yang lebih optimal, dan (iii) penyempurnaan kebijakan manajemen SDM yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dan mendukung terciptanya *High Performance Organization* (HPO).

In terms of human resources (HR), policy focus in 2014 included: (i) efforts to meet the HR requirement in a timely manner; (ii) optimal HR development; and (iii) refinements to human resource management (HRM) policy in order to motivate employees and help create a High Performance Organization (HPO).

Berbagai langkah strategis di bidang organisasi dan SDM mulai dirumuskan dengan tema utama *Motivated Organization*. Tema ini bertujuan menata organisasi dan SDM Bank Indonesia melalui penerapan berbagai strategi kebijakan dan pendekatan *best practices* dalam pengelolaan SDM. Dengan demikian, SDM terbaik yang dimiliki Bank Indonesia mampu berkontribusi secara optimal dalam setiap lini pelaksanaan tugas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi.

Various strategic organisation and HR measures were formulated under the theme of a Motivated Organisation, which aims to restructure the organisation and HR of Bank Indonesia through strategic policies and best practices. Consequently, the best human resources at Bank Indonesia will remain highly motivated and contribute optimally in terms of task implementation.

Untuk mendukung terciptanya organisasi yang berkinerja tinggi, mulai 2014, Bank Indonesia telah mencanangkan nilai-nilai strategis yang terdiri atas 5 (lima) nilai yaitu (i) *Trust and Integrity*, (ii) *Professionalism*, (iii) *Excellence*, (iv) *Public Interest*, dan (v) *Coordination and Teamwork*. Untuk menginternalisasi nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan Program Perubahan (*Change Program*) generik.

Creating a high performance organisation (HPO), Bank Indonesia introduced five strategic values in 2014, namely (i) Trust and Integrity; (ii) Professionalism; (iii) Excellence; (iv) Public Interest; and (v) Coordination and Teamwork. Internationalization of the strategic values involves a generic BI Change Program.

Change Program generik tersebut diterapkan oleh seluruh pegawai di seluruh satuan kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya saling berbagi informasi setiap hari, efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan, serta selalu tepat waktu. *Change program* generik dilengkapi dengan *change program* spesifik di satuan kerja yang didesain untuk menyelaraskan transformasi budaya kerja di satuan kerja.

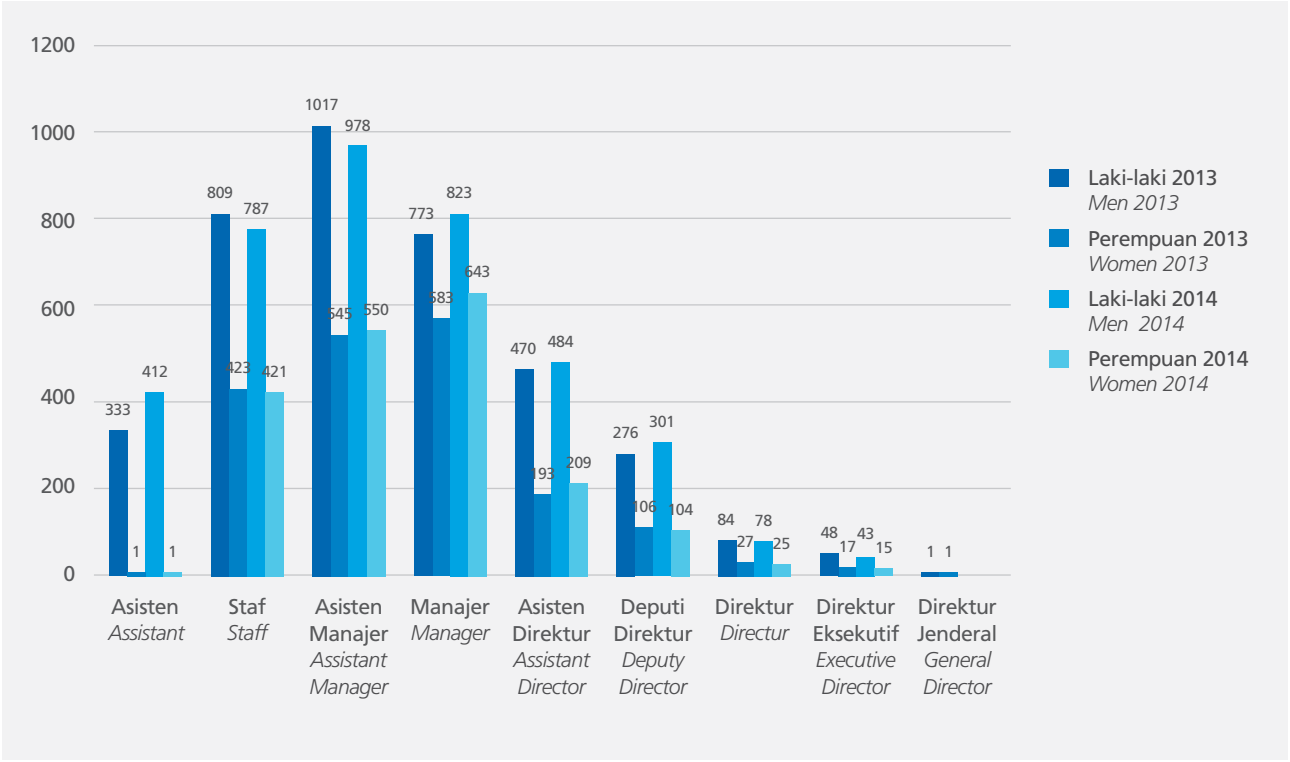
The generic Change Program is applicable to all employees in all work units and aims to build a culture of information exchange everyday, ensure the efficient and effective execution of duties as well as encourage timeliness. The generic change program is complemented with specific change programs for work units designed to harmonise cultural transformation at the work unit level.

PERBANDINGAN DATA PEGAWAI TAHUN 2013 DAN TAHUN 2014

1. BERDASARKAN GENDER DAN LEVEL JABATAN

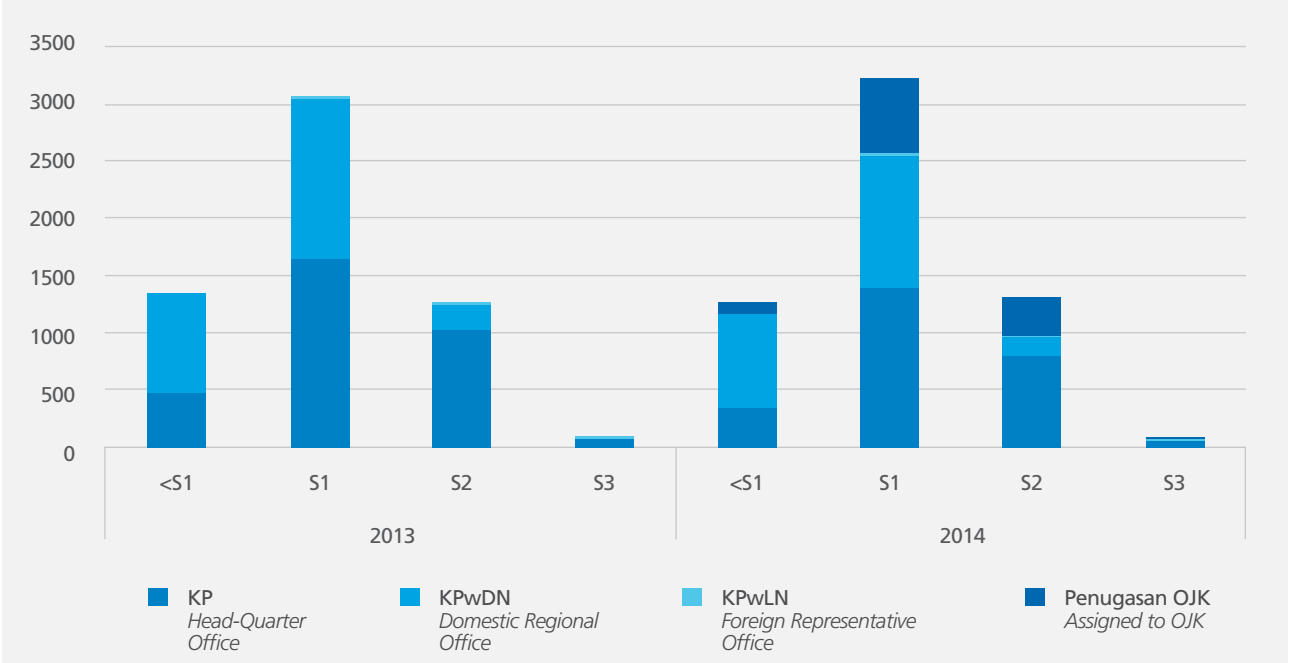
COMPARISON OF EMPLOYEE DATA BETWEEN 2013 AND 2014

1. *BASED ON GENDER AND JOB POSITION*



2. BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

2. *BASED ON ASSIGNMENT LOCATION AND LEVEL OF EDUCATION*



* Termasuk pegawai penugasan OJK, penugasan di tempat lain, PTB, dan pegawai yang cuti di luar tanggungan bank

** Including employees assigned to OJK, employees assigned to other institution, employees on education program, and employees taking unpaid leave.*

Komunikasi dan Edukasi Publik

Communication and Public Education

Bank Indonesia mengarahkan komunikasi untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral yang terbaik di regional. Komunikasi dan edukasi yang intensif dan efektif selama 2014, terbukti mampu membentuk ekspektasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia, salah satunya tercermin pada pencapaian inflasi inti yang terjaga. Publik juga memahami dan mendukung penuh kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Program komunikasi dan edukasi itu juga mampu menjaga persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fundamental ekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

Bank Indonesia directs communication towards attainment of the BI vision, namely to be the best central bank in the region. Intensive and effective communication and education throughout 2014 were shown to anchor public expectations in line with the policy direction of Bank Indonesia, as reflected in well-mitigated core inflation. The public also fully understood and supported BI policy in the monetary sector, macroprudential and payment system. The communication and education program also maintained market perception in domestic economic fundamentals and the financial system of Indonesia.

Komunikasi Bank Indonesia dilakukan melalui tahap perencanaan, implementasi komunikasi secara langsung (tatap muka) maupun pendekatan *multi-channel*, dan evaluasi untuk mengukur efektivitas komunikasi. Komunikasi dilakukan melalui media konvensional maupun media sosial lainnya. Hal ini dilakukan guna menjangkau seluas mungkin *stakeholders*.

BI communication is planned, implemented directly face-to-face and through a multichannel approach, and finally evaluated to measure the effectiveness. Various social media complement conventional communication in order to reach a broader range of stakeholders.

Untuk mensosialisasikan kebijakan, Bank Indonesia melakukan komunikasi dan edukasi secara intensif kepada *stakeholders* yang terkait langsung dengan kebijakan Bank Indonesia yaitu perbankan, pelaku pasar keuangan, investor, asosiasi, dan kalangan industri. Hal yang sama juga dilakukan kepada Pemerintah, parlemen, pengamat, media massa, akademisi, dan masyarakat luas.

To socialise policy, Bank Indonesia intensively educates and communicates with those directly affected, namely the banking industry, financial market players, investors, associations and industry groups. Such efforts are also extended to the government, parliament, observers, mass media, academics and the public.

Secara intensif, Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi, *focus group discussion* (FGD), dan sosialisasi kepada perbankan, investor, maupun pelaku usaha. Secara berkala, Bank Indonesia melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan DPR-RI. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pertemuan tatap muka dengan Pemerintah dalam bentuk rapat koordinasi untuk berbagi informasi dan koordinasi kebijakan. Kegiatan komunikasi dengan media dilakukan melalui konferensi pers, *media briefing*, pelatihan wartawan, FGD redaktur, dan *chief editor meeting*.

Bank Indonesia also undertakes intensive education, focus group discussions (FGD) and socialisation activities for the banking industry, investors and the business community. Furthermore, Bank Indonesia regularly holds working meetings and hearings with the House of Representatives and conducts face-to-face meetings with the government in the form of coordination meetings to share information and coordinate policy. Communication with the media is facilitated through press conferences, media briefings, journalist training, editor FGD and chief editor meetings.

Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pada 2014, Bank Indonesia membentuk forum akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi sekaligus memberikan informasi seputar pemahaman tugas dan kebijakan Bank Indonesia. Hal ini sebagai upaya melaksanakan pembelajaran kepada masyarakat tentang ilmu kebanksentralan. Informasi ini diharapkan dapat berguna bagi akademisi untuk kegiatan perkuliahan, narasumber seminar, penulisan artikel maupun sebagai narasumber di media masa.

Bank Indonesia tirelessly strives to build cooperation with various universities throughout Indonesia, which manifested in 2014 with the creation of prominent academic forums that aim to establish communication and provide information concerning the tasks and policies of Bank Indonesia. Such endeavours help educate the public concerning the science of central banking and the information is used by academics to give lectures, speak at seminars, compose articles as well as speak to the media.

Bank Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan kerjasama dengan 14 perguruan tinggi yang berada di Banda Aceh, Padang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Kupang, Pangkal Pinang, dan Manokwari. Kerjasama itu terkait pengembangan mata kuliah kebanksentralan dan bantuan dana penelitian. Selama 2014, pengiriman dosen tamu telah dilaksanakan kepada sebanyak 42 perguruan tinggi.

Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding (MoU) and cooperated with 14 colleges and universities located in Banda Aceh, Padang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Kupang, Pangkal Pinang and Manokwari to develop central banking courses and provide research funds. In 2014, guest lecturers were sent to 42 colleges and universities.

Selain untuk perguruan tinggi, Bank Indonesia melakukan edukasi kebanksentralan dalam beberapa bentuk. Pertama, *training of trainers* (ToT) kepada kalangan pemandu museum di wilayah Jakarta. Kedua, edukasi keuangan inklusif. Ketiga, edukasi kebanksentralan kepada kalangan SMA/SMK Jabodetabek dalam program *Museum Goes to School*. Keempat, pengajaran kepada publik dari beragam kalangan yang berkunjung ke Bank Indonesia. Secara berkala, Bank Indonesia juga mengadakan berbagai kegiatan edukasi kepada kalangan profesional, baik berskala nasional maupun internasional.

In addition to colleges and universities, Bank Indonesia also provided a number of other forms of central banking education. First, training of trainers (ToT) provided to museum guides in Jakarta. Second, financial inclusion education. Third, central banking education to school students in the Jabodetabek area through the Museum Goes to School program. Fourth, teaching visitors to Bank Indonesia. Furthermore, Bank Indonesia also regularly arranges various educational activities for professionals nationally and internationally.

Edukasi kebanksentralan bagi masyarakat umum juga dilakukan melalui Museum Bank Indonesia (MBI) seiring dengan perannya sebagai penyedia informasi kebanksentralan. Dalam ajang *Museum Awards* 2014, MBI meraih penghargaan sebagai Museum Terbaik kategori Museum Pemerintah di DKI Jakarta dan Museum Pemerintah Terbaik kategori Museum Pintar (Smart Museum). Sebelumnya, MBI termasuk 10 museum favorit wisatawan versi Trip Advisor pada 2013 dan Museum Terbaik di Provinsi DKI Jakarta pada 2012. Pada 2014, MBI juga meraih Sertifikat ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Museum.

Central banking education is also available to the public through the Bank Indonesia Museum (BIM) in line with its role as a provider of central banking information. At the Museum Awards Gala in 2014, BIM was recognised as the Best Museum in the Government Museum in Jakarta category and Best Government Museum in the Smart Museum category. Previously, BIM was included in the top ten favourite tourist museums by TripAdvisor in 2013 and the Best Museum in Jakarta in 2012. BIM received ISO 9001:2008 certification for Museum Services in 2014.

JUMLAH PENGUNJUNG MUSEUM BANK INDONESIA *NUMBER OF BANK INDONESIA MUSEUM VISITORS*

2014	2013	2012
252.476 orang *people*	**229.115** orang *people*	**248.583** orang *people*

PENGHARGAAN/SERTIFIKASI MUSEUM BANK INDONESIA *BIM AWARDS/CERTIFICATES*

2014	• Sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Museum *ISO 9001:2008 certification for Museum Services* • Penghargaan Museum Terbaik Tahun 2014 Kategori Museum Pemerintah di DKI Jakarta *Best Museum at the 2014 Museum Awards in the Government Museum in Jakarta category* • Museum Pemerintah Terbaik Museum Awards 2014 Kategori Museum Pintar (Smart Museum) *Best Government Museum at the 2014 Museum Awards in the Smart Museum category*
2013	• Termasuk 10 museum yang menjadi favorit wisatawan oleh TripAdvisor *Included in the top ten favourite tourist museums by TripAdvisor*
2012	• Museum terbaik di Provinsi DKI Jakarta *The best museum in DKI Jakarta Province* • Direkomendasikan Tripadvisor sebagai salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi *Recommended by TripAdvisor as a point of interest*

Layanan Informasi Publik

Public Information Services

Bank Indonesia terus menyempurnakan layanan informasi kepada masyarakat umum. Sejak diluncurkan 2013, melalui *contact center* Bicara *(BI Call and InteRaction*), Bank Indonesia terus melayani masyakakat melalui *call-center* 131, *visitor center, email*, dan surat. Sejak beroperasi 28 Oktober 2013, layanan Bicara telah berjalan sesuai standar internasional maupun Undang–Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008.

Bank Indonesia constantly refines its public information services. Since the launch of the BI Call and InteRaction contact centre in 2013, Bank Indonesia has served the public through the 131 call centre, visitor centre, email and letters. Since coming online on 28th October 2013, call services have been operated in accordance with international standards and the Public Information Act (No. 14 of 2008).

Sejak 2012, Bank Indonesia aktif mengimplementasikan UU KIP dan Gerakan *Open Government* Indonesia (OGI). OGI adalah sebuah gerakan untuk membangun Pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan lebih inovatif. Sejak dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 September 2011, OGI mengintegrasikan layanan informasi publik di *website* satulayanan, satuPemerintah, dan portal Lapor (Layanan aspirasi dan pengaduan *online* masyarakat). OGI juga mengintegrasikan *contact center* untuk layanan informasi publik.

Since 2012, Bank Indonesia has actively implemented the Public Information Act as well as Open Government Indonesia (OGI). OGI is a movement to build a more open, participatory and innovative government launched by the President of Indonesia on 20th September 2011. OGI integrates public information services on the one-service, one-government website and reporting portal (aspiration services and online complaints). OGI also integrates the contact centres for public information services.

Dalam program OGI, Bank Indonesia berperan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bank Indonesia. Melalui layanan ini, Bank Indonesia berupaya lebih dekat dengan publik dan masyarakat.

Bank Indonesia plays a role in the OGI program through the BI Information and Documentation Officer (PPID) who is deployed to approach the public.

Pada akhir 2014, Bank Indonesia menyesuaikan nomor layanan Bicara agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi maupun data terkini Bank Indonesia secara cepat dan murah, dengan biaya pulsa lokal. Mulai Januari 2015, nomor telepon Bicara menjadi 131 - tiga digit seperti layanan kepada masyarakat lainnya antara lain pos, kepolisian, pemadam kebakaran, Telkom, dan lain lain.

At the end of 2014, Bank Indonesia changed the phone number of the call centre to facilitate the public's voracity for the latest information and data at local call rates. Commencing in January 2015, the call centre number is 131, just three digits like other public services, such as the postal service, police, fire, Telkom and others.

Masyarakat dapat meminta data atau informasi tentang Bank Indonesia melalui beberapa cara, yakni *Call Center* 131 dan email ke Bicara@bi.go.id atau kirim fax ke (021) 3861458. Masyarakat juga bisa mengisi form permohonan informasi di website Bank Indonesia pada menu Layanan Informasi Publik.

The public can request and access data and information concerning Bank Indonesia through a variety of channels, including the call centre (131) and email to Bicara@bi.go.id or fax to (021) 3861458. An information request form is also available on the official BI website from the Public Information Services menu.



Selain itu, masyarakat bisa datang ke *Visitor Center* Bicara di Lobby Menara Sjafrudin Prawiranegara, Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No 2 Jakarta. Permintaan informasi dapat dilakukan melalui surat kepada Departemen Komunikasi Bank Indonesia, cq Unit Pelaksana PPID, Jl. MH Thamrin No.2 (Gedung Thamrin) Jakarta 10350.

Setiap Selasa dan Kamis, Bank Indonesia juga menerima masyarakat yang tertarik dengan hal-hal terkait lembaga, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Peserta kunjungan antara lain berasal dari sekolah, universitas, instansi, dan kelompok masyarakat lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada 2014, kunjungan masyarakat ke Bank Indonesia tercatat rata-rata 6 kali per bulan, dengan total peserta kunjungan mencapai 9.000 orang.

Visitors are also welcome at the Visitor Centre in the lobby of the Sjafrudin Prawiranegara Building, Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Requests for information can also be submitted by mail to BI Communication Department, cq Unit Pelaksana PPID, Jl. MH Thamrin No. 2 (Thamrin Building), Jakarta, 10350.

Every Tuesday and Thursday, Bank Indonesia also welcomes group visitors with an interest in the institution, tasks and authority of Bank Indonesia. Visitors arrive from schools, universities, institutions and other community groups, domestic and international. In 2014, public visits to Bank Indonesia averaged six per month, with total visitors numbering 9,000.

BANK INDONESIA

LAPORAN BICARA TAHUN 2014

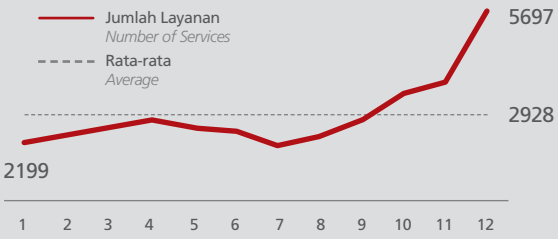
BICARA REPORT OF 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF *EXECUTIVE SUMMARY*

1. Total 35.134 permohonan informasi yang masuk melalui Telepon, Visitor Center, Surat maupun E-mail bicara@bi.go.id
   There are 35,134 information requests placed through phone, Visitor Center, letter and email bicara@bi.go.id
2. 95% stakeholders menyatakan puas terhadap pelayanan BICARA
   95% stakeholders expressed satisfaction with the services of BICARA
3. Informasi Debitur Individual Historis merupakan topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh stakeholders
   Historical Individual Debtor Information is the most frequently asked by stakeholders

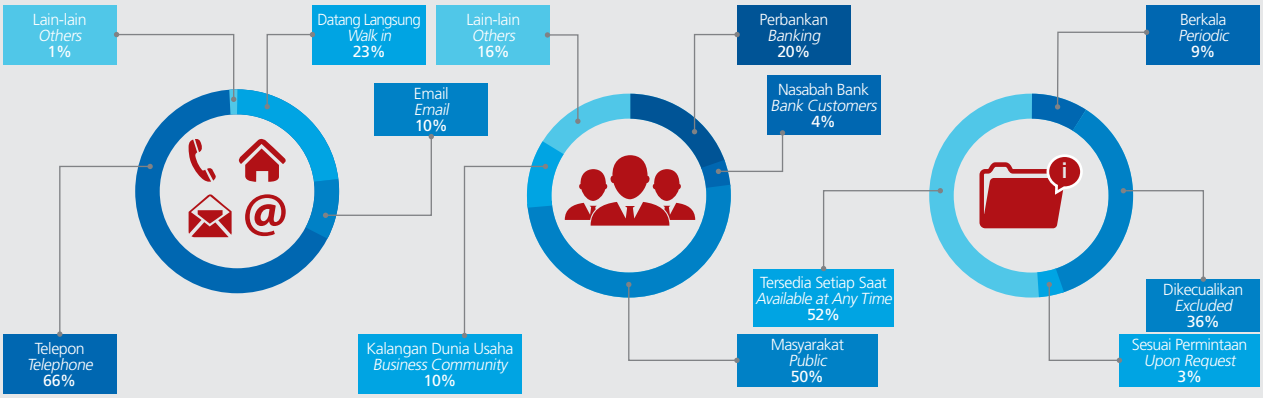
CONTACT CENTER BICARA (BANK INDONESIA CALL AND INTERACTION) - We Always Provide Solution

95%
STAKEHOLDERS
Menyatakan **PUAS** terhadap pelayanan **BICARA**
are SATISFIED with BICARA services



35.134
TIKET *TICKET*
Tahun 2014, **35.134** permohonan informasi yang dilayani oleh **BICARA**
In 2014, BICARA served 35,134 requests for information

1 HK
SOLVED
Permohonan Informasi Publik diselesaikan rata-rata dalam waktu **1 HARI KERJA**
REQUESTS FOR PUBLIC INFORMATION ARE ANSWERED WITHIN 1 WORKING DAY.



AWARDS

ISO 9001:2008 CERTIFIED

2014 THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA

The Best Contact Center Operation - **GOLD**

Bank Indonesia di Media Sosial

Bank Indonesia in Social Media

Selain program komunikasi konvensional, Bank Indonesia juga melakukan beberapa program komunikasi yang inovatif. Dengan pendekatan *multichannel*, Bank Indonesia memanfaatkan secara optimal berbagai media mulai dari media cetak, maupun elektronik (televisi, radio dan media *online*), termasuk *website* Bank Indonesia dan media sosial seperti *Twitter, YouTube, Flickr, dan Flipboard*.

In addition to conventional communication, Bank Indonesia also engages in various innovative communication programs. Through a multichannel approach, Bank Indonesia exploits a number of media, including traditional print media and electronic (television, radio and online media), encompassing the official BI website and social media such as Twitter, YouTube, Flickr and Flipboard.

Bentuk materi komunikasi juga disampaikan dalam berbagai media, selain siaran pers, *Newsletter* Gerai Info, laporan perekonomian, dan publikasi lainnya. Secara berkala, Bank Indonesia juga mendiseminasikan atau menyebarkan kebijakannya melalui iklan layanan masyarakat, *advertorial*, artikel media cetak, infografis, video *YouTube*, dan lainnya. Semua langkah itu untuk memastikan para pemangku kepentingan mendapatkan akses informasi kebijakan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

Communication material is presented in the form of press releases, newsletters, economic reports and other publications. Bank Indonesia also regularly disseminates and publicises policy through public service advertisements, advertorials, print media articles, infographics, YouTube videos and so on in order to ensure effective and efficient stakeholder access to policy information.

Pada 2014, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi terkait inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Sosialisasi dilakukan dengan menggelar *Blogger Competition* bekerjasama dengan Kompasiana. Kegiatan tersebut diikuti acara Nangkring Bareng dengan para *blogger* di Indonesia, yang digelar di kota Jakarta, Balikpapan, Yogyakarta, dan Medan.

In 2014, Bank Indonesia also undertook socialisation activities concerning inflation and financial system stability through a blogger competition in conjunction with Kompasiana, which was followed by events held for bloggers in Jakarta, Balikpapan, Yogyakarta and Medan.

Sebagai bentuk tingginya animo masyarakat untuk memperoleh informasi dari *website* Bank Indonesia, tercermin dari jumlah total pengunjung *website* Bank Indonesia. Pada 2014, website Bank Indonesia, www.bi.go.id, dilihat sebanyak 728 juta kali atau rata-rata 60 juta per bulan. Total pengunjung tercatat 61.618 visitors atau rata-rata 5.135 per bulan, dan halaman yang diakses (*page views*) sebanyak 106 juta halaman (rata-rata 8,9 juta halaman per bulan).

The growing number of visitors to the BI website is unequivocal evidence of the public's thirst for information. In 2014, the official website of Bank Indonesia received 728 million hits, averaging 60 million per month. Total visitors to the website amounted to 61,618, averaging 5,135 per month, with page views totalling 106 million (averaging 8.9 million pages per month).

Komunikasi Bank Indonesia yang dilakukan melalui *Twitter* juga mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Hingga akhir Desember 2014, *twitter* Bank Indonesia (@bank_indonesia) telah mencapai 171.442 *followers* dengan 2.548 kali tweet. Dibandingkan dengan pengikut *twitter* bank sentral lainnya, *twitter* Bank Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN dan urutan keempat di dunia. Penambahan *followers* berada di kisaran 71.000 *followers* (rata-rata 5.900 *followers* per bulan.

BI communication through Twitter has also found a place in the hearts of Indonesian people. As of the end of December 2014, the official BI Twitter account (@bank_indonesia) had 171,442 followers and 2,548 tweets. Compared to the number of followers other central banks have, the BI Twitter account placed first in ASEAN and fourth in the world, averaging 5,900 additional followers each month.

Media komunikasi Bank Indonesia melalui *YouTube* juga menunjukkan penggunaan yang signifikan. *YouTube* Bank Indonesia memiliki 76 video. Kanal tersebut telah dilihat sebanyak 312.986 kali dengan 440 *subscriber*. Selama 2014, *youTube* Bank Indonesia menayangkan sebanyak 30 video dengan 131.786 *viewer* dan 260 *subcriber*. Jumlah viewer tertinggi terjadi pada Desember yaitu sebanyak 103.590 *viewer*. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh keikutsertaan Bank Indonesia dalam *Digital Ads* di *Google, YouTube*, dan *Facebook* pada periode 19 Desember 2014 – 18 Januari 2015.

BI communication through YouTube also receives a significant amount of exposure. Bank Indonesia's YouTube channel hosts 76 videos, has 440 subscribers and has been viewed 312,986 times. In 2014, Bank Indonesia's YouTube channel broadcast 30 videos with 131,786 viewers and 260 subscribers. The number of viewers peaked in December at 103,590 in line with Bank Indonesia's active participation in Digital Ads on Google, YouTube and Facebook from 19th December 2014 – 18th January 2015.

Merespons perkembangan teknologi dan informasi, Bank Indonesia memperluas saluran media sosial dengan membuat akun pada situs berbagi foto *Flickr* dan situs kliping berita *Flipboard* (Januari 2014). Para wartawan sudah merasakan keberadaan *flickr* Bank Indonesia ketika mereka berhalangan hadir untuk mendokumentasikan kegiatan Bank Indonesia. Sebanyak 75 foto tentang kegiatan Bank Indonesia telah ditampilkan melalui *flickr* Bank Indonesia dan telah dilihat sebanyak 26.967 kali.

In response to information and technology development, Bank Indonesia expanded its social media presence to the photo-sharing site Flickr and the news-clipping site Flipboard. Journalists have already felt the BI Flickr presence when they were unable to attend an event and document BI activity. As many as 75 photos of BI activity have been posted through Flickr with 26,967 views.

Flipboard merupakan kumpulan kliping berita dari portal berita *online* yang memuat berita seputar Bank Indonesia. Keberadaan *Flipboard* bertujuan untuk memudahkan pencarian berita terkait Bank Indonesia. Hingga akhir 2014, tercatat 378 akun berlangganan. Dari 469 artikel yang ditampilkan sudah meraih 2.384 pembaca.

Flipboard is a news aggregator and clipping site containing BI news. A Flickr presence complements news searches concerning Bank Indonesia. Up to the end of 2014, BI on Flickr had 378 subscriber accounts. Furthermore, the 469 articles posted so far have been seen by 2,384 readers.

Dengan menggunakan media sosial, Bank Indonesia melakukan kampanye Uang Elektronik di *Google Display Network, YouTube*, dan *Facebook*. Kegiatan tersebut dilakukan pada 19 Desember 2014-18 Januari 2015 dengan pemasangan banner di berbagai situs partner jaringan *Google* (*Google Display Network*) dan *Facebook*. Selain itu juga dilakukan pemasangan iklan layanan masyarakat di *YouTube.*

Through social media, Bank Indonesia undertook an Electronic Money campaign on the Google Display Network, YouTube and Facebook from 19th December 2014 – 18th January 2015 with banners posted on various Google Display Network partner sites and Facebook. In addition, public service advertisements were also posted on YouTube.

Kampanye Uang Elektronik menghasilkan 29.594.869 impresi dan 302.271 klik di *Google*. Secara drastis, kampanye itu meningkatkan jumlah penonton *YouTube* Bank Indonesia, baik penonton video secara keseluruhan maupun penonton ILM Uang Elektronik. Berdasarkan statistik hasil kampanye, dapat disimpulkan bahwa *digital advertising* di media sosial sangat efektif untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia. Hal ini seiring dengan perubahan tren gaya hidup masyarakat yang mulai beralih ke digital.

The Electronic Money Campaign garnered 29,594,869 impressions and 302,271 clicks on Google. The Campaign drastically increased the number of BI YouTube viewers. According to campaign statistics, it can be concluded that digital advertising on social media is incredibly effective at socialising and communicating BI policy in line with the ongoing lifestyle trend shift towards digital.

Transformasi Menuju Bank Indonesia 2024

Transformation to Bank Indonesia 2024

"Melalui transformasi ini, kita berkomitmen untuk menjadikan Bank Indonesia yang kredibel dan lebih baik….."

"Through transformation, we are committed to making Bank Indonesia more credible and better…"

(Agus D.W. Martowardojo | Gubernur Bank Indonesia / *Governor of Bank Indonesia*)

Bank Indonesia telah mencanangkan program transformasi dengan menyusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024. Dewan Gubernur mendedikasikan diri untuk mewujudkan visi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional dan memberi manfaat lebih bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Bank Indonesia announced its transformation program by preparing the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) 2024. The Board of Governors has dedicated itself to realising the BI vision of becoming a credible central bank and the best in the region in the interest of the country and people of Indonesia.

Program transformasi diimplementasikan selaras dengan nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang mencakup *Trust & Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest,* serta *Coordination & Teamwork*. Untuk melaksanakan program transformasi yang terukur dan terkelola dengan baik, Bank Indonesia membentuk Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI). Pembentukan PPTBI ini untuk mengawal implementasi program transformasi. Implementasi program transformasi didukung dengan komitmen Dewan Gubernur, seluruh pimpinan, dan jajaran pegawai Bank Indonesia.

The transformation program is implemented in harmony with the BI strategic values of Trust and Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest as well as Coordination and Teamwork. Furthermore, Bank Indonesia established Center of Bank Indonesia Transformation Program (PPTBI) for the measured and managed implementation of the transformation program. PPTBI is charged with overseeing transformation program implementation with avowed commitment from the Board of Governors as well as all BI employees at all levels.

Penyusunan Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) 2024 didahului dengan diagnosa. Tahap berikutnya, menyusun rancangan arsitektur dan strategi dalam jangka menengah panjang 2014-2024. Selanjutnya, menyusun pentahapan penerapannya beserta *quick wins* dan beberapa inisiatif penting untuk pencapaian visi Bank Indonesia.

Preparing the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) 2024 was preceded by diagnosis. During the subsequent phase, the medium-long term strategy and architecture were designed for 2014-2024. Thereafter, phased implementation was prepared along with quick wins and several crucial initiatives to attain the BI vision.

Beberapa area substansi penting yang akan menjadi cakupan transformasi meliputi fungsi moneter, fungsi stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, fungsi sistem pembayaran, dan fungsi kapabilitas internal pendukung. Transformasi juga mencakup penguatan mekanisme koordinasi dengan lembaga mitra dalam pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, pengembangan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan koordinasi penting lainnya.

The substance of the transformation program involves the monetary function, financial system stability function (including macroprudential), payment system function and internal support capability function. Transformation also encompasses strengthening the coordination mechanisms with partner institutions in terms of inflation control, financial system stability, payment system development, financial market deepening and other important forms of coordination.

Dari penyusunan arsitektur tersebut, disepakati 5 tema transformasi dan 25 program strategis untuk mengantarkan Bank Indonesia menuju Bank Indonesia 2024:

Five transformation themes were agreed when compiling the architecture along with 25 strategic programs to lead Bank Indonesia towards 2024 as follows:

1. Policy Excellence

"Menerapkan program/inisiatif peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan Bank Indonesia"
"Applying programs/initiatives to enhance the quality and efficacy of Bank Indonesia policy."

Program yang akan dilakukan antara lain penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran-pengelolaan uang Rupiah, pengembangan *National and Regional Financial Balance Sheet,* serta peningkatan koordinasi dengan *stakeholders* dan transparansi komunikasi.

The programs include strengthening the monetary and macroprudential policy mix, payment system-Rupiah management, preparing national and regional financial balance sheets as well as enhancing coordination with stakeholders and transparent communication.

2. Outstanding Execution

"Melaksanakan program-program peningkatan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas proses kerja di seluruh satuan kerja"
"Implementing programs to enhance the efficiency, timeliness and quality of work processes at all work units."

Bank Indonesia akan memperkuat kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, membangun *Center of Excellence* (pengawasan yang komprehensif, terarah, dan efisien) di area sistem keuangan dan sistem pembayaran, serta manajemen risiko dan manajemen kelangsungan tugas Bank Indonesia.

Bank Indonesia will strengthen regional Bank Indonesia representative offices, develop a Centre of Excellence (comprehensive, targeted and efficient supervision) in the financial and payment systems as well as enhance risk management and continuity management.

3. Institutional Leadership

"Memelopori program-program yang *leading* dan *proactive (Proactive Leadership)* di antara lembaga-lembaga lain di Indonesia"
"Pioneering leading and proactive programs (Proactive Leadership) amongst other institutions in Indonesia."

Berkoordinasi dengan instansi terkait, program yang akan dilakukan adalah penguatan manajemen krisis, pendalaman pasar keuangan, pengembangan *National Payment Gateway*, mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (elektronifikasi instrumen pembayaran), pengembangan keuangan inklusif dan UMKM, serta keuangan syariah.

Coordinating with relevant institutions, the programs will include crisis management, financial market deepening, the National Payment Gateway, the National Noncash Movement (electronification of payment instruments), financial inclusion and MSME development as well as Islamic finance.

4. Motivated Organization

"Menerapkan program-program untuk meningkatkan skills, kapabilitas dan motivasi pegawai"
"Applying programs to ameliorate employee skills, capabilities and motivation. "

SDM Bank Indonesia harus mampu untuk tidak sekadar kompeten namun bermotivasi kuat dalam menjalankan tugasnya sesuai nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia akan melakukan serangkaian program kapabilitas dan motivasi pegawai. Program itu antara lain membangun Bank Indonesia Academy, transformasi strategi perencanaan SDM & rekrutmen, manajemen kinerja Bank Indonesia, *leadership engine* (pengelolaan *talent management* yang berfokus pada aspek kepemimpinan pegawai), dan restrukturisasi organisasi agar lebih efisien dan efektif.

Human resources at Bank Indonesia are not only required to be competent but also highly motivated to execute duties in accordance with the BI strategic values. To that end, Bank Indonesia will implement a range of employee motivation and capability programs, including the Bank Indonesia Academy, transforming HR planning and recruitment, performance management, the leadership engine (talent management focused on leadership) as well as organisational restructuring to be more effective and efficient.

5. State of the Art Technology

"Menjalankan program-program terkait dengan pemanfaatan teknologi & pendekatan mutakhir"
"Running programs concerning the utilisation of cutting-edge technology and approaches. "

Bank Indonesia akan meningkatkan pemanfaatan teknologi dan pendekatan mutakhir secara inovatif untuk mendukung program menjadi bank sentral yang terbaik. Beberapa program yang akan dilakukan adalah memanfaatkan Big Data untuk mendukung pengambilan keputusan, mentransformasi sistem informasi Bank Indonesia termasuk pengembangan proyek-proyek sistem informasi strategis.

Bank Indonesia will innovatively expand the use of state-of-the-art technology and approaches to support Bank Indonesia's vision of becoming the best central bank. The programs include utilising Big Data to support decision-making and transforming the Bank Indonesia information system, including developing strategic information system projects.

Kelima tema transformasi itu diterjemahkan ke dalam 25 Program Strategis. Ke-25 Program Strategis berfokus kepada penguatan fungsi/kapabilitas yang telah ada dan pengembangan kapabilitas baru. Penguatan dan pengembangan kapabilitas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

The five transformation themes were translated into 25 strategic programs focused on strengthening existing functions and capabilities as well as developing new capabilities. Capability reinforcement and development will be achieved by optimising existing resources.

5 TEMA TRANSFORMASI
5 TRANSFORMATION THEME

1	2	3	4	5
POLICY EXCELLENCE	**OUTSTANDING EXECUTION**	**INSTITUTIONAL LEADERSHIP**	**MOTIVATED ORGANIZATION**	**STATE OF THE ART TECHNOLOGY**
KUALITAS dan EFEKTIVITAS KEBIJAKAN	EFISIENSI, KETEPATAN WAKTU dan KUALITAS PROSES	PROGRAM-PROGRAM YANG LEADING dan INOVATIF	PENINGKATAN SKILLS, KAPABILITAS dan MOTIVASI	PEMANFAATAN TEKNOLOGI dan PENDEKATAN MUTAKHIR
Quality and Policy Effectiveness	Efficiency, Timeliness and Process Quality	Innovative and Leading Programs	Increased Skills, Capability and Motivation	Technology Utilization and Cutting-edge Method

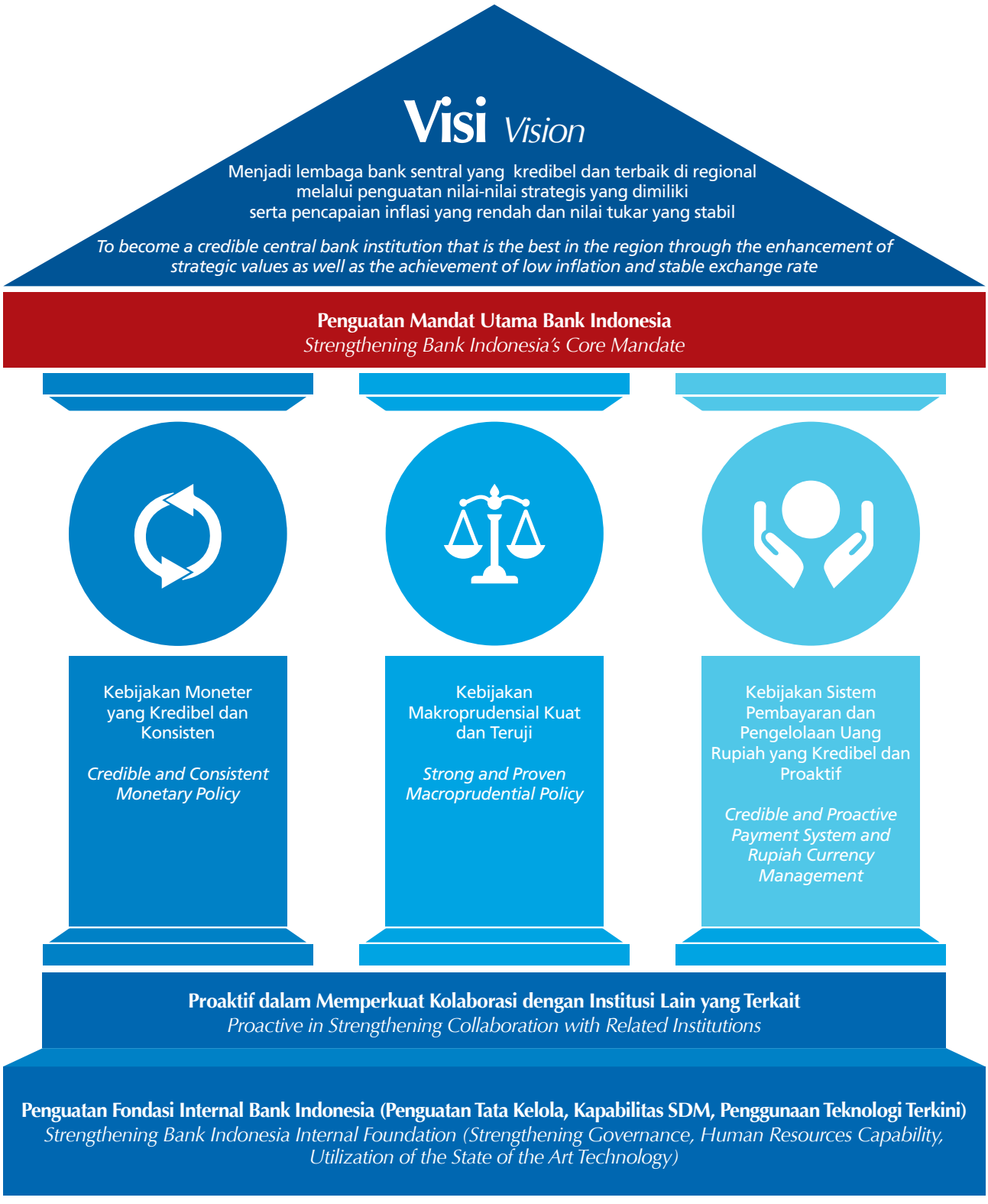
STAGE 1 Restructuring & Enhancing 2014-2019

* Memimpin dalam kebijakan moneter dan makroprudensial yang koordinatif di regional *Leading in conducting a coordinated monetary and macroprudential policy in the region* * Mampu memitigasi 10-20 jenis risiko sistemik dan *'financial imbalances'* *Able to mitigate 10-20 type of systemic risks and financial imbalances* * Inflasi dan volatilitas nilai tukar yang rendah dan terkendali di regional *Low and controlled inflation and exchange rate volatility in the region*	* Mengedarkan uang Rupiah dengan kualitas tinggi untuk denominasi/pecahan diseluruh wilayah RI *Circulate high quality Rupiah currency in every denomination in the whole Indonesian region* * KPwDN yang kuat dengan *footprint* dan struktur *governance* yang rapi *Strong Regional Offices with footprint and good governance structure*	* Pasar uang yang dalam dan likuid diberbagai *asset classes* *Deep and liquid money market in every asset class* * Menyediakan National Payment Gateways (NPG) untuk alat pembayaran dengan kartu dan elektronifikasi *Provide National Payment Gateway for card-based payment instrument and electronification* * Aktif mendorong & mewujudkan *"banked population"* dari 20% menjadi 30% *Actively promote & realize banked population from 20% to become 30%*	* Memiliki BI Institute sebagai pusat pembelajaran dan riset *Have BI Institute in place as learning and research center* * Memiliki sistem jalur karir yang robust yang selaras dengan *job grade* dan *job value* *Have a robust career path system in place that is in line with job grade and job value* * Memiliki budaya dan *praktek end-to-end performance management* *Have work culture and practice end-to-end performance management*	* Memiliki *Big Data* yang terintegrasi dengan proses pengambilan kebijakan Moneter dan Makroprudensial *Deploy Big Data that is integrated with monetary and macroprudential policy making processes* * Memiliki *enterprise architecture* yang ramping dengan jumlah aplikasi sekitar 30 sistem dengan kapabilitas yang *'best-in-class'* *Have lean enterprise architecture with around 30 application systems with best-in-class capabilities*

STAGE 2 Shaping The End State 2019-2024

* Menjadi bank sentral yang kredibel di regional *Become a credible central bank in the region* * Memiliki pendekatan *'Balanced'* dalam menangani *financial imbalances*, dengan menggunakan *national and regional balance sheet* *Have a balanced approach in managing financial imbalances using national and regional balance sheet*	* Menjadi *center of excellence* di bidang *surveillance* lembaga keuangan dan sistem pembayaran *Become the center of excellence in financial institutions and payment system surveillance* * KPwDN menjadi aktor *advisor* Pemerintah daerah yang terpercaya *Regional Offices become trustworthy advisor to the provincial government*	* Pasar uang yang dalam dan likuid diberbagai *asset classes* *Deep and liquid money market in various asset classes* * Mendorong Indonesia diakui sebagai Pusat Keuangan Syariah di regional *Promote Indonesia to be acknowledge as the Center of Shariah Financial Center in the region* * Terwujudnya platform sistem pembayaran (jalur dan instrumen pembayaran) yang terhubung melalui (ATM, *debit, credit* dan *e-money)* NPG) *Realize an interconnected payment system platform (payment channel and instrument) through ATM, debit, credit, e-money, and NPG.* * Aktif mendorong & mewujudkan *"banked population"* dari 30% menjadi 40% *Actively promote & realize banked population from 30% to become 40%*	* BI Institute yang bertaraf *World Class* sebagai garda pemikir ekonomi yang ditopang dengan lembaga riset dan pendidikan berkelas dunia *World class BI Institute as the leading economic think tank supported by research institution and world class education* * Diakui memiliki SDM terbaik dan bertalenta dengan kapabilitas kepemimpinan dan kompetensi yang tinggi *Acknowledged as having the best and talented human resources with leadership capabilitas and high competencies*	* Penggunaan *Big Data* secara inovatif, menjadi mitra *peer central banks* *Innovative use of Big Data, become partner of peer central banks* * Memiliki kapabilitas pengelolaan data dan layanan yang *excellence* dalam mendukung riset, pengambilan kebijakan dan operasional *Have the capability in managing data and excellent services in supporting research, policy making and operations*

ARSITEKTUR FUNGSI STRATEGIS BANK INDONESIA 2024
THE 2024 BANK INDONESIA'S STRATEGIC FUNCTION ARCHITECTURE





Kepedulian terhadap sesama menjadi pilar kekuatan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bank Indonesia berkomitmen untuk turut memajukan masyarakat, sebagai sumbangsih bagi negeri, dan untuk mengangkat harkat serta martabat bangsa.

Caring for others becomes a strong pillar to create a better future. Bank Indonesia is committed to help improve the society as its contribution to the country, as well as to raise the nation's dignity.



PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA

Bank Indonesia Social Programs

Lebih dari sekedar program bantuan, Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Berpijak dari hal tersebut, pelaksanaan PSBI mencakup program strategis untuk pengembangan bidang ekonomi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia, serta program kepedulian sosial untuk penanggulangan permasalahan sosial, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,kebudayaan, keagamaan, penanganan musibah dan pertolongan bencana alam. Penerapan *governance* dalam PSBI dicerminkan dari prinsip utama dalam pelaksanaan PSBI, yaitu menjunjung keterbukaan (*transparency*), mengutamakan pertanggungjawaban (*accountability*) yang jelas kepada publik, dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Selanjutnya, pengembangan PSBI dilakukan dalam bentuk Program Beasiswa Bank Indonesia, terutama bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

More than just assistance programs, Bank Indonesia Social Program (PSBI) is a form of awareness and social responsibility to the community, as well as efforts to improve people's understanding of the implementation of tasks and the achievement of the objective of Bank Indonesia. Based on this case, the implementation of PSBI include strategic program for the development of economy and the improvement of people's understanding of the task and achievement Bank Indonesia objectives, as well as social awareness programs to overcome social problems, especially in the areas of education, health, environment, cultural, religious, and natural disaster relief. The application of governance in PSBI reflected from the main principle in the implementation of PSBI, namely transparency, accountability, and avoid conflicts of interest. Furthermore, the development of PSBI carried out in the form of Bank Indonesia Scholarship Program, primarily tuition assistance to students who has the academic achievement and social activities community.

Dedikasi untuk Negeri

Dedication for the Nation

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia, dilaksanakan program bantuan dari Bank Indonesia yang disebut Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Program ini didasari kesadaran bahwa kebijakan bank sentral yang menitikberatkan pada upaya stabilitas ekonomi seringkali belum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian mempertimbangkan pula bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang kestabilan moneter dan sistem keuangan diperlukan komunikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dikelola secara baik.

As a form of social compassion and responsibility to solve problems faced by the public, as well as to increase public understanding of Bank Indonesia tasks implementation and objective archievement, Bank Indonesia carry out assistance program called Bank Indonesia Social Program (PSBI). The program is based on the awareness that central bank policy that focused heavily on economic stability measures often are not yet able to be well-understood by the public. Furthermore, It also considers that well-managed communication and interaction with stakeholders is needed to support the effectiveness of Bank Indonesia tasks implementation in monetary and financial system stability.

Sementara itu dalam berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemangku kepentingan, Bank Indonesia dihadapkan dengan berbagai kondisi dan permasalahan sosial kemasyarakatan. Sebagai bagian dari komponen utama masyarakat, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab sosial untuk turut memberikan pemikiran dan solusi dalam memecahkan permasalahan sosial yang ada. Selanjutnya dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Bank Indonesia tersebut perlu dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Meanwhile in interacting directly as well as indirectly with stakeholders, Bank Indonesia is faced with a variety of conditions and social problems. As part of the main public component, Bank Indonesia have the social responsibility to contribute thoughts and provide solution in solving existing social problems. Furthermore the implementation of Bank Indonesia social responsibility needs to be carried out with observance to good governance principles.

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan PSBI terutama adalah membantu upaya pemecahan permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Selain itu untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

The desired objective from PSBI implementation mainly is to help solve social problems including increasing the people's quality of life whether they are directly or indirectly related to Bank Indonesia objective achievement. Other than that is to support the enhancement of public knowledge and understanding of Bank Indonesia tasks implementation and objective achievement.

Jenis dan Ruang Lingkup PSBI

PSBI Type and Scope

PSBI terutama mencakup Program Strategis dan Program Kepedulian Sosial. Program Strategis merupakan program pengembangan bidang ekonomi dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia, meliputi: (i) pengembangan bidang ekonomi; dan (ii) peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan Bank Indonesia. Sedangkan Program Kepedulian Sosial, adalah kegiatan kepedulian Bank Indonesia terhadap permasalahan sosial di masyarakat, meliputi ruang lingkup

PSBI mainly encompasses Strategic Program and Social Compassion Program. Strategic Program is constituted of development program in economics and enhancement of knowledge as well as public understanding to Bank Indonesia tasks implementation and objective achievement, encompassing: (i) economics development; and (ii) enhancement of knowledge and public understanding to Bank Indonesia tasks implementation as well as objective achievement. Meanwhile Social Compassion Program is Bank Indonesia activities in caring for social problems in the community, encompassing the

penyaluran di bidang: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan, dan kerukunan hidup beragama; dan penanganan musibah dan bencana alam.

Penerapan *governance* dalam pelaksanaan PSBI tercermin dari prinsip dalam penyaluran PSBI yang meliputi: menjunjung keterbukaan (*transparency*), mengutamakan pertanggungjawaban (*accountability*) yang jelas kepada publik; dan menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

scope in education, health, living environment, culture, religious, religious life harmony, as well as coping with disaster and catastrophe.

Governance implementation in PSBI implementation is reflected in the principles of PSBI disbursement encompassing: upholding transparency, prioritizing clear accountability to the public, and avoiding conflict of interest.

Kebijakan dan Metode PSBI

PSBI Policy and Method

Untuk menjamin pelaksanaan PSBI sesuai tujuannya dan menerapkan prinsip *governance*, dilakukan pengaturan pelaksanaan PSBI dalam bentuk Peraturan Dewan Gubernur. Pengaturan ini untuk memastikan pula visi pengelolaan PSBI untuk menjadi pengelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) terbaik di nasional dan regional dapat tercapai. Selain itu ditetapkan pula pedoman prinsip untuk memastikan pengelolaan PSBI memberikan dampak secara luas. Pedoman prinsip tersebut adalah (i) Partnerships; pelaksanaan dilakukan bermitra dengan lembaga yang kredibel dan reputable; (ii) *End to End Cycle*, program diharapkan dapat mandiri dan berkelanjutan (*sustain*); (iii) *Opportunity Cost*; program memberikan *value* yang lebih bagi BI dan masyarakat; (iv) *Cross Functional*, program bermanfaat untuk berbagai aspek atau ruang lingkup penyaluran; serta (v) *Targeted*, penerima dan bentuk program dilakukan secara terfokus.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, PSBI dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana PSBI atau melalui kemitraan dengan pihak lain. Pelaksanaan PSBI melalui kemitraan harus memenuhi kriteria program atau kegiatan PSBI memiliki skala yang besar dan dampak yang luas; dan Program atau kegiatan PSBI berorientasi pada pencapaian tujuan dan penciptaan *value* bagi Bank Indonesia. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan PSBI harus memenuhi kriteria memiliki kredibilitas yang baik, memiliki pengalaman dan kompetensi terkait program yang dilaksanakan, memiliki kesamaan visi dalam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sementara pelaksanaan kemitraan dalam PSBI mengutamakan memperhatikan prinsip kesetaraan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan; berorientasi untuk menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang optimal; serta optimalisasi nilai guna bagi berbagai pihak.

To ensure PSBI is executed according to its objective and applied with governance principles, PSBI implementation is regulated in form of Board of Governors Regulation1. The rule is also established to ensure the achievement of PSBI vision which is to become the best Corporate Social Responsibility (CSR) administrator in national and regional level. Moreover, the principle guidance was also established to ensure PSBI is administered to bring an extensive impact. The principle guidance are: (i) Partnerships; the implementation is conducted in partnership with a credible and reputable organization; (ii) End to End Cycle; the program is expected to be self-reliance and sustain; (iii) Opportunity Cost; the program gives added value to Bank Indonesia and the public (iv) Cross Functional; the program is beneficial to a variety of disbursement aspects or scope; and (v) Targeted; the recipient and program configuration are focusedly delivered.

Furthermore in the execution, PSBI can be done alone by PSBI implementor or through partnership with other parties. PSBI implementation through partnership must fulfill the program criteria or PSBI activity has large in scale and extensive impact, and the Program or PSBI activity is oriented toward objective achievement and value creation to Bank Indonesia. As for parties that can become partner in PSBI implementation must fulfill the criteria of having good track record, possess experience an competence related to the program implementation, have similarity of vision in the program or planned activity. Meanwhile conducting partnership in PSBI accentuate observing the principles of equality, mutual needs, mutually reinforcing and win-win solution, oriented to generate optimal efficiency and productivity, as well as optimization of value to various parties.

Program PSBI

Bank Indonesia Social Program (PSBI)

Pelaksanaan PSBI pada tahun 2014 mengangkat tema "Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan dan Inklusif" dengan 5 sub tema, yaitu 1) Pertanian Terintegrasi; 2) Mencetak Tenaga Kerja Siap Pakai; 3) Ketahanan Pangan; 4) Komoditas Unggulan; 5) Komunitas Kebanksentralan dan Literasi Keuangan. Mengacu pada tema dan subtema tersebut, dilakukan 81 program yang melibatkan 41 Kantor Perwakilan Bank Indonesia

The implementation of PSBI in 2014 featured the theme "Promoting Strong, Sustaining, and Inclusive Economic Developement" with 5 sub theme namely are 1) Integrated Farming; 2) Creating Ready-to-Use Work Force, 3) Food Sustainability, 4) Superior Commodity, 5) Central Banking and Financial Literacy Community. Referring to the theme and subtheme, 81 program involving 41 Bank Indonesia Representative Offices were implemented.

No.	Sub Tema *Sub Theme*	Satker Pelaksana *Unit in-Charge*
1)	Pertanian Terintegrasi *Integrated Farming*	Makassar, Gorontalo, Pontianak, Surabaya, Semarang, Solo, Bengkulu, Riau, dan Jambi *Makassar, Gorontalo, Pontianak, Surabaya, Semarang, Solo, Bengkulu, Riau, dan Jambi*
2)	Mencetak Tenaga Kerja Siap Pakai *Creating Ready-to-Use Work Force*	Pontianak, dan Medan *Pontianak, dan Medan*
3)	Ketahanan Pangan *Food Sustainability*	Manado, Palu, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Malang, Kediri, Jember, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Serang, Palembang, Lampung, Padang, Pekanbaru, Jambi, Aceh, Sibolga, dan Pematang Siantar *Manado, Palu, Banjarmasin, Balipapan, Pontianak, Palangkaraya, Malang, Kediri, Jember, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Serang, Palembang, Lampung, Padang, Pekanbaru, Jambi, Aceh, Sibolga, and Pematang Siantar*
4)	Komoditas Unggulan *Superior Commodity*	Ternate, Papua, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kupang, Kediri, Tegal, Tasikmalaya, Serang dan Jambi. *Ternate, Papua, Banjarmasin, Samarinda, Denpasar, Mataram, Kupang, Kediri, Tegal, Tasikmalaya, Serang and Jambi.*
5)	Komunitas Kebanksentralan dan Litetrasi Keuangan *Central Banking and Financial Literacy Community*	DKom (pilot project di Kantor Pusat dalam bentuk Pojok Baca dan Edukasi PAUD). *(pilot project in Head Office in form of Reading Corner and Early Childhood Education Program)*

Perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi PSBI dilakukan oleh satuan kerja yang menangani fungsi komunikasi di Bank Indonesia. Satuan kerja tersebut juga berperan sebagai *strategic advisor* dalam kolaborasi pelaksanaan program PSBI dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan mitra pelaksana. Kantor Perwakilan memiliki peran dalam pelaksanaan PSBI di wilayah kerjanya, dengan mengacu pada pedoman tahunan PSBI, yang merupakan hasil rapat tahunan forum perumus. Selanjtnya pengawasan pelaksanaan PSBI dilkukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilakukan juga oleh satuan kerja tersebut.

The planning and implementation as well as evaluation of PSBI is conducted by the work unit that perform communication function in Bank Indonesia. The work unit also play a role as strategic advisor in the collaboration of PSBI implementation with Bank Indonesia Representative Office and partnership implementator. Bank Indonesia Representative Office play a role of implementing PSBI in the working area, referring to PSBI annual guideline, that were the result of formulation annual meeting forum. Moreover supervision of PSBI implementation was conducted in form of monitoring and also evalution by the related work unit.

Program Beasiswa Bank Indonesia

Bank Indonesia Scholarships Program

Pendidikan adalah investasi utama untuk menyiapkan Indonesia masa depan. Pelayanan, akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar, yaitu masalah perluasan, pemerataan, mutu, relevansi, daya saing pendidikan, penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Education is the main investment to prepare for Indonesia future. Services, access and quality of education in Indonesia has not yet fullfiled as expected. The educational world is still facing fundamental challenges, which are expansion, equalization, quality, relevancy, education competitiveness, and strenghtening of governance and accountability.

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan program beasiswa. Program ini dilakukan dengan visi menjadi program beasiswa yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan modal sosial, memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat secara berkelanjutan serta membentuk warga bangsa yang berkarakter dan berintegritas. Sedangkan misi yang diemban terutama adalah: (i) mengembangkan program kapasitas intelektual dalam berbagai bidang yang sejalan dengan perkembangan kepentingan publik, bangsa dan negara yang bersifat dinamis sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi agar mampu mengkontekstualisasikan serta mengaktualisasikan ilmu yang diperolehnya ke dalam lingkungan kerja dan masyarakat, (ii) meningkatkan kapasitas individu serta menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu untuk berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa, dan (iii) menghasilkan lulusan dan kader terbaik bangsa yang dapat membangun potensi daerah masing-masing untuk kepentingan nasional.

Taken that into consideration, Bank Indonesia implemented the scholarship program. The program is carried out with the vision to become a scholarship program that are able to facilitate the development of intellectual and social capitals, give positive contribution in transforming the public in continuum and also shape the character and integrity of the nation's citizen. Meanwhile the main missions performed are: (i) develop intellectual capacity program in a variety of areas that is in line with the vibrant development of the public, nation, and country interests so that it is able to produce graduates with high competency and able to put and apply the knowledge possessed within certain context and into work environment and the society, (ii) increase individual capacity and generate graduates through an integrated program from various knowledge discipline to contribute to the enhancement of the nation's competitiveness, and (iii) generate the nation's best graduates and cadres that are able to build upon their respective regional potentials for national interests.

Tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan beasiswa terutama adalah (i) meningkatkan motivasi belajar serta menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan menghidupkan harapan bagi masyarakat yang mempunyai prestasi (potensi) akademik untuk dapat menempuh serta menyelesaikan pendidikan tinggi, (ii) meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, indeks pembangunan manusia (*human development index*) dan daya saing bangsa, dan (iii) meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik (kurikuler), ko-kurikuler dan ekstra kurikuler sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mampu berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan.

The expected objectives in the scholarship administration mainly are (i) increase the motivation to study and guarantee the continuity of student education and give hopes to the people who have academic potentials to be able to go through and finish high education, (ii) increase the participation rate of high education, human development index, and the nation's competitiveness, and (iii) increase student's achievement in academic (curriculum), co-curriculum and extra curriculum activities to support the ability to generate human resources that are creative, independent, productive, and have high social awareness as well as able to play a role in people's empowerment and cut off the chain of poverty.

Jenis dan Program Studi Penerima Beasiswa

Types and Study Program Scholarship Recipients

Beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi mahasiswa jenjang sarjana (S1) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri adalah program sosial berupa bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2014, jumlah penerima beasiswa Bank Indonesia sebanyak 2.755 mahasiswa dari 73 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Bank Indonesia telah membuktikan komitmen dan konsistensi kepeduliannya di bidang pendidikan dimana dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studinya mencapai 6.025 orang dan hampir 90% diantaranya telah bekerja di berbagai bidang.

Scholarship given by Bank Indonesia to bachelor student (S1) in various State Universities are social program in form of tuition financial assistance to students with academic achievement and social activities. In 2014, the number of Bank Indonesia scholarship recipients amounted to 2.755 students from 73 State Universities throughout Indonesia. Bank Indonesia has demonstrated its commitment and consistency in addressing educational concerns as reflected in the past 6 years. The number of scholarship recipient that has finished their study has reached 6.025 people and almost 90% of them had worked in various areas.

Adapun program studi yang menjadi target penerima beasiswa Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
b. Manajemen/Pendidikan Ekonomi Manajemen
c. Akuntansi/Pendidikan Akutansi
d. Perbankan & Keuangan Syariah
e. Ekonomi Islam
f. Pertanian/Perternakan/Agrobisnis
g. Hukum/Ilmu Hukum
h. Komunikasi/Ilmu Komunikasi
i. Teknik Informatika
j. Sistem Informasi
k. Kesehatan Masyarakat

As for the targeted study program of Bank Indonesia scholarship recipient are as follows:

a. Economics and Development Studies
b. Management/Economic Management Education
c. Accounting/Accounting Education
d. Banking & Shariah Finance
e. Islamic Economics
f. Farming/Livestock / agribusiness
g. Laws
h. Communication
i. Computer Science
j. Information System
k. Public Health

Generasi Baru Indonesia (GENBI)

New Indonesian Generation (GENBI)

Untuk memperkuat *impact* bagi penerima beasiswa, sejak 2011 telah dibentuk komunitas mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia yang diberi nama Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pembentukan komunitas ini juga merupakan salah satu cara untuk lebih mengembangkan kompetensi dan jiwa kepemimpinan generasi muda, serta merekatkan hubungan antar GenBI, Bank Indonesia, maupun dengan masyarakat sekitarnya.

To create a bigger impact to scholarship recipient, Bank Indonesia scholarship recipient community called New Indonesian Generation (GenBI) has been formed since 2011. The establishment of the community was also one of the ways to develop young generation competency and leadership, and also cultivate relationships among GenBI, Bank Indonesia, as well as the surrounding community.

Program pengembangan GenBI terus dilakukan dalam bentuk pembekalan di bidang kepemimpinan, motivasi, kemampuan presentasi dan penulisan, hingga kesempatan *internship* baik di BI maupun berbagai perusahaan nasional dan multinasional. Sasaran program adalah untuk membentuk GenBI menjadi: (1) *frontliner*, yang membantu mengkomunikasikan kebijakan BI kepada komunitas mahasiswa dan masyarakat; (2) *agent of change*, sebagai *role model* bagi kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat sekitar; dan (3) *future leader*, menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang.

GenBI development programs continue to be conducted in form of training in leadership, motivation, presentation and writing capabilities, as well as internship opportunities in Bank Indonesia as well as a variety of national and multinational corporations. The target of the program is to form GenBI to become: (1) frontliner, help to communicate Bank Indonesia policy to the student community and public (2) agent of change, as a role model to student and college student as well as the surrounding community; and (3) future leader, become future leader in various areas.

Ke depan, program pengembangan komunitas GenBI terus dilakukan antara lain dengan cara:

a. Merancang struktur organisasi dan hubungan kerja yang jelas antara GenBI di tingkat Nasional dan tingkat Lokal (Wilayah, Provinsi dan Universitas)
b. Memperkuat database GenBI melalui *Identical Membership Number*.
c. Memberikan pembekalan kepemimpinan, antara lain dalam bentuk *leadership camp* dan *leadership lecture*.
d. Memberikan berbagai bentuk pelatihan, antara lain pelatihan motivasi, penulisan, *public speaking*, edukasi kebanksentralan, dll.
e. Kesempatan *internship* yang lebih luas di *reputable company*.

Going forward, the GenBI community development program will continue to be implemented among other through:

a. Design clear organizational structure and work relationship between GenBI in the national and local level (Area, Province and University).
b. Strengthen GenBI database through Identical Membership Number.
c. Provide training in leadership, among others in form of leadership camp and leadership lecture.
d. Provide various forms of training, among others motivation, writing, public speaking, central banking education, etc.
e. Broader internship opportunities in reputable company.



Kesuksesan sebuah organisasi merupakan kombinasi hasil kerja setiap individu. Bank Indonesia menghargai setiap dedikasi dan kontribusi para pegawai yang tersebar di berbagai unit kerja, merentang dari wilayah Timur hingga ke Barat Indonesia.

The success of an organization is a summed up of the work of each individual combined. Bank Indonesia appreciates the dedication and contribution of each employees in the various work units, stretching from the East to the West of Indonesia.



ORGANISASI BANK INDONESIA

Organisation of Bank Indonesia

Perjalanan sejarah Bank Indonesia memasuki babak baru dengan penambahan peran baru dalam bidang makroprudensial mulai awal tahun 2014. Sejalan dengan upaya pencapaian Visi Bank Indonesia 2024 melalui melalui penataan fungsi dalam Arsitektur Fungsi Bank Indonesia, dilakukan penataan organisasi.

Dalam tahap awal, pada tahun 2014 penataan organisasi dilakukan dengan penguatan fungsi manajemen risiko yang ada melalui pembentukan satuan kerja Departemen Manajemen Risiko. Pembentukan Pusat Program Transformasi Bank Indonesia utuk mengelola perubahan Bank Indonesia, penyesuaian struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), pembentukan Departemen Regional untuk melaksanakan fungsi KPwDN, serta pembentukan KPwDN di dua provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Papua Barat.

Bank Indonesia entered a historical new journey to the addition of a new role in the field of macroprudential starting early 2014. In line with the efforts to achieve Bank Indonesia Vision 2024 through structuring the function in the Bank Indonesia Architecture Function, organisation restructuring was carried out.

In the early stages, in 2014 the arrangement of the organization done by strengthening the risk management function through the establishment of the Risk Management Department. The establishment of Centre of Bank Indonesia Transformation Program to manage the change of Bank Indonesia, the adjustment of organisational structure of Bank Indonesia Regional Office (KPwDN), the establishment of the Regional Department to implement KPwDN functions, as well as the formation of KPwDN in two provinces, Bangka Belitung and West Papua.

Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia

Brief History of Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan proses nasionalisasi terhadap De Javasche Bank. Pada 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya, pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

Tahun 1968 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Bank Indonesia. Melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, diatur mengenai kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam Undang-Undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia juga memiliki fungsi yang lain yakni sebagai pemegang kas Pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk Pemerintah, dan berkewajiban membantu Pemerintah dalam menempatkan surat-surat utang negara.

1828

The history of Bank Indonesia began with the establishment of De Javasche Bank N.V. by the Government of the Dutch East Indies in 1828. De Javasche Bank functioned as a circulation bank with the duty of printing and circulating money.

1953

De Javasche Bank was nationalised after Indonesian independence. Laws concerning the Nationalisation of De Javasche Bank were announced on 15th December 1951. Subsequently, the President approved the Bank Indonesia Act on 29th May 1953, and since 1st July 1953 the nation has a central bank named Bank Indonesia. Act No. 11 of 1953 on Establishing the Principle Act of Bank Indonesia specified the duties of Bank Indonesia, namely to maintain Rupiah stability, to issue Rupiah currency, to advance credit and bank development as well as to supervise credit affairs.

1968

The Bank Indonesia Act was amended in 1968. Through Act No. 13 of 1968 on the Central Bank, the status and duties of Bank Indonesia as a central bank were separated from commercial banks. Accordingly, in addition to the three basic tasks, Bank Indonesia also assisted the government as an agent of development to foster smooth production and development along with expanding employment opportunities to ameliorate national living standards. Bank Indonesia also carried the distinction as the government cash administrator, disbursing government transfers and assisting the government in the placement of government securities.

Metamorfosa Logo Bank Indonesia

Bank Indonesia Logo Metamorphosis

1870-an



1918



1999

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar Pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

The year of 1999 was the start of a new chapter in the history of Bank Indonesia. The Bank Indonesia Act was amended by Act No. 23 of 1999, which emphasised Bank Indonesia's status as an independent state institution free from government interference in performing its duties and authority. In addition, the single objective of Bank Indonesia, namely to achieve and maintain Rupiah stability, was established.

2002

Keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen diperkuat melalui amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 24D, disebutkan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".

The presence of an independent central bank as the monetary authority was strengthened through the fourth amendment to the 1945 Constitution. Article 24D states that "the country has a central bank, for which the structure, status, authority, responsibility and independence are regulated by virtue of law".

2004

Kedudukan Bank Indonesia kembali diperkuat melalui amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. Pada 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut, dipertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen serta dilakukan penyempurnaan atas pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penataan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia.

The status of Bank Indonesia was strengthened through an amendment to the Bank Indonesia Act. Consequently, Act No. 3 of 2004, as an amendment to Act No. 23 of 1999, was issued, reiterating Bank Indonesia's status as an independent central bank. The new regulation also refined provisions concerning task implementation and authority, including the supervision of Bank Indonesia.

1930 **1930** **1930** **1948**

Terjadinya krisis ekonomi global mendorong Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penerbitan Perpu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

Tahun 2009, Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak 13 Januari 2009, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

2008

2009

2011

The global economic crisis compelled the government to implement various policy measures to preserve public confidence in the banking industry. One such measure was to issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 on the Second Amendment of Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. The new regulation aimed to enhance national bank resilience to the global crisis by broadening access to funds for banks experiencing short-term liquidity mismatch.

Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2008, as the second amendment of Act No. 23 of 1999, was enacted as the Bank Indonesia Act. Consequently, effective from 13th January 2009, Act No. 6 of 2009 superseded Perpu No. 2 of 2008 as the second amendment to Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia.

The House of Representatives of the Republic of Indonesia formally enacted the Financial Services Authority (OJK) Act. Consequently, as of 31st December 2013, the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector was handed over from Bank Indonesia to the OJK.

1950 **1950** **1960** **1973**



Terhitung sejak 31 Desember 2013, Bank Indonesia mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke OJK. Dengan pengalihan tugas tersebut, Bank Indonesia melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan makroprudensial, sementara OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan mikroprudensial.

Merupakan tahun awal bagi Bank Indonesia menjalankan peran baru sebagai otoritas makroprudensial. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan Makroprudensial oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Kebijakan makroprudensial juga untuk meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.

2013

On 31st December 2013, Bank Indonesia officially handed over the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector to the Financial Services Authority (OJK). Consequently, Bank Indonesia was responsible for macroprudential regulation and supervision, while the Financial Services Authority (OJK) handled microprudential regulation and supervision.

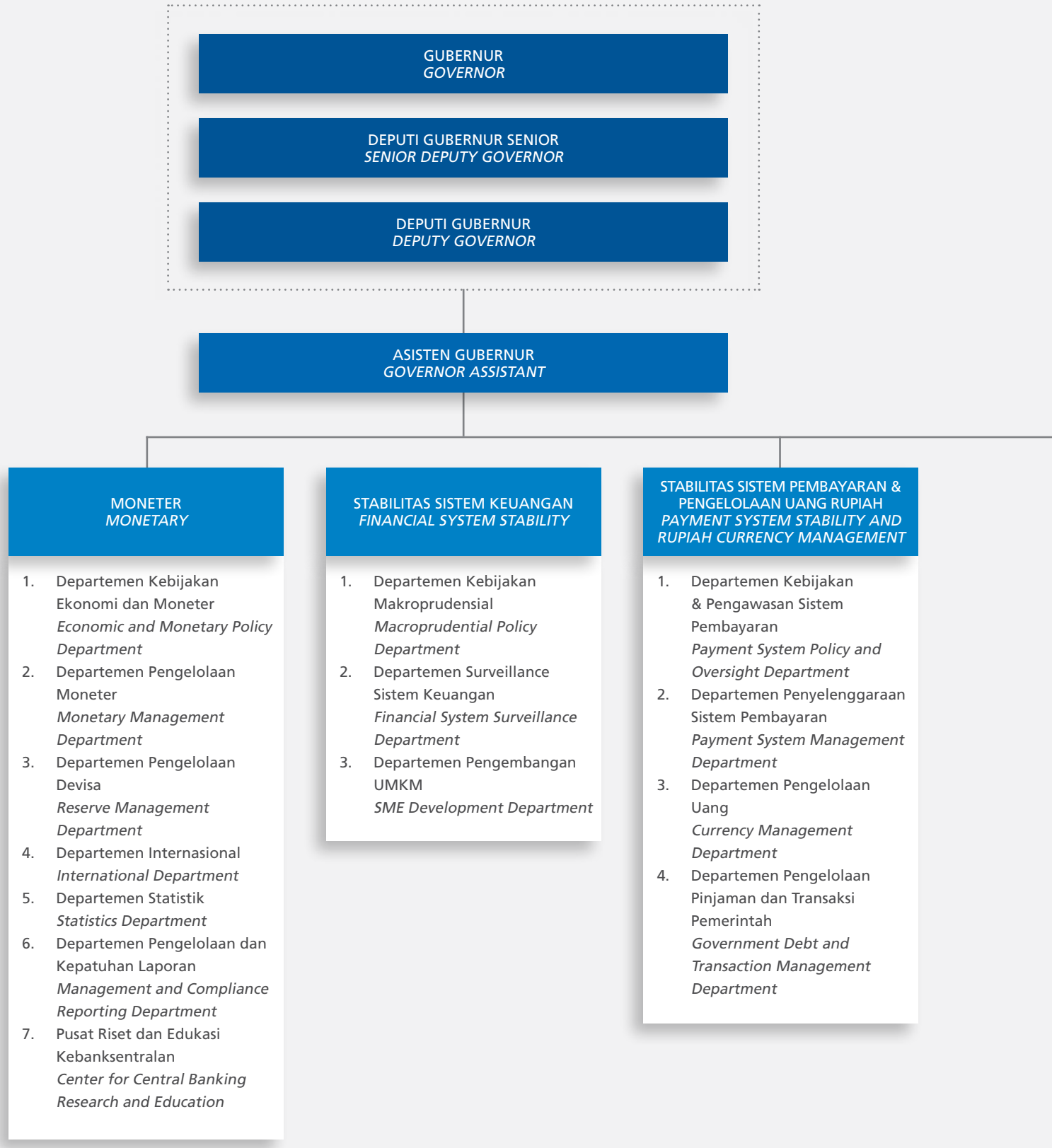
2014

The first year of Bank Indonesia's new duties as the macroprudential authority. In accordance with its new duties, Bank Indonesia strengthened financial system and payment system stability. The macroprudential policy of Bank Indonesia was to prevent and reduce systemic risk as well as to nurture balanced intermediation amongst economic sectors. Macroprudential policy also aims to enhance efficiency and access to the financial system in order to maintain financial system stability as well as support monetary and payment system stability.

1979 **1990** **1998** **2004**

Struktur Organisasi

Organisational Structure



MANAJEMEN INTERN
INTERNAL MANAGEMENT

1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
   Strategic Management and Governance Department
2. Departemen Komunikasi
   Communication Department
3. Departemen Manajemen Risiko
   Risk Management Department
4. Departemen Sumber Daya Manusia
   Human Resources Department
5. Departemen Keuangan Intern
   Finance Department
6. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
   Information System Management Department
7. Departemen Audit Intern
   Internal Audit Department
8. Departemen Hukum
   Legal Affairs Department
9. Departemen Logistik dan Pengamanan
   Logistic and Security Department
10. Departemen Pengelolaan Aset
    Asset Management Department
11. Pusat Program transformasi Bank Indonesia
    Center of BI Transformation Program

JARINGAN KANTOR
OFFICE NETWORK

REGIONAL
REGIONAL

1. Departemen Regional
   Regional Department
   - Regional I (Sumatera)
     Regional I (Sumatera)
   - Regional II (Jawa)
     Regional II (Java)
   - Regional III (Kalimantan)
     Regional III (Kalimantan)
   - Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara)
     Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali and Nusa Tenggara)
2. Kantor Perwakilan
   Regional Offices
   - 31 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
     31 Bank Indonesia Provincial Regional Offices
   - 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/ Kabupaten
     12 Bank Indonesia City/ Regency Regional Offices

LUAR NEGERI
OVERSEAS

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London
   Bank Indonesia Representative Office London
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York
   Bank Indonesia Representative Office New York
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura
   Bank Indonesia Representative Office Singapore
4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo
   Bank Indonesia Representative Office Tokyo

Nama Pemimpin Satuan Kerja

Names of Department Heads

SATUAN KERJA KANTOR PUSAT / *WORK UNITS AT HEAD OFFICE*

Moneter *Monetary*

• Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter *Economic and Monetary Policy Department*	:	Juda Agung
• Departemen Pengelolaan Moneter *Monetary Management Department*	:	Filianingsih Hendarta
• Departemen Pengelolaan Devisa *Reserve Management Department*	:	Budianto
• Departemen Internasional *International Department*	:	Aida S. Budiman
• Departemen Statistik *Statistics Department*	:	Hendy Sulistiowati
• Departemen Pengelolaan Kepatuhan Laporan *Management and Compliance Reporting Department*	:	Wiwiek Sisto Widayat
• Pusat Riset dan Edukasi Kebanksentralan *Center for Central Banking Research and Education*	:	Siti Astiyah

Stabilitas Sistem Keuangan *Financial System Stability*

• Departemen Kebijakan Makroprudensial *Macroprudential Policy Department*	:	Darsono
• Departemen *Surveillance* Sistem Keuangan *Financial System Surveillance Department*	:	Erwin Rijanto
• Departemen Pengembangan UMKM *Financial Access and SME Development Department*	:	Yunita Resmi Sari

Sistem Pembayaran & Pengelolaan Rupiah *Payment System & Rupiah Currency Management*

• Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran *Payment System Policy and Oversight Department*	:	Eni V. Panggabean
• Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran *Payment System Management Department*	:	Bramudija Hadinoto
• Departemen Pengelolaan Uang *Currency Management Department*	:	Eko Yulianto
• Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah *Government Debt and Transaction Management Department*	:	Dyah N.K. Makhijani

Manajemen Intern *Internal Management*

• Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola *Strategic Management and Governance Department*	:	Dody Budi Waluyo
• Departemen Komunikasi *Communication Department*	:	Tirta Segara
• Departemen Manajemen Risiko *Risk Management Department*	:	R. Mirmansyah
• Departemen Sumber Daya Manusia *Human Resources Department*	:	Damayanti Johan

• Departemen Keuangan Intern *Finance Department*	:	Mubarakah
• Departemen Pengelolaan Sistem Informasi *Information System Management Department*	:	Diah P.B.A. Lubis
• Departemen Audit Intern *Internal Audit Department*	:	Dyah Virgoana Gandhi
• Departemen Hukum *Legal Affairs Department*	:	Siddha Karya
• Departemen Logistik dan Pengamanan *Logistic and Security Department*	:	Heru Pranoto
• Departemen Pengelolaan Aset *Asset Management Department*	:	Wahyudi Santoso
• Pusat Program Transformasi Bank Indonesia *Center of BI Transformation Program*	:	Onny Widjanarko

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DI DALAM NEGERI / *BANK INDONESIA REGIONAL REPRESENTATIVE OFFICES*

Regional I (Sumatera) *Regional I (Sumatera)*

Departemen Regional I *Regional I Department*	:	Dian Ediana Rae
• KPw BI Provinsi Aceh *BI Regional Office Province Aceh*	:	Zulfan Nukman
• KPw BI Provinsi Sumatera Utara *BI Regional Office Province North Sumatera*	:	Difi A. Johansyah
• KPw BI Provinsi Sumatera Barat *BI Regional Office Province West Sumatera*	:	Puji Atmoko
• KPw BI Provinsi Riau *BI Regional Office Province Riau*	:	Mahdi Muhammad
• KPw BI Provinsi Kepulauan Riau *BI Regional Office Province Riau Islands*	:	Gusti Raizal Eka Putra
• KPw BI Provinsi Jambi *BI Regional Office Jambi*	:	V. Carlusa
• KPw BI Provinsi Sumatera Selatan *BI Regional Office Province South Sumatera*	:	Hamid Ponco Wibowo
• KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung *BI Regional Office Province Bangka Belitung Islands*	:	Bayu Martanto
• KPw BI Provinsi Bengkulu *BI Regional Office Province Bengkulu*	:	Bambang Himawan
• KPw BI Provinsi Lampung *BI Regional Office Province Lampung*	:	Mahirsyah Emil Akbar
• KPw BI Lhokseumawe *BI Regional Office Lhokseumawe*	:	Ahmad Farid
• KPw BI Pematang Siantar *BI Regional Office Pematang Siantar*	:	Elly Tjan
• KPw BI Sibolga *BI Regional Office Sibolga*	:	Yiyok T. Herlambang

Regional II (Jawa) *Regional II (Java)*		
Departemen Regional II *Regional II Departement*	:	Dwi Pranoto
• KPw BI Provinsi Banten *BI Regional Office Province Banten*	:	Budiharto Setyawan
• KPw BI Provinsi Jawa Barat *BI Regional Office Province West Java*	:	Rosmaya Hadi K.
• KPw BI Provinsi Jawa Tengah *BI Regional Office Province Central Java*	:	Iskandar Simorangkir
• KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *BI Regional Office Special Province of Yogyakarta*	:	Arief Budi Santoso
• KPw BI Provinsi Jawa Timur *BI Regional Office Province East Java*	:	Benny Siswanto
• KPw BI Cirebon *BI Regional Office Cirebon*	:	Totok Hermiyanto
• KPw BI Tasikmalaya *BI Regional Office Tasikmalaya*	:	Wahyu Purnama A.
• KPw BI Purwokerto *BI Regional Office Purwokerto*	:	Rahmat Hernowo
• KPw BI Solo *BI Regional Office Solo*	:	Ismet Inono
• KPw BI Tegal *BI Regional OfficeTegal*	:	Bandoe Widiarto
• KPw BI Jember *BI Regional Office Jember*	:	Achmad Bunyamin
• KPw BI Kediri *BI Regional Office Kediri*	:	Djoko Raharto
• KPw BI Malang *BI Regional Office Malang*	:	Dudi Herawadi

Regional III (Kalimantan) *Regional III (Kalimantan)*		
Departemen Regional III *Regional III Department*	:	Mahdi Mahmudy
• KPw BI Provinsi Kalimantan Barat *BI Regional Office Province West Kalimantan*	:	Dwi Suslamanto
• KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan *BI Regional Office South Kalimantan*	:	Harymurthy Gunawan
• KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah *BI Regional Office Province Central Kalimantan*	:	Muhamad Nur
• KPw BI Provinsi Kalimantan Timur *BI Regional Office Province East Kalimantan*	:	Mawardi B.H. Ritonga
• KPw BI Balikpapan *BI Regional Office Balikpapan*	:	Suharman Tabrani

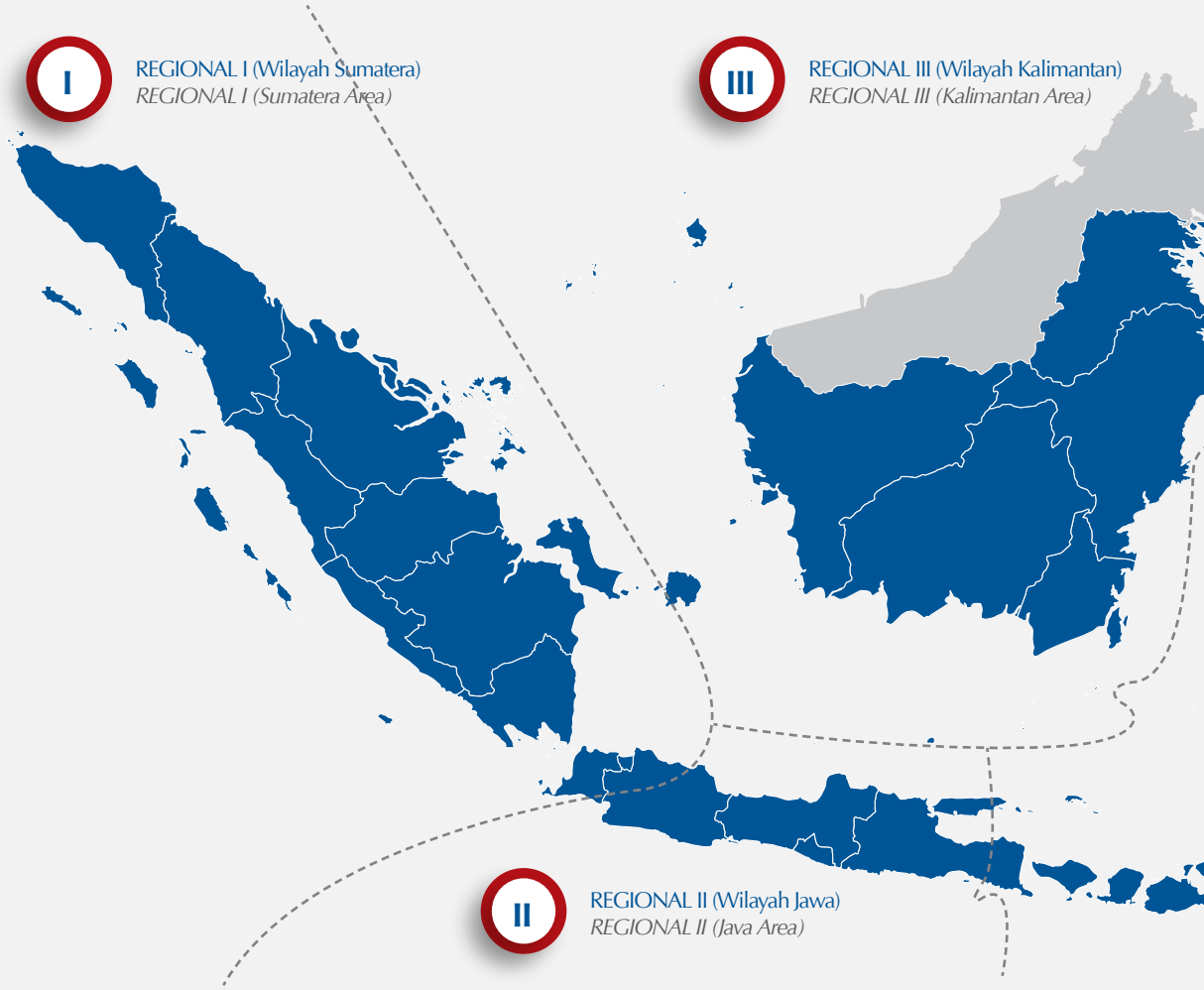
Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara) *Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali and Nusa Tenggara)*		
Departemen Regional IV *Regional IV Department*	:	Suhaedi
• KPw BI Provinsi Sulawesi Utara *BI Regional Office Province North Sulawesi*	:	Luctor Etemergo
• KPw BI Provinsi Gorontalo *BI Regional Office Province Gorontalo*	:	Suryono
• KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah *BI Regional Office Province Central Sulawesi*	:	Purjoko
• KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan *BI Regional Office Province South Sulawesi*	:	Mokhammad Dadi Aryadi
• KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara *BI Regional Office Province Southeast Sulawesi*	:	Dian Nugraha
• KPw BI Provinsi Maluku Utara *BI Regional Office Province North Maluku*	:	Budiyono
• KPw BI Provinsi Maluku *BI Regional Office Province Maluku*	:	Wuryanto
• KPw BI Provinsi Papua *BI Regional Office Papua*	:	Hasiholan Siahaan
• KPw BI Provinsi Papua Barat *BI Regional Office Province West Papua*	:	Henri N. Tanor
• KPw BI Provinsi Bali *BI Regional Office Province Bali*	:	Dewi Setyowati
• KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat *BI Regional Office Province West Nusa Tenggara*	:	Prijono
• KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur *BI Regional Office Province East Nusa Tenggara*	:	Naek Tigor Sinaga

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DI LUAR NEGERI / *BANK INDONESIA OVERSEAS REPRESENTATIVE OFFICES*

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) di Luar Negeri *Bank Indonesia Overseas Representative Offices*		
• KPw BI London *BI Representative Office London*	:	Rizal A. Djaafara
• KPw BI New York *BI Representative Office New York*	:	Sugeng
• KPw BI Singapura *BI Representative Office Singapore*	:	Nirwansyah
• KPw BI Tokyo *BI Representative Office Tokyo*	:	Detty H. Agustono

Peta Wilayah Kerja Bank Indonesia

Working Area Map of Bank Indonesia

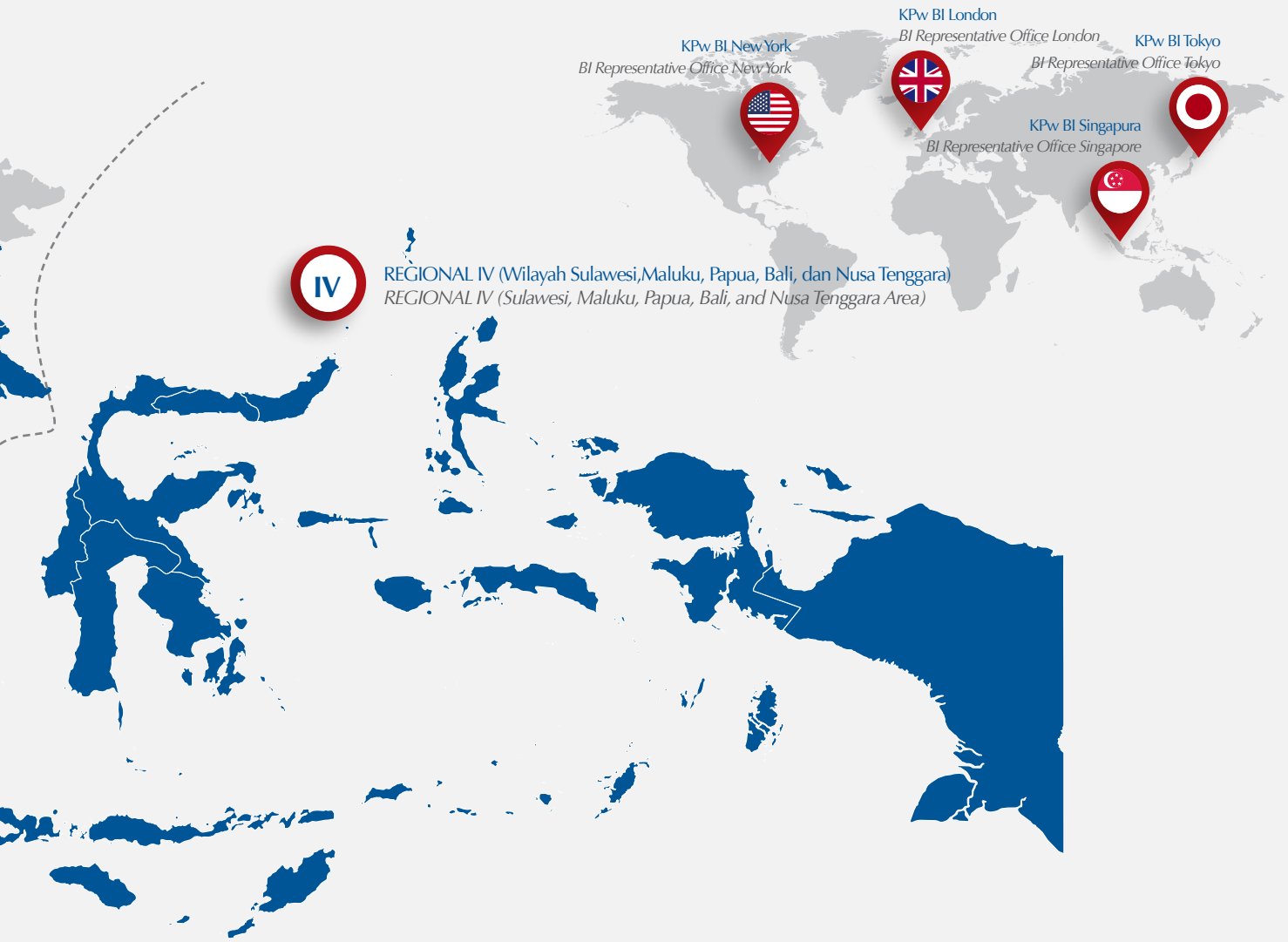


REGIONAL I (Wilayah Sumatera)
REGIONAL I (Sumatera Area)

- KPw BI Provinsi Aceh
  BI Regional Office Province Aceh
- KPw BI Lhokseumawe
  BI Regional Office Lhokseumawe
- KPw BI Provinsi Sumatera Utara
  BI Regional Office Province North Sumatera
- KPw BI Pematang Siantar
  BI Regional Office Pematang Siantar
- KPw BI Sibolga
  BI Regional Office Sibolga
- KPw BI Provinsi Sumatera Barat
  BI Regional Office Province West Sumatera
- KPw BI Provinsi Riau
  BI Regional Office Province Riau
- KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
  BI Regional Office Province Riau Islands
- KPw BI Provinsi Jambi
  BI Regional Office Province Jambi
- KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
  BI Regional Office Province South Sumatera
- KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  BI Regional Office Province Bangka Belitung Islands
- KPw BI Provinsi Bengkulu
  BI Regional Office Province Bengkulu
- KPw BI Provinsi Lampung
  BI Regional Office Province Lampung

REGIONAL II (Wilayah Jawa)
REGIONAL II (Java Area)

- KPw BI Provinsi Banten
  BI Regional Office Province Banten
- KPw BI Provinsi Jawa Barat
  BI Regional Office Province West Java
- KPw BI Cirebon
  BI Regional Office Cirebon
- KPw BI Tasikmalaya
  BI Regional Office Tasikmalaya
- KPw BI Provinsi Jawa Tengah
  BI Regional Office Province Central Java
- KPw BI Purwokerto
  BI Regional Office Purwokerto
- KPw BI Solo
  BI Regional Office Solo
- KPw BI Tegal
  BI Regional Office Tegal
- KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  BI Regional Office Special Province of Yogyakarta
- KPw BI Provinsi Jawa Timur
  BI Regional Office Province East Java
- KPw BI Jember
  BI Regional Office Jember
- KPw BI Kediri
  BI Regional Office Kediri
- KPw BI Malang
  BI Regional Office Malang



REGIONAL III (Wilayah Kalimantan)
REGIONAL III (Kalimantan Area)

- KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
  BI Regional Office Province West Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
  BI Regional Office Province South Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
  BI Regional Office Province Central Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
  BI Regional Office Province East Kalimantan
- KPw BI Balikpapan
  BI Regional Office Balikpapan

REGIONAL IV (Wilayah Sulawesi , Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara)
REGIONAL IV (Sulawesi , Maluku, Papua, Bali, and Nusa Tenggara Area)

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
  BI Regional Office Province North Sulawesi
- KPw BI Provinsi Gorontalo
  BI Regional Office Province Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
  BI Regional Office Province Central Sulawesi
- KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
  BI Regional Office Province South Sulawesi
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
  BI Regional Office Province Southeast Sulawesi
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
  BI Regional Office Province North Maluku
- KPw BI Provinsi Maluku
  BI Regional Office Province Maluku
- KPw BI Provinsi Papua
  BI Regional Office Province Papua
- KPw BI Provinsi Papua Barat
  BI Regional Office Province West Papua
- KPw BI Bali
  BI Regional Office Province Bali
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
  BI Regional Office Province West Nusa Tenggara
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
  BI Regional Office Province East Nusa Tenggara



BANK INDONESIA

2014 | Laporan Tahunan
Annual Report

BANK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Contact Center BICARA : (62 21) 131
Fax. : (62 21) 386-4884
e-mail : bicara@bi.go.id
Twitter : @Bank_Indonesia
YouTube : BankIndonesiaChannel